



PROSIDING KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

TEMA :
“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”

Pontianak, 20 November 2019

Penerbit :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
Pontianak, Kalimantan Barat.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

PROSIDING
KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

TEMA : *“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”*

PROSIDING

KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

Tahun 2019

TEMA :

“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”

Pontianak, 20 November 2019



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura**

Prosiding

Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019

Tema : "Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0"

Reviewer :

Dr. Sumiyana, SE, MSI, Ak, CA
Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS

Steering Committee :

Dr. Hernawan, SE, MS, Ak
Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS
Vitriyan ESPA, SE, MSA, Ak, CA

Organizing Committee :

Ketua : Khristina Yunita, SE, MSI, Ak
Anggota : Sari Rusmita, SE, MM
 Ella Devi Setyawati, SE, MM
 Annisa, ST
 Melinda, SE

Editor :

Sari Rusmita, SE, MM
Rafles Ginting, SE, M.Ak
Fera Damayanti, SE, M.Ak
Ayu Umyana, SE, M.Ak
Djunita Permata Indah, SE, M.Ak

Desain Cover :

Annisa, ST

ISBN : 978-602-53460-4-0

Penerbit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
 Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat
Telpon : (0561) 743465, 766840
Email : akuntansi.khatulistiwa18@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019 yang merupakan hasil penelitian yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2019 di lingkungan Jurusan AKuntansi Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dapat diwujud.

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dan ditata oleh tim dalam kepanitiaan Konferensi Akuntansi Khatulistiwa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenanakan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Plt. Dekan FEB UNTAN, Ibu Dr. Barkah, SE, MSi yang telah memfasilitasi semua kegiatan Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019.
2. Ketua Jurusan Akuntansi FEB UNTAN, Bapak Dr. Hernawan, SE, MS yang telah memotivasi dan memfasilitasi terjadinya Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019.
3. Reviewer, Bapak Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA dan Bapak Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS, yang telah bersedia dan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk menelaah artikel demi artikel.
4. Bapak/Ibu panitia Konferensi ini yang sudah bersedia membagi ide dan bekerjasama sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan sukses.
5. Bapak/Ibu yang bersedia untuk mengsubmit karya tulisannya pada prosiding ini.
6. Mahasiswa/I yang bersedia untuk mengsubmit rencana penelitian dan hasil penelitiannya pada prosiding ini.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu, khususnya di bidang akuntansi. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi dalam meneliti dan menyusun tugas akhirnya.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Pontianak, 20 November 2019
Ketua,

Khristina Yunita, SE, MSi, Ak

DAFTAR ISI

Materi Utama

The Role of Accountant in Facing 4.0 Industrial Revolution

Oleh : Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA

Artikel

Persepsi Akuntan Pendidik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kota Pontianak

Oleh : Haryati dan Haryono [1-14]

Pengaruh Reputasi KAP dan Sistem pengendalian Intern terhadap Audit Delay pada Industri Perbankan di Indonesia 2014-2018

Oleh : Dr. Nella Yantiana, SE, MM, Ak, CA, CMA, CPA [15-24]

Pengelolaan Keuangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Oleh : Vitriyan Espa [25-35]

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

(Studi Kasus Pada Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang)

Oleh : Syarbini Ikhsan [36-42]

Desain Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Masjid Serta Desain Pola Kerjasama Ekonomi Antar Masjid Di Kota Pontianak

Oleh : Juanda Astarani [43-60]

Studi Bibliografi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Penelitian

Akuntansi Di Indonesia

Oleh : Nina Febriana Dosinta dan Nur Fitriana Hamsyi [61-72]

Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura)

Oleh : Hernawan dan Juanda Astarani [73-87]

Desentralisasi Fiskal Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Sari Rusmita [88-99]

Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Oleh : Muhsin [100-112]

Pengaruh *Book Tax Differences*, *Roa*, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Oleh : Helisa Noviarty, SE, MM [113-130]

Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Prinsip Akuntansi

Oleh : Khristina Yunita [131-137]

Pemanfaatan Aplikasi Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi)

Oleh : Rudy Kurniawan [138-149]

Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Motivasi Melakukan *Fraud*

Oleh : Rusliyawati [150-167]

Analisis Kebijakan Pemanfaatan Sumber-Sumber Keuangan Desa

Oleh : Khristina Yunita [168-175]

Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Akuntansi

Oleh : Ira Grania Mustika [176-181]

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Mahasiswa Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Oleh : Syarif M. Helmi dan Berlian Apriliana [182-203]

PERSEPSI AKUNTAN PENDIDIK DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOTA PONTIANAK

Haryati

haryati.adila@gmail.com

Haryono

haryono_pontianak@yahoo.com

Universitas Tanjungpura Pontianak Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan pada kota Pontianak yang terdiri dari *Disclosure*, *Cost and Benefit*, *Responsibility*, dan *Misstate*. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terdapat jawaban responden melalui hasil kuesioner yang diolah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner di 6 kampus yaitu Universitas Tanjungpura Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Panca Bakti Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Pontianak, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak. Data dianalisis menggunakan alat analisis statistik yaitu uji beda *Mann Whitney* dengan menggunakan bantuan program *SPSS 24*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk signifikansi sebesar 0,007, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji Beda *Mann Whitney*, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima yang berarti terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan Pendidik dengan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan pendidik memiliki persepsi yang berbeda tentang etika penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci : Akuntan Pendidik, Mahasiswa Akuntansi, Disclosure, Cost and Benefit, Responsibility, dan Misstate.

Latar Belakang

Kemajuan ekonomi suatu perusahaan memacu para akuntan untuk melakukan tindakan persaingan yang cukup tajam dalam dunia bisnis. Semua perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, agar dapat memperluas jaringannya (Reski, 2013). Diera Globalisasi ini banyak sekali kasus-kasus hukum bidang ekonomi yang melibatkan manipulasi data. Skandal manipulasi data akuntansi ini tidak hanya terjadi di Amerika saja yang melibatkan sejumlah perusahaan besar seperti Enron, Tyco, Global Crossing, Worldcom, tetapi manipulasi akuntansi terjadi juga di Indonesia yang juga melibatkan perusahaan besar seperti Kimia Farma, Bank Lippo, dan Bank Century (Mufdholi, 2010). Terungkapnya kasus mark-up laporan keuangan PT. Kimia Farma oleh *Overstated*, yaitu adanya pengelembungan laba bersih tahunan senilai 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya 99,594 miliar ditulis 132 miliar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke pengadilan, meskipun KAP tersebut berinisiatif memberikan laporan adanya

Overstated. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat (*Accurate Disclosure*) dan transparansi (*Transparency*) yang akibatnya sangat merugikan pada investor, karena laba yang *Overstated* ini telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis (Arifin, 2005 dalam Mufdholi, 2010). Kasus-kasus yang terjadi diatas, akibatnya kurangnya kesadaran seorang akuntan terhadap etika dalam penyajian laporan keuangan. Akibat yang timbul dari kasus tersebut adalah merugikan banyak orang dan diri sendiri. Maka dari itu penelitian ini melihat persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan, terutama kepada mahasiswa akuntansi yang akan terjun kedunia kerja. Sehingga bisa menerapkan etika yang baik dalam penyusunan laporan keuangan.

Pendidikan akuntansi yang ada di Indonesia bertujuan menghasilkan lulusan yang beretika dan bermoral tinggi. Upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan nilai-nilai profesi dan etika akuntan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami terdapat etika profesi didalam dunia kerja. Dalam upaya pengembangan pendidikan akuntansi yang berlandaskan etika ini dibutuhkan adanya umpan balik (*Feedback*) mengenai kondisi yang ada sekarang, yaitu apakah pendidikan akuntansi di Indonesia telah cukup membentuk nilai-nilai positif mahasiswa akuntansi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi mahasiswa dengan maksud mengetahui kadar etika mahasiswa akuntansi dan efektivitas kurikulum yang ada dalam membentuk etika mahasiswa akuntansi (Yulianti, & Fitriany, 2005).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan pada kota Pontianak.

Hasil dari riset ini di diharapkan dapat memberikan informasi penting tentang persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan. Juga hasil dari riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan etika profesi dan bisnis.

Kajian Literatur

Persepsi

Menurut Shantanu, Made Pasek Swi *et al* (2014) menyatakan bahwa persepsi merupakan pandangan individu-individu terhadap peristiwa yang diterima oleh panca indra sehingga individu-individu dapat memahami kejadian yang diterima sesuai dengan keadaan peristiwa itu terjadi. Muhyadi dalam Pangewa (2004: 55) dalam Shantanu, Made Pasek Swi (2014) menyatakan suatu persepsi timbul karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya, diantaranya individu sendiri, peristiwa yang terjadi, dan situasi yang dapat membentuk suatu persepsi itu sendiri.

Etika

Menurut Sunyoto, Danang, & Wika Harisa Putri (2016: 26) secara etimologi, etika berasal dari bahasa yunani, yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat istiadat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta berbicara tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Sunyoto, Danang, & Wika Harisa Putri (2016: 26) adapun batasan mengenai etika bisa ditinjau dari 4 sudut pandang:

- a. Dilihat dari objek formal, etika membahas tentang perbuatan manusia.
- b. Dilihat dari sumbernya, etika bersumber dari akal pikiran manusia. Dalam hal ini etika merupakan cabang ilmu filsafat yang berbicara mengenai baik dan buruk perbuatan manusia.

- c. Dilihat dari fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap dari perbuatan yang dilakukan manusia.
- d. Berdasarkan sifatnya, etika bersifat relatif, yaitu berubah-ubah sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Kode Etik

Menurut Tuanakotta, Theodorus M (2007) menyatakan para Akuntan dan praktisi hukum mengenal kode etik. Kode etik merupakan bagian dari kehidupan berprofesi. Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasanya dan *Stakeholder* lainnya, dan dengan masyarakat luas (Tuanakotta, Theodorus M, 2007). Kode etik bernilai luhur sangat penting bagi profesi akuntan. Peran Profesi akuntan bisa eksis karena ada integritas (sikap jujur, walaupun tidak diketahui orang lain), rasa hormat kepada orang lain dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya (*Trust*) dari pengguna dan *Stakeholders* lainnya (Tuanakotta, Theodorus M, 2007). Menurut Farhan, Djuni (2009) menyatakan bahwa: Prinsip etika merupakan kerangka dasar aturan etika yang berlaku untuk anggota kompartemen tertentu dan khusus untuk memenuhi kepentingan anggota kompartemen tersebut. Prinsip-prinsip etika profesi IAI yang ditetapkan dalam kongres ke VIII IAI di Jakarta tahun 1998 adalah sebagai berikut: prinsip pertama : tanggung jawab profesi, prinsip kedua : kepentingan public, prinsip ketiga : integritas, prinsip keempat: objektifitas, prinsip kelima: kompetensi dan kehati-hatian professional, prinsip keenam: kerahasiaan, prinsip ketujuh: perilaku professional, prinsip kedelapan: standar teknis.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif adalah atribusi yang membuat informasi yang disediakan dalam seluruh laporan keuangan bermanfaat bagi penggunanya. Menurut rangka konseptual, ada empat karakteristik kualitatif yang utama, yaitu: keterpahaman, relevansi, keandalan dan keterbandingan. Ada 4 kategori etika penyusunan laporan keuangan yaitu sikap terhadap *Disclosure*, *Cost and Benefit*, *Responsibility*, dan *Misstate* (Hardianti, 2010, Yulianti, & Fitriani, 2005 dalam Reski, 2013)

1. Disclosure (Pengungkapan Laporan Keuangan)

Menurut Suwardjono (2016) menyebutkan bahwa metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Menurut Suwardjono (2016) menyatakan bahwa informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos statemen keuangan, penggunaan istilah teknis (terminologi), cacatan kaki (catatan atas statemen keuangan), penjelasan dalam kurung lampiran, komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmidan penjelasan auditor dalam laporan auditor. Menurut Harahap, Sofyan Syafri (2015: 272) menyatakan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

2. Cost & Benefit (Keseimbangan antara Beban dan Manfaat)

Menurut Harahap, Sofyan Syafri (2015: 135) menyatakan bahwa keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang *Pervasif* dari pada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena

alasan inilah, sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab dalam Penyajian Laporan Keuangan yang Informatif bagi Penggunanya)

Menurut Reski (2013) menyatakan bahwa *responsibility* adalah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh manajer. Hal ini dapat dilihat dari sikap *Profesionalisme* manajer dalam menyusun laporan keuangan. *Responsibility* mengharuskan pihak manajemen bertanggung jawab atas apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan artinya pihak manajemen harus membuat laporan itu sesuai dengan kenyataan sebenarnya sehingga laporan keuangan itu memberikan informasi yang dapat dipercaya bagi penggunanya. Indikator etika *Responsibility* adalah *Profesionalisme* akuntan dalam menyusun laporan keuangan, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataan. Informasi akuntansi dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara cepat, serta bebas dari kesalahan dan bias. Realibilitas sangat diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengavaluasi isi faktual dari informasi. (Kieso, Donald E, 2007)

4. *Misstate* (Kecenderungan terhadap Salah Saji)

Dewasa ini banyak kantor akuntan publik menggunakan perangkat lunak komputer, dan komputer akan menunjukkan salah saji potensi untuk asersi tertentu. Dengan bantuan perangkat komputer, auditor mengidentifikasi salah saji potensi yang berkaitan dengan asersi tertentu sesuai dengan keadaan perusahaan. Salah saji potensi bisa diidentifikasi untuk asersi yang berkaitan dengan masing-masing kelompok transaksi dan untuk asersi pada setiap saldo rekening signifikan. Contoh, salah saji potensial bisa diidentifikasi untuk asersi pengeluaran kas dan untuk dua rekening paling utama yang terpengaruh oleh pengeluaran kas, yaitu kas dan utang dagang (Sunarto, 2003).

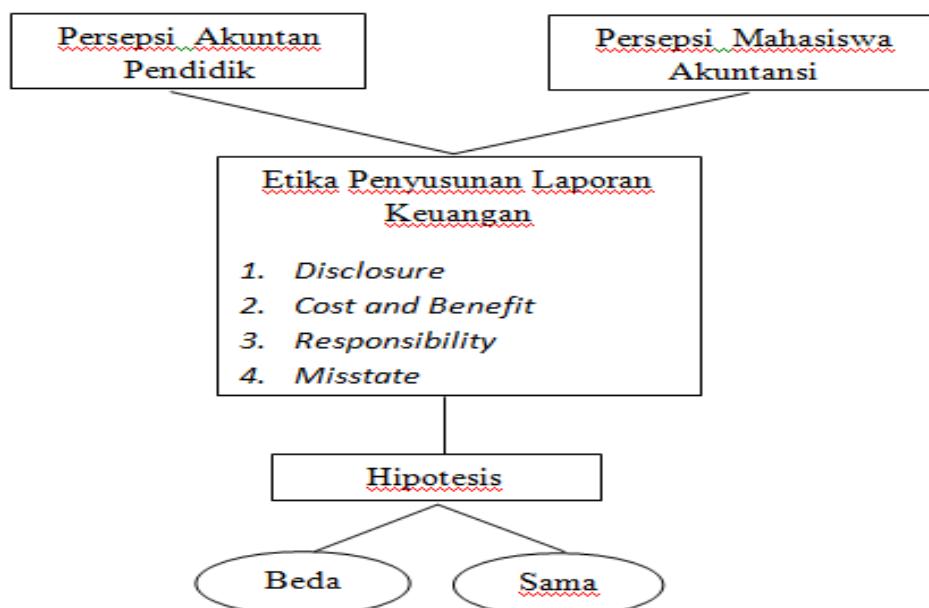
Menurut Reski (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan agar terhindar dari salah saji yang disengaja oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, maka pihak manajemen dilarang melakukan salah saji secara sengaja dengan berbagai alasan, karena laporan keuangan tersebut tidak akan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Indikator dalam etika *Misstate* tersebut adalah laporan keuangan harus terhindar dari salah saji yang disengaja dan terhindar dari salah saji yang tidak disengaja (Reski, 2013).

Kajian Empiris

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Yulianti dan Fitriany (2005) yang menganalisis persepsi akuntansi Mahasiswa akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir menyangkut faktor *Cost-Benefit*, demikian pula untuk ketiga faktor lainnya yaitu *Misstate*, *Disclosure* dan *Responsibility* dan menunjukkan bahwa mahasiswa profesi akuntansi memiliki sikap yang lebih baik secara signifikan untuk *Cost-Benefit* dan *Misstate* dan juga membuktikan bahwa karakteristik individu, dalam hal jenis kelamin, hanya memiliki pengaruh pada sikap terhadap manajemen laba dimana responden pria lebih menolak manajemen laba dibandingkan responden wanita dan faktor-faktor *Cost & Benefit*, *Disclosure*, *Misstate*, dan *Responsibility* tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pria dengan wanita. Rudiarsiki, Komang, et.al (2015) menganalisis persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Bali) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi akuntan pendidik dengan mahasiswa S1/D4 akuntansi terhadap etika

penyusunan laporan keuangan. Shantanu, Made Pasek Swi, et.al (2014) menganalisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 dan Program Diploma 3 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja) menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan signifikan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Syarif Mufdholi R (2010) menganalisis persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Peran Komite Audit dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* menunjukkan bahwa Menunjukkan bahwa berdasarkan uji *Independen Sample T-test* tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap peranan komite audit dalam dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

H_a : Terdapat perbedaan signifikan antara persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan

H_0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat prilaku dan persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu menyebar kuesioner kepada responden. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya. Data yang dianalisis menggunakan alat analisis statistis yaitu uji beda *Mann Whitney* dengan menggunakan bantuan program *SPSS 24*. Metode pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

di mana:

n = ukuran sampel

N = populasi

e = prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan (5 %)

Responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Akuntan Pendidik (Dosen) Jurusan Akuntansi dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi D3, dan D4/S1 tingkat akhir yang masih terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi yang semester akhir di Universitas Tanjungpura Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Panca Bakti Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Pontianak, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak dan pernah belajar auditing. Adapun jumlah responden yang bisa diolah sebanyak 606 kuesioner yang terdiri dari 79 Akuntan Pendidik dan 527 Mahasiswa Akuntansi.

Metode Analisis

Sebelum data diolah untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu pengujian instrumen dengan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas untuk melihat apakah data yang diperoleh responden dapat menggambarkan secara tepat yang diuji (Mufdholi, 2010).

a. Uji Validitas

Menurut Ghazali, Imam (2013:52) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali, Imam (2013 : 47) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau kontrak. Suatu kuesioner yang dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

c. Uji Normalitas

Sesuai dengan persyaratan uji beda maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap data. Uji normalitas dilakukan guna untuk mengetahui metode uji beda yang akan kita gunakan. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan metode *Kolmogorof-Smirnov*.

Pengujian Hipotesis

Pengujian uji hipotesis dalam penelitian perbandingan persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi pada kota Pontianak yaitu uji beda *Mann Whitney* dengan menggunakan bantuan *Statistical Packages For Social Science (SPSS) 24*. Menurut Ghazali, Imam (2013: 64) menyatakan bahwa uji beda *T-test* digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda *T-test* dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut:

$$t = \frac{\text{Rata-rata sampel pertama} - \text{rata-rata sampel kedua}}{\text{standar error perbedaan rata-rata kedua sampel}}$$

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Akuntan

Akuntan yang digunakan sebagai sampel adalah akuntan pendidik yang berasal dari 6 perguruan tinggi yang ada di Pontianak yaitu Universitas Tanjungpura Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Panca Bhakti Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak, Perguruan

Tinggi Widya Dharma Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak yang berjumlah 79 akuntan.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Akuntan Variabel *Disclosure*

Tabel 1
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Disclosure* (x_1)

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Koefisien Alpha
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
x_1	$x_{1.1}$	0.831	0.000	0,634
	$x_{1.2}$	0.625	0.000	
	$x_{1.3}$	0.814	0.000	

Sumber : data primer olahan

Berdasarkan tabel 1 tampak ketiga pertanyaan diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p) 0,000 dan Koefisien Alpha 0,634. Dari hasil diatas bahwa pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 79 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dikatakan valid karena semua nilai korelasi (r) dari item pertanyaan lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) atau nilai signifikansinya kurang dari 5% dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, Uma 2003:311). Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel *disclosure* (x_1) valid dan reliabel untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Akuntan Variabel *Cost and Benefit*.

Tabel 2
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Cost and Benefit* (x_2)

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Koefisien Alpha
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
x_2	$x_{2.1}$	0.825	0.000	0,637
	$x_{2.2}$	0.765	0.000	
	$x_{2.3}$	0.713	0.000	

Sumber: data primer olahan

Berdasarkan tabel 2 tampak ketiga pertanyaan diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p) 0,000 dan Koefisien Alpha 0,637. Dari hasil diatas bahwa pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 79 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dikatakan valid karena semua nilai korelasi (r) dari item pertanyaan lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) atau nilai signifikansinya kurang dari 5% dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, Uma 2003:311).

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Akuntan Variabel *Responsibility*

Tabel 3
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Responsibility* (x_3)

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Koefisien Alpha
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
x_3	$x_{3.1}$	0.888	0.000	0,714
	$x_{3.2}$	0.876	0.000	

Sumber: data primer olahan

Berdasarkan tabel 3 tampak kedua pertanyaan diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p) 0,000 dan Koefisien Alpha 0,714. Dari hasil diatas bahwa pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 79 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dikatakan valid karena semua nilai korelasi (r) dari item pertanyaan lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) atau nilai signifikansinya kurang dari 5% dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, Uma 2003:311).

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Akuntan Variabel *Misstake*

Tabel 4
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Misstake* (x_4)

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Koefisien Alpha
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
x_4	$x_{4.1}$	0.597	0.000	0,628
	$x_{4.2}$	0.793	0.000	
	$x_{4.3}$	0.621	0.000	
	$x_{4.4}$	0.754	0.000	

Sumber: data primer olahan

Berdasarkan tabel 4 tampak keempat pertanyaan diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p) 0,000 dan Koefisien Alpha 0,628. Dari hasil diatas bahwa pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 79 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dikatakan valid karena semua nilai korelasi (r) dari item pertanyaan lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) atau nilai signifikansinya kurang dari 5% dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, Uma 2003:311).

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Mahasiswa

Mahasiswa yang digunakan sebagai sampel adalah mahasiswa akuntansi yang semester akhir dan telah menempuh matakuliah auditing yang berasal dari 6 perguruan tinggi yang ada di Pontianak yaitu Universitas Tanjungpura Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Panca

Bhakti Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak, Perguruan Tinggi Widya Dharma Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak yang berjumlah 527 mahasiswa.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Mahasiswa Variabel *Disclosure*

Tabel 5
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Disclosure* (x_1)

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Koefisien Alpha
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
x_1	$x_{1.1}$	0.786	0.000	0,608
	$x_{1.2}$	0.747	0.000	
	$x_{1.3}$	0.712	0.000	

Sumber: data primer olahan

Berdasarkan tabel 5 tampak ketiga pertanyaan diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p) 0,000 dan Koefisien Alpha 0,608. Dari hasil diatas bahwa pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 527 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dikatakan valid karena semua nilai korelasi (r) dari item pertanyaan lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) atau nilai signifikansinya kurang dari 5% dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, Uma 2003:311). Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel *disclosure* (x_1) valid dan reliabel untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Mahasiswa Variabel *Cost and Benefit*

Tabel 6
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Cost and Benefit* (x_2)

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Koefisien Alpha
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
x_2	$x_{2.1}$	0.754	0.000	0,607
	$x_{2.2}$	0.782	0.000	
	$x_{2.3}$	0.711	0.000	

Sumber: data primer olahan

Berdasarkan tabel 6 tampak ketiga pertanyaan diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p) 0,000 dan Koefisien Alpha 0,607. Dari hasil diatas bahwa pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 527 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dikatakan valid karena semua nilai korelasi (r) dari item pertanyaan lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) atau nilai signifikansinya kurang dari 5% dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, Uma 2003:311).

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Mahasiswa Variabel *Responsibility*

Tabel 7
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Responsibility* (x_3)

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Koefisien Alpha
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
x_3	$x_{3.1}$	0.832	0.000	0,615
	$x_{3.2}$	0.869	0.000	

Sumber: data primer olahan

Berdasarkan tabel 7 tampak kedua pertanyaan diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p) 0,000 dan Koefisien Alpha 0,615. Dari hasil diatas bahwa pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 527 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dikatakan valid karena semua nilai korelasi (r) dari item pertanyaan lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) atau nilai signifikansinya kurang dari 5% dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, Uma 2003:311).

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Mahasiswa Variabel *Misstake*

Tabel 8
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Misstake* (x_4)

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Koefisien Alpha
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
x_4	$x_{4.1}$	0.763	0.000	0,629
	$x_{4.2}$	0.729	0.000	
	$x_{4.3}$	0.657	0.000	
	$x_{4.4}$	0.596	0.000	

Sumber: data primer olahan

Berdasarkan tabel 8 tampak keempat pertanyaan diatas menunjukkan bahwa probabilitas (p) 0,000 dan Koefisien Alpha 0,629. Dari hasil diatas bahwa pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 527 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dan reliabel. Dikatakan valid karena semua nilai korelasi (r) dari item pertanyaan lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002:106) atau nilai signifikansinya kurang dari 5% dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, Uma 2003:311).

Uji Normalitas

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas Kolmogorof-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Nilai
N		606
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	51.97
	Std. Deviation	4.479
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.073
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data primer olahan

Berdasarkan tabel 9 diatas, tampak hasil signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari 5% jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Karena data tidak terdistribusi normal maka uji beda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji Beda *Mann Whitney*.

Uji Hipotesis

Tabel 10
Hasil Uji Beda
Test Statistics^a

		Nilai
Mann-Whitney U		16907.000
Wilcoxon W		20067.000
Z		-2.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.007

a. Grouping Variable: Kelompok

Sumber: data primer olahan

Hasil uji beda diatas seperti tampak pada tabel 10, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji Beda *Mann Whitney*, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima yang berarti terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan Pendidik dengan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan pendidik memiliki persepsi yang berbeda tentang etika penyusunan laporan keuangan. Di dukungan dengan pernyataan Rakhmat (2008: 57) dalam Mufdholi (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah :

- 1) Faktor fungsional, berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, motivasi, harapan dan keinginan, perhatian, emosi, suasana hati dan hal-hal yang termasuk dalam faktor personal.
- 2) Faktor struktural, berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu.

- 3) Faktor Kebudayaan, berasal dari kultur atau budaya yang mana individu timbul dan berkembang, akan turut pula menentukan persepsi seseorang.

Penelitian ini mendukung penelitian yang terdahulu yaitu dilakukan oleh Rudiarsiki, Komang *et al* (2015) yaitu nilai probabilitas sebesar $0,022 < 0,05$ menunjukkan hipotesis penelitian dapat diterima berarti terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dengan mahasiswa S1/D4 akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan, dan juga didukung oleh Reski (2013) yaitu oleh hasil pengujian dengan *Independent Sample T-test* menyatakan bahwa untuk *Disclosure, Cost and Benefit dan Responsibility* dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan dan mahasiswa akuntansi.

Simpulan Dan Rekomendasi

Simpulan

Penelitian ini di teliti untuk mengetahui perbedaan persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan dengan jumlah responden 606 dengan variabel *Disclosure, Cost and Benefit, Responsibility, dan Misstate*. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,007, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji Beda *Mann Whitney*, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima yang berarti terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan Pendidik dengan Mahasiswa Akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah pertanyaan atau variabel yang baru perlu diadakan untuk lebih mencakup etika dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas area penelitian yang tidak hanya berada di Kota Pontianak saja tetapi seluruh Indonesia agar lebih mewakili populasi di seluruh Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya tidak hanya terbatas pada perguruan tinggi tapi juga pada instansi baik negeri maupun swasta dan pada kantor akuntan publik atau bisa juga pada perusahaan-perusahaan.
4. Diharapkan bagi Akuntan Pendidik bisa mengaplikasikan kepada Mahasiswa cara penyusunan laporan keuangan secara benar dan tidak menyimpang dari laporan keuangan.
5. Diharapkan bagi Mahasiswa Akuntansi bisa mengaplikasikan kedunia kerja cara penyusunan laporan keuangan secara benar dan tidak menyimpang dari laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Adhwa, Irawati. (2012). Perbedaan Mahasiswa Akuntansi dan Karyawan Bagian Akuntansi Tentang Etika Penyusunan Laporan Keuangan. *Skripsi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Clikeman, P.M. & S. L. Henning. (2000). *The Socialization of undergraduate accounting students. Issues in Accounting Education*, vol 15 pp 1-15.
- Farhan, Djuni. (2009). Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik. Malang: Intermedia.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Giri, Efraim Ferdinand. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah 1 Perspektif IFRS*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Greysiana, Recal. (2013). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan (Survey Pada Mahasiswa Falkultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta). *Naskah Publikasi*. Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Intani, Linsie, & E.Susy Suhendra. (2009). Analisa Pengaruh Pendidikan Etika dan Persepsi Mahasiswa Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal*. Universitas Gunadarma.
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, & Terry D.Warfield. (2007). *Akuntansi Intermediate Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.
- Mahmud, Amir. (2008). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal*. Jurusan Akuntansi FE Unnes.
- Nasution, Mustafa Edwin, & Hardius Usman. (2006). *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nuraina, Elva, & Septi Hari Kurniawati. (2012). Perbedaan Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Prodi Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, IKIP PGRI, Madiun, Indonesia*.ISSN 2085-4277 Vol. 4, No. 2, September 2012, pp. 111-120.
- Reski. (2013). *Perbandingan Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan*. Skripsi. Makasar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasaniddin.
- Retnawati, Heri. (2016). *Validitas Reliabilitas & Karakteristik Butir (Panduan untuk Peneliti, Mahasiswa, dan Psikometri)*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Mufdholi, S.R. (2010). *Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Peran Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*. Skripsi. Jakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rudiarsiki, Komang, Desak Nyoman Sri Werastuti, & Edy Sujana. (2015). Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Bali). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No 1 Tahun 2015)*
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods For Business: A Skill Buiding Approach*, Fourth Edition, New York: John Willey & Sons, Inc.
- Shantanu, Made Pasek Swi, Ni Kadek Sinarwati, & Anantawikrama Tungga Atmaja. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 dan Program Diploma 3 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No: 1 Tahun 2014)*
- Sugiono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*, cet. Bandung: Kedelapan Alfabeto.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeto.

- Sujarweni, V.Wiratna. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunarto. (2003). *Auditing*. Yogyakarta: Edisi Revisi Cetakan Pertama Pena Persada.
- Sunyoto, Danang & Wika Harisa Putri. (2016). *Etika Bisnis Membangun Kesuksesan Bisnis Melalui Manajemen dan Perilaku Bisnis yang Beretika*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.
- Supranto, J dan Nanda Limakrisna. (2016). *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi Edisi 4*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Edisi Ketiga Cetakan Kesembilan..
- Tuanakotta, Theodorus M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Velasquez, Manuel G. (2005). *Etika Bisnis Konsep dan Kasus edisi 5*. Yogyakarta: Andi Edisi Bahasa Indonesia.
- Yulianti dan Fitriani. (2005). Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo, 15-16 September*.

Pengaruh Reputasi KAP dan Sistem pengendalian Intern terhadap Audit Delay pada Industri Perbankan di Indonesia 2014-2018

Dr. Nella Yantiana, SE, MM, Ak, CA, CMA, CPA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Abstract

This research aims to analyze the factors which affect audit delay on companies in banking industries listed on IDX for 2014-2018. The theory used in this study were agency theory and shareholder theory. The samples were taken by using purposive sampling technique consist of 44 companies in total. Analyzed by multiple linear regression analysis and performed using SPSS version 20.0. The techniques of data analysis were descriptive statistics, classic assumption tests, and hypothesis test. The results of the research show that the Public Accounting Firm and Internal Control Systems has no significant effect on audit delay.

Keywords: *Reputation of Public Accounting Firm, Internal Control Systems, Audit Delay*

Pendahuluan

Laporan keuangan memuat informasi penting yang diperlukan oleh investor, namun akan lebih memiliki kredibilitas jika laporan keuangan perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang profesional. *Audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikan laporan audit independen (Halim, 2000). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Standar Pekerjaan Lapangan yang mengatur prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan bagi auditor, bahwa auditor perlu memiliki perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan. Juga dikatakan dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2004) bahwa laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi bagi investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain dalam mengambil keputusan dari informasi yang tersedia dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan pernyataan (Subekti & Widiyanti, 2004) menyatakan bahwa pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar membutuhkan waktu lebih lama, sebaliknya makin tidak sesuai dengan standar makin pendek pula waktu yang diperlukan. Yaputro & Rudiawarni (2012) mengatakan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan akan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan keputusan investasi dan penyebaran informasi keuangan yang tidak merata kepada *stakeholder* di pasar modal.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit dapat lebih meningkatkan tingkat profesionalisme seorang auditor. Menurut Dyer & McHugh (1975) menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi faktor yang penting dalam laporan keuangan. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Hendriksen, 1992). Ketepatan waktu juga dapat dipengaruhi dari awal waktu perikatan dengan auditor. Idealnya waktu perikatan audit sudah diterima oleh auditor enam sampai dengan sembilan bulan sebelum akhir tahun buku klien.

Penyampaian laporan audit dapat menjadi tertunda dikarenakan dalam melaksanakan audit yang harus sesuai dengan standar sehingga auditor membutuhkan waktu lebih dan lama. Petronila (2007) berpendapat bahwa penyebab lamanya waktu audit disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya transaksi yang harus diaudit, terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, kerumitan dari transaksi, pengendalian intern yang kurang baik, pemeriksaan yang lamban oleh auditor.

Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 63 perusahaan tercatat atau emiten belum menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) tahun buku 2015 secara tepat waktu hingga 2 Mei 2016. Sedangkan untuk laporan tahunan tahun buku 2016, BEI melakukan suspensi terhadap 17 emiten atas keterlambatan penyampaian laporan audit dan pembayaran denda. Terdapat 8 (delapan) perusahaan yang diperpanjang masa suspensi perdagangan efeknya oleh otoritas bursa lantaran belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan pelaporan keuangan serta pembayaran denda atas keterlambatan penyerahan laporan keuangan audit tahunan tahun buku 2017.

Puspitasari & Latrini (2014), Kurniawati, *et al* (2016), dan Suparsada & Putri (2017) menyebutkan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* lebih awal menyelesaikan auditnya daripada KAP *non-Big Four*. Tidak konsisten dengan penelitian Prabandari & Rustiana (2007) dan Lestari, *et al* (2017) yang mengatakan bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan keterkaitan variabel reputasi KAP dan Sistem pengendalian Internal, maka penelitian ini mencoba untuk membuktikan hipotesis serta menguraikannya dengan menggunakan metode penelitian. Artikel ini juga menguraikan metode penelitian yang diterapkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang kemudian diikuti oleh paparan hasil penelitian dan pembahasan yang relevan. Sebagai penutup, artikel ini juga menyajikan kesimpulan yang ditarik dari temuan yang ada.

Kajian Literatur

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa sebagai suatu perusahaan pastinya akan muncul hubungan agensi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa. Implementasi *Agency Theory* dapat berupa kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimumkan utilitas, sehingga diharapkan agen bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan *principal*. Namun, *principal* akan memberikan insentif yang sesuai pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal. Menurut Scott (1997) dalam Arifin (2005), inti dari *Agency Theory* adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyalaraskan kepentingan *principal* dan *agent* dalam hal terjadi konflik kepentingan. Rustiarini & Sugiarti (2013) mengatakan ketidakseimbangan dalam pendistribusian informasi yang diterima oleh *agent* dan *principal* menyebabkan terjadinya asimetri informasi sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa audit merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya masalah agensi dan informasi asimetri (Primadita & Fitriany, 2012).

Teori Pemegang Saham (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder Theory dinyatakan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dipertanggungjawabkan tidak hanya untuk pemegang saham tapi juga *stakeholders* lain (Rustiarini,

2012). Perusahaan tidak hanya berkepentingan terhadap pengguna laporan keuangan, namun juga kepada karyawan, masyarakat sekitar, pemerintah, dan pihak-pihak lain. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pelaporan keuangan, yang dalam prakteknya memerlukan pihak ketiga guna menjamin akuntabilitas penyampaiannya. Oleh karena itu, ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan penting diterapkan untuk menjamin terciptanya proses pelaporan keuangan yang wajar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban *agent* atas pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan, perusahaan mempercepat audit atas laporan keuangan sebagai salah bentuk mengurangi timbulnya asimetri informasi

Keterlambatan Audit (Audit Delay)

Audit delay bermakna sebagai rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay diukur berdasarkan seberapa lamanya seorang auditor independen dalam menetapkan laporan auditor atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang dihitung dalam jumlah hari, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Praptika & Rasmini, 2016). Menurut Dyer & McHugh (1975), “*Auditors' report lag is the open interval of number of days from the year end to the date recorded as the opinion signature date in the auditor's report*”.

Panjang pendeknya audit delay dipengaruhi oleh kerumitan proses audit. Tingkat kerumitan yang tinggi mengakibatkan auditor memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak perusahaannya. Praptika & Rasmini (2016) berpendapat bahwa audit delay akan bertambah apabila penerbitan laporan keuangan mengalami penundaan. Dengan tertundanya penyajian laporan keuangan maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Semakin lama waktu dalam pempublikasian laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan *insider trading* dan rumor-rumor lain di bursa saham (Prameswari & Yustrianthe, 2015). Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja secara maksimal.

Tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitian Dyer & Mc Hugh (1975) sebagai berikut :

1. Preliminary lag : diukur dari interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa;
2. Auditor's report lag : diukur dari interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;
3. Total lag : diukur dari interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

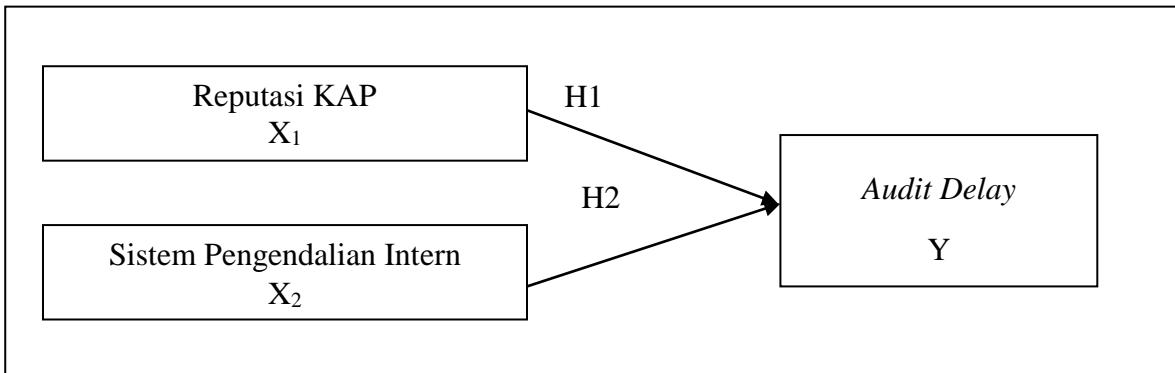
Kendala yang dihadapi auditor terkait adanya audit delay adalah standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa audit harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Pada umumnya, standar tersebut merupakan standar pertama pekerjaan lapangan yang diatur dalam SPAP. Perencanaan tersebut meliputi tiga alasan utama, yaitu:

1. Agar auditor memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi yang ada.
2. Perencanaan agar pengeluaran biaya audit tetap wajar.
3. Menghindari kesalahpahaman dengan klien.

Perencanaan audit yang matang dan sesuai ini akan mempengaruhi kinerja dari auditor. Pemenuhan standar audit dapat menyebabkan lamanya penyelesaian laporan audit, namun juga dapat meningkatkan kualitas hasil audit tersebut.

Ketepatan waktu (timeliness) dalam pelaporan laporan auditor merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Informasi dikatakan relevan apabila memiliki karakteristik informasi yang bernilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan dan relevansinya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Berikut adalah gambaran kerangka konseptual yang akan diteliti dijelaskan.



Gambar 1. Model Penelitian

Dengan adanya kerangka konseptual, penelitian akan lebih terfokus ke dalam bentuk layak diuji dan akan memudahkan penyusunan hipotesis. Kerangka konseptual juga akan memudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian, baik sebagai variabel eksogen (anteseden) maupun variabel endogen (konsekuensi).

Pengaruh Reputasi KAP terhadap Audit Delay

Puspitasari & Latrini (2014) mengutarakan bahwa kantor KAP *Big Four* membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit secara efisien dan memiliki fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya disamping mereka memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak serta memiliki pengalaman yang lebih banyak dari KAP lainnya. Suparsada & Putri (2017) menyebutkan jika jarak waktu yang singkat merupakan cara kantor akuntan publik *Big Four* untuk terus mempertahankan reputasi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, *et al* (2016) menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan ukuran sebuah KAP akan mempengaruhi keefisienan waktu terkait sistem kerja audit dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal serta sistem informasi yang canggih. Pendapat yang sama juga disebutkan oleh Puspitasari & Latrini (2014) dalam penelitiannya.

H₁. Reputasi KAP berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *audit delay*

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Audit Delay

Perusahaan perbankan merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang juga selalu dalam pengawasan otoritas keuangan misalnya pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituntut agar selalu memiliki kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan dan perundangan yang berlaku tercermin dalam sistem

pengendalian intern perusahaan perbankan. Pengukuran terhadap penerapan sistem pengendalian intern dapat tercermin melalui laporan *Good Corporate Governance (GCG)* yang disampaikan ke OJK selanjutnya akan diberikan penilaian terhadap pelaksanaannya berupa nilai komposit.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sa'adah, Shohelma (2013), yang berpendapat bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang kuat, perusahaan besar akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan untuk menjaga *image* dan nama baik perusahaan di mata publik. Penyampaian laporan keuangan tepat waktu dapat terhindar dari audit delay.

H₂. Sistem pengendalian intern perusahaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *audit delay*

Metode Penelitian

Bentuk Penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif dimana menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan publik yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadikan rekaman historis mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Data tersebut meliputi data laporan keuangan tahunan perusahaan 2014-2018 dan laporan auditor independen serta dianalisis menggunakan statistik (dengan menggunakan bantuan program *SPSS 20.0*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan asosiatif dengan hubungan kausal yaitu mengumpulkan data yang memberikan gambaran jelas mengenai objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh sehingga dapat dilihat pengaruh maupun hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri perbankan di Bursa Efek Indonesia 2014-2018 dan telah diaudit oleh auditor independen serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan tahunan perusahaan diperoleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan keuangan dan laporan audit perusahaan) dan studi pustaka melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan juga dari website resmi perusahaan sampel dimana merupakan rekaman historis mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Pengambilan data dalam bentuk *purposive sampling* sebanyak 44 perusahaan dengan kriteria-kriteria populasi yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dan telah menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit berturut-turut untuk tahun 2014-2018.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi KAP dan sistem pengendalian intern sebagai variabel bebas serta *audit delay* sebagai variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan koefisien determinasi. Adapun bentuk model regresi yang digunakan sebagai dasar adalah bentuk fungsi linear yakni:

$$AUDELAY = \alpha + \beta_1 BFOUR + \beta_2 SPI + \varepsilon$$

dimana:

α	= Konstanta
AUDELAY	= <i>Audit delay</i> , diartikan jumlah hari antara tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal penandatanganan laporan audit, dihitung secara kuantitatif per hari.
BFOUR	= Reputasi KAP, diproksikan dengan variabel <i>dummy</i> . Nilai 1 apabila KAP <i>Big Four</i> dan nilai 0 apabila KAP <i>non Big Four</i>
SPI	= Peringkat komposit dalam laporan GCG
ε	= Error

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis Statisik Deskriptif

Berikut hasil perhitungan statistik deskriptif dapat dilihat secara lengkap pada 44 perusahaan perbankan tahun 2014-2018 di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	Min	Max	Mean	Std. Deviation	N
AUDELAY	15	97	60.47	17.992	220
BFOUR	0	1	.80	.397	220
SPI	1	4	2.87	1.80	220

Sumber : Data Olahan SPSS 20, 2018

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		203
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	16.07964712
	Absolute	.058
Most Extreme Differences	Positive	.048
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.826
Asymp. Sig. (2-tailed)		.502

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan SPSS 20, 2018

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov pada model regresi bernilai 0,502. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model penelitian telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
(Constant)	.000	
1 BFOUR	.108	Non Heteroskedastisitas
SPI	.076	Non Heteroskedastisitas

Sumber : Data Olahan SPSS 20, 2018

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian Multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 BFOUR	.876	1.199
SPI	.577	1.153

a. Dependent Variable: AUDELAY

Sumber : Data Olahan SPSS 20, 2018

Berdasarkan Tabel 4 diatas, hasil analisis menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,10 maka dapat dikategorikan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.574 ^a	.294	.209	15.840	1.764

a. Predictors: (Constant), BFOUR, SOLV, PROF, SIZE

b. Dependent Variable: AUDELAY

Sumber : Data Olahan SPSS 20, 2018

Berdasarkan Tabel 5 diatas, hasil pengujian yang menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,764 dimana nilai ini telah memenuhi syarat untuk lolos uji autokorelasi bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,764 lebih besar dari nilai du 1,727 pada tingkat signifikansi 0,05.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), di mana semakin tinggi nilai R^2 suatu regresi atau semakin mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Hasil pengujian R^2 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. R Square

Model	R	R Square
1	.574 ^a	.294

Sumber : Data Olahan SPSS 20, 2018

Uji koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 6 diatas yang menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,224. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *audit delay* dapat dijelaskan oleh model penelitian ini berdasarkan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan reputasi KAP yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 29,4%. Sedangkan sisanya sebesar 70,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis, seperti umur perusahaan, jenis industri, internal auditor, lama perusahaan menjadi klien KAP, besarnya audit fee dan kompleksitas perusahaan yang diaudit.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 7 berikut menunjukkan hasil pengujian dengan regresi linear berganda pada tingkat signifikan 5 persen.

Tabel 7. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error			
1	(Constant)	71.429	4.663	15.320	.000
	BFOUR	1.484	2.922	.508	.108
	SPI	1.382	2.502	.671	.076

Sumber : Data Olahan SPSS 20, 2018

Pembahasan

Pengujian variabel reputasi KAP dengan menggunakan regresi linear berganda menghasilkan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,508 dengan nilai signifikansi sebesar 0,108 ($p>0,05$) yang menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Pengungkapan yang senada juga diutarakan oleh Lestari, *et al* (2017) dan Prabandari & Rustiana (2007) dimana ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara reputasi KAP terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua KAP yang termasuk *big four* melakukan audit lebih pendek daripada KAP non *big four*. Hal ini disebabkan masing-masing KAP ingin menjaga reputasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Oleh karena itu, faktor reputasi KAP tidak memberikan jaminan akan cepat lambatnya *audit delay* sehingga kualitas audit tetap diutamakan dibandingkan berfokus pada ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan auditor.

Pengujian variabel Sistem Pengendalian Intern dengan menggunakan regresi linear berganda menghasilkan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,671 dengan nilai signifikansi sebesar 0,076 ($p>0,05$) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan audit, baik pada bank yang mengalami sistem pengendalian intern yang berpredikat komposit terbaik atau terendah, cara yang dilakukan oleh auditor akan tetap sama sesuai dengan prosedur audit. Berdasarkan tujuan audit yaitu untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan maka penerapan SPI pada bank adalah mutlak harus dilaksanakan merupakan hal yang wajar selama adanya pengungkapan yang memadai. Sistem pengendalian intern perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sa'adah, Shohelma (2013), yang berpendapat bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang kuat, perusahaan besar akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan untuk menjaga *image* dan nama baik perusahaan di mata publik.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa reputasi KAP dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap *audit delay*. Beberapa keterbatasan yang ditemukan bahwa variabel independen yang diteliti hanya berpengaruh sebesar 29,4% sehingga 70,6% dipengaruhi faktor lain yang dapat diteliti selanjutnya. Penelitian ini hanya fokus terhadap industri perbankan sehingga jumlah sampel sedikit dan terbatas. Selanjutnya, penelitian ini disarankan untuk dapat memilih variabel keuangan yang sekiranya dapat menjadi faktor determinan *audit delay* seperti : umur perusahaan, jenis industry, internal auditor, lamanya perusahaan menjadi klien KAP, besarnya audit fee, dan kompleksitas perusahaan yang diaudit. Pemilihan sampel dan obyek penelitian diharapkan dapat diperluas sehingga memungkinkan

adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada obyek penelitian yang berbeda dengan sampel yang berbeda pula.

Daftar Pustaka

- Amani, F.A. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014). *Jurnal Nominal*, 5 (1).
- Arifin. (2005). *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aryaningsih, N.N.D. & Budiarta, I.K. (2014). Pengaruh Total Aset, Tingkat Solvabilitas dan Opini Audit pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7 (3), 747-647.
- Ashton, R.H., John, J.W., & Robert, K.E. (1987). An Empirical Analysis of Audit Delay. *Journal of Accounting Research*, 25 (2), 275-292.
- Baridwan, Zaki. (2004). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Carslaw, C.A.P.N. & Kaplan, S.E. (1991). An Examination of Audit Delay: Further Evidence from New Zealand. *Accounting and Business Research*, 22 (85), 21-32.
- Dyer, J.C. & McHug, A.J. (1975). The Timeliness of the Australian Annual Report. *Journal of Accounting Research*, 13 (2). 204-219.
- Halim, Varianada. (2000). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Empiris Perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 2 (1), 63-75.
- Hendriksen, E.S. (1992). *Accounting Theory. 5th Edition*. USA : Richard D. Irwin Inc.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3 (4), 305-360.
- Kurniawati, Herni, Setiawan, F.A., & Kristanto, S.B. (2016). Pengaruh Solvabilitas, Segmen Operasi, dan Reputasi KAP terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 20 (3), 448-452.
- Lestari, C.S., Rasyidi, A., & Widya Susanti. (2017). Pengaruh Reputasi KAP, Opini Audit dan Komite Audit terhadap Audit Delay pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3.
- Petronila, T.A. (2007). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Audit Report lag dan Timeless. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10 (1), 1-10.
- Prabandari, J.D.M. & Rustiana (2007). Beberapa Faktor yang Berdampak pada Perbedaan Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan -Perusahaan Keuangan yang Terdaftar Di BEJ. *Kinerja*, 11 (1), 27-39.
- Prameswari, A.S. & Yustrianthe, R.H. (2015). Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 19 (01), 50-67.
- Praptika, P.Y.H. & Rasmini, N.K. (2016). Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor dan Financial Distress pada Audit Delay pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (3), 2052-2081.
- Primadita, Indria & Fitriany. (2012). Pengaruh Tenure & Auditor Spesialis Terhadap Informasi Asimetri. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi*, 15.
- Puspitasari, K.D. & Latrini, M.Y. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay. *Jurnal Nominal*, 4 (2).
- IAI. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

- Ramadhany, F.R., Suzan, Leny & Dillak, V.J. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Umur Listing Perusahaan terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *E-Proceeding of Management*, 5 (1), 843.
- Rustiarini, N.W. (2012). Karakteristik Komite Audit, Eksternal Auditor, dan Audit Report Lag. *Proceeding Seminar Nasional Hasil Penelitian STIE*.
- Rustiarini, N.W. & Sugiarti, N.W.M. (2013). Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor pada Audit Delay. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2 (2).
- Sa'ada, Shohelma. (2013) Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Audit Delay. E-Jurnal UNP, Volume 1 dan 2.
- Santoso, F.K. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan di Sektor Keuangan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1, (2).
- Subekti, Imam & Widiyanti, N. W. (2004). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 7, 991-1002.
- Suparsada, N.P.Y.D & Putri, I.A.D. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18 (1), 60-87.
- Yanuarizqi, D.P. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2 (1).
- Yaputro, J.W. & Rudiawarni, F.A. (2012). Hubungan Antara Tingkat Efektivitas Komite Audit dengan Timeliness Laporan Keuangan pada Badan Usaha Go Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 1 (1).

PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Vitriyan Espa

Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan keluarga Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keterlibatan dalam keluarga dalam pengelolaan keuangan, mengetahui bagaimana sistem pencatatan keuangan keluarga serta proses penyusunan anggaran keuangan keluarga. Pendekatan yang dikulakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara kepada sebanyak 25 orang responden yang terdiri dari 15 orang dosen dan 10 orang tenaga kependidikan dan administrasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan keluarga PNS dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura di dominasi oleh istri sebagai pelaku dalam melakukan aktivitas pengelolaan keuangan keluarga dan sistem pencatatan yang dilakukan masih belum sepenuhnya menggunakan catatan khusus (buku kas manual, handphone maupun komputer). Selanjutnya berkaitan dengan proses penyusunan anggaran keluarga telah terjadi kerjasama yang harmoni antara suami dan istri sehingga sebagian besar keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga melibatkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Keluarga, Keputusan Keuangan Keluarga,
Pencatatan Keuangan Keluarga.

Latar Belakang

Setiap orang akan dihadapkan pada kesempatan untuk membuat keputusan yang tepat guna memenuhi kebutuhannya. Untuk membuat keputusan yang tepat dibutuhkan pemahaman terkait dasar-dasar pengambilan keputusan. Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi yang paling kecil dari sistem ekonomi yang lebih besar, semisal perusahaan dan negara (Doriza, 2015).

Bukan hanya perusahaan saja yang mutlak mengelola keuangannya secara baik, keluarga dan individu pun harus mahir menangani keuangannya agar pendapatan dan pengeluaran bisa diatur keseimbangannya, merencanakan keuangan pribadi dan keluarga mutlak dilakukan agar perjalanan hidup selanjutnya lebih nyaman. (Sembel et al., 2003). Berdasarkan paparan tersebut sudah jelas bahwa di dalam keluarga atau rumah tangga perlu adanya manajemen pengelolaan keuangan keluarga yang bertujuan mengatur cash flow keuangan keluarga menjadi lebih baik dan teratur.

Keluarga dibentuk atas dorongan untuk mencapai kepuasan maksimal, kebahagian, dan kesejahteraan. Sehingga keluarga dituntut mampu untuk menentukan pilihan berbagai macam kegiatan atau pekerjaan guna mencapai tujuan tersebut. Membuat keputusan ekonomi yang cerdas adalah suatu pilihan, dan pilihan ini memerlukan upaya. Selain upaya maka individu juga perlu memahami syarat-syarat yang tepat guna membuat keputusan ekonomi sehari-hari.

Terkait upaya dan persyaratan tersebut maka pengelolaan ekonomi menjadi suatu pilihan yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang. Hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki pengelolaan ekonomi yang memadai guna membuat keputusan yang cerdas. Sehingga pola pengelolaan ekonomi perlu dibangun dan dimasyarakatkan agar kesejahteraan keluarga bisa tercapai. Pada prinsipnya, pengelolaan ekonomi merupakan alat yang berguna untuk merubah perilaku yang tidak cerdas menjadi cerdas.

Akibat dari pemahaman pengelolaan ekonomi yang tidak memadai akan tampak dari bagaimana seseorang mengalami kesalahan ketika membuat keputusan pembelanjaan dan lain-lainnya. Efek lanjutannya adalah bertendensi mengalami kesulitan pemenuhan dana untuk berbagai aktivitas. Kesulitan itu dapat terjadi pada tataran individu atau pun keluarga, karena aktivitas ekonomi dalam keluarga seringkali mengalami kebocoran sehingga lebih besar pengeluaran dari pada pemasukan. Proses pengeluaran yang begitu besar tanpa didukung oleh pemasukan yang memadai hanya akan mengakibatkan kesulitan hidup. Rendahnya pengelolaan ekonomi juga akan berdampak pada sikap konsumtif pada masyarakat sehingga mengkerucutkan peluang untuk mencapai kesejahteraan. Dengan pengelolaan ekonomi keluarga yang baik diharapkan bisa menjadi efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan keluarga sehingga keluarga menjadi sejahtera.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura memiliki jumlah pegawai negeri sipil lebih dari 100 orang (Administrasi dan Akademik serta Dosen Tetap) tentunya memiliki variasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan keluarga. Berdasarkan uraian sebelumnya penelitian ini berjudul " Pengelolaan Keuangan keluarga Pegawai Negeri Sipil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura".

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam keluarga, meliputi pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui sistem pencatatan keuangan yang digunakan dalam keluarga.
3. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran keuangan keluarga.

Kajian Literatur

Pengertian literasi keuangan

Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi keuangan yang ditimbulkan (Mason dan Wilson 2000). Literasi finansial atau kecakapan finansial terjadi manakala seorang individu cakap (literate) dan memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Sementara itu Atkinson (2010) menyebutkan bahwa financial literacy adalah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang baik yang akhirnya mengakibatkan kesejahteraan individu. Lebih jauh, kecakapan financial disini juga menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, hingga bagaimana menerapkannya secara tepat. Literasi keuangan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan karena literasi keuangan merupakan yang terinformasi, namun dari pengalaman-pengalaman di berbagai negara masih menunjukkan relatif kurang tinggi (Orton, 2007).

Financial literacy atau pengetahuan keuangan adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola keuangan untuk membuat suatu keputusan keuangan yang tepat

agar terhindar dari masalah keuangan. Selain itu, financial literacy juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola informasi ekonomi, membuat perencanaan keuangan, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang akumulasi kekayaan, pensiun, dan juga hutang (Lusardi dan Mitchell, 2014).

Seseorang dengan pengetahuan keuangan tinggi cenderung puas dengan keadaan finansial dan terus meningkatkan kualitas hidup karena mengerti sepenuhnya atas keadaan finansialnya saat ini dan cara memperbaikinya. Jadi apabila individu atau keluarga mampu mengelola pengetahuan keuangan dengan baik serta menggunakan uangnya dengan bijak yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan maka tujuan yang diinginkan akan tercapai (Halim dan Astuti, 2015). Financial literacy merupakan cara yang baik untuk mengajarkan konsumen tentang manfaat memiliki hubungan dengan lembaga keuangan. Diantaranya adalah pendanaan dan kredit, kemampuan untuk membangun keuangan yang positif. Memberikan pelatihan financial literacy bukanlah satu ukuran cocok untuk semua usaha. Financial literacy dibagi menjadi empat kategori: awal intervensi, dasar literasi, rehabilitasi kredit dan perencanaan jangka panjang atau asset bangunan. Pengenalan pada tahap awal seringkali dapat menghilangkan kebutuhan untuk intervensi korektif pada tahap-tahap selanjutnya (Yulianti dan Silvy, 2013).

Pengalaman Keuangan (*Financial Experience*)

Pengalaman keuangan adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan atau pengambilan keputusan investasi untuk menentukan perencanaan dan pengelolaan investasi untuk mengetahui kegunaan manajemen keuangan untuk saat ini dan di masa mendatang. Keputusan keuangan yang baik dan benar dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan, mengelola pengeluaran, pembayaran pajak agar manajemen keuangan keluarga menjadi baik (Sina, 2012). Pengalaman keuangan merupakan kejadian tentang hal yang berhubungan dengan keuangan yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung dan sebagainya), dari pengalaman keuangan dapat digunakan untuk modal dalam mengelola keuangan (Sriwidodo, 2015).

Faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi perencanaan investasi adalah pengalaman keuangan. Pengalaman dalam mengelola keuangan juga sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Pengalaman keuangan merupakan pembelajaran dalam mengelola keuangan maupun perencanaan investasi sehingga dalam membuat keputusan keuangan bisa tepat (Sriwidodo dan Sumaryanto, 2017).

Keputusan keuangan yang baik dan benar dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan, mengelola pengeluaran, pembayaran pajak agar manajemen keuangan keluarga menjadi baik. Pengalaman masa kecil yang positif tentang mengelola keuangan, lingkungan sosial, dan sikap terhadap penghematan memainkan peran manajemen keuangan dalam perilaku keluarga di masa yang akan datang. Motivasi individu untuk hidup lebih baik dengan belajar dari pengalaman. Pengalaman dapat dipelajari dari pengalaman pribadi, teman, keluarga atau orang lain yang lebih berpengalaman sehingga memperbaiki dalam pengelolaan, pengambilan keputusan maupun perencanaan investasi keluarga (Yulianti dan Silvy, 2013).

Perencanaan dan pengelolaan investasi dengan baik dan benar adalah untuk mencapai kesuksesan. Tentunya dalam hal ini kesuksesan yang dimaksud adalah ketentraman, kenyamanan dalam hidup untuk sekarang dan di masa mendatang. Oleh karena itu perlu secara kritis untuk mengelola penghasilan. Motivasi individu untuk hidup lebih baik dengan belajar dari pengalaman. Pengalaman dapat dipelajari dari pengalaman pribadi, teman, keluarga, atau orang lain yang lebih

berpengalaman sehingga memperbaiki dalam pengelolaan, pengambilan keputusan maupun perencanaan investasi keluarga.

Perencanaan Keuangan Keluarga

Pengelolaan keuangan didefinisikan sebagai proses yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan dengan disiplin dan melakukan evaluasi atau revisi jika diperlukan Senduk (2000). Wibawa dalam Nancy (2009), mengartikan perencanaan keuangan sebagai suatu cara menyusun keseimbangan dari penghasilan disatu sisi dengan pengeluaran disisi lain yang berupa konsumsi, tabungan, dan investasi. Mengelola keuangan dimulai dari perencanaan keuangan, pelaksanaan hingga melakukan evaluasi. Indriani et.al (2009) mendefinisikan rencana keuangan sebagai suatu strategi yang apabila dijalankan bisa membantu mencapai tujuan keuangan di masa datang. Menurut Dorimulu, (2003) perencanaan keuangan atau financial planning merupakan proses pencapaian tujuan hidup yakni masa depan yang sejahtera dan bahagia lewat penataan keuangan.

Financial planning atau perencanaan keuangan keluarga adalah istilah yang mulai populer di Indonesia sekitar tiga sampai empat tahun terakhir. Mereka yang menekuni profesi ini menyebut dirinya sebagai Financial Planner yakni orang-orang yang mendampingi individu atau keluarga untuk menyusun rencana keuangan guna mencapai tujuan-tujuan keuangan yang telah dipilih atau ditetapkan sebelumnya. Dalam kontek ini perencanaan keuangan lebih banyak berkaitan dengan keuangan pribadi (Personal Finance) ketimbang keuangan perusahaan (Corporate Finance).

Dalam buku *The Truth About Money* seperti yang dikutip oleh Sembel, et al (2003) memaparkan 11 alasan mengapa perencanaan keuangan perlu dilakukan oleh individu maupun keluarga, yaitu untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari berbagai resiko yang berdampak secara financial (seperti kecelakaan, penyakit, kematian, dan tuntutan hukum), mengurangi hutang-hutang pribadi / keluarga, membiayai kehidupan saat tidak lagi berada dalam rentang usia produktif, ini berkaitan dengan naiknya tingkat ekspektasi hidup rata – rata manusia di suatu Negara, membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk membesarkan anak, menyediakan biaya pendidikan anak sampai ke perguruan tinggi, membayar biaya pernikahan, membeli kendaraan, membeli rumah, mampu menentukan masa pensiun dengan gaya hidup yang kita inginkan, membayar biaya-biaya perawatan yang bersifat jangka panjang, dan mewariskan kesejahteraan kepada generasi berikutnya (anak, cucu, cicit, canggah). Demikian juga dengan penelitian Walker dan Llewellyn (2000) mengenai akuntansi dalam rumah tangga : beberapa perspektif interdisciplinary yang menyimpulkan bahwa praktek akuntansi di dalam rumah tangga dan individual berpotensi sama dengan institusi publik.

Perencanaan keuangan keluarga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rencana keuangan jangka pendek, rencana keuangan jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dalam membuat perencanaan keuangan sangat penting untuk mempertimbangkan horizon waktu (time horizon). Berdasarkan time horizon, rencana keuangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

Rencana Keuangan Jangka Pendek adalah rencana keuangan yang harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh rencana keuangan jangka pendek adalah perencanaan dana darurat, rencana untuk membeli barang elektronik dan lainnya.

Rencana Keuangan Jangka Menengah adalah rencana keuangan yang harus dipenuhi dalam waktu antara 1 – 3 tahun. Contoh rencana keuangan jangka menengah adalah dana perjalanan ke luar negeri, dana perjalanan ibadah, membeli kendaraan dan lainnya.

Rencana Keuangan Jangka Panjang adalah rencana keuangan yang harus dipenuhi dalam waktu lebih dari 5 tahun. Contoh rencana keuangan jangka panjang adalah dana hari tua (rencana pensiun), dana pendidikan anak dan lainnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan memakai dasar teoritis phenomenology. Menurut Moleong (2004), phenomenology merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus akan pengalaman-pengalaman subyektif manusia dari perilakunya. Karena penelitian ini akan membahas tentang perilaku manusia khususnya dalam mencatat dan mengelola keuangan keluarganya, dimana datanya diperoleh dari keterangan dan pernyataan-pernyataan dari obyek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah manusia, yang berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dapat melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti dan lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif), sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya (Sugiyono, 2005).

Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang menarik untuk diteliti yang peneliti berniat untuk menyelidiki (Sekaran, 1999). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura yang berjumlah 167 orang. terdiri dari 124 Dosen tetap dan 43 Tenaga Kependidikan dan Administrasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara detail (Sekaran, 1999). Pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling, merupakan metode dimana peneliti memiliki kebebasan untuk memilih keluarga yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian dan untuk mencari petunjuk penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang PNS dilingkungan FEB Untan yang terdiri dari 15 orang Dosen dan 10 orang Tenaga Kependidikan dan Administrasi.

Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kuesioner disebar melalui isian link google form sedangkan wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti penelitian yang dilakukan pada keluarga PNS dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Ada dua proses kegiatan yang dilakukan yaitu proses memasuki lokasi (*getting in*) dan proses ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*). Pada proses memasuki lokasi penelitian, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik kelengkapan administratif maupun berbagai persoalan yang berhubungan dengan setting dan subyek penelitian serta mencari relasi awal. Peneliti menempuh pendekatan formal maupun informal serta menjalin hubungan yang akrab dengan informan, sedangkan pada proses ketika berada di lokasi penelitian, peneliti melakukan hubungan pribadi dan membangun kepercayaan pada subyek penelitian (informan).

Analisis Data

Penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Moleong (2004) yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data dan, (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajad kepercayaannya atau kebenarannya dari hasil penelitiannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Responden yang digunakan dalam penelitian berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari Tenaga Pendidik (Dosen) dan 10 orang dari Tenaga Kependidikan dan Administrasi.

Tanggapan Responden Terhadap Pentingnya Pengelolaan Keuangan Keluarga.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pentingnya pengelolaan keuangan untuk diterapkan dalam keluarga, ternyata sebagian besar menyatakan Sangat setuju (52%) dan Setuju (40%) serta tidak setuju (8%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dalam sebuah keluarga adalah hal yang penting untuk diterapkan.

Hasil di atas mencerminkan bahwa sebagian besar responden berpendapat dan menganggap bahwa sebuah keluarga perlu melakukan pengelolaan keuangan. Hasil wawancara juga mendapatkan informasi responden menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dalam sebuah keluarga perlu dan penting untuk dilakukan karena sesuai dengan prinsip dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia sangat tidak terbatas dan sumberdaya yang dimiliki terbatas, sehingga pengelolaan dalam keuangan keluarga merupakan salahsatu prinsip dalam ilmu ekonomi yang harus dilakukan dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari.

Tanggapan Responden Terhadap Penerapan Pengelolaan Keuangan Keluarga.

Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan apakah anda menerapkan pengelolaan keuangan keluarga pada keluarga anda ?. Ternyata masih ada responden yang menyatakan tidak menerapkan pengelolaan keuangan keluarga (4%), terdapat menyatakan kadang-kadang (4%), kemudian sebanyak 24% yang menyatakan ragu-ragu dan selebihnya sebanyak 68% menyatakan telah menerapkan pengelolaan keuangan keluarga pada keluarganya.

Hasil di atas mencerminkan bahwa lebih dari 50% telah menerapkan pengelolaan keuangan keluarga yakni sebesar 68% sedangkan yang menyatakan tidak menerapkan hanya 4 %, selebihnya kadang-kadang dan masih ragu-ragu. Hal ini dapat didilihat bahwa walaupun sebagian besar responden menyatakan bahwa pengelolaan keuangan keluarga adalah penting untuk diterapkan (gambar 1) namun yang benar-benar menerapkannya hanya 68% atau sekitar 17 responden.

Tanggapan Responden Terhadap pengetahuan atas 3 keputusan dalam pengelolaan keuangan (Pendanaan, Investasi dan Operasional)

Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan apakah anda mengetahui bahwa keputusan dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan 3 keputusan (Pendanaan, investasi dan operasional)??. Ternyata dari jawaban responden menunjukkan bahwa hampir semuanya mengetahui bahwa inti dari pengelolaan keuangan meliputi 3 (tiga) aspek yakni Pendanaan, Investasi dan Operasional.

Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.
2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. (https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_keuangan)

Dari jawaban responden menunjukan bahwa sebagian besar telah mengetahui, yakni sebanyak 96% dan sisanya 4% tidak mengetahui. Berdasarkan analisa peneliti ini wajar saja karena tidak semua responden memiliki latar belakang pendidikan dari ilmu ekonomi dan bisnis.

Tanggapan Responden Terhadap pertimbangan aspek ekonomi dan melakukan perhitungan rinci terhadap keputusan yang diambil.

Berdasarkan jawaban responden bahwa sebanyak 68 % menyatakan bahwa telah mempertimbangkan aspek ekonomi dan melakukan perhitungan rinci terhadap keputusan yang ambil, baik dari aspek pendanaan, investasi dan operasional. Namun ada juga sebanyak 20% (sekitar 5 responden) yang menyatakan ragu-ragu yang dapat dimaknai bahwa mereka kadang-kadang menggunakan dan mungkin beberapa waktu tidak mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan responden yang menyatakan tidak sama sekali menggunakan pertimbangan ekonomi adalah sebanyak 12 %.

Tanggapan Responden Terhadap Catatan Khusus yang dimiliki (Manual/Handphone/Komputer) untuk mencatat transaksi keuangan keluarga.

Lebih lanjut peneliti meminta responden untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan perangkat atau alat yang digunakan oleh responden dalam rangka menerapkan pengelolaan keuangan keluarga, yakni apakah anda memiliki catatan khusus (manual/handphone/komputer) mengenai transaksi keuangan dalam keluarga ?. Dari jawaban responden, menunjukkan bahwa sebagian besar tidak memiliki catatan khusus (48%) dan hanya sebesar 36% menyatakan memiliki catatan khusus. Selebihnya menyatakan ragu-ragu dan kadang-kadang (ditotalkan sebesar 16%).

Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa kesadaran responden secara teratur untuk mendokumentasikan catatan keuangan keluarga dalam bentuk catatan manual (tertulis), catatan di Handphone, maupun catatan di komputer belum sepenuhnya dilakukan, padahal sebagian besar berpendapat bahwa pengelolaan keuangan keluarga adalah yang penting untuk dilakukan. Namun, tidak diikuti dengan aktivitas pencatatan yang memadai.

Tanggapan Responden Terhadap Peranan Suami/Istri dalam mendiskusikan keputusan pengelolaan keuangan keluarga

Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner dan hasil wawancara dengan responden berkaitan dengan peranan pasangan (suami/istri) dalam mendiskusikan untuk pengambilan keputusan pengelolaan keuangan keluarga.

Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa sebagian besar responden (sebesar 84%) selalu mendiskusikan dengan pasangannya masing-masing (suami/istri) sebelum mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan keluarga, sebesar 8% menyatakan ragu-ragu yang dapat diinterpretasikan sebagai tidak rutin melakukan diskusi (rembukan) dengan pasangannya dan sebesar 8% selebihnya menyatakan tidak melakukan diskusi dengan suami/istri. Hal ini menunjukkan bahwa

setiap keputusan yang diambil oleh responden dalam penelitian ini sebagian besar didiskusikan terlebih dahulu dengan pasangan suami/istri masing-masing.

Tanggapan Responden Terhadap Peran Financial Planner (Konsultan Perencana Keuangan Keluarga).

Pada bagian akhir kuesioner peneliti juga menanyakan kepada responden berkaitan dengan apakah responden memiliki konsultan khusus (ahli dalam hal Financial Planner) untuk mengelola keuangan keluarga. Berdasarkan hasil jawaban responden terlihat bahwa 100% responden tidak memiliki Konsultan khusus dalam pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden yang semuanya menyatakan tidak memiliki.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara kepada 25 responden Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak dapat dianalisis bahwa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dalam keluarga PNS di Lingkungan FEB adalah para istri. Dimana dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan responden bahwa seorang istri lebih "care" atau peduli terhadap keputusan keuangan ekonomi keluarga.

Banyak anggapan bahwa yang paling tepat mengatur keuangan adalah istri karena dianggap lebih detail, lebih teliti dan lebih mengetahui prioritas semua kebutuhan keluarga mana yang lebih penting dan tidak. Jadi sebaiknya semua uang diserahkan ke istri. Tetapi ada anggapan juga mengatakan bahwa wanita kebanyakan boros, suka belanja dan menghabiskan uang berlebihan. Hal tersebut tidak semuanya benar. Ada juga suami yang detail, teliti dan lebih bijak dalam menentukan sekala prioritas kebutuhan keluarga. Dan ada juga laki-laki yang suka menghambur-hamburkan uang hanya untuk kesenangan dan hobi. Dalam membagi tugas dan peran mengatur keuangan tidak ada pakem yang mengharuskan istri atau mengharuskan suami. Semua itu perlu adanya penyeimbang dan kerja sama antar pasangan suami dan istri.

Salah satu responden (seorang wanita) menyampaikan bahwa di awal pernikahan semua pendapatan yang diterima oleh suaminya semua diberikan kepadanya. Sehingga semua teknis mengatur keuangan keluarga istri yang berperan, suami hanya minta biaya operasional sesuai dengan kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu responden tersebut yang juga bekerja menyadari bahwa dia kurang piawai untuk mengatur semuanya sehingga mengubah pola pengaturan dengan melakukan kompromi kembali bersama suami.

Kesepakatan yang dibuat bersama dengan saling terbuka tentunya menghindari konflik antara suami dan istri. Pola yang baik adalah dengan membagi tugas, suami yang memenuhi dan membayarkan kebutuhan pokok seperti listrik, telpon, cicilan rumah, belanja, sekolah dan iuran-iuran pokok lainnya sedangkan seorang istri lebih fokus pada pos investasi dan pos tambahan seperti liburan.

Keterbukaan dengan pasangan adalah kunci komunikasi yang efektif dalam hubungan suami-istri. Dengan saling terbuka tentunya menghilangkan rasa sungkan dan menciptakan rasa nyaman. Begitu juga dalam urusan keuangan, berapa pun pendapatan yang diterima maupun pengeluaran yang digunakan baik pengeluaran untuk pribadi maupun untuk kebutuhan bersama atau keluarga, terbukalah terhadap pasangan.

Tidak terkecuali istri terhadap suami, begitu juga suami terhadap istri. Dengan saling terbuka, maka kompromi dan kesepakatan terhadap alokasi anggaran pendapatan akan lancar, menimbulkan

rasa nyaman dan saling percaya. Jika tidak bisa saling terbuka tentunya akan menciptakan rasa tidak nyaman, curiga yang menimbulkan konflik dan dapat berujung pada perceraian.

Tidak ada aturan khusus siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Meskipun yang lebih berkewajiban memberi nafkah keluarga adalah suami, tidak harus suami atau istri saja yang mengelola keuangan. Masing-masing baik suami ataupun istri bisa mengambil peran. Pembagian peran baiknya dikompromikan sebelum menikah. Dalam perjalanan berumah tangga dengan melakukan kompromi tugas dan peran keuangan bisa disesuaikan, misal yang tadinya membayar listrik dilakukan oleh suami bisa dialihkan ke istri. Di dalam ilmu Perencanaan Keuangan di luar negeri ini dikenal juga dengan istilah Family Planning atau perencanaan keluarga. Banyak orang yang terkaget-kaget ketika menikah mereka belum punya pemahaman yang sama tentang mengatur keuangan keluarga.

Prilaku responden yang bervariasi tentunya menjadi sangat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran bagaimana mengatur mekanisme keuangan keluarga. Sebagian besar dari responden tidak memiliki catatan keuangan khusus dalam mengelola keuangan keluarga. Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berdasarkan aktivitas mencatat secara rutin belum sepenuhnya dilakukan. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya catatan khusus bagi pengelolaan keuangan keluarga.

Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran keuangan keluarga Sebagian besar responden menjawab mendiskusikan terlebih dahulu dengan pasangannya (suami/istri). Hal ini terlihat dari jawaban responden sebesar 84% menyatakan bekerjasama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan keluarga. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga dimana setiap keputusan penting harus melalui tahapan yang melibatkan keduabelah pihak baik suami maupun istri.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterlibatan Istri dalam mengelola keuangan keluarga lebih dominan dibandingkan para suami, hal ini dikarenakan istri memiliki karakter lebih mampu untuk mengatur segala pengeluaran yang berkaitan dengan pengeluaran keluarga (terutama bagi istri yang tidak bekerja).
2. Sistem pencatatan keuangan dalam keluarga PNS dilingkungan FEB Untan belum sepenuhnya dicatat kedalam catatan keuangan secara khusus baik menggunakan media manual (buku kas), catatan di Handphone maupun catatan di komputer.
3. Proses penyusunan anggaran keuangan keluarga pada PNS dilingkungan FEB Untan sebagian besar dilakukan secara bersama-sama dengan pasangan masing-masing (Suami/istri). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PNS di FEB melakukan rembuk sebelum menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini tentunya masih banyak keterbatasan dan kekurangan untuk itu peneliti akan memberikan saran berupa:

1. Perlunya penelitian lebih lanjut yang melibatkan jangka waktu yang lama dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan observasi yang lebih detil terhadap beberapa keluarga yang khusus telah melakukan pencatatan keuangan keluarga secara tertulis (baik dengan media buku kas, handphone ataupun komputer). Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengeksplorasi pelaksanaan pengelolaan keuangan keluarga PNS di Lingkungan FEB Untan. Saran ini tentunya memiliki keterbatasan dan hambatan terutama berkaitan kesediaan responden untuk dieksplorasi keluarganya secara mendalam dan komprehensif.
2. Perlunya penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan keuangan keluarga belum optimal dengan pendekatan kuantitatif dengan memperhatikan model penelitian keuangan keluarga yang ada.

Referensi

- Daroini A. 2011. Pengaruh Potensi Ekonomi Peternakan Sapi Potong Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi (Studi Kasus Pada Peternak Sapi Potong Skala Kecil Di Kabupaten Kediri).Disertasi Tidak Diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Damayanti. Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Pasca Kenaikan Harga BBM. 2010. (Online). (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2010).
- Doriza, Shinta. 2015. Ekonomi Keluarga. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.Komunitas MK Kalsel. 2010.
- Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga. (Online). (<https://komunitasmkkalsel.blogspot.co.id/2010/12/pengelolaan-ekonomi-rumah-tangga/>).Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia.
- Rodhiyah. 2012. Managemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera. (online). (ejurnal.undip.ac.id/index.php/forum/article/download/3202/2875)
- Sutisna. 2009. Pengertian Managemen. (Online). (<http://sutisna.com/artikel/ilmu-sosial/manajemen/pengertian-manajemen-3/>) UU RI No 10 Tahun 1992 Bab I pasal 11 tentang Pengertian Keluarga.
- Undang-undang No 10 Tahun 1992 tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera”.
- Wahyono. 2001. Pengaruh Perilaku Ekonomi Kepala Keluarga Terhadap Intensitas Pendidikan Ekonomi Di Lingkungan Keluarga. Disertasi Tidak Diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Wibawa, Heru Kustriyadi. 2003. Perencanaan Keuangan Keluarga (Sebuah Langkah Menuju Keluarga Sejahtera). Jakarta: Salemba Empat.
- Chen, M-J., 2001. Inside Chinese Business, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts. (www.google.com).
- Efferin, S., (2004). Metode Penelitian Untuk Akuntansi, Bayumedia Publising, Malang.
- Hamidi, 2004). Metode Penelitian Kualitatif, UMM Press, Malang.
- Komori, N., 2000. In Search of Feminine Accounting Practice : The Experience of Women “Accountants” in Japan, Sheffild University Management School and Wakayama University.
- Moleong, J., 2004. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung .

- Ridwan, 2004). Populasi Tionghoa, (<http://www.IndonesiaMediaonline.com>), Sinar Harapan, 2000, (www.google.com).
- Sembel, R., et al, 2003. Smart Saving and Borrowing for Ordinary Family. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sekaran, U.,1999. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 2th, John Wiley & Sons, Ltd.
- Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabata, Bandung. Suryadinata, L. 2002. Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Walker, S.P. and Llewellyn, S., 2000). Accounting At Home : Interdisciplinary Perspectives, University of Edinburgh, Edinburgh, UK.
- Wulandari, F.R., 2000. Perilaku Ekonomi Etnis Cina Tahun 1930-an-2000, (www.kompas.com).
- Yooshik, G. and Wonho, J., 1998. Culture & Development: Reassessing Cultural Explanations on Asian Economic Development, (www.google.com).

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 (STUDI KASUS PADA DESA SUNGAI PUKAT KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG)

Syarbini Ikhsan
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini dilatar belakangi semakin meningkatnya nilai dana desa yang diterima setiap tahunnya, sehingga sangat diperlukan pengelolaannya lebih baik agar sesuai dengan maksud dan tujuannya, terutama bergantung pada kapasitas dari pemerintah dan aparatur desa, karena sejauh ini para perangkat pemerintahan desa hingga para kepala urusan dinilai belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan di Desa Sungai Pukat sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap pemerintah Desa.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai penatausahaan secara teknis sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, hanya saja pada proses penatausahaan belum ada dibuat buku pembantu panjar. Sementara pada tahap pelaporan keuangan di desa Sungai Pukat terdapat ketidaksesuaian yaitu bahwa Kepala Desa Sungai Pukat waktu pelaporan tidak menentu atau tidak tetap karena laporan dibuat pada bulan ke-2 setelah semua kegiatan pertahapan dicairkan. Dan pada tahap Pertanggungjawaban di Desa Sungai Pukat masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu berkaitan dengan informasi mengenai laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, belum diinformasikan sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 20 tahun 2018, Perencanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberi dampak positif seperti terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terdapat aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, salah satunya yaitu masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diproses dan dibuat secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kepala Desa sudah diberi kewenangan yang penuh oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Dengan semakin meningkatnya nilai dana desa yang diterima setiap tahunnya,

sangat diperlukan pengelolaannya lebih baik agar sesuai dengan maksud dan tujuannya, terutama bergantung pada kapasitas dari pemerintah dan aparatur desa, karena sejauh ini para perangkat pemerintahan desa hingga para kepala urusan dinilai belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 yang merupakan Peraturan Menteri perubahan atas PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan di Desa Sungai Pukat sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kajian Literatur

Permendes Nomor 16 Tahun 2018

Permendes Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu mengutamakan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan serta berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, prioritas provinsi, prioritas kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, yaitu mendahulukan kewenangan hak asal usul serta kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif, yaitu mendahulukan prakarsa, kreativitas dan peran serta dari masyarakat Desa;
- f. Swakelola, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, lebih mendahulukan kemandirian Desa.
- g. Berdikari, yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari masyarakat Desa, oleh masyarakat Desa dan untuk masyarakat Desa itu sendiri, sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
- h. Berbasis sumber daya Desa, yaitu dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa, lebih mendahulukan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa.
- i. Tipologi Desa, yaitu memperhatikan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip/prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d. Pembedayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

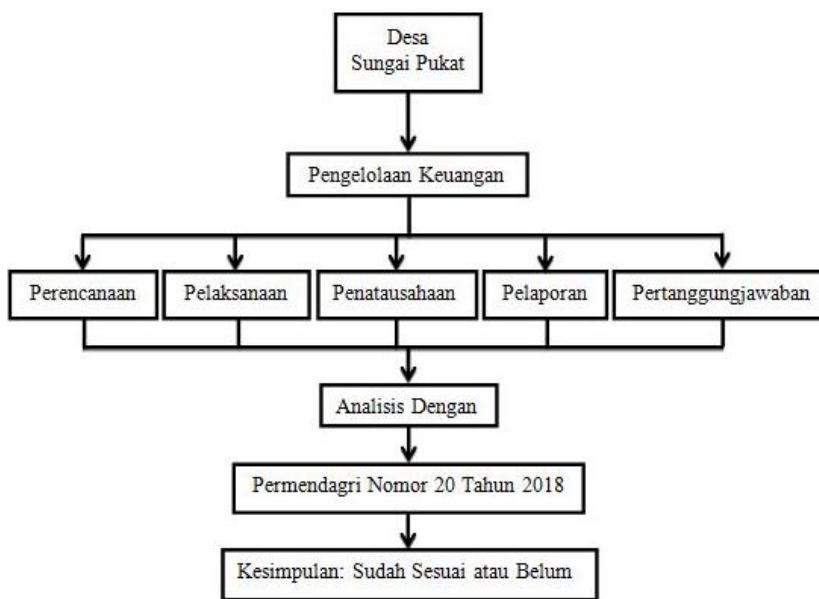
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Pengelolaan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Jenis aset desa meliputi kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum; dan lain-lain kekayaan asli desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, dan dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa, dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa yang berasal dari Kepala Urusan.

Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Aset desa dapat diasuransikan. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan keadaan fenomena, kejadian atau fakta, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan hasil yang menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini berusaha untuk memberikan uraian, penjelasan, dan gambaran tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengkajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari jawaban yang diperoleh dari proses wawancara dan bukan berupa angka-angka. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan keuangan desa Sungai Pukat melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa Sungai Pukat dianggarkan dalam APBDesa pada tahun anggaran berjalan. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setelah diverifikasi Camat.

2. Pelaksanaan

Pada Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sungai pukat, semua penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa Sungai Pukat dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), selain itu pencatatan juga dilakukan ke dalam buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku register.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan pada Desa Sungai Pukat dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati Sintang melalui camat, laporan yang disampaikan yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan realisasi kegiatan disusun oleh Kepala Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan, dan disusun pada bulan ke-2 setelah semua kegiatan pertahapan dicairkan.

5. Pertanggungjawaban

Kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Desa Sungai Pukat yaitu berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati Sintang. Kepala Desa Sungai Pukat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati Sintang melalui camat paling lama bulan ketiga pada tahun anggaran berikutnya. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi berupa papan informasi namun hanya memuat informasi mengenai jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa, realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran, dan belum memuat kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan alamat pengaduan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan di Desa Sungai Pukat sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- 2) Pelaksanaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- 3) Pada tahap penatausahaan keuangan di desa Sungai Pukat secara teknis sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tetapi masih terdapat kekurangan dimana Kaur Keuangan di desa Sungai Pukat hanya membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak saja, belum ada membuat buku pembantu panjar.
- 4) Pada tahap pelaporan keuangan di desa Sungai Pukat terdapat ketidaksesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 68 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu bahwa Kepala Desa menyusun laporan Pelaksanaan APBDesa dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan untuk Desa Sungai Pukat waktu pelaporan tidak menentu atau tidak tetap karena laporan dibuat pada bulan ke-2 setelah semua kegiatan pertahapan dicairkan.
- 5) Pertanggungjawaban di Desa Sungai Pukat masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu berkaitan dengan informasi mengenai laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasinya memuat informasi mengenai jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa, realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran, dan belum memuat kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan alamat pengaduan.

Referensi

- Adi, H.P.S. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1 (4), 1375-1385

- Amalia, R.N. (2017). Penerapan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2 (3), 121-132
- Andi, T. N. (2018) Sintang Gelar Raker Kades. Antara Kalbar. Diperoleh dari <https://kalbar.antaranews.com/berita/359436/sintang-gelar-raker-kades>
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Bandung: Rineka Cipta.
- Atmaja, D.A. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). (Skripsi Publikasi). Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Dewanti, D.W.E.(2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. *Jurnal Unej. Digital Repository*. Universitas Jember.
- Hanifa, I.S.(2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Mamuaya, J.V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Emba*, 5 (2), 1020-1030
- Mentu, P.E.(2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392-1399
- Moleong, L.J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, H.I., Ayudiat, C.,& Surifah. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di kabupaten Sleman). The 2nd University Research Coloquium: 305-313.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Dana Desa.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sintang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- RUAItv. (2018). Kejari Sintang Terima Enam Pengaduan Dana Desa. RUAItv. Diperoleh dari <http://ruai.tv/2018/05/03/kejari-sintang-terima-enam-pengaduan-dana-desa/>
- Sarosa, S. (2012). Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Jakarta: Indeks Penerbit.
- Sekaran, U., Bougie, R. (2013). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Ed. United Kingdom: Wiley.
- Sugiyono. (2008). Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif-Kulitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarna, A. (2015). Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses dari <http://www.keuangandesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-desa.html>
- Tumiwa, Y.E.(2013). Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Di Kota Manado.Jurnal EMBA, 1 (4), 1365-1374
- Wahidin. (2018). Realisasi Dana Desa di Sintang Berjalan Baik, Ada Peran Aparat Penegak Hukum di Dalamnya. Tribun Pontianak. Diperoleh dari <http://pontianak.tribunnews.com/2018/12/05/realisasi-dana-desa-di-sintang-berjalan-baik-ada-peran-aparat-penegak-hukum-di-dalamnya>.

DESAIN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID SERTA DESAIN POLA KERJASAMA EKONOMI ANTAR MASJID DI KOTA PONTIANAK

Juanda Astara

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana praktek dalam pengelolaan keuangan masjid yang ada di Kota Pontianak. Dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik grounded yakni bergerak dari level empirikal menuju ke level konseptual-teoritikal. Kemudian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara profesional guna memaksimalkan potensi keuangan masjid agar menjadi lebih baik. Permasalahan yang banyak dihadapi dalam pengelolaan masjid mulai dari dana masjid yang kurang produktif, minimnya kegiatan-kegiatan masjid serta terjadi kesenjangan antar masjid-masjid yang ada di Kota Pontianak.

Kata Kunci : keuangan masjid, pengelolaan keuangan masjid, akuntansi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang mendominasi dari beberapa pemeluk agama yang ada, dengan persentase lebih kurang 80% dari total penduduk Indonesia. Jumlah muslim yang besar ini tentu berbanding lurus dengan jumlah tempat ibadah yang dimiliki (masjid). Berdasarkan data pada tahun 2017, jumlah masjid di Indonesia adalah 800.000 bangunan dan terus bertambah setiap tahunnya.

Dengan jumlah yang begitu besar menjadikan penduduk muslim tersebar hampir diseluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kota Pontianak. Untuk bangunan masjid sendiri di Kota Pontianak terdapat sekitar 329 masjid berdasarkan data dari BPS tahun 2017.

Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga digunakan sebagai pusat aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang. Sebagaimana sejarah mengatakan pada masa Rasulullah saw masjid merupakan pusat peradaban dan pusat aktivitas baik ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*.

Semakin kompleks permasalahan masyarakat, menuntut masjid sebagai pusat peradaban dapat mengakomodir kebutuhan sosial. Dari itu dibutuhkannya manajemen dan pengelolaan yang baik. Pengelolaan masjid secara professional dan berpandangan ke depan adalah salah satu cara untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat dirampas oleh negara barat. Tanpa ditangani secara profesional, maka masjid hanya merupakan monumen dan kerangka bangunan mati yang tidak dapat memancarkan perjuangan syiar dan penegakan risalah kerasulan.

Manajemen masjid yang baik ditopang dengan manajemen keuangan yang baik. Berbagai program yang direncanakan tidak dapat sesuai harapan jika tidak di *support* dengan keuangan yang kuat dan sehat. Artinya, perlu adanya manajemen keuangan yang baik dan professional. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana masjid berasal dari donasi jamaahnya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sama

saja pengurus masjid telah melalaikan amanah. Selain itu dari sudut pandang ekonomi, semakin banyaknya *idle asset*, sehingga menyalahi konsep uang dalam Islam, yaitu sebagai *flow concept* bukan *stock concept*. Dana masjid yang banyak melimpah harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat sekitar masjid.

Untuk dapat menjalankan wacana yang telah dibuat maka diperlukan sebuah desain dalam pengendalian internal masjid itu sendiri. Pengendalian internal adalah suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait diterapkan oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong sumber daya manusia untuk melakukan kebijakan organisasi, meningkatkan efisiensi dan memastikan keandalan pencatatan akuntansi.

Masjid, sebagai entitas yang langsung menyentuh masyarakat *grass root*, tentulah harus dimaksimalkan perannya. Ada masjid yang memiliki dana “gemuk” dan tumbuh dengan kegiatan yang tidak jelas targetnya, sementara di sisi lain ada masjid yang progresif kegiatannya dalam membangun “shaf kultural”, tetapi hidup kembang kempis karena kekurangan dana. Oleh karena itu, sinergitas dan kerjasama antar masjid yang diwakili para pengurusnya harus terjalin dengan baik agar tercapainya optimalisasi dari potensi keuangan masjid-masjid yang ada.

Berdasarkan uraian latarbelakang dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana jika sistem pengendalian internal yang baik diterapkan dalam pengelolaan sebuah masjid, maka tema yang akan dibahas adalah “Desain Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Masjid Serta Desain Pola Kerjasama Ekonomi Antar Masjid Di Kota Pontianak.”

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik manajemen keuangan masjid di Kota Pontianak dan bagaimana penerapan pemberdayaan ekonomi umat yang ada di masjid-masjid tersebut.

Landasan Teori

Pengertian Masjid

Masjid berasal dari kata sajada-sujudan yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim, atau tempat sujud. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata sajada diubah menjadi masjidun (isim makan) artinya tempat sujud menyembah Allah SWT. Diartikan sebagai tempat sujud, masjid mengandung arti general, yaitu dipersamakan dengan bumi. Sebagaimana pesan dari Rasulullah saw yang berarti: “setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud.” Secara teminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebijakan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebijakan, yaitu kebijakan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus, yaitu shalat fardhu, dan kebijakan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah.

Kata masjid dalam al-Qur'an diulang sebanyak 28 kali. Dalam ilmu tafsir, kata-kata atau kalimat yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung makna yang amat penting. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dan fungsi masjid dalam ajaran Islam.

Pada masa Nabi saw ataupun di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun mencakup ideology, politik, ekonomi, sosial,

peradilan, dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga termasuk ajang halaqah atau diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.

Mengelola masjid juga memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana memakmurkan masjid, yang oleh Allah mendapat perhatian khusus. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18:

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Bila disimak dengan saksama, ayat tersebut memberi penekanan bahwa pembangunan masjid merupakan manifestasi keimanan dan hanya orang yang berimanlah yang sanggup memakmurkan masjid, Jadi, masjid yang tidak makmur dan sepi merefleksikan keimanan umat di lingkungannya.

Masjid mempunyai kaitan erat dengan keimanan dan pembinaan umat bagi kaum muslimin agar dapat memberikan peranan yang dominan dalam pembangunan negara. Kekuatan iman inilah yang menentukan persatuan umat yang akan memberikan kekuatan lahir batin dalam memperjuangkan nasib masyarakat Islam yang berdasarkan tauhid.

Mustofa (2007) mengemukakan beberapa fungsi masjid:

- 1) Sebagai wahana konsultasi keagamaan, masalah keluarga, dan masalah sosial.
- 2) Sebagai wahana pengembangan pendidikan masyarakat.
- 3) Sebagai wahana pengembangan bakat dan keterampilan.
- 4) Sebagai wahana pengentasan kemiskinan.
- 5) Sebagai wahana meringankan beban orang kurang mampu.
- 6) Sebagai wahana pembinaan generasi muda.
- 7) Sebagai wahana mitra pengembangan perekonomian masyarakat.
- 8) Sebagai wahana menyehatkan masyarakat.

Selain itu, Ayub menjabarkan Sembilan fungsi besar masjid, yaitu:

- 1) Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt
- 2) Masjid adalah tempat kaum muslimin untuk beritikaf, membersihkan diri, mengembangkan batin untuk membina kesdaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
- 3) Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- 4) Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan pertolongan
- 5) Masjid adalah tempat untuk membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama
- 6) Masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin
- 7) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat

- 8) Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya,
- 9) Masjid sebagai tempat untuk melaksanakan pengaturan dan supervise sosial.

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah saw terutama dalam periode madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat makhdah atau khusus, seperti shalat, tetapi masjid juga memiliki beberapa peran sebagai berikut. Pertama, dalam keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijran di Madinah, Rasulullah saw bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh, tetapi terlebih dahulu mendirikan masjid. Kedua, kalender Islam, yaitu tahun hijriah dimulai dengan mendirikan masjid yang pertama, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan tahun hijriah selanjutnya jatuh pada tanggal 1 Muharam.

Ketiga, di Makah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. Pada kurun pertama atau periode Makiyah, Nabi Muhammad saw mengajarkan dasar-dasar agama, memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah saw menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. Keempat, masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang muhajirin dan anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah swt. Kelima, masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemajuan bersama.

Memasuki zaman keemasan Islam, masjid mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Corak penyesuaian dengan tuntutan zaman yang terjadi itu tidak kalah fungsionalnya dibanding optimalisasi nilai dan makna masjid di zaman Rasulullah SAW. Dalam perkembangan terakhir, masjid mulai memperhatikan kiprah operasionalnya menuju keragaman dan kesempurnaan kegiatan. Dikenal manajemen masjid.

Manajemen masjid adalah kegiatan yang menggunakan perangkat yang meliputi unsur dan fungsi di tempat melakukan segala sesuatu aktivitas yang mengandung kepatuhan Allah melalui ibadah dalam arti seluas-luasnya.

Untuk menjalankan peran dan fungsi tersebut, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Mengurus masjid, memelihara, dan melaksanakan kegiatan masjid hanya mungkin terealisasi jika tersedia dana yang mencukupi. Tanpa ketersediaan dana, hampir semua gagasan memakmurkan masjid tidak dapat dilaksanakan.

Secara tradisional, aliran dana ke masjid didapatkan dari hasil tromol Jumat atau dari sedekah jamaah. Namun, mengandalkan *income* hanya dari kedua pos itu niscaya jauh dari memadai. Jumlah yang dihasilkan relatif sedikit, sedangkan anggaran pengeluaran masjid cukup besar. Mau tidak mau, pengurus masjid perlu menggiatkan usaha-usaha lain yang menjamin adanya sumber pendapatan masjid.

Secara umum, sumber dana masjid berasal dari:

a. Zakat

Zakat adalah kadar (jumlah) harta yang tertentu, dalam waktu tertentu, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariatnya atau sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Infaq

Infaq adalah sebagian harta yang dikeluarkan seseorang untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat.

c. Sedekah

Sedekah mempunyai arti yang lebih lus dibanding infaq, tidak hanya berasal dari harta, tetapi berbagai kebaikan yang dilakukan seseorang juga bisa dikatakan sedekah.

d. Wakaf

Wakaf berarti menghalangi atau menahan *taṣarruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

Manajemen Keuangan Masjid

Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba yang berarti suatu organisasi atau kumpulan beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Kategori organisasi nirlaba adalah lembaga keagamaan, organisasi kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Maka, manajemen keuangan yang digunakan adalah manajemen keuangan lembaga/organisasi nirlaba.

Akuntabilitas publik dibutuhkan dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan masyarakat banyak (umat). Akuntabilitas public merupakan kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Mahmudi, 2005: 9). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lannya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Manajemen keuangan dapat dipahami sebagai usaha memperoleh dana dengan biaya murah pada saat kita memerlukan dana dan usaha menempatkan dana dengan hasil yang tinggi pada saat kita memiliki dana. Terry Lewis memberikan pengertian terkait manajemen keuangan. Manajemen keuangan meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*implementing*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*monitoring*) sumber-sumber daya keuangan (*financial resources*) suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya (*objectives*).

Manajemen keuangan meliputi empat aspek, yaitu :

1) Mengelola Sumber Daya yang Langka

Setiap organisasi, terutama organisasi nirlaba harus memastikan bahwa seluruh dana dan sumber daya yang didonasikan kepadanya digunakan secara tepat dan hanya demi menghasilkan manfaat serta dampak yang terbaik, untuk mencapai misi dan tujuan, yakni pelayanan kemanusiaan.

2) Mengelola Risiko

Semua organisasi nirlaba menghadapi risiko-risiko internal dan eksternal yang dapat mengancam kinerja bahkan eksistensinya. Risiko tersebut harus dikelola melalui suatu upaya yang terorganisasi untuk membatasi kerusakan yang bisa ditimbulkannya lebih jauh. Upaya dilakukan dengan memaparkan sistem dan prosedur untuk mewujudkan kontrol keuangan.

3) Mengelola Organisasi secara Strategis

Manusia dalam kehidupannya dikelilingi oleh berbagai berbagai jenis organisasi. Pada masyarakat modern sejak manusia lahir sudah ada organisasi yang mengurus kelahirannya, ketika meninggal ada yang mengurus kematianya, setelah dikubur pun masih ada yang menjaga dan merawat makam. Manusia dapat menjadi anggota beberapa organisasi sekaligus. Fungsi manusia di berbagai macam organisasi dapat berbeda-beda, tergantung kedudukannya di setiap organisasi yang ia ikuti.

Organisasi timbul karena manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu mereka harus mengadakan koordinasi/kerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Adanya kerjasama dan tujuan bersama inilah yang akhirnya mendasari munculnya organisasi.

Manajemen keuangan adalah salah satu bagian dari manajemen organisasi secara keseluruhan. Artinya, para pengelola harus waspada dan antisipatif terhadap segala potensi positif maupun negatif, yang dapat timbul dengan cara melihat *big picture* organisasinya.

4) Mengelola Berdasarkan Tujuan

Manajemen keuangan organisasi nirlaba membutuhkan perhatian yang intensif pada pelaksanaan proyek dan pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen keuangan organisasi nirlaba berlangsung secara simultan di dalam suatu siklus yang berkelanjutan.

Ditilik dari istilah manajemen, maka hal ini berarti akan terkait dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam manajemen keuangan lembaga akan terdapat proses penyusunan anggaran, penyelenggaran manajemen uang kas masuk dan keluar, pemeriksaan atau audit, dan evaluasi atau analisis atas kinerja keuangan lembaga.

Jika diringkas, proses manajemen keuangan organisasi nirlaba ada tiga atau 3-M, yaitu:

1) Merencanakan

Pada awal pendirian organisasi, orang-orang yang di dalamnya merancang tujuan-tujuan dan merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan rencana keuangan (anggaran), yang berisi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan dari sumber-sumber mana saja dana untuk menutupinya bisa diperoleh.

2) Melaksanakan.

Setelah memperoleh dana sesuai yang diperlukan, program-program dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan.

3) Mengevaluasi.

Dengan menggunakan laporan-laporan pemantau keuangan, situasi atau realisasi aktual dibandingkan dengan rencana-rencana awalnya, Pengelola lantas memutuskan apakah organisasinya benar-benar sesuai target untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam skala waktu dan anggaran yang telah disetujui ataukah belum. Pelajaran dari tahap evaluasi ini dijadikan sebagai bahan perencanaan selanjutnya, dan demikian selanjutnya.

Pengertian manajemen keuangan dalam organisasi masjid adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'i serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana. Dengan kata lain, manajemen keuangan masjid berkaitan dengan strategi pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat yang dijalankan secara terencana, terukur, serta terkontrol.

Ruang lingkup manajemen keuangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu:

- 1) Membuat perencanaan atau menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) atau *budgeting* yang meliputi berapa dana yang diharapkan terhimpun beserta sumber dan strategi memperolehnya, berapa jumlah dana yang akan disalurkan, dan jumlah orang atau lembaga yang akan menerimanya, serta saldo minimum yang harus tersedia sebagai cadangan untuk -paling tidak- setiap bulannya.
- 2) Membuat panduan berupa kebijakan umum dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan dana yang akan dilaksanakan di lembaga. Panduan ini harus mencakup penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana.

a) Penghimpunan Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola. Jenis dana yang lazim ada di masyarakat dan sesuai undang-undang pengelolaan zakat adalah zakat, infaq, sedekah, wasiat, waris, kafarat, wakaf, hibah lembaga lain, hibah dari pemerintah, dan hibah dari luar negeri.

Cara penerimaan dana masjid juga harus diperhatikan. Ada tiga cara dana diterima: melalui rekening di bank, langsung di masjid, dan "jemput bola", yaitu pengelola datang langsung kepada pemberi dana.

b) Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- (1) Penerima/pengguna dana
- (2) Tujuan penggunaan
- (3) Bentuk dan sifat penggunaan, apakah konsumtif ataukah produktif.

c) Prosedur Pengeluaran Dana

Pengeluaran dana harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, perlu melibatkan beberapa pihak dalam prosedur pengeluaran dana, yakni:

- (1) Pengguna dana, yaitu pihak yang mengajukan permintaan dana.
- (2) Verifikator dan otorisator yakni pihak yang berhak memverifikasi dan menyetujui pengeluaran dana.
- (3) Kasir, yakni pihak yang bertindak sebagai juru bayar.

d) Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana

Setiap pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis, lengkap, dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan. Pertanggungjawaban harus diberikan dalam batas waktu tertentu.

- 3) Melakukan pengendalian dalam penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana. Pengendalian keuangan ini meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unit atau orang penanggung jawab keuangan

Dalam organisasi, baik besar atau kecil, harus ada unit atau orang tertentu yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Tidak boleh terjadi setiap orang bertidak sebagai bendahara. Uang masuk dan keluar hanya dilakukan satu pintu.

b) Anggaran

Anggaran merupakan alat pengendalian. Anggaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau alat pembanding dalam mengevaluasi kegiatan.

c) Kebijakan

Kebijakan yang jelas dapat menghindarkan pengeluaran dan penggunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten.

d) Pelaporan

Pelaporan dan publikasi merupakan sarana pengendalian keuangan yang melibatkan bukan hanya atasan melainkan seluruh masyarakat.

e) Pencatatan

Dengan pencatatan maka setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri.

f) Prosedur

Setiap penerimaan atau pengeluaran harus melalui prosedur untuk menghindari penerimaan atau pengeluaran yang tidak sesuai.

g) Personalia

Pengelola yang amanah dan profesional merupakan unsur utama dalam pengendalian. Sebaik apapun unsur-unsur yang lain tidak akan banyak berarti tanpa pengelola yang memiliki aiqadah yang lurus dan akhlak yang mulia.

h) Audit Internal

Audit internal dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan karena kelalaian maupun kesengajaan baik terkait dengan syariah maupun etika umum yang berlaku di masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi

Rappaport mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Sedangkan Craig dan Mayo mengatakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan pengembangan masyarakat yang terkait dengan konsep kemandirian (self help), partisipasi (participation), jaringan kerja (networking), dan pemerataan (equity).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Menurut Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya penggerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan masyarakat, sehingga dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mencakup beberapa hal, yaitu : a) peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha; b) peningkatan akses masyarakat terhadap pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang mendukung secara langsung terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dalam perspektif Islam isu-isu yang mengarah kepada pola pemberdayaan telah disebutkan 1400 abad yang lalu. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat al Qur'an ataupun hadits yang apabila dihubungkan dengan konteks pemberdayaan merupakan spirit pemberdayaan dengan landasan rahmatan lil 'alamîn.

Beberapa manifestasi rahmatan lil 'alamîn ini dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain adalah pembinaan "kehidupan yang baik" (hayatan thayyibah) dan "kesejahteraan" (falah), pemberian kemudahan dan pengentasan penderitaan (kemiskinan), generasi kemakmuran.

Nilai-nilai dan ideologi merupakan bagian yang melekat dari setiap pendekatan praktek atau dasar teoritis. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam perspektif Islam tidak dengan tujuan untuk menghancurkan yang powerfull ataupun mendistribusikan kekuasaan kepada semua orang secara merata, karena kedua sisi ekstrim tersebut merupakan hal yang mustahil, tetapi Islam mengambil jalan pertengahan (tawazun). Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai universal yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Misalnya Islam memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan menghindari perbuatan dzalim.

Komponen-komponen Pemberdayaan Ekonomi

Pertama, Lembaga atau organisasi pemberdayaan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai sebuah organisasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemberdayaan masyarakat.

Kedua, Partisipasi individu dalam bentuk kelompok pemberdayaan merupakan the missing ingredient untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Karena pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting.

Upaya masyarakat miskin untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan melalui power yang dimilikinya merupakan bagian dari pembangunan manusia (personal/human development). Pembangunan manusia merupakan proses pembentukan pengakuan diri (self-respect), percaya diri (self-confident), dan kemandirian (self-reliance), dapat bekerja sama dan toleransi terhadap sesamanya dengan menyadari potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat diwujudkan dengan menimba ilmu dan keterampilan baru, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dalam komunitas mereka.

Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Di samping itu, dalam kelompok akan terjadi dialogical encounter yang dapat menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok.

Pembentukan kelompok merupakan fase awal dari sebuah pemberdayaan. Dalam hal ini masyarakat miskin diberi kebebasan untuk membentuk dan beraktivitas dalam kelompok yang

diinginkannya. Dimana pembentukan kelompok menekankan prinsip kebersamaan dengan mewujudkan semangat dan kegiatan koperatif.

Ketiga, Pembiayaan Modal Pemberdayaan dalam pemberdayaan merupakan penyaluran dana. Menggunakan istilah pembiayaan karena penyaluran dana yang dilakukan secara bertahap dan bersifat produktif.

Mekanisme pembiayaan dalam pemberdayaan dapat disebarluaskan dengan menggunakan basis kelompok pemberdayaan. Ini sebagai cara yang paling layak, efektif dan efisien untuk memberikan pembiayaan kepada orang miskin.

Keempat, Pendampingan merupakan fasilitator dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, upaya proses pendampingan dalam pemberdayaan sangat urgen, karena anggota pemberdayaan kadang menunjukkan lingkarannya ketidakberdayaan sehingga memerlukan pihak lain yang dapat berfungsi sebagai penstimulir. Dengan demikian anggota pemberdayaan perlu difasilitasi untuk dapat menjadi berdaya.

Menurut Sumodiningrat, kegiatan pendampingan dapat dilakukan oleh : 1) pendamping lokal seperti oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, aparat pemerintahan setempat, perguruan tinggi, ormas, dan lembaga swadaya masyarakat, 2) pendamping teknis dari tenaga penyuluhan departemen teknis, 3) pendamping khusus yang disediakan untuk masyarakat miskin dengan pembinaan khusus.

Kelima, Pendidikan dan Pelatihan Dalam pemberdayaan proses belajar berkulminasi dari level fisik ke level yang lebih tinggi yaitu pengetahuan. Melalui mekanisme bekerja sambil belajar, masyarakat miskin akan memperoleh berbagai pengalaman fisik, pengalaman mengorganisasi bersama, dimana tindakan bersama akan terpola dan melembaga sehingga menghasilkan pengalaman institusional. Hal ini akan sangat berguna bagi pengembangan diri masyarakat miskin.

Pengendalian Internal

International Organization of Supreme Audit Institutions menyatakan bahwa pengendalian intern sebagai suatu proses integral yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai, yang dirancang untuk menghadapi resiko-resiko, serta memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai misi dengan mencapai tujuan-tujuan umum, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib, etis, ekonomis, efisien dan efektif
2. Menyajikan laporan keuangan yang akurat dan handal
3. Mintaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengamankan sumber daya dari kehilangan, penyalahgunaan dan kerusakan asset.

Pengendalian intern menurut Boynton (2006: 391). Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi

Warens Reeve Fees (2008) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian entitas tersebut.

Pengendalian intern menurut Horngren dkk (2006: 372). Pengendalian intern adalah suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait diterapkan oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong karyawan untuk melakukan kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan keandalan pencatatan akuntansi.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengusahakan dalam mencapai suatu akhir dari kegiatan operasional maupun administrasi perusahaan. Hal ini memiliki serangkaian tindakan yang dapat meresap dan terintegrasi dalam seluruh proses pengendalian intern dan tidak perlu untuk ditambahkan kedalam infrastruktur suatu perusahaan.

Pengendalian intern dilakukan oleh pihak yang terkait dan berperan misalnya dewan direksi, manajemen dan personel perusahaan lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pengendalian intern bukan hanya suatu manual kebijakan ataupun formulir kelengkapan perusahaan, tetapi lebih ditekankan pada orang atau pihak yang berperan pada berbagai tingkatan dalam suatu perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian grounded yakni bergerak dari level empirikal menuju ke level konseptual-teoritikal. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer para pengurus masjid sebagai responden yang diambil acak dari masjid yang ada di Kota Pontianak. Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa dokumen.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan questioner. Dengan teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Setelah pengumpulan data potensi keuangan masjid, kemudian dianalisa untuk dibuatkan model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Adapun tahapan analisis data model interaktif adalah sebagai berikut : 1) Pada tahap describing, peneliti melakukan penjelajahan pengumpulan data secara umum dari masjid-masjid, dimana setiap masjid diambil secara acak. 2) Tahap classifying atau categorizing, pada tahap ini peneliti melakukan klasifikasi data dengan memperhatikan konsep-konsep potensi masjid sebagaimana disebutkan dalam bab kerangka teoritis. Sehingga potensi ekonomi masjid dapat dikategorikan. 3) Pada tahap terakhir analisis data, yakni tahap connecting peneliti melakukan konstruksi dengan cara menghubungkan kategori-kategori potensi keuangan masjid tersebut dengan bantuan teori model pemberdayaan ekonomi ataupun konsep model pemberdayaan ekonomi dari hasil penelitian yang lain sehingga dapat dibuatkan desain model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Pembahasan

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah sebagai salah satu ilmu yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan ke arah konsepsi teoritis korporasi dalam lingkungan yang dinamis dan dalam kondisi yang tidak mempunyai kepastian.

Adapun fungsi manajemen keuangan dalam suatu lembaga atau perusahaan merupakan proses perencanaan anggaran (*budgeting*) dimulai dengan *forecasting* sumber pendanaan (*source found*),

pengorganisasian kegiatan dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien, serta mengantisipasi semua resiko (*risk ability*).

Dalam melaksanakan fungsi manajemen keuangan, terdapat tujuan korporasi/lembaga antara lain:

- Untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum
- Mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang
- Mencapai hasil manajerial yang maksimum
- Mencapai pertanggungjawaban sosial dalam pengertian; peningkatan kesejahteraan dari karyawan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu korporasi/lembaga pada umumnya meliputi; Neraca (*Balance Sheets*) dan Laporan Rugi Laba (*Income Statement*). Laporan keuangan digunakan untuk berbagai macam tujuan. Setiap penggunaan yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Informasi yang didasarkan pada analisis keuangan mencakup penilaian keadaan keuangan korporasi/lembaga baik yang telah lampau, sekarang dan ekspektasi pada masa yang akan datang. Tujuan analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah dimasa depan.

Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, analisis ini digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan / lembaga. Sebelum melakukan analisis, perlu diketahui terlebih dahulu dasar-dasar dari laporan keuangan, sebagai berikut:

a. Neraca (*Balance Sheets*)

Neraca merupakan laporan tentang posisi keuangan suatu korporasi/lembaga pada waktu tertentu yang meliputi; aktiva, hutang, dan modal. Aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki oleh korporasi itu sendiri, sedangkan hutang dan modal adalah bagian dari pembelanjaan korporasi. Persamaan neraca adalah: total aktiva = total utang + modal pemilik. Seperti contoh tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Contoh Neraca Trisakti Korporasi
NERACA (dalam \$000)

Tahun	2011	2012
Aktiva Lancar: (<i>Current Assets</i>)		
Kas (<i>Cash</i>)	2.550	2.380
Surat Berharga (<i>Marketable Securities</i>)	.500	.500
Piutang (<i>Account Receivables</i>)	14.450	17.000
Persediaan Barang (<i>Inventories</i>)	19.210	20.400
Biaya Dibayar dimuka (<i>Additional Costs</i>)	.350	.520
Aktiva Lancar (<i>Total Current Assets</i>)	37.060	40.800
Aktiva Tetap: (<i>Fixed Assets</i>)		

Tanah (<i>Land</i>)	3.400	3.400
Gedung dan Mesin (<i>Plant & Building</i>)	19.040	20.910
Penyusutan Gedung dan Mesin (<i>Depreciation</i>)	(11.560)	(12.410)
Aktiva Tetap (<i>Fixed Assets</i>):	7.480	8.500
Total Aktiva: (<i>Total Assets</i>)	47.940	52.700
Hutang Lancar: (<i>Current Liabilities</i>)		
Hutang Dagang (<i>Account Payables</i>)	5.440	5.100
Wesel Bayar (<i>Bill's Payable</i>)	1.530	5.780
Gaji yang Akan Dibayar (<i>Salaries</i>)	6.460	5.270
Hutang Lain-lain (<i>Other's Acc Payable</i>)	.850	.850
Hutang Lancar (<i>Current Liabilities</i>):	14.280	17.000
Hutang Jangka Panjang: (<i>Long Term Debt</i>)		
Obligasi (<i>Bond's</i>)	18.700	18.190
Modal Pemegang Saham: (<i>Stockholder's Equity</i>)		
Modal Saham (<i>Common Stock</i>)	.170	.170
Agio Saham (<i>Stock Split</i>)	3.400	3.400
Laba yang Ditahan (<i>Retained Earnings</i>)	11.390	13.940
Total Modal (<i>Total Equity</i>):	(11.560)	(12.410)
Total Hutang dan Modal:	47.940	52.700
(<i>Total Liabilities & Stockholder's Equity</i>)		

b. Rugi Laba (*Income Statement*)

Rugi Laba adalah laporan hasil dari aktivitas atau kegiatan operasional korporasi dalam suatu periode tertentu. Laporan ini pada umumnya disusun dengan menggunakan konsep “*Accrual Basis*”. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dan biaya yang dilaporkan tidak selalu menggambarkan “*Actual Cash Flows*” selama periode tersebut.

Dengan demikian “*Net Earnings*” yang diperoleh tidak sama dengan aktual cash yang dihasilkan dari operasional korporasi. *Accrual Basis* adalah metode pencatatan pendapatan dan biaya secara akrual terpisah dari saat penerimaan atau pengeluaran tunai. *Net earnings* sama dengan *net profit* yang artinya laba bersih atau pendapatan bersih. Berikut contoh laporan Rugi Laba:

Tabel 4.2
Contoh Laporan Rugi Laba Trisakti Korporasi
Laporan Rugi Laba (*Income Statement*) (dalam \$000)

Tahun	2011	2012
Penjualan (<i>Total Sales</i>)	81.600	86.700
Harga Pokok Penjualan (<i>Cost of Goods Sold</i>)	(60.790)	(64.600)
Laba Kotor (<i>Gross Income</i>):	20.810	22.100
Biaya Operasional: (<i>Operational Cost</i>)		
Biaya Penjualan (<i>Sales Expenses</i>):	(4.900)	(5.100)
Biaya Penyusutan (<i>Depreciation</i>):	(.800)	(.850)
Biaya Administrasi & Umum (<i>Other's & Administration Expenses</i>)	(9.200)	(9.350)
<i>Laba Operasi Bersih (Net Income Before Interest & Taxes)</i>	5.910	6.800
Biaya Bunga (<i>Interest</i>)	(1.630)	(1.700)
<i>Pendapatan Sebelum Pajak: (Income Before Taxes)</i>	4.280	5.100
<i>Pajak Pendapatan (Taxes)</i>	(1.710)	(2.040)
<i>Laba Bersih (Net Income) :</i>	2.570	3.060
<i>Pembagian Laba Bersih: (Net Income For Dividends and Earnings)</i>		
<i>Dividens atas Saham (Dividens per-share):</i>	.500	.510
<i>Laba yang Ditahan (Retained Earnings)</i>	2.070	2.550
<i>Data per-Saham: (Share Info)</i>		
<i>Jumlah Saham (Total Share)</i>	100.000	100.000
<i>EPS (Earnings per-Share)</i>	25.700	30.600

Dalam kondisi tersebut terdapat dua alasan perbedaan antara *Net Income* dengan *Cash Flow*-nya, yaitu yang pertama, pendapatan dan biaya sudah dimasukkan ke dalam laporan rugi laba meskipun tidak terjadi *cash flow*. Yang kedua, biaya yang dimasukkan ke dalam laporan rugi laba bukan merupakan “*cash expenses*”, sebagai contoh; penyusutan atas aktiva tetap adalah bukan pengeluaran kas korporasi, tetapi dihitung sebagai biaya.

Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan adalah suatu penyusunan tindakan bagi korporasi/lembaga sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan merupakan tugas

manajer keuangan dalam menganalisis cacatan korporasi/lembaga yang lampau untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekayaan pemegang saham.

Perencanaan keuangan tergantung dari macam perencanaan keuangan yang dibuat. Apabila korporasi/lembaga membuat perencanaan laporan keuangan untuk suatu periode tertentu, maka dasar perencanaan yang terbaik adalah posisi laporan keuangan terakhir. Sedangkan apabila korporasi/lembaga akan membuat anggaran kas maka dasar perencanaan yang baik adalah menilainya dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode yang direncanakan. Berikut adalah dasar-dasar perencanaan keuangan;

a. Penyusunan Laporan Keuangan Pro-Forma

Proses penyusunan laporan keuangan Pro-Forma dapat dilakukan secara sederhana apabila dilakukan untuk satu periode perencanaan dan atas dasar satu kondisi tertentu, tetapi apabila untuk beberapa periode dan berdasarkan beberapa asumsi maka laporan keuangan akan menjadi rumit.

b. Proyeksi Anggaran Kas

Anggaran merupakan bentuk perencanaan aktivitas yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi pelaksanaan aktivitas tersebut. Anggaran mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang. Meskipun demikian dalam masalah *Capital Budgeting* untuk investasi aktiva tetap, pada umumnya mempunyai jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Anggaran tahunan biasanya dibagi dalam anggaran bulanan, triwulanan atau semesteran. Anggaran dikelompokkan menjadi dua yaitu anggaran keuangan dan anggaran operasional. Anggaran keuangan meliputi; Anggaran kas, Anggaran neraca dan Rugi Laba/Laporan Keuangan Pro-Forma, dan Anggaran sumber dana dan Penggunaan dana. Anggaran operasional meliputi; Anggaran penjualan, Anggaran Produksi, Anggaran Biaya administrasi, dan lain-lain.

Dalam penyusunan anggaran keuangan memiliki tiga fungsi pokok yaitu; untuk menyatakan kapan dan berapa kebutuhan keuangan perusahaan pada periode tersebut, menjadi dasar untuk mengambil tindakan koreksi saat jumlah yang dianggarkan tidak sama dengan jumlah realisasi atau jumlah sebenarnya, anggaran juga menjadi dasar untuk evaluasi kinerja perusahaan.

Penyusunan rencana keuangan tidak hanya untuk anggaran keuangan saja, akan tetapi juga untuk anggaran-anggaran yang lain untuk memahami dasar penyusunannya. Susunan rencana pada sistem penganggaran meliputi tiap-tiap sumber *cash flow* yang akan berpengaruh pada perusahaan selama periode yang direncanakan. Secara umum, suatu bisnis memanfaatkan empat macam anggaran yaitu anggaran fisik, anggaran biaya, anggaran pendapatan, dan anggaran kas.

c. Proyeksi Arus Dana (*Cash Flow*)

Proyeksi arus kas digunakan sebagai alat untuk pengendalian aliran kas (masuk dan keluar). Masa proyeksi aliran dana dibagi menjadi dua yaitu proyeksi aliran dana jangka pendek dan jangka panjang.

Proyeksi aliran dana jangka pendek (dalam satu tahun) digunakan untuk pembiayaan dan penerimaan dari operasi korporasi. Pembiayaan tersebut adalah biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan penerimaan tersebut adalah sumber dari hasil operasional.

Jenis biaya dalam proyeksi aliran dana jangka pendek adalah berdasarkan perilaku, biaya dapat digolongkan sesuai dengan tingkah laku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan yang dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Biaya Tetap (*Fixed Cost*). Adalah biaya yang jumlahnya relatif tetap, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu.
- b. Biaya Variabel (*Variable Cost*). Adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding (proporsional) dengan perubahan volume kegiatan.
- c. Biaya Semivariabel (*Semivariable Cost / Mixed Cost*). Adalah biaya yang sebagian tetap dan sebagian lagi berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.

Proyeksi aliran dana jangka panjang (lebih dari satu tahun) digunakan untuk membiayai investasi (sarana prasarana, mesin dan peralatan). Sedangkan penerimaan diramalkan dari hasil *Internal Rate of Return* (IRR). Laporan keuangan setiap tahun korporasi (*financial report*) yaitu hasil akhir dari *Income Statement*.

Implikasi operasional aliran kas dalam praktik sehari-hari berupa anggaran kas. Anggaran kas tersebut meliputi; saldo kas awal, penerimaan dan pengeluaran kas, surplus atau defisit kas.

Perencanaan dan pengendalian dalam manajemen keuangan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan/lembaga, karena didalamnya terdapat sebuah kerangka kerja. Kerangka kerja dalam perencanaan keuangan tersebut meliputi penggunaan proyeksi atas dasar standar prestasi yang ditentukan. Sedangkan pengendalian manajemen keuangan perlu adanya pengembangan mekanisme agar memperoleh umpan balik bagi korporasi/lembaga.

Analisis Sumber dan Penggunaan Dana (*Sources and Uses Funds*)

Manajer keuangan bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban keuangannya serta mendapatkan keuntungan dari peluang investasi. Untuk membantu analis menilai keputusan ini maka penting untuk mengetahui arus dana suatu perusahaan. Laporan arus dana merupakan hasil bersih atas berbagai perubahan antara dua neraca yang dapat diperbandingkan dalam tanggal yang berbeda.

Dasar dalam pembuatan laporan dana dimulai dari menentukan jumlah dan arah perubahan bersih neraca yang terjadi di antara dua tanggal neraca, kemudian mengklasifikasikan perubahan bersih neraca sebagai sumber dan penggunaan dana, serta mengkonsolidasikan informasi ini dalam format laporan sumber dan penggunaan dana. Setelah melakukan dasar-dasar tersebut, tahap selanjutnya yaitu melakukan penyesuaian agar dapat menghasilkan laporan yang sangat informatif sebagai dasar analisis.

Laporan sumber dan penggunaan dana digunakan untuk menunjukkan bagaimana dana yang diperoleh dan bagaimana penggunaan dana yang dimiliki. Berbeda dengan neraca, analisis sumber dan penggunaan dana memberikan informasi tentang bagaimana suatu korporasi/lembaga mencapai posisi tertentu. Suatu sumber dana diidentifikasi sebagai penurunan dalam nilai aktiva atau peningkatan dalam nilai pasiva. Selain untuk mengidentifikasi sumber penggunaan dana, laporan sumber dan penggunaan dana juga digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik pembiayaan yang tidak benar. Cara yang paling sederhana untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana adalah dengan menghitung perbedaan atau selisih antara rekening-rekening neraca dan informasi dari laporan rugi laba.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dimana pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara profesional guna memaksimalkan potensi keuangan masjid agar menjadi lebih baik. Permasalahan yang banyak dihadapi dalam pengelolaan masjid mulai dari dana masjid yang kurang produktif, minimnya kegiatan-kegiatan masjid serta terjadi kesenjangan antar masjid-masjid yang ada di Kota Pontianak.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah bagi pengurus masjid hendaknya menjadikan dana masjid lebih produktif tidak hanya menumpuk didalam rekening masjid saja. Membuat kegiatan rutin seperti kajian harian atau mingguan agar masjid menjadi lebih makmur serta pengurus masjid hendaknya meminimalisir kesenjangan antar masjid dengan cara saling membantu keperluan pendanaan bagi masjid yang sedang membutuhkan untuk keperluan renovasi atau yang semisalnya.

Daftar Pustaka

- Alfitri. 2011. *Community Development : Teori dan Aplikasi*, Cetakan ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aminudin, Teukeu. 2008. *Masjid Dalam Pembangunan*. Yogyakarta : UII.
- Asqalani, al, Ibnu hajar. 1997. *Fathul Qarib Syarah Shahih al Bukhari*. Jilid 3. Riyad : Maktabah Darussalam.
- Ayub, Moh. E dkk. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta : Gema Insani Press
- Azra, Azyumardi. 2003. *Berderma Untuk Semua*. Jakarta : Mizan Publika. Chapra,M. Umar. tt. *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*, UK : The Islamic Foundation, Leicester
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dalmeri, 2014. *Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural*. Jurnal Walissongo. Vol.22 No.2
- Dusuki, Asyraf Wajdi. "Empowering Islamic Microfinance: Lesson from Group-Based Lending Scheme and Ibn Khaldun's Concept of „Asabiyah", presented at *Monash University 4th International Islamic Banking and Finance Conference*. Kuala Lumpur, on 13- 14 November, 2006
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment : The Politics of Alternative Development*, Malden : Blackwell Publishers.
- Hafidudin, Didin, dkk, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang Untuk Menyelamatkan Umat*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2009. *Politik Santri*. Yogyakarta : Kanisius Munawir, Ahmad Warson. 1984. Al Munawir Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta : Ponpes Krapyak.

- Muslim, Azis. *Manajemen Pengelolaan Masjid*, Aplikasia : Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. V No. 2 Desember 2004. P. 105 – 114
- Nahdi, Khirjan. *Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral*. Islamica, Volume 7, No. 2 Tahun 2013, h. 381-405
- Nasafi, al. tt. *Tafsir al Nasafi*, Jilid 4, Beirut : Darul Kutub Al-Arabi. Robbins, T.L. M.D. Crino, L.D. *Fredendall, An integrative model of the empowerment process*, Human Resource Management Review 12 (2002) 419–443. 2002 Published by Elsevier Science Inc.
- Roqib, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam : Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta : LKiS
- Ruslan, Ismail, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak*. Jurnal Katulistiwa-Journal of Islamic Studies.Vol.2 Nomor 1.
- Sani, M Anwar. 2010. *Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwat, Ahmad. 2012. *Fiqh Kehidupan*. Jakarta : DU Publising.
- Sasono, Adi. 2008. *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*. Jakarta : Alvabet dan Dekopi.

STUDI BIBLIOGRAFI
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DALAM PENELITIAN AKUNTANSI DI INDONESIA

Nina Febriana Dosinta¹, Nur Fitriana Hamsyi²

^{1,2}*Universitas Tanjungpura, Pontianak*

nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mereview pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penelitian akuntansi di Indonesia. Sampel penelitian akuntansi di Indonesia diambil dari 17 jurnal akuntansi dan *accounting journal* terakreditasi yang terindeks *Science and Technology Index* (SINTA) peringkat 2 dengan jumlah 92 artikel. Dengan menerapkan metode *charting the field*, peninjauan pengungkapan CSR dilakukan mulai tahun 2007, mengingat program tanggungjawab sosial harus dilakukan pada Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007. Pengungkapan CSR dalam penelitian akuntansi di Indonesia mengalami puncaknya pada tahun 2017, tepat satu dasawarsa regulasi tanggung jawab sosial pada PT. Selama 12 tahun terakhir, pengungkapan CSR dalam penelitian akuntansi di Indonesia di dominasi *legitimacy theory* dan teori *stakeholder* dengan analisis *analytical*.

Kata kunci: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, penelitian akuntansi, *legitimacy theory*, teori *stakeholder*, analisis *analytical*.

Pendahuluan

Tanggung jawab sosial merupakan suatu keharusan bagi sebuah perusahaan karena dampak dari kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dapat mengubah *setting* lingkungan sosial masyarakat dari segala aspek kehidupan (Rismawati, 2015). Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA (Sumber Daya Alam) diatur dalam regulasi UU (Undang-Undang) No. 40 Tahun 2007 tentang perusahaan yang memuat bahwa PT wajib melaksanakan tanggung jawab sosial.

Perkembangan CSR di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori *discretionary responsibilities* dapat dilihat dari dua perspektif berbeda, pertama, CSR memang merupakan suatu praktik bisnis secara sukarela, artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 74, kedua, CSR bukan lagi merupakan *discretionary business practice*, melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh UU yang bersifat *mandatory* (Soedaryono & Riduifana, 2017).

Sudah selayaknya tanggung jawab sosial atau CSR menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian oleh perusahaan, mengingat keberadaan perusahaan tidak terlepas dari adanya lingkungan sosial (Hamsyi & Dosinta, 2018). Dampak negatif berupa kesenjangan sosial muncul seiring dengan perkembangan perusahaan, memunculkan kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dengan melakukan program CSR, dimana CSR tidak dianggap sebagai beban namun dianggap sebagai

investasi oleh perusahaan (Astarani & Siregar, 2016). CSR secara klasik menilai pihak internal sebagai *stakeholder* yang paling diutamakan, sedangkan dalam sosial ekonomi menjadikan masyarakat sebagai *stakeholder* yang harus mendapatkan keutamaan dari perusahaan (Apriliani & Abdullah, 2018).

Praktik pelaporan perusahaan merupakan bagian dari implementasi perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi para *stakeholders* dalam menjelaskan strategi dan kinerja perusahaan (Dosinta, Brata, & Heniwati, 2018a). Perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan CSR melalui pengungkapan dalam laporan tahunan. Dengan adanya pengungkapan CSR, perusahaan mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, diantaranya menjaga keberadaan perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015). Penyajian pelaporan CSR mengungkapkan peran perusahaan dalam menerapkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta upaya perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholders* (Dosinta, Brata, & Heniwati, 2018b).

Setiap pelaku ekonomi selain berusaha memenuhi kepentingan *shareholders* dalam mengkonsentrasiakan pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (IAI, 2016), pada paragraf kesembilan yaitu, perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu) (Suparjan & Mulya, 2012).

Praktik pengungkapan CSR bisa menginformasikan dampak sosial perusahaan kepada *stakeholders* (Unerman, 2000), yang juga bisa mengungkapkan masalah akuntansi sosial dan kepedulian terhadap masyarakat (Gololo, 2019). Praktik ini merupakan wujud pelaksanaan akuntabilitas dan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial (Adams, Frost, & Webber, 2004; Burritt, 2014; Unerman, 2000). Kajian CSR semakin berkembang pesat seiring banyak kasus yang terjadi dimana perusahaan tidak memberikan kontribusi positif secara langsung kepada masyarakat (Cheng & Christiawan, 2011).

Penelitian ini termotivasi oleh penelitian yang dilakukan (Dewi, Fitriana, & Setiawan, 2018) mengenai penelitian bibliografi pada praktik pengungkapan informasi perusahaan. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan Dewi et al., (2018) memaparkan bahwa pengungkapan berbasis CSR adalah yang paling banyak diteliti karena kemungkinan dianggap menyangkut banyak pihak terutama masyarakat umum dan banyak menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik pengungkapan CSR dalam bentuk bibliografi.

Pengungkapan CSR sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk meminimalkan *legitimacy gap* melalui peningkatan kesesuaian antara operasional perusahaan dan pengharapan masyarakat (Lindawati & Puspita, 2015). CSR dan pelaporan CSR adalah alat legitimasi untuk menunjukkan kepatuhannya, dalam hal ini merupakan unsur dari *legitimacy theory* (Asmeri, Alvionita, & Gunardi, 2017). Di Indonesia yang merupakan negara berkembang, perusahaan-perusahaan menerapkan CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders* (Margaretha & Witedjo, 2017). Pengungkapan CSR kemudian menjadi media bagi perusahaan untuk memberikan informasi dari berbagai aspek selain keuangan seperti aspek sosial dan lingkungan yang tidak dapat dijelaskan

secara tersirat dalam setiap komponen dalam laporan keuangan perusahaan kepada *stakeholders* maupun *shareholders* perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015).

Berpjik dari penelitian Dewi et al., (2018) yang menggunakan artikel yang *published* pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 serta belum mengaitkan dengan teori yang digunakan dalam studi bibliografi, penelitian ini mencoba mengaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian akuntansi untuk topik pengungkapan CSR dengan artikel yang *published* sampai dengan Juli 2019. Penelitian ini penting dilakukan mengingat CSR sudah selayaknya menjadi perhatian perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek akademis dan praktis. Manfaat dalam aspek akademis berupa pemahaman yang berkaitan dengan teori dan metode yang digunakan untuk pengungkapan CSR pada penelitian akuntansi di Indonesia dalam studi bibliografi. Sedangkan dalam aspek praktis, pemahaman yang didapat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam membuat keputusan perusahaan.

Guna mencapai tujuan tersebut, rancangan struktur penelitian adalah sebagai berikut: pendahuluan digunakan untuk memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan rancangan struktur penelitian. Berikutnya kajian literatur yang menguraikan kajian teoritis dan empiris. Kemudian metodologi digunakan untuk memaparkan metode dan pendekatan penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan digunakan untuk memaparkan hasil temuan untuk pengungkapan CSR pada penelitian akuntansi di Indonesia dalam studi bibliografi. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi digunakan untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

Kajian Literatur

Legitimacy theory merupakan suatu ide pentingnya kontrak yang bersifat sosial antara perusahaan dengan masyarakat (Deegan, 2007). Lindbloom (1994) dalam (Deegan, 2007) memaparkan bahwa dalam kontrak yang bersifat sosial, perusahaan harus dapat menghargai harapan dari masyarakat. Betapa pentingnya kontrak yang bersifat sosial antara perusahaan dan masyarakat menunjukkan keterwakilan harapan masyarakat secara implisit dan eksplisit, yang ditujukan agar perusahaan melakukan sesuatu kegiatan sesuai harapan masyarakat tersebut (Deegan, 2007; Rankin, Stanton, McGowan, Ferlauto, & Tilling, 2012). Legitimasi merupakan salah satu alasan pentingnya keberadaan perusahaan, oleh karena itu perusahaan melakukan berbagai pendekatan ke masyarakat untuk mendapatkan legitimasi (Chariri & Nugroho, 2009).

Agusti & Rahman, (2011) berpendapat bahwa dalam *legitimacy theory*, pengungkapan CSR dalam laporan tahunan merefleksikan kegiatan operasional perusahaan yang berlangsung sesuai dengan sistem serta nilai-nilai yang dipegang dalam masyarakat. Agusti & Rahman, (2011) berpendapat lebih lanjut bahwa berdasarkan *legitimacy theory*, suatu perusahaan harus dapat memperlihatkan keberadaannya, sehingga kegiatan operasional perusahaan bisa diterima serta sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya *legitimacy theory* dalam kebijakan perusahaan, pernyataan perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat yang implisit dan eksplisit dari hasil kontrak sosial, menunjukkan keberadaan institusi tersebut di mata masyarakat (Dosinta, Brata, & Heniwati, 2017).

Peran nyata yang telah dilakukan perusahaan dapat ditunjukkan melalui pengungkapan dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi sosial lingkungan merupakan dialog antara perusahaan dengan *stakeholders* yang memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang selanjutnya dapat mengubah persepsi dan ekspektasi (Adams & McNicholas, 2007). Pengungkapan tersebut

dilakukan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para *stakeholders* serta mendapatkan dukungan dari para *stakeholders* demi kelangsungan hidup suatu perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015).

Lindawati & Puspita, (2015) menegaskan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap *stakeholders* yang ada, CSR dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para *stakeholders* akan informasi non keuangan perusahaan terkait dampak sosial yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan.

Metodologi

Mengingat tujuan penelitian utama untuk menelusuri pengungkapan CSR dalam penelitian akuntansi di Indonesia, penelitian ini menerapkan metode *charting the field* yang dikembangkan Hesford, Lee, Van der Stede, & Young, (2007) yang juga digunakan Dewi et al., (2018). Pendekatan dalam penelitian ini menawarkan keunggulan spesifik. Pertama, memungkinkan pengungkapan CSR dipahami pada konteks bibliografi dalam penelitian akuntansi. Kedua, penerapan metode *charting the field* memungkinkan penyelidikan dilakukan dengan cara yang tidak dibatasi oleh asumsi bahwa perubahan pelaporan bisnis terdapat sesuatu hal yang dapat dipelajari lebih mendalam (Carnegie & Napier, 1996).

Tabel 1
Daftar Nama Jurnal Akuntansi dan Accounting Journal
Terindeks SINTA Peringkat 2 Sebagai Sampel Penelitian

No.	Nama Jurnal	Institusi	H5-Index	Citations	Jumlah artikel
1.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)	Universitas Kristen Petra	24	3516	6
2.	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)	Universitas Islam Indonesia	23	3138	6
3.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI)	Universitas Indonesia	23	2439	3
4.	Jurnal Dinamika Akuntansi (JDA)	Universitas Negeri Semarang	17	859	4
5.	Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)	Universitas Brawijaya	15	1351	11
6.	Jurnal Akuntansi dan Investasi (Jai)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	12	946	4
7.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)	Universitas Udayana	12	878	6
8.	Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi	Universitas Trisakti	11	860	8
9.	Jurnal Akuntansi	Universitas Tarumanagara	9	338	4
10.	Jurnal Reviu Akuntansi dan	Universitas	9	294	7

Keuangan		Muhammadiyah Malang				
No.	Nama Jurnal	Institusi	H5-Index	Citations	Jumlah artikel	
11.	Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia	Universitas Muhammadiyah Surakarta	8	322	4	
12.	AKRUAL : Jurnal Akuntansi	Universitas Negeri Surabaya	7	327	3	
13.	ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan	Universitas PGRI Madiun	7	265	3	
14.	<i>Indonesian Journal Of Sustainability Accounting And management (IJSAM)</i>	Universitas Pasundan	7	198	8	
15.	Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)	Universitas Syiah Kuala	7	175	13	
16.	<i>International Business And Accounting Research Journal</i>	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung	6	164	1	
17.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis	Universitas Sebelas Maret	5	130	1	
Total					92	

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel yang diterbitkan dengan topik CSR pada jurnal akuntansi dan *accounting journal* yang terindeks SINTA peringkat 1 dan 2. Peneliti memilih jurnal akuntansi dan *accounting journal* yang terindeks SINTA peringkat 1 dan 2 sebagai bahan pengamatan karena artikel diterbitkan telah melalui proses penyeleksian yang lebih ketat sehingga artikel yang diterbitkan memiliki kredibilitas dan kualitas sesuai dengan standar kualifikasi SINTA peringkat 1 dan 2.

Dalam penelitian ini, terdapat empat tahap pemilihan sampel. Pertama, peneliti mencari data mengenai jurnal akuntansi dan *accounting journal* dengan mengetik “akuntansi” dan “accounting” pada jurnal yang terindeks SINTA peringkat 1 dan 2 di <http://sinta2.ristekdikti.go.id>. Jurnal akuntansi dan *accounting journal* yang terindeks SINTA 1 berjumlah 0 (nol) jurnal dan yang terindeks SINTA peringkat 2 berjumlah 17 (tujuh belas) jurnal. Selanjutnya,. Kedua, peneliti membuka satu persatu portal jurnal akuntansi dan *accounting journal* yang terindeks SINTA peringkat 1 dan 2. Ketiga, peneliti mengetik kata “pengungkapan tanggungjawab sosial”, kemudian mengetik kembali “pengungkapan CSR” dan juga mengetik “CSR disclosure” di setiap jurnal akuntansi dan *accounting journal*, pada kolom *search*. Pada tahap ketiga ini setelah memasukkan *keywords*, peneliti membuka satu per satu artikel pada masing-masing jurnal tersebut kemudian men *download* setiap artikel terkait. Daftar jurnal akuntansi dan *accounting journal* beserta asal institusi berjumlah 17 dengan total 92 (sembilan puluh dua) artikel sebagai sampel penelitian pada Tabel 1 berdasarkan peringkat masing-masing jurnal pada SINTA peringkat 2, *H5-Index* dan *Citations* sampai dengan Juli 2019.

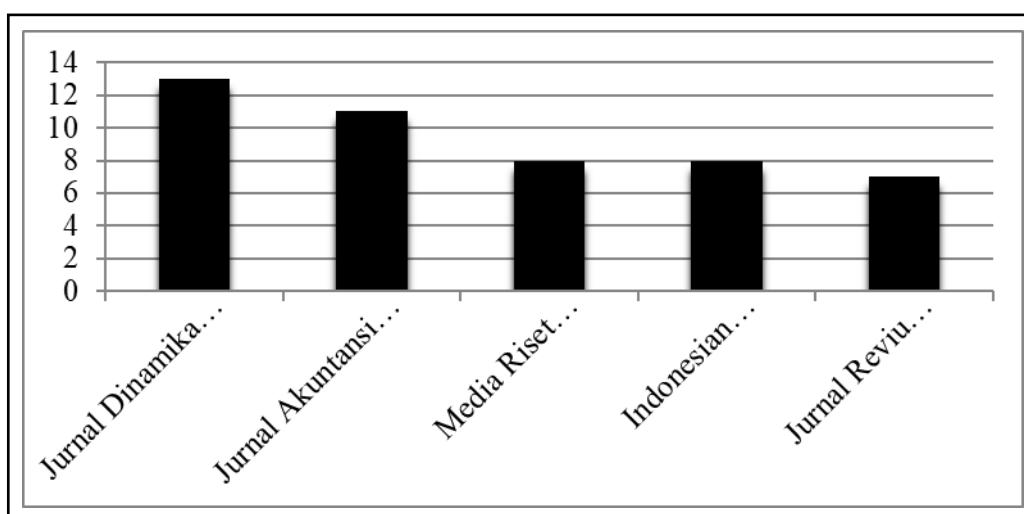
Belum terdapatnya jurnal akuntansi dan *accounting journal* dalam jurnal yang terindeks SINTA peringkat 1 menyebabkan 92 (sembilan puluh dua) artikel yang menjadi sampel dalam

penelitian ini berasal dari jurnal terakreditasi yang terindeks SINTA peringkat 2. Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi berdasarkan publikasi jurnal, nama penulis artikel, tahun terbit, judul artikel, teori, metode, dan sitasi pada artikel.

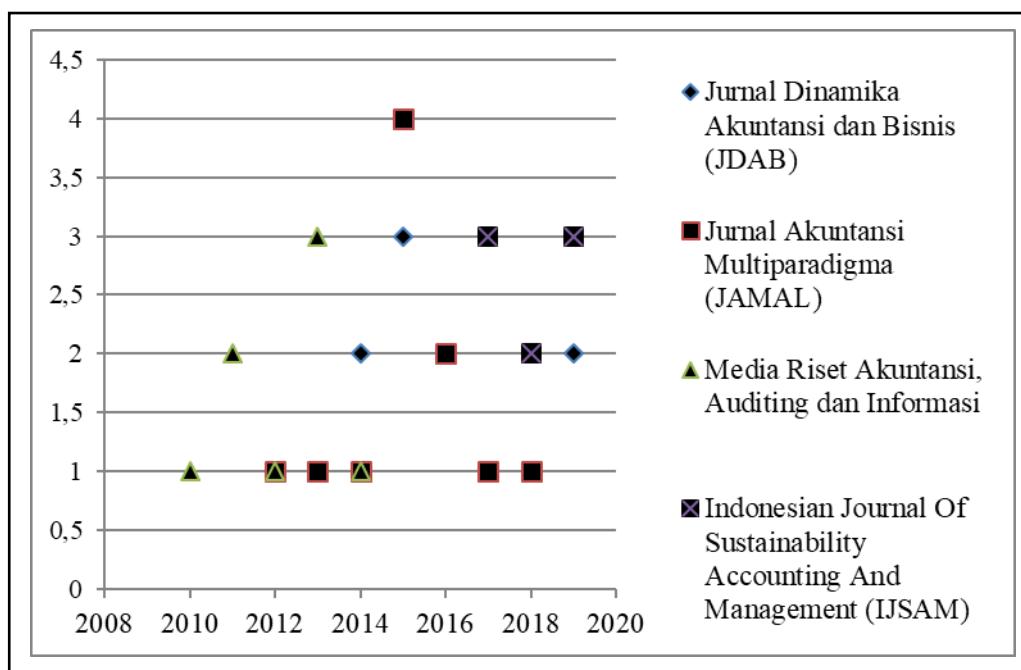
Pemilihan jurnal yang menjadi data dalam penelitian ini menggunakan beberapa kriteria. Pertama, jurnal akuntansi dan *accounting journal* yang terindeks SINTA peringkat 1 dan 2. Kedua, jurnal-jurnal tersebut dapat diakses melalui OJS (*Open Access Journal*). Ketiga, artikel yang digunakan bersinggungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial atau pengungkapan CSR atau *CSR disclosure* dalam bentuk *full paper*.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan pemetaan 92 artikel, terdapat 5 jurnal yang menerbitkan artikel pengungkapan CSR dengan jumlah terbanyak. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) sebanyak 13 (tiga belas) artikel, Jurnal Akuntansi Multiparadigma sebanyak 11 (sebelas) artikel, Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi sebanyak 8 (delapan) artikel, Indonesian Journal Of Sustainability Accounting And Management (IJSAM) sebanyak 8 (delapan) artikel, serta Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) artikel. Gambar 1 menunjukkan pemetaan 5 (lima) jurnal yang menerbitkan artikel pengungkapan CSR dengan jumlah terbanyak.



Gambar 1
Pemetaan 5 (lima) jurnal yang menerbitkan artikel pengungkapan CSR



Gambar 2
Rentang Waktu Pemetaan 4 (empat) jurnal
yang menerbitkan artikel pengungkapan CSR

Pada tahun 2015, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) menerbitkan artikel pengungkapan CSR berjumlah 4 (empat), sedangkan Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis menerbitkan pengungkapan CSR berjumlah 3 (tiga). Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi menerbitkan artikel pengungkapan CSR berjumlah 3 pada tahun 2013, sedangkan Indonesian Journal Of Sustainability Accounting And Management (IJSAM) berjumlah 3 (tiga) pada tahun 2017. Rentang Waktu Pemetaan 4 (empat) jurnal yang menerbitkan artikel pengungkapan CSR yang terdapat pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 2015 serta tahun 2017 jurnal yang menerbitkan artikel pengungkapan CSR masing-masing tahun tersebut sebanyak 3 (tiga) artikel.

Tabel 2
Tahun Pemetaan Publikasi Jurnal

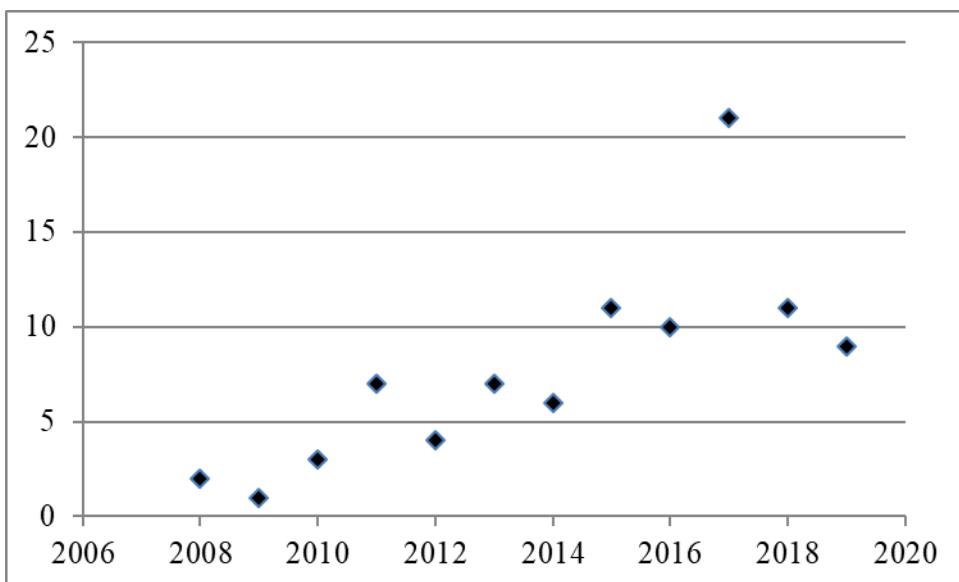
No.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	T
1.	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	6
2.	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	6
3.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
4.	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4
5.	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	2	-	11
6.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4
7.	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	6
8.	-	-	1	2	1	2	-	-	-	2	-	-	8
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4
10.	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	-	7
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4
12.	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3

13.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3
15.	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	1	2
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	2	1	3	7	4	7	6	11	10	21	11	9
												92

Keterangan:**No. Nama Jurnal**

1. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)
2. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)
3. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI)
4. Jurnal Dinamika Akuntansi (JDA)
5. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)
6. Jurnal Akuntansi dan Investasi (Jai)
7. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)
8. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi
9. Jurnal Akuntansi
10. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan
11. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
12. AKRUAL : Jurnal Akuntansi
13. ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan
14. *Indonesian Journal Of Sustainability Accounting And management* (IJSAM)
15. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)
16. *International Business And Accounting Research Journal*
17. Jurnal Akuntansi dan Bisnis

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 3 menunjukkan pada tahun 2017, jurnal yang menerbitkan artikel pengungkapan CSR pada jumlah terbanyak yaitu 21 (dua puluh satu) artikel. Artinya, 10 tahun setelah tahun 2007, jumlah artikel yang diterbitkan jurnal akuntansi dan *accounting journal* pada SINTA peringkat 2 mengalami puncaknya. Jumlah artikel yang diterbitkan terbanyak pada tahun 2017, ternyata tidak dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Terlihat pada tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) artikel.



Gambar 3
Rentang Waktu Pemetaan Publikasi Jurnal

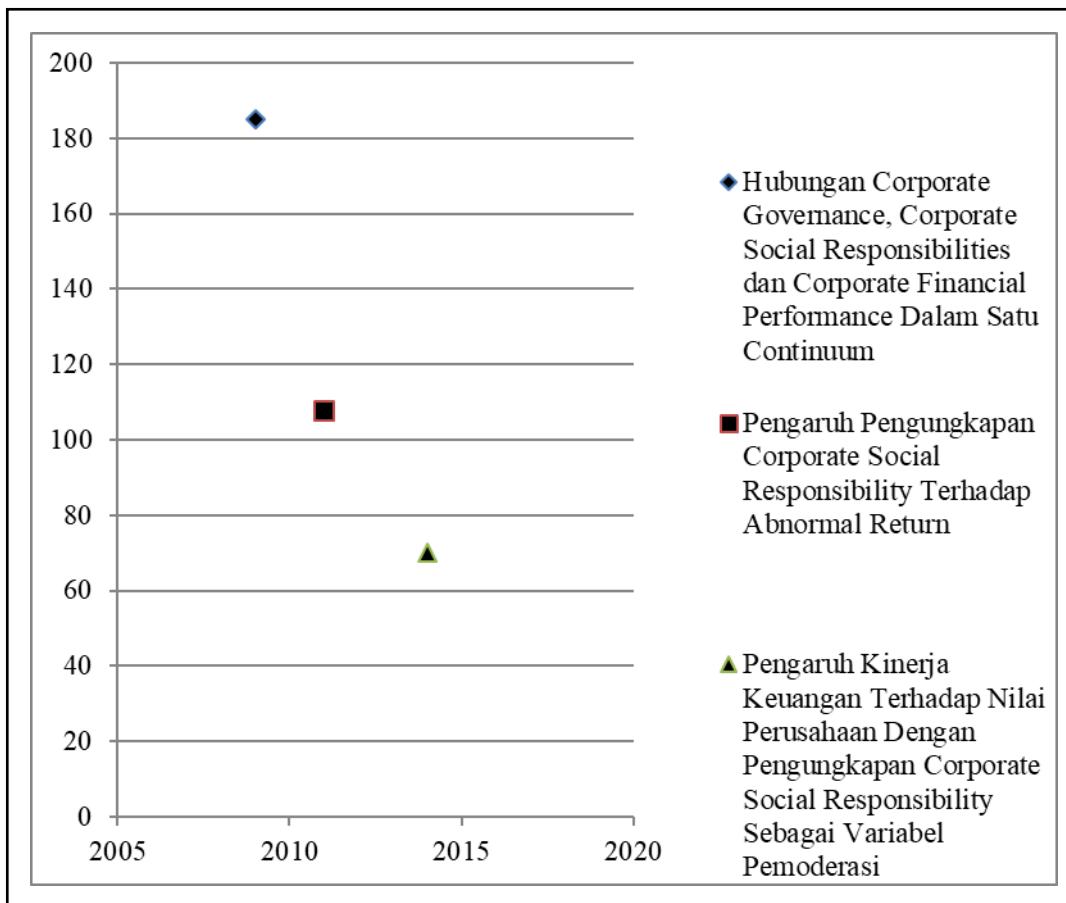
Jurnal yang menerbitkan artikel pengungkapan CSR di dominasi dengan *legitimacy theory* dan teori *stakeholder*, diikuti dengan *signaling theory*, *agency theory*, teori akuntansi positif, *stewardship theory*, serta *slack resource theory*.

Dewi et al., (2018) memaparkan bahwa metode penelitian yang dibahas dalam penelitiannya diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *analytical*, *survey* dan *literature review*. Selanjutnya Dewi et al., (2018) menjelaskan bahwa metode *analytical* adalah para peneliti menggunakan berbagai teknik analisis data seperti regresi berganda, analisis deskriptif, *content analysis* dengan menggunakan berbagai alat misalnya SPSS, SEM, E-Views dan Amos untuk menguji hubungan antar variabel, selanjunya metode *literature review* adalah para peneliti melakukan perbandingan atau studi kasus mengenai laporan keuangan dan pengujian kembali indeks serta teori, berikutnya metode *survey* adalah peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan skala likert untuk mengetahui persepsi penyedia laporan keuangan dan pemaknaan laporan keuangan. Metode *analytical* adalah metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian Dewi et al., (2018). Dalam penelitian akuntansi di Indonesia, selama 12 tahun sejak tahun 2007 berkenaan dengan pengungkapan CSR, di dominasi metode *analytical*.

Pada Gambar 4 menunjukkan artikel Murwaningsari, (2009) yang berjudul Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum yang diterbitkan Jurnal Akuntansi dan Keuangan dari Universitas Petra memiliki jumlah sitasi 185. Dilanjutkan artikel Cheng & Christiawan, (2011) yang berjudul Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Abnormal Return* yang diterbitkan Jurnal Akuntansi dan Keuangan dari Universitas Petra memiliki jumlah sitasi 108. Berikutnya artikel Hermawan & Maf'ulah, (2014) yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan *Corporate Social* yang diterbitkan Jurnal Dinamika Akuntansi (JDA) dari Universitas Negeri Semarang memiliki jumlah sitasi 70.

Penelitian Murwaningsari, (2009) bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara struktur *Corporate Governance* yang diprosikan sebagai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial terhadap CSR dan CSR terhadap *corporate financial performance*. Penelitian Murwaningsari, (2009)

menggunakan data sekunder dari laporan tahunan 2006 perusahaan publik yang terdapat di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian Murwaningsari, (2009) sebanyak 126 perusahaan dengan hasil penelitian melalui pendekatan analisa jalur (*path analysis*) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yaitu kepemilikan managerial dan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan, selanjutnya *Good Corporate Governance* yang diamati melalui kepemilikan managerial dan institusional, mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR.



Gambar 4
Citations Publikasi Artikel Pengungkapan CSR
 Dalam Penelitian Akuntansi Di Indonesia

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengungkapan CSR dalam penelitian akuntansi di Indonesia mengalami puncaknya pada tahun 2017, tepat satu dasawarsa regulasi tanggung jawab sosial pada PT. Selama 12 tahun terakhir, pengungkapan CSR dalam penelitian akuntansi di Indonesia, di dominasi *legitimacy theory* dan teori *stakeholder* dengan analisis *analytical*. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan dominasinya *legitimacy theory* dan teori *stakeholder* pada pengungkapan CSR dalam penelitian akuntansi di Indonesia, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk mengaitkan dengan *Shariah Enterprise Theory* seperti yang telah dilakukan Hamsyi & Dosinta, (2018) berkenaan dengan penelitian pada pengungkapan CSR.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (FEB UNTAN) yang telah memberikan dukungan melalui DANA DIPA No. 3041/UN 22.2/PL/2019 tanggal 22 April 2019.

Referensi

- Adams, C. A., & McNicholas, P. (2007). Making A Difference Organisational Change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(3), 382–402. <https://doi.org/10.1108/09513570710748553>
- Adams, C., Frost, G., & Webber, W. (2004). Triple Bottom Line: A Review of The Literature. In A. Henriques & J. Richardson (Eds.) (pp. 17–25). London: Earthscan.
- Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2011). Relevansi Informasi Akuntansi : Peran Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Dewan Komisaris Independen. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia*, 15(2), 121–129.
- Apriliani, M., & Abdullah, M. W. (2018). Falsafah Kesenian Tanjidor Pada Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 377–393. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9023>
- Asmeri, R., Alvionita, T., & Gunardi, A. (2017). CSR Disclosures in the Mining Industry : Empirical Evidence from Listed Mining Firms in Indonesia. *Indonesian Journal Of Sustainability Accounting And Management*, 1(1), 16–22. <https://doi.org/10.28992/ijsam.v1i1.23>
- Astarani, J., & Siregar, J. S. (2016). Pengaruh Return On Assets (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 5(1), 49–76.
- Burritt, R. L. (2014). Environmental Performance Accountability : Planet, People, Profits. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 25(2), 370–405. <https://doi.org/10.1108/09513571211198791>
- Carnegie, G. D., & Napier, C. J. (1996). Critical and Interpretive Histories : Insights into Accounting's Present and Future Through Its Past. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(3), 7–39.
- Chariri, A., & Nugroho, F. A. (2009). Retorika Dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility : Analisis Semiotik Atas Sustainability Reporting. In *Simposium Nasional Akuntansi ke-12* (pp. 1–24). Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Cheng, M., & Christiawan, Y. J. (2011). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 24–36.
- Deegan, C. (2007). *Financial Accounting Theory*. Singapore: Mc Graw Hill.
- Dewi, A. C., Fitriana, A., & Setiawan, D. (2018). Perkembangan Penelitian Di Bidang Pengungkapan Di Indonesia : Telaah Konseptual. *Jurnal Siasat Bisnis*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol22.iss1.art1>
- Dosinta, N. F., Brata, H., & Heniwati, E. (2017). Implikasi Legitimacy Theory Dalam CSR Bank Kalbar Untuk Peningkatan Kualitas SDM di Kalimantan Barat. In S. N. Panjaitan, N. Bariyah, & Z. Zain (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPT)* (pp. 5–16). Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Dosinta, N. F., Brata, H., & Heniwati, E. (2018a). Haruskah Value Creation Hanya Terdapat Pada

- Integrated Reporting? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 248–266.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9015>
- Dosinta, N. F., Brata, H., & Heniwati, E. (2018b). Studi Eksploratif Pengungkapan Multiple Capitals Dalam Integrated Reporting. In S. N. Panjaitan, N. Bariyah, & Z. Zain (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPT)* (pp. 85–96). Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Gololo, I. A. (2019). Corporate Social Responsibility Disclosure And Financial Performance Of Quoted Nigerian Cement Companies. *International Business And Accounting Research Journal*, 3(2), 89–106.
- Hamsyi, N. F., & Dosinta, N. F. (2018). Pengungkapan Corporate Social Responsibility PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Berdasarkan Sharia Enterprise Theory. In J. Astarani (Ed.), *Konferensi Akuntansi Khatulistiwa 2018* (pp. 93–104). Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
- Hermawan, S., & Maf'ulah, A. N. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(2), 103–118.
- Hesford, J. W., Lee, S. H., Van der Stede, W. A., & Young, S. M. (2007). *Management Accounting: A Bibliographic Study*. Elsevier Ltd.
- IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per Efektif 1 Januari 2017. Jakarta: Divisi Penerbitan IAI.
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 157–174. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>
- Margaretha, F., & Witedjo, C. G. (2017). CSR, Nilai Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Industri Pertambangan Dan Manufaktur Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 14(1), 89–115. <https://doi.org/10.25105/mraai.v14i1.1754>
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 30–41. <https://doi.org/10.9744/jak.11.1.pp.30-41>
- Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., Ferlauto, K., & Tilling, M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. Milton Qld: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Rismawati. (2015). Memaknai Program Corporate Social Responsibility : Suatu Kajian Proses Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 245–253. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6020>
- Soedaryono, B., & Riduifana, D. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Corporate Social Responsibility. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 13(1), 1–35. <https://doi.org/10.25105/mraai.v13i1.1735>
- Suparjan, A., & Mulya, A. S. (2012). Pengaruh Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Intervening terhadap Nilai Perusahaan. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 12(3), 27–59.
- Unerman, J. (2000). Methodological issues - Reflections on quantification in corporate social reporting content analysis. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(5), 667–681. <https://doi.org/doi.org/10.1108/09513570010353756>

**PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MAHASISWA (STUDI KASUS DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA)**

Hernawan dan Juanda Astarani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepercayaan diri mahasiswa terhadap prestasi belajar mereka dengan lokasi penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura pada Prodi Akuntansi. Dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan alat uji hipotesis yaitu uji t dengan menggunakan software WarpPLS6.0. Diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Keyakinan diri berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan sementara Sikap Positif dan Memanfaatkan Kelebihan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa prodi S1 Akuntansi FEB Untan.

Kata Kunci : kepercayaan, keyakinan, prestasi belajar.

Pendahuluan

Perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga yang menyelenggarakan proses belajar mengajar dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi setiap perguruan tinggi, sehingga para civitas akademika diarahkan untuk mampu mengaktualisasikan dirinya secara professional berdasarkan tugasnya masing-masing. Hasil nyata keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar dapat dilihat dari prestasi belajar mahasiswanya. Diharapkan para mahasiswa ini memperoleh prestasi belajar setinggi-tingginya. Hal ini dapat dilihat dari hasil akhir proses belajar mengajar, yaitu nilai akhir mahasiswa di setiap mata kuliah yang ditempuh. Jika nilai akhir mahasiswa itu baik, hal tersebut menandakan bahwa prestasi belajarnya baik dan proses transfer pengetahuan dari pengajar ke peserta didik dapat dikatakan berhasil. Jadi dapat dikatakan bahwa prestasi belajar mahasiswa yang ditunjukkan dengan nilai akhir pada mata kuliah yang ditempuhnya merupakan umpan balik dari berbagai hal seperti kemampuan, kelelahan, kekurangan, dan potensi yang dimilikinya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa di dalam kelas. Adjani dan Adam (2013:8) melakukan riset dengan menggunakan faktor pengalaman belajar, motivasi, lingkungan keluarga, dan kualitas pengajaran sebagai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengalaman dan motivasi belajar mahasiswa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajarnya, sedangkan lingkungan keluarga dan kualitas pengajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Adjani dan Adam juga mengungkapkan bahwa jika mahasiswa tersebut menaruh minat pada satu pelajaran atau mata kuliah tertentu, biasanya cenderung untuk menyimak dan memahami materi perkuliahan yang diberikan dan memberikan dampak positif bagi prestasi belajar. Begitu juga dengan motivasi. Mahasiswa yang memiliki motivasi yang kuat dan tinggi akan memperbesar usaha dan kegiatannya untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi.

Prestasi belajar mahasiswa merupakan hal yang menjadi sorotan utama bagi kualitas dari seorang pendidikan itu sendiri. Setiap peserta didik memiliki prestasi yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan yang mereka miliki, biasanya digolongkan menjadi tiga yakni prestasi yang tinggi, sedang dan rendah. Dalam tingkat SD, SMP dan SMA prestasi belajar ditandai dengan nilai raport pada setiap tahun, sedangkan pada perguruan tinggi prestasi belajar ditandai dengan IPK (Indeks Prestasi Komulatif) yang merupakan akumulasi dari seluruh nilai pada setiap semester.

Setiap mahasiswa bersaing untuk memperoleh prestasi yang sesuai dengan ekspektasi yang telah mereka tentukan. Namun, tidak semua individu dapat memperoleh prestasi belajar yang baik, bahkan tidak jarang pula seorang individu demi memperoleh prestasi yang baik, dapat melakukan tindakan yang tidak diharapkan, misalnya saja memperoleh nilai yang baik dengan cara mencontek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat percaya diri yang merupakan aspek pribadi yang melekat pada diri individu itu sendiri.

Seseorang yang memiliki latar belakang yang mendukung akan memperoleh tingkat percaya diri yang tinggi sehingga mampu bersosialisasi dengan baik. Percaya diri atau self confidence adalah aspek kepribadian yang penting pada diri seseorang. Tanpa adanya kepercayaan diri maka akan banyak menimbulkan masalah pada diri seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya kepercayaan diri, seseorang mampu mengaktualisasikan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Sifat percaya diri ini juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Mahasiswa yang memiliki sifat percaya diri yang tinggi akan mudah berinteraksi dengan mahasiswa lainnya, mampu mengeluarkan pendapat tanpa ada keraguan dan menghargai pendapat orang lain, mampu bertindak dan berpikir positif dalam pengambilan keputusan, sebaliknya mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah akan sulit untuk berkomunikasi, berpendapat, dan akan merasa bahwa dirinya tidak dapat menyaingi mahasiswa yang lain.

Perbedaan tingkat percaya diri yang dimiliki individu tentu akan mempengaruhi perolehan prestasi belajar. Individu yang memiliki percaya diri yang tinggi akan memperoleh prestasi yang baik karena selalu beranggapan positif dan percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Begitupun sebaliknya, individu yang memiliki percaya diri yang rendah akan memiliki prestasi belajar yang kurang memuaskan karena selalu beranggapan negatif dan tidak percaya akan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.

Dari hasil penelitian yang telah diungkapkan oleh Mitarwan (2015), menunjukkan bahwa IMM Fishum sebagai lembaga kemahasiswaan dapat memberikan peran mahasiswa dalam meningkatkan interaksi sosialnya. Karena dalam sebuah organisasi banyak kegiatan atau diskusi yang dilakukan dimana semua anggota harus berpartisipasi di dalamnya, dari situlah mahasiswa biasa saling bertukar pikiran, menyampaikan gagasan atau mencari solusi dalam memecahkan masalah. Dengan demikian hal itu dapat melatih, melancarkan untuk komunikasi.

Percaya diri salah satunya dapat terlihat pada saat mahasiswa melakukan presentasi di depan kelas dimana mahasiswa yang kurang percaya diri ketika menyampaikan presentasi dan berinteraksi dengan peserta presentasi akan menampilkan presentasi yang kurang maksimal. Mahasiswa juga cenderung malu ketika akan mengajukan pertanyaan kepada dosen jika mahasiswa merasa kurang jelas terhadap penjelasan dosen. Banyak mahasiswa juga masih merasa dirinya tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa mahasiswa masih tidak percaya diri akan

penampilan dan kemampuannya, dan tidak itu saja maraknya budaya mencontek dikalangan mahasiswa yang sulit dihilangkan sebagai bentuk dari rendahnya kepercayaan diri dari mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian agar mengetahui Kepercayaan Diri Mahasiswa Program Studi Akuntansi. Oleh karena itu, peneliti ingin menuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa penelitian dengan judul “Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa: Studi Kasus di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.”

Kerangka Teori

Pengertian dan Teori Belajar

Menurut James O, Whittker, merumuskan belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.

Drs. Slameto merumuskan pengertian tentang belajar, menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan.

Belajar Skinner, yang dikutip Barlow (1985) dalam bukunya *educational psychology the teaching-learning process*, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Berdasarkan eksperimennya B.F Skinner percaya bahwa proses adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal apabila ia diberi penguatan (reinforce).

Chaplin dalam *dictionary of psychology* membatasi belajar dengan dua macam Rumusan. Rumusan pertama berbunyi belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Rumusan keduanya belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus.

Hintzman dalam bukunya menyatakan belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme (manusia dan hewan) disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. While dalam bukunya menyatakan belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman.

Reber dalam kamus susunannya yang tergolong modern, *Dictionary of psychology* membatasi belajar dengan dua macam definisi. Pertama, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, biasanya sering dipakai dalam pembahasan psikologi kognitif. Kedua belajar adalah suatu perubahan kemampuan berakselerasi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperbaiki.

Teori belajar sangat banyak dan beraneka ragam. Setiap teori menjelaskan aspek-aspek tertentu dalam belajar, dan setiap teori yang dijadikan dasar akan mewarnai proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam praktik, suatu teori belajar tidak dapat diterapkan untuk berbagai situasi pembelajaran. Penerapan suatu teori mungkin cocok untuk suatu situasi tertentu dan tidak untuk situasi yang lain. Setiap teori belajar dirumuskan berdasarkan kajian tentang perilaku individu dalam proses belajar. Kajian itu pada intinya menyangkut dua hal:

1. Konsep yang menganggap bahwa otak manusia terdiri atas sejumlah kemampuan potensial (daya-daya), seperti menalar, mengingat, mengkhayal, yang dapat dikembangkan dengan latihan.

2. Konsep yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu sistem energi yakni suatu sistem tenaga yang dinamis yang berupaya memelihara keseimbangan dalam merespon sistem energi lain sehingga ia dapat berinteraksi melalui organ rasa. Sistem energi ini meliputi respon terhadap stimulus, motivasi, dan proses penalaran.

Berdasarkan kajian terhadap kedua macam konsep itulah, teori-teori belajar dibangun yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua macam aliran, yaitu:

1. Disiplin mental atau psikologi daya, yang memandang bahwa otak manusia terdiri atas sejumlah daya yang beraneka ragam. Belajar pada prinsipnya adalah melatih daya-daya mental tersebut.
2. Behaviorisme atau psikologi tingkah laku, yang menganggap bahwa tingkah laku manusia merupakan kumpulan respon terhadap rangsangan.

Respon terhadap rangsangan ini meliputi dua macam, sehingga menghasilkan dua macam aliran:

- a. Koneksionis atau asosianisme yang menganggap bahwa tingkah laku itu merupakan respon terhadap stimulus tertentu. Penganut aliran atau teori ini menganggap bahwa suatu stimulus (S) mempunyai ikatan dengan response (R) tertentu.
- b. Kognitif atau Gestalt yang menganggap bahwa proses kognitif yaitu insight (pemahaman/wawasan) merupakan fundamental (asasi) dari respon manusia. Dengan demikian perilaku manusia itu ditandai oleh kemampuan melihat dan membuat hubungan antar unsur-unsur dalam situasi problematic, sehingga diperoleh insight.

Kajian tentang belajar berdasarkan psikologi daya banyak menekankan pada pembentukan daya mental tertentu. Oleh karena itu, bisa di pahami bila dalam menerapkan teori belajar menurut psikologi daya ini adalah kesulitan untuk menentukan jenis bahan pelajaran apa yang terbaik untuk melatih, membentuk, atau mengembangkan otak. Proses belajar yang paling menonjol dalam penerapan teori daya adalah dengan melalui praktek dan latihan (diantaranya memecahkan soal, menghafal, dan mengarang). Motivasi belajar siswa di pandang tidak begitu penting untuk diperhatikan, demikian pula faktor perbedaan individual dianggap tidak relevan untuk penerapan teori ini. Persoalan transfer (pengalihan) dalam belajar dipandang sebagai sesuatu yang bersifat otomatis. Artinya, bila daya mental tertentu sudah terbentuk maka kemampuan ini dapat di transfer pada situasi lain.

Berbeda dengan kajian diatas, aliran behaviorisme memandang bahwa perilaku manusia merupakan respon terhadap stimulus (rangsangan). Cabang dari aliran ini adalah koneksiisme atau asosiasi dan organismic atau gestalt.

Menurut teori asosiasi, setiap stimulus mempunyai hubungan (asosiasi, koneksi) dengan respon tertentu. Belajar dalam hal ini adalah membentuk sejumlah ikatan stimulus-respon pada diri individu. Untuk membentuk asosiasi dalam proses belajar mengajar perlu dilakukan latihan secara mekanis, yakni dengan banyak memberikan stimulus sehingga akan memunculkan respon dari diri individu pembelajar. Stimulus-stimulus itu dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras. Oleh sebab teori ini memandang persoalan transfer dalam belajar itu terbatas, yakni transfer kedalam situasi yang mempunyai unsur identik, maka bahan pelajaran diusahakan menyerupai situasi kehidupan. Dengan demikian hasil belajar berguna bagi siswa, karena dapat ditransfer dalam situasi kehidupan.

Teori koneksiisme menganggap bahwa perilaku tertentu dapat dibentuk melalui pembiasaan. Pengembangan teori ini sampai kepada munculnya teori kondisioning, yakni classical conditioning (Pavlov) dan operant conditioning (Skinner). Classical conditioning sangat menekankan pentingnya faktor latihan untuk memperoleh respon lain dari suatu stimulus. Teori ini menganggap bahwa latihan yang berulang-ulang dapat menghasilkan suatu perilaku sebagai suatu respon terhadap stimulus, meskipun stimulus itu dalam keadaan biasa mempunyai ikatan dengan respon tertentu yang berbeda dengan respon yang berbeda dengan respon yang dilatihkan atau dibiasakan. Classical conditioning sangat tepat dalam proses mempelajari hal-hal seperti agama, akhlak, adat istiadat, sopan santun, atau bahasa. Pada teori operant conditioning faktor hadiah (reward) dalam belajar sangat menonjol. Karena dapat menjadi penguat (reinforcement) terhadap ikatan stimulus-respon. Hadiah itu sendiri ada dua macam, yaitu hadiah yang dating dari luar (extrinsic) seperti pujian, dan hadiah yang dating dari dalam diri sendiri (intrinsic) yakni perasaan puas karena mengetahui bahwa respon yang diberikan terhadap suatu stimulus adalah tepat dan benar.

Teori Gestalt memandang bahwa proses kognitif yang berupa insight (pemahaman atau wawasan) merupakan cirri asasi dari respon manusia yang diberikan dalam menanggapi lingkungan betapapun sederhananya. insight itu sendiri muncul secara tiba-tiba, ketika seseorang dapat melihat atau ketika seseorang dapat memahami inti struktur dalam situasi problematic. Dapat pula dikatakan insight merupakan semacam reorganisasi pengalaman yang terjadi secara tiba-tiba, seperti ketika seseorang menemukan ide baru, atau memecahkan suatu masalah. Dalam memperoleh insight individu belajar melalui pengalaman. Mempelajari suatu mata pelajaran, tidak hanya dilakukan dengan mempelajari jawaban soal, tetapi yang penting disini adalah proses dalam menyelesaikan soal sehingga hasil atau jawaban menjadi tepat.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata pemanfaatan media pembelajaran harus mempunyai landasan teori tentang belajar. Karena teori-teori ini dapat memberi penjelasan tentang proses belajar dalam berbagai situasi. Dengan mengetahui proses belajar media yang dimanfaatkan dapat memberi kemungkinan kepada siswa belajar secara efektif dan efisien. Karena belajar merupakan proses yang rumit dan kompleks serta banyak variable yang mempengaruhi, maka perlu kiranya kita mengetahui juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik terhadap proses maupun hasil belajar.

Proses Belajar

Proses dari bahasa latin "processus" yang berarti "berjalan ke depan" menurut Chaplin (1972) proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan.

Dalam psikologi belajar proses berarti cara-cara/langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil tertentu (Reber, 1988). Jadi proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, efektif dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa.

Fase - fase dalam proses belajar menurut Jerome S. Bruner, salah seorang penentang teori S.R Bond dalam proses pembelajaran siswa menempuh tiga episode atau fase, antara lain :

1. Fase informasi (tahap penerimaan materi)
2. Fase transformasi (tahap pengubahan materi)
3. Fase evaluasi (tahap penilaian materi)

Menurut Wittig (1981) dalam bukunya psychology of learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahapan, antara lain :

1. Actuation (tahap perolehan/penerimaan informasi)
2. Storage (tahap penyimpanan informasi)
3. Retrieval (tahap mendapatkan kembali informasi)

Hasil Belajar

Hasil belajar menurut Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajaranya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar.

Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni : informasi verbal, kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik (Sudjana, 1990:22).

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu:

1. Faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya, motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, etekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis.
2. Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, terutama kualitas pengajaran.

Hasil belajar yang dicapai siswa menurut Sudjana (1990:56), melalui proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar intrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dengan prestasi yang rendah dan ia akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau setidaknya mempertahankan apa yang telah dicapai.
2. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya.
3. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan lama diingat, membentuk perilaku, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain, kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan mengembangkan kreativitasnya.
4. Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif (sikap) dan ranah psikomotorik, keterampilan atau perilaku.
5. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya.

Kepercayaan Diri

Pengertian Kepercayaan Diri

Enung Fatimah (dalam Khusnia, S., & Rahayu, S. A, 2010) mengartikan kepercayaan diri sebagai sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Rasa percaya diri adalah dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. Rasa percaya diri memang tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan berkaitan dengan kepribadian seseorang (Loekmono, 1983). Secara definitif, Hasan (dalam Khusnia, S., & Rahayu, S. A, 2010) menjelaskan bahwa kepercayaan diri

adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri secara adekuat dan menyadari kemampuan-kemampuan yang dimiliki serta dapat memanfaatkannya secara tepat.

Hal ini bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri, tetapi rasa percaya diri hanya merujuk pada adanya perasaan yakin mampu, memiliki kompetensi dan percaya bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang realistik terhadap diri sendiri.

Dalam penelitian ini, kepercayaan diri yang penulis maksud yaitu keyakinan akan kemampuan diri dalam mengembangkan sikap positif dan dapat memanfaatkannya dengan tepat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri pada seseorang menurut Hakim (2002:121) sebagai berikut:

a) Lingkungan keluarga

Keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan utama dalam kehidupan setiap manusia, lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan awal rasa percaya diri pada seseorang. Rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang ada pada dirinya dan diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Berdasarkan pengertian di atas, rasa percaya diri baru bisa tumbuh dan berkembang baik sejak kecil, jika seseorang berada di dalam lingkungan keluarga yang baik, namun sebaliknya jika lingkungan tidak memadai menjadikan individu tersebut untuk percaya diri maka individu tersebut akan kehilangan proses pembelajaran untuk percaya pada dirinya sendiri. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama yang sangat menentukan baik buruknya kepribadian seseorang.

Hakim (2002:121) menjelaskan bahwa pola pendidikan keluarga yang bisa diterapkan dalam membangun rasa percaya diri anak adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan pola pendidikan yang demokratis
2. Melatih anak untuk berani berbicara tentang banyak hal
3. Menumbuhkan sikap mandiri pada anak
4. Memperluas lingkungan pergaulan anak
5. Jangan terlalu sering memberikan kemudahan pada anak
6. Menumbuhkan sikap bertanggung jawab pada anak
7. Setiap permintaan anak jangan terlalu dituruti
8. Memberikan anak penghargaan jika berbuat baik
9. Memberikan hukuman jika berbuat salah
10. Mengembangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak
11. Menganjurkan anak agar mengikuti kegiatan kelompok di lingkungan rumah
12. Mengembangkan hobi yang positif
13. Memberikan pendidikan agama sejak dini

b) Pendidikan formal

Sekolah bisa dikatakan sebagai lingkungan kedua bagi anak, dimana sekolah merupakan lingkungan yang paling berperan bagi anak setelah lingkungan keluarga di rumah. Sekolah memberikan ruang pada anak untuk mengekspresikan rasa percaya dirinya terhadap teman-teman sebayanya.

Hakim (2002:122) menjelaskan bahwa rasa percaya diri siswa di sekolah bisa dibangun melalui berbagai macam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Memupuk keberanian untuk bertanya
2. Peran guru/pendidik yang aktif bertanya pada siswa
3. Melatih berdiskusi dan berdebat
4. Mengerjakan soal di depan kelas
5. Bersaing dalam mencapai prestasi belajar
6. Aktif dalam kegiatan pertandingan olah raga
7. Belajar berpidato
8. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
9. Penerapan disiplin yang konsisten
10. Memperluas pergaulan yang sehat dan lain-lain

c) Pendidikan non formal

Salah satu modal utama untuk bisa menjadi seseorang dengan kepribadian yang penuh rasa percaya diri adalah memiliki kelebihan tertentu yang berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Rasa percaya diri akan menjadi lebih mantap jika seseorang memiliki suatu kelebihan yang membuat orang lain merasa kagum. Kemampuan atau keterampilan dalam bidang tertentu bisa didapatkan melalui pendidikan non formal misalnya : mengikuti kursus bahasa asing, jurnalistik, bermain alat musik, seni vokal, keterampilan memasuki dunia kerja (BLK), pendidikan keagamaan dan lain sebagainya. Sebagai penunjang timbulnya rasa percaya diri pada diri individu yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri yang lain menurut Angelis (2003:4) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan pribadi: Rasa percaya diri hanya timbul pada saat seseorang mengerjakan sesuatu yang memang mampu dilakukan.
2. Keberhasilan seseorang: Keberhasilan seseorang ketika mendapatkan apa yang selama ini diharapkan dan cita-citakan akan menperkuat timbulnya rasa percaya diri.
3. Keinginan: Ketika seseorang menghendaki sesuatu maka orang tersebut akan belajar dari kesalahan yang telah diperbuat untuk mendapatkannya.
4. Tekat yang kuat: Rasa percaya diri yang datang ketika seseorang memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri ada tiga, yaitu pertama faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kemampuan yang dimiliki individu dalam mengerjakan sesuatu yang mampu dilakukannya, keberhasilan individu untuk mendapatkan sesuatu yang mampu dilakukan dan dicita-citakan, keinginan dan tekad yang kuat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan hingga terwujud. Faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga di mana lingkungan keluarga akan memberikan pembentukan awal terhadap pola kepribadian seseorang. Kedua, lingkungan formal atau sekolah, dimana sekolah adalah tempat kedua untuk senantiasa mempraktikkan rasa percaya diri individu atau siswa yang telah didapat dari lingkungan keluarga kepada teman-temannya dan kelompok bermainnya. Ketiga, lingkungan pendidikan non formal tempat individu menimba ilmu secara tidak langsung belajar keterampilan-keterampilan sehingga tercapailah keterampilan sebagai salah satu faktor pendukung guna mencapai rasa percaya diri pada individu yang bersangkutan.

Hipotesis Penelitian

- H1: Keyakinan diri berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan.
- H2: Sikap Positif berpengaruh positif signifikan terhadap Prestasi Belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan.
- H3: Kemampuan Memanfaatkan Kelebihan berpengaruh positif signifikan terhadap Prestasi belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan.

Metode Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan melaporkan suatu objek penelitian dengan mengoperasikan antara teori dengan keadaan yang terjadi dilapangan, apakah ada kesenjangan atau mungkin kesamaan antara teori dengan kenyataan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun identifikasi variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang diprediksi mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Variabel-variabel tersebut antara lain Keyakinan Diri, Sikap Positif, Memanfaatkan Kelebihan Terhadap Prestasi Belajar yang dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Metode pengumpulan data ialah melalui penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data primer dengan lokasi penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan menggunakan software WarpPLS6.0. Kaidah keputusan pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut, bilamana diperoleh $p\text{-value} \leq 0.10$ (alpha 10%) maka dikatakan *weakly significant*, jika $p\text{-value} \leq 0.05$ (alpha 5%) maka dikatakan *significant* dan jika $p\text{-value} \leq 0.01$ (alpha 1%) maka dikatakan *highly significant*.

Pembasahan

Deskripsi Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui aplikasi WhatsApp kepada mahasiswa Prodi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpuras. Dari kuesioner yang disebarluaskan tersebut didapatkan respon dari mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan sebanyak 102 orang mahasiswa dengan deskripsi sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Pria	35
Wanita	67
Total	102

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.2.

Jumlah Responden Berdasarkan Angkatan

Angkatan	Jumlah
2014	17
2015	38
2016	17
2017	30
Total	102

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.3.

Rata-rata IPK per Angkatan

Rata rata IPK	Nilai IPK
Angkatan 2014	3,37
Angkatan 2015	3,31
Angkatan 2016	3,39
Angkatan 2017	3,42

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.4.

Jumlah Responden Berdasarkan Asal Daerah

Asal Daerah	Jumlah
Pontianak	51
Singkawang	7
Sambas	6
Ketapang	8
Sintang	6
Mempawah	6
Sanggau	4
Sekadau	2
Kubu Raya	5
Melawi	2
Sampang	1
Batu Ampar	1

Asal Daerah	Jumlah
Kapuas Hulu	1
Tg Balai Karimun	1
Bengkayang	1
Total	102

Sumber: Data Olahan

Pengujian Data

Dari kuesioner yang diisi, maka penulis melakukan analisa data yang telah terkumpul dengan melakukan pengujian Validitas dan Reliabilitas data.

Hasil Uji Validitas

A. Penilaian Validitas Konvergen

Validitas konvergen dapat dinilai dengan menggunakan nilai *factor loading*. Hasil perhitungan nilai muatan faktor untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Nilai Muatan Faktor (*factor loading*)

	X1	X2	X3	Y	P value
X1.1	0.854	0.070	-0.080	0.151	<0.001
x1.2	0.854	-0.070	0.080	-0.151	<0.001
x2.1	0.077	0.808	-0.321	-0.162	<0.001
x2.2	-0.168	0.863	0.114	0.059	<0.001
x2.3	0.121	0.688	0.234	0.116	<0.001
x3.1	-0.157	0.024	0.845	0.139	<0.001
x3.2	0.157	-0.024	0.845	-0.139	<0.001
Y	0.000	-0.000	-0.000	1.000	<0.001

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai muatan faktor menunjukkan semua nilai muatan faktor untuk setiap variabel yang diuji menunjukkan nilai lebih dari 0.30, sehingga dinilai memenuhi kriteria validitas konvergen.

B. Validitas Diskriminan

Hasil perhitungan validitas diskriminan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6.

Nilai Muatan Faktor (*factor loading*)

	X1	X2	X3	Y
X1	0.854	0.664	0.520	0.020
X2	0.664	0.790	0.523	-0.027
X3	0.520	0.523	0.845	-0.065
Y	0.020	-0.027	-0.065	1.000

Sumber: Data Olahan

Validitas diskriminan diukur dengan membandingkan antara nilai Akar AVE dengan nilai korelasi variabel yang bersangkutan dengan variabel lain. Jika nilai akar AVE lebih besar dari nilai korelasi variabel bersangkutan dengan variabel lain, maka indikator yang digunakan dianggap memiliki validitas diskriminan.

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa semua Akar AVE lebih besar dari nilai korelasi variabel bersangkutan dengan variabel lain.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka nilai akar AVE untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut; a. untuk variabel X1 nilai akar AVE sebesar 0.854, b. untuk X2 sebesar 0.790, c. untuk X3 sebesar 0.845, dan d. untuk Y sebesar 1.00. Sedangkan angka selain angka tersebut adalah korelasi variabel bersangkutan dengan variabel lain. Berdasarkan hasil ini, maka semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dianggap memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Hasil Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini reliabilitas dinilai dengan menggunakan ukuran reliabilitas komposit dan reliabilitas konsistensi internal. Ukuran reliabilitas komposit dinilai dari ukuran koefisien reliabilitas komposit (*composite reliability coefficient*), sedangkan ukuran reliabilitas konsistensi internal menggunakan koefisien cronbach's alpha. Berkut adalah hasil perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.7.
Nilai Muatan Faktor (*factor loading*)

No	Variabel	Composite reliability coefficients	Cronbach's alpha coefficients
1	X1	0.843	0.628
2	X2	0.831	0.694
3	X3	0.833	0.599
4	Y	1.000	1.000

Dari hasil penilaian reliabilitas, maka untuk reliabilitas komposit memiliki nilai lebih dari 0.70 yang berarti semua variabel dalam kuesioner dinyatakan reliabel. Sedangkan untuk ukuran reliabilitas konsistensi internal, didapatkan 3 variabel menunjukkan nilai cronbach's alpha diatas 0.6 dan 1 variabel mendekati 0.6 yaitu variabel X3 dengan nilai cronbach's alpha sebesar 0.599. sehingga hanya variabel X3 yang reliabilitasnya rendah. Tetapi meskipun hanya 0.599, nilai cronbach's alpha variabel X3 masih dapat dikatakan dapat diandalkan karena sangat mendekati 0.6.

Dari dua pengujian reliabilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.

Pengujian Hipotesis

Adapun Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

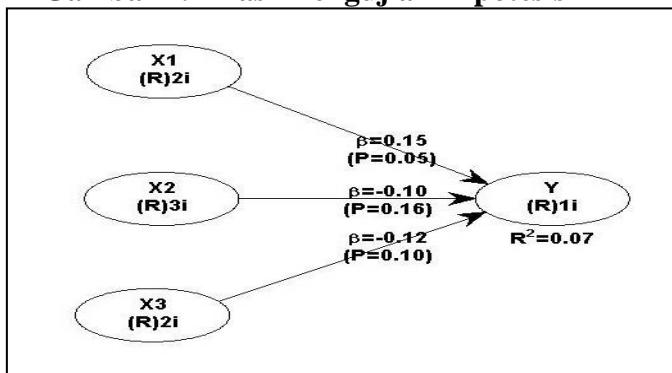
H1: Keyakinan diri berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan.

H2: Sikap Positif berpengaruh positif signifikan terhadap Prestasi Belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan.

H3: Kemampuan Memanfaatkan Kelebihan berpengaruh positif signifikan terhadap Prestasi belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengujian model Penelitian dengan menggunakan Software Warp.PLS6.0, dengan hasil pengujian ditampilkan dalam gambar dan tabel dibawah ini:

Gambar 4.1 Hasil Pengujian Hipotesis



Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hubungan Antar Variabel			Koefisien Jalur	p-value	Keterangan
	Variabel Penjelas	→	Variabel Respon			
1	X1 (Keyakinan Diri)	→	Y (Prestasi (IPK))	0,15	0,05	Highly Significant
2	X2 (Sikap Positif)	→	Y (Prestasi (IPK))	0,10	0,16	Weakly Significant
3	X3 (Memanfaatkan Kelebihan)	→	Y (Prestasi (IPK))	0,12	0,1	Weakly Significant

Hasil diatas menunjukkan bahwa Keyakinan diri berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan sementara Sikap Positif dan Memanfaatkan Kelebihan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa prodi S1 Akuntansi FEB Untan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui bahwa keyakinan diri merupakan faktor yang dominan dalam menentukan prestasi belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan. Kepercayaan diri merupakan faktor yang berasal dari dalam atau internal diri seseorang yang juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keyakinan diri berpengaruh positif signifikan terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan, yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,05.
2. Sikap Positif memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa, yang ditunjukkan dengan nilai p-value 0,16.
3. Kemampuan memanfaatkan kelebihan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Prestasi belajar mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FEB Untan.
4. Berdasarkan penjelasan diatas maka hanya Hipotesis 1 yang tidak ditolak, sedangkan hipotesis 2 dan 3 di tolak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah pada pengayaan variable prestasi belajar. Variabel prestasi belajar dapat menggunakan indikator tidak hanya IPK tetapi juga dapat menggunakan nilai-nilai mata kuliah tertantu yang berkaitan langsung dengan Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Adjani, S. & Adam H. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi. *Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya*, 1(1), 11-20.
- Azhar, Musarat, Sundus Nadeem, Faqiha Naz, Fozia Perveen & Ayesha Sameen, 2013. Impact Of Parental Education and Socio-Economic Status on Academic Achievements of University Students. *International Journal of Academic Research and Reflection* Vol. 1 No. 3.
- Bright, C., Lindsay, E., Lowe, D., Murray, S. & Liu, D. (2008). Factors that impact learning outcomes in both simulation and remote laboratories. In J. Luca & E. Weippl (Eds.). *Proceedings of world conference on educational multimedia, hypermedia and telecommunications 2008* (pp. 6251-6258). Cheasepeake, VA: AACE. Diunduh dari <http://www.editlib.org/p/29248>.
- Derajat, Zakiah, dkk., 1995. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, cet. VI, Jakarta:, hal. 289-312.
- Diaz, A. L. 2003. Personal, Family, and Academic Factors Affecting Low Achievement in Secondary Schools. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology and Psychopedagogy*, 1(1), 43 – 66.
- Felder, R. M. 1993. Reaching the Second Tier: Learning and Teaching Styles in College Science Education. *Journal of College Science Teaching*, 23(5), 286 – 290.
- Flemming, N. (2 Januari 2012). *VARK: A guide to learning styles*. Diunduh dari <http://www.vark-learn.com/english/index.asp>.
- Harb, N., & El-Shaarawi, A. 2006. Factors Affecting Student Performance. Munich Personal RePEc Archive Paper No. 13621. Accessed on November 02, 2011 from <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13621/>
- Hendikawati, P. (2011). Analisis faktor yang mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa. *Jurnal matematika kreatif-inovatif*, 2(1), 27-35.
- Henson, Kenneth T., dan Eller, Ben F. 1999. *Educational Psychology for Effective Teaching*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Kamsinah, 2008. Metode Dalam Proses Pembelajaran: Studi tentang Ragam dan Implementasinya. *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 1 JUNI 2008: 101-114.
- Klopp, E., Stark, R., Kopp, V. & Fischer, M. R. (2013). Psychological factors affecting medical student's learning with erroneous worked examples. *Journal of education and learning*, 2(1), 158-170.
- Lim, D. H. & Morris, M. L. (2009). Learner and instructional factors influencing learning outcomes within a blended learning environment. *Educational technology and society*, 12(4), 282-293.

- Maria & Risnawaty, R. (2013, July). *The correlation between resiliency and learning outcomes*. Paper presented at the 71th Annual Convention of International Council of Psychologists, Jakarta, INA.
- Mayer, R. E. (2003). Memory and information processes. *Handbook of psychology* (Irving B. Weiner, editor). New Jersey, NJ: John Wiley and Sons.
- Memon, G.R. Joubish, M.F. & Khurram, M.A. 2010. Impact of Parental Socio-Economic Status on Student's Educational Achievements and Secondary Schools of District Malir, Karachi.
- Mlambro, Victor. 2011. An Analysis Of Some Factors Affecting Student Academic Performance In An Introductory Biochemistry Course At The University Of The West Indies. Caribbean Teaching Scholar Vol. 1, No. 2, November 2011, 79–92
- Omrod, J. E. 2008. Educational Psychology: Developing Learners. Sixth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education
- Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. 2008. Learning Styles: Concepts and Evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 106 – 119.
- Qudsyi, Hazhira, Lya Indriaty, Yulia Herawaty, Saifullah, Ilham Khalilq, Jaka Setiawan. 2011. Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA. *Proyeksi*, Vol. 6 (2) , 34-49.
- Reid, J.M. 1995. Learning Styles in the ESL/EFL Classroom. Boston: Heinle & Heinle
- Santrock, J. W. (2011). *Educational psychology* (5th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.
- Schunk, D. H. & Zimmerman, B. J. (2003). Self-regulation and learning. *Handbook of psychology* (Irving B. Weiner, editor). New Jersey, NJ: John Wiley and Sons.
- Sullivan, B. F. & Thomas, S. L. (2007). Documenting student learning outcomes through a research-intensive senior capstone experience: Bringing the data together to demonstrate progress. *North American journal of psychology*, 9(2), 321–329.
- Tobias, C. U. (1996). *Cara mereka belajar* (Yohanan Kwee Han Tiong, penerj.). Jakarta: Harvest Publication House.

DESENTRALISASI FISKAL MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

Sari Rusmita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Abstrak

Pemerintahan pusat yang ada di Indonesia bersifat sentralistik dan berjalannya waktu sistemnya menjadi desentralistik. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan bisa membuat pembangunan daerah merata sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Empat hipotesis yang ada hanya satu hipotesis yang diterima yaitu hipotesis yang menyatakan IPM memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hipotesis ini menunjukkan bahwa dengan IPM yang tinggi khususnya berkaitan dengan kualitas manusia dalam pendidikan dan keterampilan. Hal ini dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, karena SDM yang siap untuk menjadi tenaga kerja memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik yang dapat dilihat dari nilai IPM yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kemandirian Pemerintah kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat masih belum dilakukan dengan optimal karena belanja pemerintah lebih banyak pada belanja rutin dari pada belanja pembangunan sehingga ini mengindikasikan bahwa potensi dana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota Kalimantan Barat belum dapat dikatakan produktif.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Penyerapan Tenaga Kerja

Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi wilayah yang berbeda, mulai dari geografinya, budaya maupun kondisi ekonominya. Namun pemerintah pusat tidak semua mengerti atau bisa menangani permasalahan yang ada didaerah. Hanya daerah tersebutlah yang mengerti tentang kondisi daerahnya sendiri. Jika suatu daerah terlalu bergantung kepada pemerintah pusat, maka pertumbuhan atau pun pembangunan didaerah akan terhambat. Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan modal pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk pendeklegasian pengelolaan keuangan kepada daerah.

Pada awalnya pemerintahan pusat yang ada di Indonesia bersifat sentralistik dan berjalannya waktu sistemnya menjadi desentralistik karena pada prinsipnya pemerintah daerahlah yang lebih mengerti kondisi masyarakat yang ada di daerah, dan aspirasi masyarakat pun akan cepat tertangani apabila proses birokrasinya dipotong hingga tataran daerah, agar proses penyerapan aspirasi dan penyediaan pelayanan publik dapat berlangsung dengan cepat. Disini lah mulai adanya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan bisa membuat pembangunan daerah merata sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Menurut teori desentralisasi fiskal bahwasanya dengan di terapkannya desentralisasi fiskal tersebut maka kewenangan pemerintah yang ada didaerah

dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi semakin besar, ini karena proses perpindahan kewenangan yang diberikan oleh pusat ke daerah. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi atau pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya atau didaerah. Desentralisasi fiskal juga dapat diartikan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran. Indonesia yang telah menerapkan sistem desentralisasi sejak dikeluarkannya UU nomor 22 Tahun 1999 diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai dengan karakteristik yang melekat pada daerah tersebut.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cara melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk melakukan pembelanjaan. Saragih (2003) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Ebel dan Yilmaz (2002) untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Dia menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variabels*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga *size variabels* yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP. Dari sisi pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerahnya. Seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur atau pelayanan publik. Dan dari sisi pendapatan adalah seperti transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut Barzelay dalam Sasana (2009) pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu : 1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Kebijakan dari Desentralisasi Fiskal yang diharapkan adalah seperti meningkatkan kemampuan daerah dalam membangun daerah seperti dalam membangun atau meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan bisa membantu atau meningkatkan IPM menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan IPM ini, maka tingkat Penyerapan Tenaga Kerja akan menjadi menigkat. Ini karena Banyaknya

peluang atau penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB di suatu provinsi. Apabila tingkat PDRB meningkat maka semakin banyak juga tenaga kerja yang terserap.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat tahun 2013, daerah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kota Pontianak yaitu sebesar 7.83 dan daerah yang paling rendah yaitu daerah Kabupaten Ketapang sebesar 4.72. Sedangkan pada tahun 2014 daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah daerah Kota Singkawang yaitu sebesar 6.61 dan yang paling rendah masih daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 2.76. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah daerah Kabupaten Kuburaya sebesar 6.21 dan paling rendah adalah Kabupaten Sanggau sebesar 3.15. sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi paling tinggi ada di daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 7.97 dan yang terendah ada di daerah Kabupaten Melawi sebesar 4.75. Dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 7.21 dan yang terendah ada di daerah Kabupaten Melawi sebesar 4.79. Dari data pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dilihat bahwa pemerintah daerah memang belum mampu membuat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat stabil.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kalimantan Barat bisa dilihat bahwa pada data IPM tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan pergerakan yang baik. Walaupun data dari tiap kabupaten tidak sama, sebagian besar atau rata-rata dari data tersebut bisa dilihat bahwa IPM mengalami kenaikan. Kenaikan IPM ini belum mampu membantu tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat menjadi stabil. IPM ini juga akan berpengaruh ke faktor-faktor lainnya seperti kemiskinan, pengangguran hingga menyebabkan penyerapan Tenaga Kerja yang baik. Rata-rata pada data penyerapan tenaga kerja, persentase dari jumlah tenaga kerja terhadap angkatan kerja adalah sebesar 90%. Ini berarti penyerapan tenaga kerja yang ada di Kalimantan Barat sudah cukup baik, tetapi tidak cukup stabil. Ini dikarenakan oleh setiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda mulai dari permasalahan ekonomi, sosial, budaya maupun lainnya.

Data pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja pergerakannya belum cukup baik atau berfluktuasi. Ini menunjukkan pemerintah Provinsi Kalimantan barat belum menerapkan kebijakan dengan baik. Masalah ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membantu perekonomian, kesejahteraan maupun tenaga kerja. Dengan desentralisasi fiskal ini diharapkan mampu membuat pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Melihat fenomena yang ada di Kalimantan Barat maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Dan juga, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dan sumber informasi maupun data untuk masyarakat dan para peneliti yang sedang atau akan melakukan penelitian membahas topik atau tema sejenis tentang desentralisasi fiskal. Serta penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat, para peneliti dan bermanfaat sebagai masukan kebijakan bagi

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat agar dapat membuat pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengurangi pengangguran yang ada melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk kuantitatif yang berarti penelitian ini menggunakan data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Metode penelitian kuantitatif juga merupakan salah satu jenis penelitian yang terperinci, sistematis, dan terstruktur dan penelitian ini menggunakan tabel untuk menunjukkan hasil data yang didapat. Penelitian ini menggunakan data populasi, populasi yang dimaksud yaitu seluruh daerah Kabupaten/Kota atau 12 Kabupaten dan 2 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2013 sampai dengan 2017, dan data *cross section* yang terdiri atas 12 Kabupaten dan 2 Kota, sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2013-2017) 5 tahun dengan data *cross section* 12 Kabupaten dan 2 Kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat baik dari buku maupun dari website. Selain itu data diambil dari buku berdasarkan tahun terkait, yaitu dari buku tahun 2014 hingga tahun 2018.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Desentralisasi Fiskal (X), Desentralisasi fiskal adalah hasil dari antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi total pengeluaran pemerintah. Pada penelitian ini realisasi total pengeluaran pemerintah diliat dengan realisasi total belanja daerah kabupaten/kota dalam satuan juta rupiah.
 2. Pertumbuhan Ekonomi (Y_1), Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB menurut harga konstan tahun 2010, yang dinyatakan dalam satuan persen.
 3. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (Y_2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah.
 4. Penyerapan Tenaga Kerja (Y_3), Data Penyerapan Tenaga Kerja dalam yang dimaksud adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dalam satuan orang.

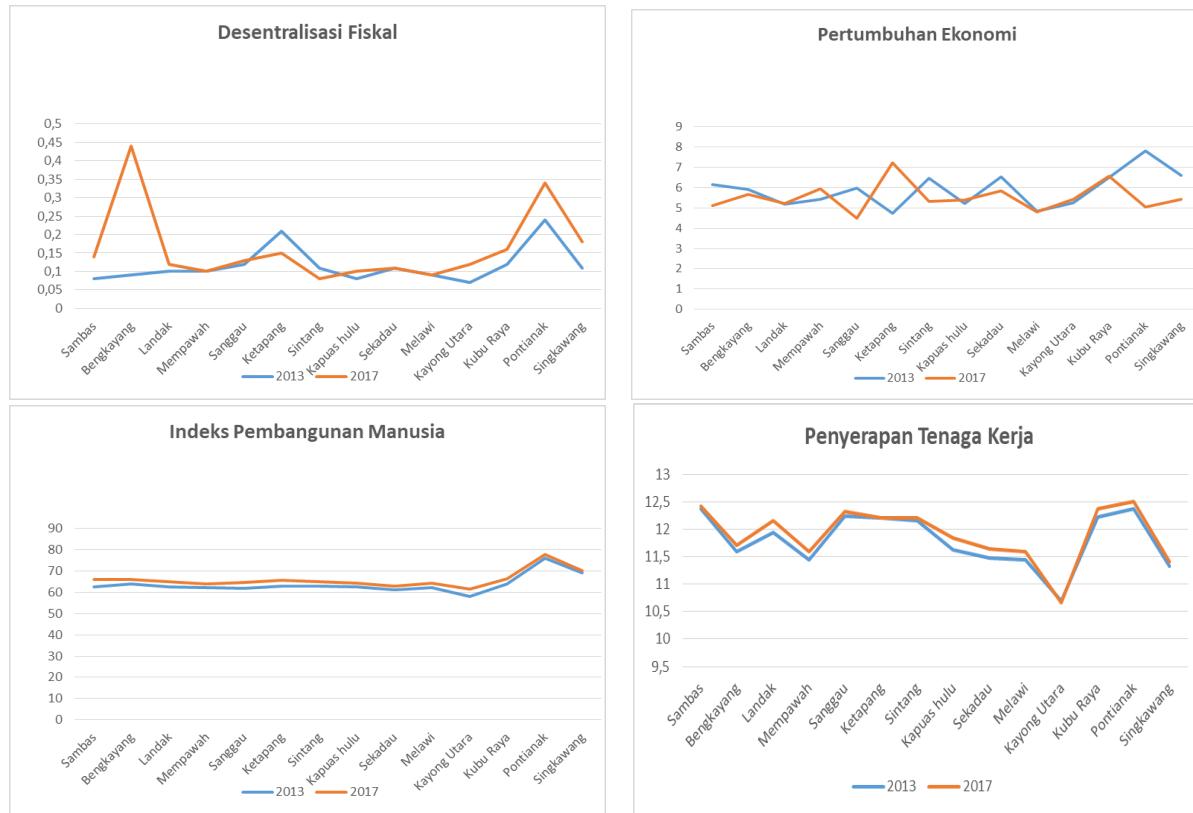
Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu menggunakan analisis regresi linear. Pengolahan data disini menggunakan program atau aplikasi *Eviews* Versi 10. Berikut bentuk persamaan regresi linear dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dimana :

- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
- X_1 = Desentralisasi Fiskal
- Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi
- Y_2 = Indeks Pembangunan Manusia
- Y_3 = Tenaga Kerja Terserap
- i = Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- t = Menunjukkan periode waktu ke- t
- e = Error

Hasil Dan Pembahasan

Berikut ini adalah pergerakan dari data desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, IPM dan penyerapan tenaga kerja yang menjadi variabel dalam penelitian ini untuk tahun 2013 dan 2017 dari data Kabupaten Kota Provinsi di Kalimantan Barat.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan barat, 2019

Gambar 1. Pergerakan Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan 2017

Gambar 1 menunjukkan pola pergerakan dari variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pola pergerakan dari 3 variabel penelitian yaitu desentralisasi fiscal, IPM dan penyerapan tenaga kerja relative sama pada tahun 2013 dengan tahun 2017, namun tahun 2017 menunjukkan capaian lebih

tinggi dari tahun 2013 pada setiap Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan pada variabel pertumbuhan ekonomi, pola pergerakan pada tahun 2013 berbeda dengan tahun 2017. Dimana menunjukkan ada kabupaten yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2013 seperti Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Namun ada juga kabupaten yang pertumbuhan ekonominya meningkat pada tahun 2017 dibanding tahun 2013 yaitu Kabupaten Mempawah dan Ketapang.

Untuk menentukan model yang akan dipakai, terlebih dahulu telah dilakukan pengujian terhadap Model *Common Effect*, Model *Fixed Effect*, dan Model *Random Effect*. Hasilnya menunjukkan Model *Fixed Effect* lebih baik dari pada model yang lainnya, maka dapat dilihat nilai konstanta dan koefisien untuk membentuk persamaan regresi, seperti yang ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Dengan Model Fixed Effect Cross Section Weight

No	Variabel	Konstanta (α)	Koefisien (β)	Adj R (R^2)
1	Desentralisasi Fiskal \Rightarrow Pertumbuhan Ekonomi	5,432912	-0,001521	0,158964
2	Pertumbuhan Ekonomi \Rightarrow IPM	64,71361	0,032803	0,941506
3	Pertumbuhan Ekonomi \Rightarrow Penyerapan Tenaga Kerja	11,53684	0,042362	0,815800
4	IPM \Rightarrow Penyerapan Tenaga Kerja	4,643827	0,109768	0,853664

Sumber : Hasil Olahan E-Views 8

Berdasarkan Tabel 1 maka persamaan regresi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta (α) sebesar 5,432912 memiliki arti bahwa jika variabel independen (desentralisasi fiskal) = 0, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat bertambah sebesar 5,432912 persen. Dan jika desentralisasi fiskal bertambah sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan berkurang sebesar 0,001521 persen.

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta (α) sebesar 64,71361 memiliki arti bahwa jika variabel independen (pertumbuhan ekonomi) = 0, maka IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat bertambah sebesar 0,032803 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi bertambah sebesar 1 persen maka IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan bertambah sebesar 0,032803 persen.

Penyerapan Tenaga Kerja = 11.53684 + 0.042362 Pertumbuhan Ekonomi + e(7)

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta (α) sebesar 11,53684 memiliki arti bahwa jika variabel independen (pertumbuhan ekonomi) = 0, maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat bertambah sebesar 0,042362 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi bertambah sebesar 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan bertambah sebesar 0,042362 jiwa.

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta (α) sebesar 4,643827 memiliki arti bahwa jika variabel independen (IPM) = 0, maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi

Kalimantan Barat bertambah sebesar 0,109768 persen. Dan jika IPM bertambah sebesar 1 persen maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan bertambah sebesar 0,109768 jiwa.

Hasil terbentuknya persamaan regresi dapat menunjukkan hubungan antara variable dan dapat menjawab hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Berikut ini tabel 2 yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Arah Hubungan	Sig.	Keputusan Hipotesis
1	Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Negatif	0,7846	Ditolak
2	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap IPM	Positif	0,8927	Ditolak
3	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Positif	0,2418	Ditolak
4	IPM berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Positif	0,0002	Diterima

Sumber : Hasil Olahan E-Views 8

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari empat hipotesis yang ada hanya satu hipotesis yang diterima yaitu hipotesis yang menyatakan IPM memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hipotesis ini menunjukkan bahwa dengan IPM yang tinggi khususnya berkaitan dengan kualitas manusia dalam pendidikan dan keterampilan. Hal ini dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, karena SDM yang siap untuk menjadi tenaga kerja memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik yang dapat dilihat dari nilai IPM yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, hipotesis yang lain tidak dapat diterima karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Desentralisasi fiscal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah belum dapat menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hal ini mungkin dikarenakan pengeluaran rutin pemerintah kurang produktif jika dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, hal ini mengakibatkan desentralisasi fiscal kurang optimal. Sehingga, mengakibatkan tidak dapat mendorong naiknya tingkat konsumsi yang pada akhirnya juga tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji hipotesis lainnya juga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap IPM dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif terhadap IPM dan Penyerapan tenaga kerja, ini berarti semakin meningkatnya Pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat juga IPM dan Penyerapan tenaga Kerja. Namun melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja yang tidak signifikan, ini menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi tidak selalu mengakibatkan berubahnya IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja karena Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan kualitas penduduk dari suatu daerah dan belum tentu dapat menambah lapangan kerja atau mengurangi pengangguran.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tidak selalu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Ini juga karena besarnya jumlah permintaan tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja kurang seimbang.

Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif terhadap Penyerapan tenaga kerja, ini berarti semakin meningkatnya Pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat juga Penyerapan tenaga Kerja. Tetapi melihat hubungan pengaruh anatar Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja ini tidak signifikan, ini berarti Pertumbuhan Ekonomi tidak selalu mengakibatkan berubahnya tingkat Penyerapan Tenaga Kerja karena Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi belum tentu menambah lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tidak selalu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Ini juga karena besarnya jumlah permintaan tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja kurang seimbang.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penyerapan Tenaga kerja, ini berarti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia maka Penyerapan Tenaga Kerja juga akan mengalami peningkatan. Jika disuatu daerah tingkat kesejahteraannya yang pada penelitian ini melihat dari IPM meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat dan mengurangi pengangguran sehingga mengurangi kemiskinan yang ada. IPM yang rata-rata meningkat dari tahun ke tahun yang mengakibatkan Penyerapan Tenaga Kerja akan meningkat. Pada data Indeks Pembangunan Manusia pergerakannya sebagian besar mengalami kenaikan begitu juga dengan data Penyerapan Tenaga Kerja dimana data tersebut juga sebagian besar meningkat juga dari tahun ke tahunnya. ini berarti sesuai dengan hasil regresi Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Dengan meningkatkan kesejahteraan disuatu daerah, bisa membantu kondisi perekonomian didaerah menjadi lebih baik seperti dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi, kemiskinan maupun mampu menyerap tenaga kerja. Karena jika masyarakat sejahtera maka kebutuhan masyarakat sendiri bisa dipenuhi. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia maka masyarakat akan lebih aktif dalam membangun daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan manusia merupakan komponen utama dalam membangun suatu daerah. Dengan aktifnya masyarakat ini maka tenaga Kerja akan terserap karna aktifnya masyarakat dalam membangun daerahnya.

Hasil studi ini mendukung teori Smith bahwa manusia merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelola sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Subri (2002: 2).

Kesimpulan Dan Sarana

Kesimpulan

Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini bisa dilihat dari probabilitasnya $0,7846 > 0,05$. Selain itu hubungan antara varibel desentralisasi

fiskal ini adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bisa dilihat dari nilai koefisiennya yaitu sebesar -0,001521. Ini dikarenakan tidak sebanding atau tidak seimbangnya perkembangan daya beli masyarakat dan jumlah penduduk yang ada. Walaupun pun suatu daerah mandiri tetapi jumlah penduduk, jumlah lapangan kerja dan tingkat upah tinggi kurang yang kurang seimbang maka daya beli masyarakat juga tidak tinggi sehingga akan sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu belum mampunya daerah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal secara produktif dan optimal.

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan berhubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan IPM. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan membuat penyerapan tenaga kerja dan IPM juga akan meningkat, ini karena dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka suatu daerah tingkat produksinya akan meningkat, dalam proses produksi ini akan mampu menyerap tenaga kerja yang ada sehingga IPM juga meningkat. Tetapi tidak selama meningkatnya pertumbuhan ekonomi bisa menyerap tenaga kerja. Seperti yang ada saat ini dimana teknologi memiliki kemajuan yang pesat. Kemajuan teknologi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dalam membantu atau mempermudah proses produksi. Dikarenakan penggantian tenaga kerja dengan mesin maka akan kurang menyerap tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Ini dikarenakan manusia adalah komponen utama atau yang memiliki peran penting dalam membangun suatu daerah. Meningkatnya indeks Pembangunan Manusia maka masyarakat akan lebih aktif dalam membangun daerahnya sendiri. Dengan aktifnya masyarakat ini maka tenaga kerja akan terserap.

Saran

Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi Fiskal sebaiknya pemerintah bisa menggunakan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya. Daya serap anggaran Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat masih kurang baik. Jika bisa digunakan dengan sebaik-baiknya maka bisa berdampak baiknya kondisi perkeonomian.
2. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan investasi asing yang ada. Karena jika investasi asing yang lebih kepada padat modal dan lebih mementingkan teknologi dalam proses produksi maka Penyerapan Tenaga Kerja akan kurang. Sebaiknya investasi asing bisa lebih dialihkan kepada padat karya, sehingga dengan investasi tersebut bisa menyerap tenaga kerja. Selain belanja pemerintah pada belanja langsung seperti belanja dalam infrastruktur juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan mengeluarkan belanja pemerintah dibagian infrastruktur pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dan akan menyerap tenaga kerja.
3. Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang mengenai tingkat kelayakan hidup masyarakat. Selain itu pemerintah harus bisa menerapkan masyarakat sebaik-baiknya dalam mengikutsertakan pembangunan didaerahnya sendiri. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Selain itu dengan pemanfaatan masyarakat yang sebaik-baiknya dalam pembangunan ini bisa menambah kapasitas produksi hingga memperbaiki perekonomian.

Daftar Rujukan

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Awandari, Luh Putu. P, dan Indrajaya, I Gst, Bgs. (2016). *Pengaruh Infrastruktur , Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*. E-jurnal ekonomi pembangunan universitas udayana Vol 5 No 12, Desember 2016
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.
- Bahl, Roy W. (2000). *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bahl, Roy W. and Sally Wallace. (2001). *Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies*.
- Chairul Nizar, dkk (2013). *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1980-2010*. Skripsi Ilmu Ekonomi Univesitas Syiah Kuala. Aceh
- Damanhuri, D.S dan M. Findi. (2014). *Masalah dan Kebijakan : Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Ebel, R D. dan Serdar Y. (2002). *On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. World Bank Study 2809, Policy Research Working Paper*.
- Furyanah, Anah dan Sulistiyan. (2019). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Industri Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Sekuritas. Vol.2, No.3, Mei 2019.
- Iswanto, D. A. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran: Validitas Hukum Okun Di Indonesia*. Jurnal FEB Universitas Brawijaya.
- Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kemu, Suparman Zen dan R. Nurhidayat. (2005), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 3*.
- Khusaini, Muhamad. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unbraw.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan*

- Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Laksono, Richat. T. (2016). *Efektifitas Pengeluaran Pemerintah (Goverment Expenditure) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 10, No. 2 Mei 2016 Hal. 189 – 202.
- Lopian, A.L.C.P. (2013). *Analisis Faktor – Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara*. Disertasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.
- Nugraheni, D. (2012). *Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, Kemiskinan : Analisis Kabupaten/Kota Di Indonesia 2006 – 2009*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Prasetyo, P. E. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Pressman, Steven. (2000). *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Taufiqur., Suparta, I Wayan., dan Taher, Arivina, Ratih. (2018). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*. Vol. 7, No. 2. Juli 2018.
- Santi, Nurmainah. (2013). *Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 20, No. 2 September 2013, Hal. 131 – 141.
- Saragih, Panglima Juli. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasana, Hadi. (2009). *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 16, No.1. Maret 2009, Hal. 50 – 69.
- Sasana, Hadi. (2009). *Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 – 124.
- Soleh, Ahmad dan Ardilla, Ayu. (2018). *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 1 Nomor 2, Desember 2018*.
- Subri, Mulyadi, (2002). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rajawali Persada
- Suparmoko, M. (2002). “*Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*” edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Yogyakarta: BPFE
- Suparno. (2010). *Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian di Indonesia*. Tesis. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Susanto, A.B dan Rachmawati, L. (2013). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*.
- Todaro, Michael P and Smith, Stephen C. (2003). *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom: Pearson Education Limited
- Undang -undang nomor 22 tahun 1999 tentang “*Pemerintahan Daerah*”

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang “*Ketenagakerjaan*”
- Undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang “*Pemerintahan Daerah*”
- Undang -undang nomor 32 tahun 2004 tentang “*Pemerintahan Daerah*”
- Undang -undang nomor 33 tahun 2004 tentang “*Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”
- UNSFIRS, (2000). *Indonesia: the National Human Development Report, 2000*. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIRS) and UNDP.
- Wijaya, Andi., Indrawati, Toti dan Pailis, Eka, Armas. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau*. Jom FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII.

ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT

Muhsin

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Tanjungpura Pontianak

muhsin@ekonomi.untan.ac.id

Abstract

Researching and evaluating auditor ethical variables as moderating variables influencing auditor competence on audit quality. The research sample is the Auditor of the West Kalimantan Provincial Government Inspectorate, with sample selection using a purposive sampling method with the provisions of the auditor who has audited the financial statements of the local government. The analysis technique uses WarpPLS 6.0 software. The findings of this study refer to the auditor's positive competence on the quality of audits received, then the ethics of accountants as auditors assessing the competence of auditors on audit quality received by examiners.

Keywords: audit quality, auditor ethics, auditor competence and attribution theory

Abstrak: Riset bertujuan mengetahui dan menguji variabel etika auditor sebagai variabel variabel pemoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Sampel riset adalah Auditor Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan penentuan sample memakai metode *purposive sampling* dengan ketentuan auditor yang pernah melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis menggunakan perangkat lunak WarpPLS 6.0. Temuan riset ini adalah berpengaruh positif kompetensi auditor terhadap kualitas kerja audit diterima, kemudian etika seorang auditor sebagai pemoderasi hubungan kompetensi auditor terhadap kualitas audit seorang pemeriksa diterima.

Kata Kunci: kualitas audit, etika auditor, kompetensi auditor dan teori atribusi.

Latar Belakang

Pemerintah daerah berperan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, proses pembangunan tersebut memerlukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan anggaran yang telah digunakan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan disebut sebagai instrumen penting sebagai media informasi keuangan kepada pihak berkepentingan (*stakeholders*). Kepala daerah adalah pihak yang bertanggungjawab pada laporan keuangan pemerintah daerah sebagai manajemen dari (LKPD) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, maka dari itu sebelum LKPD di susun maka harus dilakukan evaluasi dan audit atas LKPD tersebut. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 tahun 2008, tentang kewenangan dan peran serta fungsi dari pengawasan internal yang disebut dengan aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP). APIP melakukan tugas audit, melakukan reviu, dapat melakukan evaluasi, serta melaksanakan pemantauan dan kegiatan pengawasan yang lain. APIP berperan sebagai pengawas untuk membantu supaya tujuan organisasi dapat terwujud dan untuk *preventif* kemungkinan adanya penyimpangan, serta ketidakefisienan (Samsi dkk, 2012).

APIP sebagai lembaga audit internal pemerintah melakukan audit internal dengan melakukan aktivitas mencari dan mengumpulkan informasi dan bukti atas kegiatan yang dilakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD), salah satu tugas yang dilakukan adalah mengkomparasi capaian dengan beberapa kriteria/standar yang ditetapkan, kemudian menerima atau tidak menyetujui hasil, kemudian mengeluarkan rekomendasi/catatan supaya bisa dilakukan perbaikan kedepan. APIP dalam bertugas biasanya mengalami hambatan yaitu adanya rasa benturan kepentingan sehingga menyulitkan dalam bertugas, sementara tuntutan publik APIP harus dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan audit. sehingga dalam bertugas harus berjalan secara wajar dan bermanfaat.

Auditor harus memiliki kompetensi yang cukup supaya dalam melakukan tugas audit dapat memberikan hasil audit yang berkualitas. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan informal seperti pelatihan keterampilan dibidang akuntansi dan auditing. Kompetensi auditor adalah keahlian yang dimiliki auditor dalam (ilmu akuntansi dan auditing) yang digunakan dalam audit atas laporan keuangan (Saputra, 2012). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Arens, *et al* (2012) menyatakan bahwa kualifikasi profesional wajib dimiliki auditor, dalam menjalankan tugas audit atas laporan keuangan dengan cara mengerti dan memahami kriteria-kriteria sesuai standar audit yang sudah ditetapkan, mulai dari memahami jenis bukti transaksi yang harus cukup, kompeten dan valid, sehingga simpulan audit berupa opini audit dapat terus ditingkatkan dan wajar sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi.

Auditor juga dituntut dan disyaratkan untuk memiliki standar etika yang tinggi, etika auditor inspektorat telah diatur dalam Kode Etik Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah Asosiasi Auditor Interen Pemerintah Indonesia (AAPI) tahun 2014, isinya mengatur tentang pencegahan kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak beretika dalam menjalankan tugas audit internal sebagai pencegahan terjadinya tingkah laku yang tidak etis aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) supaya dipenuhinya standar tugas yang dapat diepertanggungjawabkan dan kinerja auditor melaksanakan tugas audit. Auditor harus memiliki sifat integritas, yang meliputi jujur dan tegas, kemudian berfikir obyektivitas yang meliputi bertindak secara adil dan tekanan dan terakhir adalah kompetensi yang mumpuni termasuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas audit

Riset dilakukan termotivasi dan mereplikasi dari hasil riset Alim, dkk (2007), Darayasa & Wisadha, 2016, dan Wardhani & Astika, 2018 dengan variabel independen riset yaitu kompetensi dan independensi serta variabel dependen/bebas kualitas audit, juga menggunakan variabel moderasi yaitu etika auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alim, dkk (2007), Darayasa & Wisadha, 2016, dan Wardhani & Astika, 2018 adalah terletak pada peneliti menggunakan modifikasi variabel independen dengan menghilangkan variabel independensi, dengan argumen bahwa independensi kurang tepat diteliti untuk auditor internal karena sama-sama bagian internal pemerintah (inspektorat dan organisasi perangkat daerah atau entitas audit internal), kedua riset sebelumnya dilakukan disektor privat, sedang riset ini disektor publik, ketiga alat analisis riset sebelumnya menggunakan Regresi, sedangkan riset ini menggunakan WarpPLS 6.0. Permasalahan dalam riset ini dapat dirumuskan, bagaimana kompetensi seorang auditor ada berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan apakah etika seorang auditor memoderasi pengaruh kompetensi pemeriksa terhadap kualitas kerja audit. Tujuan riset dilakukan adalah menguji dan melakukan analisis pengaruh kompetensi pada kualitas audit, dan akan menguji dan juga melaksanakan analisis etika auditor sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap audit yang berkualitas. Riset ini akan

memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu auditing sehingga setiap melakukan tugas audit, auditor pemerintah perlu memperhatikan etika auditor, kompetensi auditor dan kualitas audit.

Kajian Literatur

Teori Atribusi

Menjelaskan proses seseorang dalam hal menginterpretasikan kejadian dan mempelajari cara orang menginterpretasikan sebab-sebab atas prilaku tersebut. Kualitas audit merupakan suatu peristiwa yang ingin dijelaskan oleh seorang auditor dengan mengetahui apa saja yang mampu membuat kualitas audit yang dihasilkan meningkat (Suartana, 2010). Robbins (2008) menyatakan seseorang melakukan pengamatan terhadap prilaku orang lain, sehingga akan berusaha mencari sebab terjadinya, bisa dari sebab atribusi internal (kendali diri sendiri) dan eksternal (dari luar pribadi/sekitar).

Menurut Robbins (2008) prilaku terjadi karena aspek internal atau aspek eksternal yaitu, (a) orang yang memiliki konsistensi (atribusi internal) dari waktu ke waktu dalam menilai prilaku orang lain (b) individu mempunyai sifat konsensus (atribusi internal) yaitu cara padang yang sama kepada semua orang dalam situasi yang sama, jika konsensus tinggi tergolong atribusi internal sebaliknya maka termasuk dalam atribusi eksternal (c) seseorang yang memiliki kekhususan, yaitu individu tersebut akan mempersepsikan prilaku individu lain dengan cara yang berbeda dan dalam situasi berbeda. jika prilaku tersebut dinilai biasa saja termasuk atribusi internal, sebaliknya persepsinya suatu hal luar biasa dan tidak biasa maka disebut atribusi eksternal.

Menurut Rahmawati, 2013, perilaku disebabkan karena faktor internal/atribusi internal yaitu perilaku berada pada kendali pribadi orang tersebut contoh usaha, pengetahuan, serta kemampuan. Faktor eksternal/atribusi eksternal ialah hasil dari tekanan keadaan sehingga orang terpaksa melakukannya, misalnya peluang, kesempatan dan lingkungan sosial dan masyarakat, kadang auditor berlaku tidak etis sehingga menuruti kemauan klien, sehingga kondisi sebenarnya klien yang harus dilaporkan justru tidak terungkap.

Kompetensi Auditor

SA Seksi 210 standar umum menyatakan proses audit dilakukan seorang auditor yang mempunyai keahlian dan memiliki pelatihan teknis yang cukup dan memadai. Sejalan dengan standar audit bagi Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), 2014 juga menyatakan bahwa auditor pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab audit harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi. Hal tersebut didukung oleh Arens *et al* (2012) dimana auditor yang kompeten adalah memiliki keahlian dan pelatihan teknis. Demikian juga Tuanakotta (2011) bahwa untuk kompeten auditor memperoleh pelatihan, pengalaman dan pengetahuan. Auditor ada persyaratan dan kualifikasi yang cukup sehingga dalam proses pengumpulan dan pencarian bukti-bukti audit dapat dilakukan dengan baik. Terakhir Halim (2008) menyatakan hal yang sama bahwa auditor berstandar kompetensi bisa diperoleh pada pendidikan formal akuntansi, ujian profesional, serta pengalaman praktik profesional auditor.

Etika Auditor

Etika menjadi syarat utama bagi auditor berpraktik, Etika adalah berisikan prinsip mendasar suatu nilai moral yang harus dimiliki akuntan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah menetapkan kode etik dan semua auditor harus mematuhiinya. Kode etik ditetapkan untuk mengatur hubungan

sesama rekan auditor, dengan atasan auditor, klien dan stakeholders. Menurut Halim (2008) kode etik akuntan berpengaruh pada kualitas audit, karena menyangkut aspek obyektivitas, integritas dan independensi auditor. Maryani dan Ludigdo (2001) mengartikan etika satu set peraturan dan pedoman bagi auditor, yang berisi kewajiban dan larangan bagi auditor. Sementara Kurnia et al, (2014) Etika auditor adalah ilmu untuk menilai hal baik dan buruk, serta mana yang menjadi hak dan keharusan/kewajiban. Berikutnya Murwanto et.al,(2011), etika adalah keseluruhan norma dan penilaian untuk mengetahui penuntun agar manusia memiliki sikap yang benar.

Kualitas Audit

Kualitas audit masih menjadi isu utama dalam membahas proses audit, Arens *et.al.* (2012) menyatakan auditor harus mampu mendeteksi kesalahan dan kesengajaan klien dalam menyajikan laporan keuangan. Auditor yang mampu mendeteksi kesalahan sistem akuntansi klien adalah auditor yang memiliki kompetensi yang memadai. Auditor yang dapat mendeteksi salah saji laporan keuangan klien adalah akan berguna mengurangi informasi yang tidak linier atau tidak benar kepada pemilik/prinsipal dengan manajemen /agen, sehingga dapat membuat pemangku kepentingan percaya pada perusahaan (Halim, 2008). Selanjut (Badjuri 2011), mengatakan profesional auditor dapat diukur dengan opini profesional auditor yaitu obyektivitas penilaian bukti audit. Peran yang penting dan besar dari profesi auditor sangatlah ditunggu oleh publik, karena itu dalam melakukan audit, benar-benar dapat mencerminkan hasil yang sesungguhnya terjadi pada klien, dengan demikian hasil audit harus dapat memperbaiki kinerja manajemen klien melalui rekomendasi dan tindak lanjut.

Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris riset sebelumnya adalah :

Tabel 2.1
Matrik Riset Sebelumnya

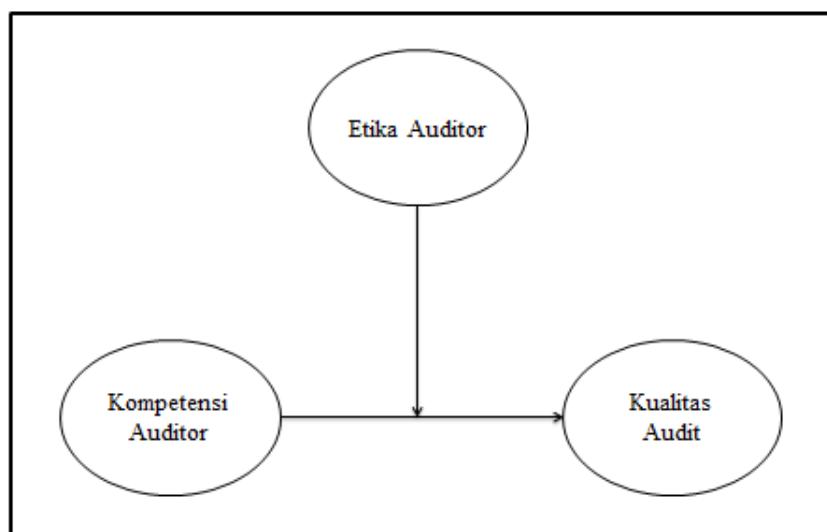
No	Peneliti	Variabel Riset	Hasil Penelitian
1	Alim, et al (2007)	Var. Independen : Kompetensi, , Independensi Dan Etika Auditor Var. Dependen/bebas: Kualitas Audit	Variabel independensi dan kompetensi memiliki berpengaruh signifikan pada kualitas audit, interaksi etika pemeriksa dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit.
2	Samsi et al (2012)	Variabel Independen : Pengalaman Kerja Independensi Kompetensi Kepatuhan Etika Variabel Dependen: Kualitas Hasil Pemeriksaan	Pengalaman ada pengaruh positif terhadap kualitas kerja audit, interaksi independensi dan kepatuhan etika auditor ada pengaruh pada kualitas hasil pemeriksaan. kompetensi dan interaksi kompetensi dan kepatuhan etika auditor tidak ada pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

3	Wicaksono (2015)	Variabel terikat : Kompetensi Independensi Moderasi : Etika Auditor Variabel bebas: Kualitas Audit	kompetensi, independensi memiliki dampak positif pada kualitas audit. pengaruh etika memoderasi kompetensi auditor berdampak positif terhadap kualitas audit. etika auditor memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit
4	Darayasa & Wisadha, 2016	Var. independen : Kompetensi independensi Moderasi : etika auditor Var. dependen: kualitas audit.	Kompetensi, independensi positif pengaruh pada kualitas audit, etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi pada kualitas audit, etika auditor memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit.
5	Wardhani & Astika, 2018	Var.independen : Kompetensi Akuntabilitas Moderasi : etika auditor Variabel Dependens: Kualitas Audit	etika auditor memperkuat hubungan kompetensi dan akuntabilitas. etika auditor tidak mempengaruhi hubungan antara independensi pada kualitas audit.

Data olahan, 2019

Konseptual dan Hipotesis Riset

Konseptual riset ini adalah sebagai berikut:



Sumber : Model Riset, 2019

Hipotesis Penelitian

Hubungan Kompetensi Seorang Auditor Pada Kualitas Kerja Audit

Auditor diwajibkan mempunyai kompetensi, kriteria baik dalam bidang akuntansi dan audit. Maksudnya adalah dapat menambah keyakinan hasil seorang auditor dalam bekerja yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan audit. Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam AAIPPI tahun 2014 sebagai standar kepada semua APIP dalam tugas audit. Standar umum mengatur auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang berkualitas dan serta kompetensi/keahlian untuk melaksanakan tanggung jawab auditya. Penelitian pada variabel ini dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi seorang auditor, dimana auditor merupakan objek yang terlibat secara langsung dalam proses audit. Samsi dkk (2012) menjelaskan bahwa kompetensi bagi auditor dalam audit yaitu pengetahuan dan kemampuan dalam prosedur audit, dimana diperlukan untuk pemahaman entitas klien, kemudian auditor bisa bekerja sama dalam tim audit, terakhir mampu menganalisa problem yang ada pada klien. Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi auditor pada kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian Alim, dkk (2007), Ningtyas & Aris (2016) Darayasa & Wisadha, 2016 dan Wardhani & Astika, 2018 membuktikan bahwa kompetensi auditor dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dihasilkan auditor.

H1 : Kompetensi Seorang Auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas kerja audit.

Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit, dengan moderasi Etika kerja Auditor

Etika seorang auditor adalah syarat utama yaitu satu set yang berisi peraturan atau norma-norma atau juga pedoman untuk menuntun dan mengatur tingkah laku auditor, jadi dapat diketahui hal mana yang wajib dan hal mana yang harus diabaikan dan mengatur pada suatu profesi akuntan. Maryani dan Ludigdo (2001). Alim dkk (2007) membuktikan dalam risetnya interaksi/saling pengaruh antara etika seorang auditor dan kompetensi seorang tidak memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja seorang auditor. Kontradiktif riset Wicaksono (2015), Darayasa & Wisadha, 2016 dan Wardhani & Astika, 2018 menghasilkan yaitu interaksi kompetensi yang ada pada auditor dengan seperangkat etika seorang auditor memiliki hubungan berpengaruh yang positif dan serta positif dan signifikan terhadap kualitas pekerjaan audit.

H2 : Ada pengaruh sifat kompetensi seorang pemeriksa terhadap kualitas kerja audit dengan moderasi etika yang dimiliki auditor.

Metodologi Riset

Bentuk Riset

Bentuk riset ini adalah metode kuantitatif yaitu metode untuk menyelesaikan problem riset ilmiah dengan maksud untuk memecahkan mencari jalan keluar suatu masalah yang diteliti dengan tema peran etika seorang auditor sebagai variabel pemoderasi pengaruh kompetensi yang dimiliki pemeriksa/auditor terhadap kualitas/kinerja seorang audit.

Tempat dan Waktu Penelitian

Auditor Inspektorat Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, waktu penelitian mulai Mei 2019 sampai dengan September 2019

Populasi dan Sampel

Auditor Inspektorat, yang telah pernah melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Prosedur Pengumpulan Data Riset

Riset ini menggunakan data primer, berupa kuesioner berisi item pertanyaan dari variabel yang digunakan yaitu kualitas audit, etika auditor, dan kompetensi auditor. Prosedur pengumpulan data, dibagikan langsung kepada auditor, waktu sekitar 30 menit, untuk menjawab kuesioner, setelah selesai langsung dikumpulkan kepada peneliti.

Variabel & Pengkuran

- a. Kualitas audit/Audit Quality adalah kemampuan/hasil seorang pemeriksa dapat dilihat dari kualitas hasil pemeriksaan sesuai dengan standar audit dan aturan yang berlaku. Pengukuran variabel audit quality menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Ningtyas dan Aris (2016) dengan indikator sebagai berikut: 1) apakah sesuai atau patuh pada standar audit yang berlaku, 2) kualitas pemeriksaan. Variabel kualitas suatu pekerjaan audit dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh jenis pernyataan yang diukur menggunakan ukuran skala *likert* dari 1 sampai dengan nilai 4.
- b. Kompetensi auditor adalah keahlian yang dimiliki oleh APIP dalam bidang akuntansi dan audit serta mengikuti dan memiliki pelatihan teknis yang dimilikinya. Dalam riset digunakan adalah instrument yang dikembangkan oleh Ningtyas dan Aris (2016) dengan indikator sebagai berikut : 1) kualitas personal auditor, 2) Auditor harus memiliki pengetahuan yang umum, dan 3) Serta auditor juga diminta memiliki keahlian khusus atau tertentu, dan terdiri (9) sembilan jenis pernyataan, dengan menggunakan pengukuran liket mulai nilai 1 sampai dengan nilai 4.
- c. Etika auditor adalah nilai atau moral atau prinsip yang harus ada pada diri seorang pemeriksa. Dalam riset ini untuk mengukur variabel etika seorang pemeriksa adalah indikator yang dikembangkan oleh Lay dkk (2017) dimana kepatuhan pada kode etik diukur dengan tiga indikator yakni: 1) integritas/kejujuran yang tinggi, 2) Obyektivitas, dan 3) dapat menjadi rahasia dan 4) harus mutlak memiliki kompetensi/kemampuan. Variabel etika seorang auditor dalam penelitian ini terdiri dari 12 (dua belas) instrumen liket dengan skala nilai 1 sampai dengan 4.

Metodelogi Analisis Data

Teknik & Alat Analisis Data Riset

Teknis analisis dengan (*Partial Least Squares*). Alasan digunakannya metode ini adalah relatif cukup kuat/tangguh karena tidak dengan perlu banyak syarat/ketentuan dan asumsi, serta data tidak dibutuhkan data harus berdistribusi dengan normal, dan data skala kategorial, ordinal, interval sampai nilai rasio, juga bisa digunakan sampel kecil atau tidak perlu dalam jumlah besar, yaitu WarpPLS 6.0.

Hasil Dan Pembahasan

Teknik Analisis Data

Riset ini memakai program WarpPLS 6.0 *Structural Equation Modelling* (SEM) dalam mengolah data penelitian, dengan hasil tabel 1 berikut:

Tabel 1: Koefisien Variabel Laten

	ETIAUD	KOMAUD	KUAAUD	ETIAUD*KOMAUD
R-squared			0.644	
Adj. R-squared			0.627	
Composite reliab.	0.929	0.923	0.894	0.936
Cronbach's alpha	0.915	0.894	0.861	0.928
Avg. var. extrac.	0.526	0.710	0.528	0.247
Full collin. VIF	3.851	3.858	2.642	4.326
Q-squared			0.567	

Sumber : WarpPLS 6.0. (2019).

Referensi tabel 1, koefisien dari masing-masing konstruk/variabel laten. Ghozali dan Latan (2014) mengatakan aturan main signifikansi untuk *R-Square* atau *Adjusted R²* = ≤ 0.70 , kriteria suatu model kuat, ≤ 0.45 , model penelitian moderat, dan ≤ 0.25 , model riset lemah. Analisis yang dilakukan tabel 1 *R-Square* atau *Adjusted R²* memiliki nilai (0.644, atau 0.627), maka dapat dikategorikan bahwa menunjukkan pengaruh variabel kualitas audit memiliki model yang kuat. Batas *rule of thumb* dan signifikansi untuk *Composite reliability* > 0.70 , digunakan riset konfirmatori dan nilai antara 0.60-0.70 untuk eksploratori riset. Tabel 1 menghasilkan nilai etika auditor 0.929, kualitas audit 0.894 dan kompetensi auditor 0.923. *Average variance extracted* (AVE) > 0.50 . Tabel 1 menghasilkan nilai etika auditor 0.526, kualitas audit 0.528 dan kompetensi auditor 0.710, dimana dengan nilai diatas 0.50. *Cronbach alpha* $> 0.6 - 0.70$. Tabel 1 menghasilkan nilai etika auditor 0.915, kualitas audit 0.861 dan kompetensi auditor 0.894. *Full collinearity variance inflation factor* (VIF) < 3.3 . Tabel 1 menghasilkan nilai etika auditor 3.851, kualitas audit 2.642 dan kompetensi auditor 3.858 dan Koefisien Q-squared manfaat menilai prediktif validitas atau blok relevansi variabel laten prediktor terhadap variabel laten kriterion. Berdasarkan tabel 1, hasil penelitian semua variabel terpenuhi syarat konsisten internal reliabilitas. Nilai validitas prediktif yang layak adalah jika koefisien Q-squared di atas nol (Hair *et al.*, 2011). Koefisien Q-squared di atas/lebih besar dari nilai nol maka variabel kualitas kerja audit dalam audit sebesar 0.567, kesimpulannya model riset ini valid dan baik.

Tabel 2.
Keterangan Model Fit

No	Hasil Uji/Parameter	Nilai Hitung	Cut-Off Value	Kriteria/Kesimpulan
Ke-1	<i>Average Path Coefficient</i> atau (APC)	0.529, P<0.001	P<0,05	Model Riset Baik
Ke-2	<i>Average R-Squared</i> atau (ARS)	0.644, P<0.001	P<0,05	Model Riset Fit
Ke-3	<i>Average adjusted R-squared</i> or (AARS)	0.627, P<0.001	P<0,05	Model Riset Layak
Ke-4	<i>Average full collinearity VIF</i> abbrev. (AFVIF)	3.669	<i>diterima if <5, ideally < 3.3</i>	Model Penelitian Fit
Ke-5	<i>Tenenhaus GoF</i> atau (GoF)	0.569,	<i>Kecil > 0.1, medium > 0.25, large > 0.36</i>	Model Terpenuhi Fit

Sumber: Hasil WarpPLS 6.0 (2019)

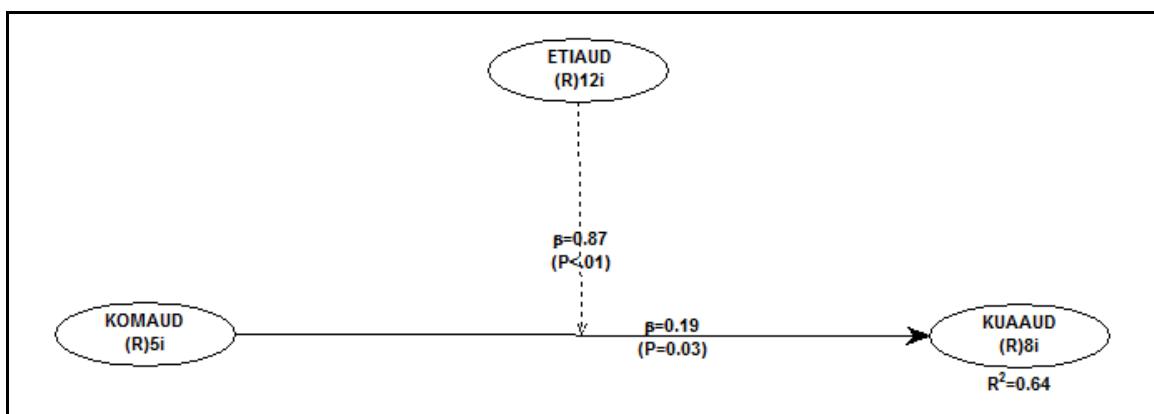
Penjelasan tabel 2, menurut (Ghozali dan Latan, 2014 adalah, nilai *Average Path Coefficient* (APC) adalah =0.529, maka model layak. Nilai *Average R-Squared* (ARS). =0.644, maka terpenuhi

signifikansi. Nilai *Average Adjusted R-Squared* (AARS) =0.627, memenuhi persyaratan signifikansi. Nilai *Average Full Collinearity VIF* (AFVIF) =3.669, tidak ada multikolinearitas. Terakhir nilai *Tenenhaus GoF* (GoF) =0.569, model penelitian adalah kuat.

Pembahasan Hasil

Riset dengan objek penelitian di Auditor Inspektorat Propinsi Kalbar. Kuesioner yang didistribusikan dalam penelitian ini sejumlah 47 buah, sesuai jadwal yang ditentukan maka ada 46 buah kuesioner kembali. Kemudian 46 lembar kuesioner dicek hasil isian dari responden, ditemukan 1 buah kuesioner, tidak diisi dengan lengkap, jadi kuesioner/data yang diolah 45 kuesioner. Tingkat jawaban responden adalah 97,8%, Rujukan (Indriantoro & Supomo, 2007) mengatakan riset sosial kisaran kuesioner kembali 10% - 20%, dengan begitu tingkat kembali kuesioner diatas rata-rata atau baik. Auditor laki-laki yang mengisi kuesioner yaitu 26 responden (58%), dan 19 auditor perempuan (42%), maka dominan auditor berjenis kelamin pria yang menjadi sampel peneliti.

Gambar 2 Model Hasil Penelitian



Sumber: Hasil Olah Data WarpPLS 6.0 (2019).

Berdasarkan dari Tabel 1, kemudian pada Gambar No. 2, bahwa semua indikator variabel validitas dan reliabilitas serta konsisten internal adalah mencerminkan suatu model yang baik.

Daftar tabel 3. Temuan/ringkasan output

Hipotesis	Uraian	Output
Hipotesis Pertama	Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Terbukti didukung
Hipotesis Kedua	Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Moderasi Etika Auditor.	Terbukti Diterima

Sumber: Olahan riset (2019).

Auditor yang memiliki kompetensi berpengaruh secara positif pada kualitas kerja seorang audit dan secara statistik signifikan pada $P=0.03$ (H_1), maka hipotesis 1 diterima. Berdasarkan gambar 2, hasil pengujian pada hipotesis 1 menunjukkan estimasi 0,19 dengan $p=0,03$. Nilai probabilitas berada dalam batas normal sehingga dapat disimpulkan kompetensi auditor ada pengaruh positif dan signifikan pada kualitas hasil audit. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Alim, dkk (2007), Ningtyas & Aris (2016) Darayasa & Wisadha, 2016 dan Wardhani & Astika, 2018, dimana hasil riset menyatakan bahwa kompetensi seorang auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja audit.

Teori atribusi menjelaskan dan mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan kejadian dan mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perlakunya. Kualitas audit merupakan suatu peristiwa yang ingin dijelaskan oleh seorang auditor dengan mengetahui apa saja yang mampu membuat kualitas audit yang dihasilkan meningkat. Adanya kompetensi auditor dapat membawa dampak pada kualitas audit yang dibuat oleh auditor. Semakin tinggi kompetensi auditor yang dirasakan oleh auditor maka kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor cenderung semakin tinggi pula. Berdasarkan teori atribusi, auditor yang mampu menginterpretasi suatu peristiwa atau tugas mampu dan dapat meningkatkan kualitas audit, karena auditor mengetahui apa saja yang harus ia lakukan dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini akan mengakibatkan auditor mampu membuat kualitas audit yang baik dan tepat. Auditor yang memiliki kompetensi baik dalam melakukan audit dapat meningkatkan kualitas audit. Apalagi responden riset ini yang mana proksi auditor adalah sebenarnya auditor yang sudah menempuh dan memiliki kompetensi dalam audit sehingga mampu meningkatkan kualitas audit LKPD.

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa kompetensi auditor kepada kualitas pekerjaan audit dimoderasi oleh etika seorang auditor, dengan secara statistik nilai signifikansi pada $P<0.01$ (H_2), maka hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian etika auditor terbukti memiliki pengaruh positif atau memoderasi dan signifikan pada $P<0.01$ terhadap hubungan antara variabel kompetensi auditor dan kualitas audit Berdasarkan gambar 2, pengujian hipotesis kedua menghasilkan nilai estimat 0,87 pada $p<0,001$. Dengan probabilitas normal, jadi kesimpulannya kompetensi seorang auditor inspektorat terhadap kualitas tugas audit dengan dimoderasi sifat etika pada auditor. Temuan ini kosisten dibandingkan hasil riset Alim,et. al (2007), Ningtyas & Aris (2016) Darayasa & Wisadha, 2016 dan Wardhani & Astika, 2018, berkesimpulan kompetensi seorang auditor kepada kualitas pekerjaan audit dimoderasi etika yang baik seorang auditor diterima dan terbukti. Artinya tingginya kompetensi yang dimiliki pemeriksa, akan berdampak semakin tinggipula dan baik pula kualitas suatu hasil audit, kemudian hadirnya moderasi etika auditor dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

Teori atribusi menginterpretasikan kejadian dan mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan sebab atas perilaku. Kualitas audit suatu peristiwa yang ingin dijelaskan seorang auditor dengan mengetahui apa saja yang mampu membuat kualitas audit yang dihasilkan meningkat. Pemeriksa harus memiliki kompetensi yang cukup dalam pelaksanaannya sehingga auditor semakin beretika dalam melakukan tugas audit dan mampu membuat kualitas audit. Etika yang baik auditor sebagai pemoderasi pengaruh variabel kompetensi auditor terhadap kualitas auditor, auditor merasa tugas audit yang dihadapinya harus dengan kompetensi dan etika auditor yang tinggi sehingga pemeriksa tidak kesulitan melakukan tugas audit dan opini semakin berkualitas. Tugas auditor yang semakin berat dengan target berkualitas tinggi akan membuat auditor semakin beretika, sehingga pemeriksa terbebani tugas berat membuat auditor semakin hati-hati dan patuh pada kode etik seorang auditor dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Konklusi Dan Saran.

Konklusi

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa hubungan yang positif kompetensi seorang auditor memiliki pengaruh secara positif/kuat kepada kualitas audit, bermakna tingginya kompetensi akuntan, tinggi pula lahir kualitas audit dari seorang akuntan atas laporan keuangan pemerintah

daerah, begitu juga sebaliknya apabila kompetensi auditor yang dirasakan auditor rendah maka menjadikan hasil kerja kualitas audit rendah. Kemudian etika pemeriksa sebagai pemoderasi hubungan kemampuan/kompetensi auditor terhadap kualitas audit diterima, hal ini bermakna dalam model riset ini, adanya etika seorang auditor akan semakin memperkuat atau pemoderasi hubungan kompetensi pemeriksa pada kualitas opini audit yang dibuat aparat auditor atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Implikasi.

Organisasi pemerintah dan swasta perlu untuk mempertimbangkan menggunakan variabel etika auditor, kompetensi auditor bagi setiap auditor dalam melaksanakan tugas dan prosedur audit dalam rangka melahirkan kualitas audit. Terakhir variabel etika auditor, kompetensi auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, juga disebabkan oleh karena auditor menginterpretasi peristiwa sehingga mampu berbuat untuk meningkatkan kualitas hasil audit hal ini selaras dengan teori atribusi dimana mempelajari bagaimana auditor menginterpretasikan suatu kejadian dan prilakunya. Kualitas audit suatu peristiwa yang ingin dijelaskan oleh seorang auditor dengan mengetahui apa saja yang mampu membuat kualitas audit yang dihasilkan meningkat

Keterbatasan.

Penulis sudah berusaha merancang dan merencanakan semaksimal mungkin riset ini, namun perlu diteliti lebih lanjut pertama, model riset sekarang, hanya mampu menjelaskan 64%. karena itu masih ada peluang riset sebesar 36%, dipengaruhi variabel lain. Maka dari itu variabel penelitian yang digunakan belum bisa digeneralisasi untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas audit. Terakhir, riset ini menggunakan kuesioner, dan tidak melakukan wawancara, dengan pengamatan menyeluruh dimana mungkin ada ketidakfahaman responden dalam menjawab kuesioner yang diberikan peneliti. Sebaiknya dalam riset mendatang supaya lebih mendapatkan hasil yang lebih baik, maka bisa menggunakan *mix method* (metode kuantitatif dan kualitatif).

Saran.

Berpjik dari keterbatasan, maka ruang riset untuk kedepan yaitu : (a) mereplikasi dan memodifikasi model riset ini untuk sampel BPK Se-Indonesia, karena auditor BPK adalah nyata sudah melakukan audit atas laporan keuangan serta telah memberikan dan melahirkan opini atas LKPD ; (b) menambah variabel lain sebagai variabel crition, misal, keahlian yang dimiliki auditor dan *mood* bagi auditor.

Daftar Pustaka

- Alim dkk (2007) Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Simposium Nasional Akuntansi X. UNHAS. Makasar.
- Arens, A.A, *et al.* 2012. Audit dan Jasa Audit Assurance Pendekatan Terintegritas. Edisi Keduabelas. Jakarta. Erlangga
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), 2014. Standar Audit Intern Pemerintah.
- Badjuri, Achmad (2012) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Jawa Tengah). Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Vol. 1.
- Bastian, Indra (2010) Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

- Darayasa & Wisadha, 2016, Etika Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pada Kualitas Audit Di Kota Denpasar, *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.1. April (2016): 142-170.*
- Ghozali, I. Latan, H. (2014) Partial Least Squares. Konsep, Metode Dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 5.0. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro..
- Halim, A. (2008) Auditing. Edisi Ke Empat Jilid 1. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta-Indonesia.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta Salemba Empat.
- Indriantoro & Supomo, (2012). Metode Penelitian Akuntansi & Manajemen. BPFWE UGM Jogjakarta.
- Kurnia, K dan Sofie (2014) Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti*, Vol. 1 No 2.
- Lay. F.,dkk (2017) Pengaruh Kecakapan Profesional Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Dengan Kepatuhan Pada Kode Etik Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* Vol.8 No 1.
- Mardiasmo (2006) Perwujudan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2. No.1, Mei.
- Maryani, T. dan Ludigdo, U. (2001) Survei Atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. *TEMA II* (1): 49-62.
- Mulyadi. (2002). Auditing Edisi Keenam Buku 1. Salemba Empat. Jakarta-Indonesia.
- Murwanto, dkk (2011) Audit Sektor Publik. Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Ningtyas, W. A, & Aris, M. A. 2016. Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, Dan Due Professional Care : Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit Yang Dimodrasikan Dengan Etika Profesi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. Vol, 1 No.1, 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Rahmawati. J.D.W. (2013) Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Vol. 1, No. 1.
- Robins, S.P. & T. A. Judge. 2008. Prilaku Organisasi. Edisi 12. Jakarta. Salemba Empat
- Ryan S. G, *et al.* (2001). *SEC Auditor Independence Requirements: AAA Financial Accounting Standards Committee. Accounting Horizons* 15 (December): 373-386.
- Samsi dkk (2012) Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dengan Kepatuhan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 1.

- Saputra, Anton, Eka. 2012. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. JUKAKSI Vol. 1. No.2 2012
- Sholihin, M & Ratmono, D (2013) Analisis SEM-PLS Dengan Warppls 3.0 Untuk Hubungan Standar Pemeriksaan Keungan Negara (SPKN) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2017.
- Suartana, W.(2010) Akuntansi Keperilakuan, Teori Akuntansi dan Implementasi, Yogyakarta: ANDI.
- Tuanakotta, TM. 2011. Berpikir Kritis dalam Auditting. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardhani & Astika, 2018, Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Independensi pada Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi, ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23.1. April (2018): 31-59 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p02>
- Wicaksono, M (2015) Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Bawasda Pemerintah Daerah Di Ex-Karesidenan Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Dan Pajak Vol. 15.

**PENGARUH *BOOK TAX DIFFERENCES*, ROA, LEVERAGE DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN BUMN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Helisa Noviarty, SE, MM

Abstraksi

Pertumbuhan laba adalah perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Book Tax Differences* baik itu Beda Temporer maupun Beda Tetap, ROA, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu lima tahun mulai dari 2014 sampai dengan 2018. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* didapat 6 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beda Temporer dari *Book Tax Differences*, Beda Tetap dari *Book Tax Differences*, ROA, Leverage dan Ukuran perusahaan masing-masing variabel ini berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Namun secara simultan variabel-variabel ini tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba.

Kata Kunci : Pertumbuhan Laba, Book Tax Differences, ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan

Latar Belakang

Pengelolaan usaha yang baik dapat diwujudkan dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan para pengambil keputusan. Informasi keuangan terbagi menjadi dua yaitu informasi akuntansi dan informasi non akuntansi. Informasi akuntansi terdiri dari informasi operasional, informasi akuntansi keuangan, informasi akuntansi manajemen serta informasi akuntansi pajak. Semua informasi akuntansi dan non akuntansi dapat diperoleh dari laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Saputro, 2011).

Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi sebuah perusahaan. Laporan keuangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi investor dan calon investor dan juga informasi yang digunakan sebagai hasil dari kegiatan operasional sebuah perusahaan yang dikeluarkan secara periodik oleh perusahaan, yang akan menjadi sebuah pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, *stockholders*, kreditur, dan pemerintah. Untuk itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan serta menggambarkan kondisi perusahaan pada masa lalu dan proyeksi masa datang. Laporan keuangan juga merupakan indikator bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut, yaitu ada pihak internal yang merupakan manajemen perusahaan, kemudian ada pihak eksternal, yaitu pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, *supplier*, konsumen, dan masyarakat umum lainnya. Pihak-pihak tersebut menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajemen perusahaan, yaitu salah satunya merupakan informasi perolehan laba selama periode tertentu. Menurut *Statements of*

Financial Accounting Concepts (SFAC) informasi laba memiliki manfaat dalam menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba dan menaksir risiko dalam investasi.

Menurut PSAK No 1 Paragraf ke 10 (2012), “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atau penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Laporan keuangan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dimana dengan mengetahui informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007:349) menjelaskan bahwa salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (*earning per share*). Disamping itu, laba merupakan pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks (Belkoui,2011: 226).

Laba umumnya dipandang sebagai dasar untuk perpajakan, penentu dari kebijakan pembayaran dividen, panduan dalam melakukan investasi dan pengambilan keputusan dan satu elemen dalam peramalan. Laba mempunyai peran sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Laba dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan seperti pembagian bonus atau insentif para manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen dan dasar penentuan besarnya penrogenaan pajak oleh pihak internal dan eksternal pada suatu perusahaan (Wijayanti, 2006). Angka laba diharapkan dapat mempresentasikan kinerja suatu entitas atau perusahaan secara keseluruhan. Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal yang nantinya akan berdampak kepada kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Rosanti dan Zulaikha, 2013).

Pertumbuhan laba adalah perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Karena yang menjadi sorotan utama bagi stakeholder seperti investor, kreditor dan pembuat kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan seperti pengujur prestasi atau kinerja manajemen perusahaan, pemberian kompensasi dan bonus bagi manajer, pemberian kredit bagi perusahaan dan juga bagi pemerintah yang gunakan sebagai dasar penentuan pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh.

Ada dua versi laba dalam laporan keuangan yaitu laba yang dikenal sebagai laba kena pajak yang diperhitungkan menurut aturan-aturan perpajakan dan laba yang diperhitungkan menurut akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. PSAK No 46 (2012) menyebutkan bahwa laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan). Informasi yang berisikan perbedaan laba akuntansi dan laba pajak disebut juga dengan *Book Tax Differences*. *Book Tax Differences* timbul dari perbedaan yang sifatnya sementara (*Temporary Differences*) dan perbedaan yang sifatnya tetap (*Permanent Differences*). Perbedaan tersebut diakibatkan karena terdapat perbedaan prinsip

akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2019).

Book Tax Differences merupakan perbedaan besaran laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Ketidaksamaan perhitungan laba yang terjadi setiap tahunnya ini akan berdampak pada pertumbuhan laba suatu periode perusahaan dikarenakan perusahaan harus menyelesaikan kembali perhitungan laba akuntansinya dengan menurut aturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal merupakan penggabungan antara penyajian laporan keuangan laba rugi akuntansi dengan laba rugi fiskal guna memperhitungkan besarnya penghasilan kena pajak (Deviana dalam Saputro, 2011:15).

Salah satu faktor penting yang harus diketahui oleh para calon investor adalah *Return On Asset* (ROA) yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik minat para investor karena perusahaan diharapkan dapat memiliki tingkat pengembalian return yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan untuk dilirik oleh para investor.

Leverage merupakan salah satu ratio yang menunjukkan seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Leverage diukur dengan cara perbandingan total utang dengan total asset. Menurut Horne dkk (2007) Financial Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetap sehingga keuntungan pemegang saham bertambah.

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) adalah salah satu skala untuk mengklasifikasikan perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai proksi dari *political cost*, dianggap sangat sensitif terhadap perilaku pelaporan laba. Perusahaan berukuran sedang dan besar lebih memiliki tekanan yang kuat dari para *stakeholdernya*, agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para investornya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut ukurannya perusahaan dapat dikualifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu : besar, menengah dan kecil. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, nilai pasar atas saham perusahaan dan lain-lain. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan didasarkan pada total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan karena pada umumnya besarnya perusahaan dinilai dari besarnya aktiva perusahaan.

Penelitian Oktafioni dkk (2011) tentang pengaruh Book Tax Differences terhadap pertumbuhan laba dengan hasil yang menunjukkan bahwa temporary differences dan permanent differences dari Book Tax Differences tidak memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama masa pengamatan di tahun 2009-2011. Dari penelitian Hutabarat (2012) tentang Pengaruh Book Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan Food and Beverages di BEI periode pengamatan tahun 2010-2012 dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa book tax differences berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian penelitian dari Husna dkk (2015) tentang Pengaruh Book Tax Differences dan Likuiditas terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan manufaktur subsector industry dasar dan kimia periode pengamatan di tahun 2012-2015 yang menunjukkan hasil penelitian yaitu perbedaan permanen (permanent differences) dan working capital to total asset berpengaruh

terhadap pertumbuhan laba sedangkan perbedaan temporer (temporary differences) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan dengan adanya fenomena dan hasil penelitian yang berbeda maka menunjukkan adanya *research gap* di dalam penelitian sejenis. *Research gap* adalah kesenjangan penelitian yang perlu diteliti dan menjadi alasan bagi penulis untuk dijadikan objek penelitian dengan menambahkan beberapa variabel sebagai objek penelitian dengan judul “Pengaruh *Book Tax Differences*, ROA, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Adapun perbedaan lainnya dengan penelitian terdahulu berupa sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI dengan alasan perusahaan BUMN merupakan perusahaan dengan laba yang relatif tinggi sehingga menghasilkan pajak yang tinggi pula sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Tahun pengamatan penelitian adalah periode tahun 2014-2018 dengan total perusahaan BUMN yang dengan total populasi sebanyak 20 perusahaan BUMN.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Apakah perbedaan permanen dalam *book tax differences* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba ?
2. Apakah perbedaan temporer dalam *book tax differences* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba ?
3. Apakah ROA memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba ?
4. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba ?
5. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba ?
6. Apakah Perbedaan Permanen, Perbedaan Temporer, ROA, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Laba ?

Teori dan Pengembangan Hipotesis

Book Tax Differences merupakan perbedaan besaran laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Ketidaksamaan perhitungan laba yang terjadi setiap tahunnya ini akan berdampak pada pertumbuhan laba suatu periode perusahaan dikarenakan perusahaan harus menyelesaikan kembali perhitungan laba akuntansinya dengan menurut aturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal merupakan penggabungan antara penyajian laporan keuangan laba rugi akuntansi dengan laba rugi fiskal guna memperhitungkan besarnya penghasilan kena pajak (Deviana dalam Saputro, 2011:15). Menurut Suandy (2011) dalam Putri dan Sari (2017) adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini yang biasa disebut dengan *book tax differences*. Menurut Resmi (2017), perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).

Beda Temporer dari Book Tax Differences

Perbedaan waktu/temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan

harta berwujngaruh signifikan terhadap ud,unjukkan bahwa Temporary Differences berpe amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Perbedaan Temporer biasanya timbul karena perbedaan metode yang digunakan antara pajak dengan akuntansi dalam hal penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan dan metode penghapusan piutang (Agoes dan Trisnawati, 2010:219). Penelitian yang dilakukan Saputro dan Zulaikha (2011) tentang Pengaruh Temporary Differences dari Book Tax Differences terhadap Pertumbuhan laba perusahaan menunjukkan bahwa Temporary Differences berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini di dukung oleh Jackson (2009) serta Martani (2010) yang menunjukkan bahwa Temporary Differences berpengaruh signifikan negative terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lestari dan Ardiyanto (2011) yang menunjukkan bahwa Beda Temporer dari Book Tax Differences tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan. Dari pembahasan ini dapat dijadikan dasar untuk membangun hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Beda Temporer dari Book Tax Differences berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan BUMN di BEI

Beda Tetap dari Book Tax Differences

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, deviden, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh

Penelitian Oktafioni dkk (2011) tentang pengaruh Book Tax Differences terhadap pertumbuhan laba dengan hasil yang menunjukkan bahwa temporary differences dan permanent differences dari Book Tax Differences tidak memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama masa pengamatan di tahun 2009-2011. Dari penelitian Hutabarat (2012) tentang Pengaruh Book Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan Food and Beverages di BEI periode pengamatan tahun 2010-2012 dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa book tax differences berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian penelitian dari Husna dkk (2015) tentang Pengaruh Book Tax Differences dan Likuiditas terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan manufaktur subsector industry dasar dan kimia periode pengamatan di tahun 2012-2015 yang menunjukkan hasil penelitian yaitu perbedaan permanen (*permanent differences*) dan *working capital to total asset* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sedangkan perbedaan temporer (*temporary differences*) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dari Pembahasan diatas dapat dijadikan dasar dalam membangun hipotesis sebagai berikut :

H_2 : Beda Tetap dari Book Tax Differences berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan BUMN Di BEI

Return On Total Aset (ROA)

Pengembalian atas total aktiva (*return on total asset*) merupakan ratio memperlihatkan tingkat efisien operasi perusahaan secara keseluruhan. *Return On total Asset* (ROA) menyediakan dasar-dasar yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan ROE yang baik. Sebuah perusahaan yang tidak memiliki ROA yang baik hampir tidak mungkin menghasilkan ROE yang memuaskan.

$$ROA = \frac{EBIT}{Total\ Asset} \times 100$$

ROA merupakan salah satu Ratio Profitabilitas. ROA adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri pada periode tertentu. Dari sudut pandang investor salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan dimasa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan ROA perusahaan. Dan indikator ini juga sangat penting untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan oleh investor di suatu perusahaan mampu memberikan *return* yang diharapkan. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ROA ini.

H₃ : ROA berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan BUMN Di BEI

Leverage

Rasio *Leverage* atau rasio utang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar modal yang berasal dari pinjaman (modal asing) untuk membiayai kegiatan investasi dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, manajer perusahaan dengan *financial leverage* melakukan perataan laba sebab, tingkat *financial leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa risiko perusahaan yang tinggi pula sehingga pihak *stakeholder* (kreditur) cenderung memperhatikan besarnya risiko perusahaan dengan penggunaan hutang yang tinggi sehingga akan dihadapkan pada kewajiban yang tinggi pula. Pada saat kondisi perusahaan rugi atau pada saat laba yang tidak terlalu tinggi, maka kreditur akan dihadapkan pada risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. *Leverage* dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva suatu dana. Semakin besar *leverage* menunjukkan bahwa dana yang disediakan oleh pemilik dalam membiayai investasi perusahaan semakin kecil, atau tingkat penggunaan utang yang dilakukan perusahaan semakin meningkat. Semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi untuk menghindari pelanggaran kontrak perjanjian hutang. Akibat kondisi tersebut perusahaan cenderung untuk melakukan pertumbuhan laba. Weston dan Copeland dalam Dewi (2011) mengemukakan bahwa penggunaan hutang akan menentukan tingkat *financial leverage* perusahaan, karena dengan menggunakan lebih banyak hutang dibandingkan modal sendiri maka beban yang ditanggung perusahaan tinggi yang pada akhirnya akan menyebabkan Book Tax Differences menurun.

H₄ : Leverage berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan BUMN di BEI

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Jika semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasarnya maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketiga variabel tersebut dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar ukuran

perusahaan tersebut, misal semakin besar aktiva maka akan semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka akan semakin besar pula perusahaan itu dikenal dalam masyarakat. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh kepada struktur pendanaan dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan ada kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang lebih besar pula. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki kebutuhan dana yang besar. Dan salah satu pemenuhan dana yang tersedia adalah dengan pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal ini dapat diperoleh dari penerbitan saham, penerbitan obligasi dan hutang, sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut perusahaan akan lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat berbagai cara dalam mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan ukuran, antara lain dengan total asset, *log size*, total penjualan, nilai pasar saham dan lainnya. Didalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma total asset.

H₅ : Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Emiten (perusahaan) yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan (dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017). Populasi perusahaan BUMN yang listing di BEI berjumlah 20 perusahaan dan 6 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sample. Data yang dianalisis oleh penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan diolah menjadi suatu informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan studi kepustakaan dan elektronik (melalui situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari internet Pasar Modal.

Teknik analisis yang dilakukan adalah secara kuantitatif dimana *memperhitungkan Book Tax Differences* baik yang permanen maupun perbedaan sementara, ROA, Leverage maupun Ukuran Perusahaan selama periode pengamatan berdasarkan laporan keuangan tahunan dan informasi-informasi lainnya serta menganalisa hubungannya terhadap Pertumbuhan Laba secara tahunan.

Untuk mengetahui perubahan yang diteliti menggunakan formula :

1. Variabel Dependend (Terikat)

Pengertian pertumbuhan laba dalam penelitian ini merupakan penghasilan/laba sebelum pos luar bisa yang diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\Delta NI = \frac{NI_t - NI_{t-1}}{NI_{t-1}} \times 100$$

2. Variabel Independen (Bebas)

A. *Return On total Asset* (ROA)

Pengembalian atas total aktiva (*return on total asset*) merupakan ratio memperlihatkan tingkat efisien operasi perusahaan secara keseluruhan. *Return On total Asset* (ROA) menyediakan dasar-dasar yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan ROE yang baik. Sebuah perusahaan yang tidak memiliki ROA yang baik hampir tidak mungkin menghasilkan ROE yang memuaskan.

$$ROA = \frac{EBIT}{Total\ Asset} \times 100$$

B. Leverage

Leverage merupakan salah satu ratio yang menunjukkan seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Leverage diukur dengan cara perbandingan total utang dengan total asset.

C. Ukuran perusahaan (*Firm*)

$$Leverage = \frac{Total\ hutang}{Total\ Asset}$$

Ukuran perusahaan adalah $\log \text{size}$ diklasifikasikan ke dalam besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat berbagai cara dalam mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan ukuran, antara lain dengan total asset, *log size*, total penjualan, nilai pasar saham dan lainnya. Didalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma total asset.

$$\text{Firm size} = \log \text{total asset}$$

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara dua variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi bertujuan untuk menguji pengaruh book tax differences (perbedaan permanen dan perbedaan sementara), ROA, leverage dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan laba dengan model sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan audit secara berturut-turut dalam kurun waktu 2014-2018. Dalam penelitian ini objek penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dari total populasi banyak 20 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh sample sebanyak 6 perusahaan yang akan menjadi objek dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang menggunakan persamaan regresi linier berganda.

Tabel 4.1
Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI	20
Perusahaan yang tidak memenuhi	(14)
Jumlah Perusahaan yang digunakan sebagai Sampel	6
Masa Pengamatan (periode tahun 2014-2018)	5
Jumlah Variabel Penelitian	5
Jumlah Data Penelitian	30

Sumber: Data Olahan

Pengaruh *Book Tax Differences*, ROA, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba, dihitung berdasarkan data-data yang ada dan diurutkan secara panel yaitu dengan menggabungkan data 6 perusahaan tersebut selama 5 tahun berturut-turut dengan 5 variabel sehingga jumlah data adalah 30. Analisis data dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya dilakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Keempat pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 21. Prosedur dimulai dengan memasukkan variable-variabel penelitian ke program SPSS yang kemudian dihasilkan output-output yang sesuai metode analisis data yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, didapat 6 perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini dan diamati selama periode pengamatan yaitu ditahun 2014-2018. Adapun daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Nama Perusahaan yang D

NO	Kode	Nama Perusahaan
1	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	JSMD	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
3	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
4	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
5	KAEF	PT Kimi Farma (Persero) Tbk
6	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk

Sumber : Data olahan

Sebelum melakukan empat pengujian stastistik, dilakukan perhitungan pada variable dependen (Pertumbuhan Laba) dan variable-variabel independen (Book Tax Differences, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan) terlebih dahulu.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS Versi 21 dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari perhitungan, diperoleh nilai rata-rata Pertumbuhan Laba (Y) selama periode 2014-2018 adalah sebesar 6,84193%.

2. Dari perhitungan, diperoleh nilai rata-rata Beda Temporer dari *Book Tax Differences* (X_1) selama periode 2014-2018 adalah sebesar 0,005167%.
3. Dari perhitungan, diperoleh nilai rata-rata nilai Beda Tetap (X_2) selama periode 2014-2018 adalah sebesar 0,002333%.
4. Dari perhitungan, diperoleh nilai rata-rata ROA (X_3) selama periode 2014-2018 adalah sebesar 3,9217%.
5. Dari perhitungan diperoleh nilai rata-rata Leverage (X_4) selama periode 2014-2018 adalah sebesar 0,63440%.
6. Dari perhitungan diperoleh nilai rata-rata Ukuran Perusahaan (X_5) selama periode 2014-2018 adalah sebesar 6,64290%.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu model regresi yang baik adalah dimana datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan analisis statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov* (*K-S*) dengan hipotesis pengujian yaitu :

H_0 = Data terdistribusi dengan normal

H_A = Data tidak terdistribusi secara normal

Adapun hasil perhitungan Uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
N	30	30	30	30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}						
Mean	6,84193	,005167	,002333	3,9217	,63440	6,64290
Std.	23,62802	,0122955	,0043018	5,86563	,139763	1,554393
Deviation	7					
Most Extreme Differences						
Absolute	,143	,306	,245	,163	,161	,297
Positive	,143	,306	,198	,163	,161	,297
Negative	-,097	-,182	-,245	-,085	-,109	-,170
Kolmogorov-Smirnov Z	,784	1,678	1,342	,895	,880	1,626
Asymp. Sig. (2-tailed)	,570	,070	,055	,399	,421	,010

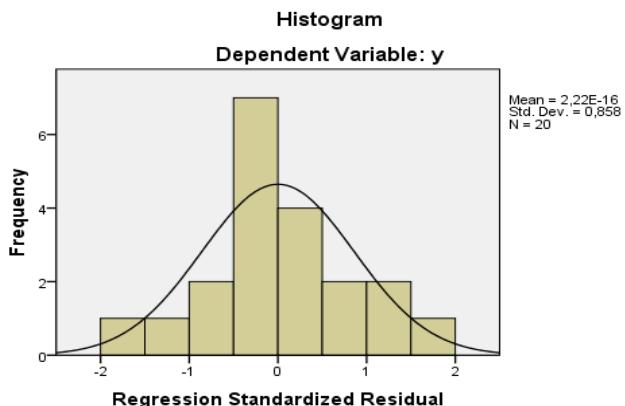
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data olahan

Pada hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov - Smirnov* (*K-S*) dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov - Smirnov* untuk variabel X_1 1,678 dengan probabilitas signifikansi 0,070 dan nilainya diatas $\alpha=0,05$ hal ini berarti hipotesis H_0 diterima atau variabel X_1 terdistribusi secara normal. Begitu pula dengan nilai *Kolmogorov - Smirnov* untuk variabel X_2 sebesar 1,342 dengan probabilitas signifikansi 0,055 dan nilainya diatas $\alpha=0,05$ hal ini berarti hipotesis H_0 diterima atau variabel X_2 terdistribusi secara normal. Untuk variabel berikutnya nilai *Kolmogorov - Smirnov* untuk variabel X_3 = 0,895 dengan probabilitas signifikansi 0,399 dan nilainya diatas $\alpha=0,05$ hal ini berarti hipotesis H_0 diterima atau variabel X_3 terdistribusi secara normal. Untuk variabel berikutnya nilai *Kolmogorov - Smirnov* untuk variabel X_4 adalah 0,880 dengan probabilitas signifikansi 0,421 dan nilainya diatas

$\alpha=0,05$ hal ini berarti hipotesis H_0 diterima atau variabel X_4 terdistribusi secara normal. Dan yang terakhir untuk variabel X_5 nilai *Kolmogorov – Smirnov* untuk variabel sebesar 1,626 dengan probabilitas signifikansi 0,010 dan nilainya diatas $\alpha=0,05$ hal ini berarti hipotesis H_0 diterima atau variabel X_5 terdistribusi secara normal. Selain dengan Uji *Kolmogorov – Smirnov* diatas, normalnya data juga tercermin pada plot grafik histogram berikut ini :

Gambar 4.1

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai Tolerance $<0,10$ atau nilai VIF > 10 . Dari table 4.5 berikut didapat hasil X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance yang kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen nilainya lebih dari 95% sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	53,611	47,794		1,122	,273		
x1	5,711	449,466	,003	,013	,990	,567	1,763
x2	-1076,961	1087,219	-,196	-,991	,332	,792	1,263
x3	1,868	1,507	,464	1,240	,227	,222	4,510
x4	18,198	37,119	,108	,490	,628	,644	1,553
x5	-9,507	5,675	-,625	-1,675	,107	,223	4,492

a. Dependent Variable: y

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada period t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

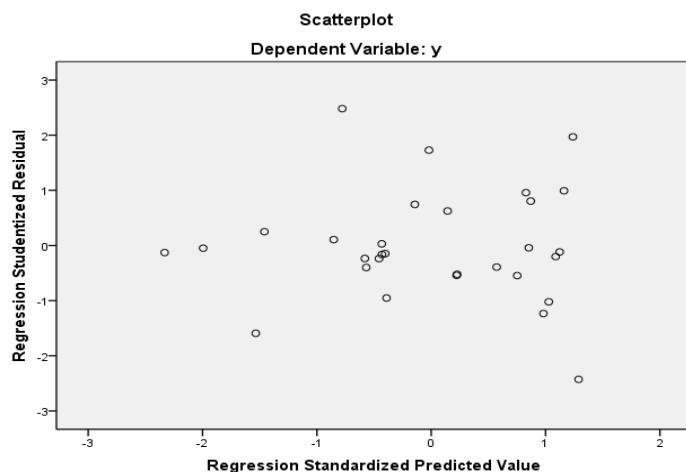
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,505	,255	,100	22,415570	2,045

Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,045, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai table dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 30 (n) dan jumlah variabel independen 5 (k=5) maka didapatkan nilai DW 2,045 lebih besar dari batas atas dan kurang dari batas bawah sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik scatterplots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.2 diatas dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas atau menyebar, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan SPSS untuk mengolah data dan memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	53,611	47,794		1,122	,273
X ₁	5,711	449,466	,003	,013	,990
X ₂	-1076,961	1087,219	-,196	-,991	,332
X ₃	1,868	1,507	,464	1,240	,227
X ₄	18,198	37,119	,108	,490	,628
X ₅	-9,507	5,675	-,625	-1,675	,107

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode regresi linear berganda, maka dapat disusun sebuah persamaan sebagai berikut :

$$Y = 53,611 + 5,711X_1 - 1076,961X_2 + 1,868X_3 + 18,198X_4 - 9,507X_5 + e$$

Nilai konstanta (a) sebesar 53,611, menunjukkan bahwa nilai variabel independen Beda Temporer dari *Book Tax differences* (X₁), Beda tetap dari *Book Tax Differences* (X₂), ROA (X₃), Leverage (X₄) dan Ukuran Perusahaan (X₅) diasumsikan sama dengan nol (0), maka besarnya tingkat pertumbuhan laba adalah sebesar 53,611.

Koefisien regresi X₁ sebesar 5,711 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Beda Temporer dari *Book tax Differences* (X₁) sebesar 1% akan diikuti kenaikan sebesar 5,711% dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol maka pertumbuhan laba akan meningkat sebesar 5,711 unit. Ini artinya bahwa Beda Temporer (X₁) dengan Pertumbuhan Laba menunjukkan hubungan yang searah (positif) artinya setiap kenaikan Beda Temporer (X₁) akan mendorong terjadinya pertumbuhan laba.

Koefisien regresi X₂ sebesar -1076,961 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Beda Tetap dari *Book Tax Differences* (X₂) sebesar 1 % akan diikuti penurunan pertumbuhan laba sebesar 1076,961% dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol maka pertumbuhan laba akan menurun sebesar 1076,961 unit. Ini artinya bahwa setiap kenaikan Beda Tetap dari *Book Tax Differences* (X₂) maka akan menurunkan pertumbuhan laba.

Koefisien regresi X₃ sebesar 1,868 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel ROA (X₃) sebesar 1% akan diikuti kenaikan sebesar 1,868% dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol maka pertumbuhan laba akan meningkat sebesar 1,868 unit. Ini artinya bahwa ROA (X₃) dengan Pertumbuhan Laba menunjukkan hubungan yang searah (positif) artinya setiap kenaikan ROA (X₃) akan mendorong terjadinya pertumbuhan laba.

Koefisien regresi X₄ sebesar sebesar 18,198 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Leverage (X₄) sebesar 1% akan diikuti kenaikan sebesar 18,198% dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol maka pertumbuhan laba akan meningkat sebesar 18,198 unit. Ini artinya bahwa Leverage (X₄) dengan Pertumbuhan Laba

menunjukkan hubungan yang searah (positif) artinya setiap kenaikan Leverage (X_4) akan mendorong terjadinya pertumbuhan laba.

Koefisien regresi X_5 sebesar -9,507 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Ukuran Perusahaan (X_5) sebesar 1 % akan diikuti penurunan pertumbuhan laba sebesar 9,507% dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol maka pertumbuhan laba akan menurun sebesar 9,507 unit. Ini artinya bahwa setiap kenaikan Leverage (X_5) maka akan menurunkan pertumbuhan laba.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (t Test)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Beda Temporer, Beda Tetap, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5) terhadap variabel dependen Pertumbuhan Laba (Y) pada Perusahaan BUMN yang listing di BEI.

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	53,611	47,794		1,122	,273
X_1	5,711	449,466	,003	,013	,990
X_2	-1076,961	1087,219	-,196	-,991	,332
X_3	1,868	1,507	,464	1,240	,227
X_4	18,198	37,119	,108	,490	,628
X_5	-9,507	5,675	-,625	-1,675	,107

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah sebesar 5%. Nilai dari distribusi t dengan $\alpha=0,05/2=0,025$ dan $df (n-k-1) = (30-5-1)=24$. Dimana (n) merupakan jumlah data dalam penelitian, k merupakan variabel independen sehingga diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian sebesar $\pm 1,711$ dan kriteria penerimaannya sebagai berikut :

H_1 diterima jika $-1,711 \leq t_{hitung} \leq 1,711$

H_1 ditolak jika $t_{hitung} > 1,711$ atau $t_{hitung} < -1,711$

Untuk menginterpretasikan koefisien varabel bebas independen dapat juga menggunakan *unstandardized coefficients* maupun *standardized coefficients*.

Berdasarkan tabel uji t di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

H_1 : Beda Temporer dari Book Tax Differences berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang listing di BEI.

Untuk mengetahui apakah hipotesis pertama diterima atau tidak, dapat dilihat dari probabilitas signifikansi pada masing-masing variabel, untuk H_1 kita lihat pada variabel Beda Temporer (X_1) tingkat signifikansi sebesar 0,990 yang nilainya diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Laba dipengaruhi oleh Beda Temporer (X_1) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti Beda Temporer dari Book Tax Differences memiliki pengaruh terhadap

pertumbuhan laba namun pengaruh yang ditimbulkan bukan merupakan indikator utama perusahaan dalam pertumbuhan labanya.

H₂ : Beda Tetap dari *Book Tax Differences* berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.

Untuk mengetahui apakah hipotesis kedua diterima atau tidak, dapat dilihat dari probabilitas signifikansi pada masing-masing variabel, untuk H₁ kita lihat pada variabel Beda Tetap (X₂) tingkat signifikansi sebesar 0,332 yang nilainya diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Laba dipengaruhi oleh Beda Tetap (X₂) maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini berarti Beda Tetap dari *Book Tax Differences* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba namun pengaruh yang ditimbulkan bukan merupakan indikator utama perusahaan dalam pertumbuhan labanya.

H₃ : ROA berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.

Untuk mengetahui apakah hipotesis ketiga diterima atau tidak, dapat dilihat dari probabilitas signifikansi pada masing-masing variabel, untuk H₁ kita lihat pada variabel ROA (X₃) tingkat signifikansi sebesar 0,227 yang nilainya diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Laba dipengaruhi oleh ROA (X₃) maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini berarti ROA memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba namun pengaruh yang ditimbulkan bukan merupakan indikator utama perusahaan dalam pertumbuhan labanya.

H₄ : Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.

Untuk mengetahui apakah hipotesis keempat diterima atau tidak, dapat dilihat dari probabilitas signifikansi pada masing-masing variabel, untuk H₁ kita lihat pada variabel Leverage (X₄) tingkat signifikansi sebesar 0,628 yang nilainya diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Laba dipengaruhi oleh Leverage (X₄) maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini berarti Leverage memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba namun pengaruh yang ditimbulkan bukan merupakan indikator utama perusahaan dalam pertumbuhan labanya.

H₅ : Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.

Untuk mengetahui apakah hipotesis kelima diterima atau tidak, dapat dilihat dari probabilitas signifikansi pada masing-masing variabel, untuk H₁ kita lihat pada variabel Ukuran Perusahaan (X₅) tingkat signifikansi sebesar 0,107 yang nilainya diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Laba dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan (X₅) maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Ini berarti Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap laba namun pengaruh yang ditimbulkan bukan merupakan indikator utama perusahaan dalam pertumbuhan labanya.

Hasil Uji Pengaruh Simultan (F Test)

Uji F atau disebut juga uji Analysis of Variance (ANOVA) pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya dalam suatu model regresi. Berikut hasil perhitungan dengan software SPSS untuk Uji F dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4131,240	5	826,248	1,644	,187 ^a
Residual	12058,987	24	502,458		
Total	16190,227	29			

a. Predictors: (Constant), X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil output perhitungan uji model regresi yang ditampilkan pada table diatas didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 1,644 dengan tingkat signifikansi 0,187 lebih besar dari 0,05 ($0,187 > 0,05$) sehingga berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini disimpulkan bahwa model penelitian ini variabel-variabel bebasnya tidak berpengaruh secara sinultan terhadap pertumbuhan laba.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness of fit* dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,505	,255	,100	22,415570	2,045

Sumber : data olahan SPSS

Dari table 4.9 diatas dapat diketahui besarnya adjusted R² adalah 0,100, hal ini berarti 10% dari variasi Pertumbuhan Laba dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen yaitu Beda Temporer dari *Book Tax differences* (X_1), Beda tetap dari *Book Tax Differences* (X_2), ROA (X_3), Leverage (X_4) dan Ukuran Perusahaan (X_5). Sedangkan sisanya sebesar 90% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya signifikansi Book Tax Differences, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa :

1. Beda Temporer dari Book Tax Differences berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.
2. Beda Tetap dari Book Tax Differences berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.
3. ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.
4. Leverage berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.

5. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.
6. Secara bersama-sama (simultan) Book Tax Differences, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan *financial leverage* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN yang *listing* di BEI.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel terbatas pada perusahaan BUMN dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh, dengan periode pengamatan terbatas hanya lima tahun, yaitu hanya pada tahun 2014 sampai dengan 2018, sehingga mungkin tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai pertumbuhan laba.
2. Penelitian ini hanya menguji lima variable yang berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, yaitu Book Tax Differences, ROA, Leverage dan ukuran perusahaan.

Saran

Dari simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Rendahnya koefisien determinasi dari model yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan laba. Maka dianjurkan untuk menggunakan variabel lain tersebut.
2. Sebaiknya menambah periode tahun penelitian sehingga dapat memberikan tren perusahaan yang lebih jelas serta memperluas populasi penelitian sehingga dapat diketahui apakah perusahaan pada sektor lain memiliki hasil yang sama atau tidak.
3. Menggunakan variabel lainnya seperti *debt to equity ratio*, harga saham, *dividend payout ratio*, kepemilikan public dan sebagainya. Karena dalam penelitian hanya menggunakan empat variabel saja.

Daftar Pustaka

- Algifari. 2000. Analisa Regresi : Teori, Kasus dan Solusi. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Atmaja, Lukas Setia. 2003. Manajemen Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Andi. Brigham dan Houston. 2006. Fundamental of Financial Management : Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Ferdinand, Auguty. 2006. Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Cetakan ke Empat, Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Haryanto. 2003. Pengaruh Rasio Book Tax Differences Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Minuman di BEJ. Tesis. Fakultas Pascasarjana Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Jackson, Mark.2009. Book Tax Differences and Earnings Growth. Working Paper. SSRN: Universitas Nevada.
- Martani, Dwi, Dan Persada, Aulia Eka. 2008. Pengaruh Book Tax Gap terhadap JaPersistensi Laba. Jurnal Akuntansi. Universitas Indonesia.

- Rosanti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Perubahan Laba. Jurnal. Semarang. Univeritas Diponegoro.
- Sawir, Agnes. 2005. Analisis kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saputro, N. A. 2001. Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010). Semarang. BP Universitas Diponegoro.
- Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Cetakan Pertama. Yogyakarta:BPFE.
- Van Horne, James dan Wachowict. 2007. Prinsip Manajemen Keuangan. Buku Dua. Edisi Ke-12. Jakarta. Salemba Empat.

PEMAHAHAMAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PRINSIP AKUNTANSI

Khristina Yunita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap prinsip akuntansi. Mahasiswa yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa yang berada di semester akhir atau minimal semester 7. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif karena mencoba menggambarkan dan menjelaskan pemahaman responden dalam bentuk persentase. Jumlah responden yang diminta untuk mengisi kuesioner adalah sebanyak 69 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip biaya historis berada pada kategori sedang, yaitu sebesar 34,78%. Pemahaman mahasiswa terhadap prinsip pengakuan pendapatan berada pada kategori sedang atau sebesar 23,19%, sedangkan pemahaman terhadap prinsip menandangkan berada pada kategori rendah sebesar 37,68%. Pemahaman mahasiswa terhadap pengungkapan penuh berada pada kategori sedang sebesar 39,13%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program studi akuntansi perlu meningkatkan sistem pembelajaran agar mahasiswa tidak lagi sekedar menghafal tetapi mampu mengaplikasikannya pada kasus-kasus akuntansi maupun pada kasus – kasus nyata di masyarakat.

Kata Kunci : pemahaman, prinsip biaya historis, pengakuan pendapatan, menandangkan, pengungkapan penuh

Pendahuluan

Akuntansi secara umum didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi sehingga mempermudah penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi siapa saja yang akan menggunakan informasi tersebut. Berdasarkan definisi tersebut secara ringkas, proses akuntansi terdiri atas: Pertama, identifikasi dan pengukuran data yang relevan untuk keputusan, terdiri dari transaksi-transaksi dan kejadian dalam suatu entitas. Transaksi atau kejadian akan selalu berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan. Kedua, proses dan pelaporan yaitu kegiatan yang mencakup pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran. Pencatatan berarti mengumpulkan data secara kronologis, sedangkan penggolongan transaksi bertujuan agar penyajian dapat diringkas dan pengikhtisaran yaitu menyajikan informasi yang telah digolongkan ke dalam bentuk laporan keuangan. Ketiga, laporan akuntansi yang menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keempat, analisis dan interpretasi yaitu kegiatan untuk menjelaskan keterkaitan angka dan item-item dalam laporan keuangan dan menjelaskan perubahannya serta kemudian menghubungkannya dengan keputusan yang diambil (Sumarso, 2015)

Prinsip akuntansi berbeda dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). PABU adalah sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, serta praktik yang yang dipilih atau dianggap berterima secara umum serta dijadikan pedoman umum di lingkungan atau negara tertentu. PABU berdasarkan definisi ini memiliki kedudukan di atas prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi sendiri bermakna sebagai seperangkat konsep, standar, prosedur, metode, dan teknik sebagai objek pengetahuan akuntansi dan istilahnya hanya dipakai dalam kajian secara teoritis. Prinsip akuntansi yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK, 2018) terdiri atas empat prinsip.

Pertama, Biaya Historis (*Historical Cost Principle*) yang menghendaki digunakannya harga perolehan didalam mencatat utang, modal, aktiva, dan biaya. Harga perolehan adalah harga pertukaran yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkaitan dalam transaksi. Harga perolehan

ini selalu terjadi didalam transaksi yang melibatkan dua belah pihak yang bebas berdasarkan *arm's-length transaction*. Berdasarkan prinsip biaya historis, harga jual-beli atau biaya yang sudah dikeluarkan saat transaksi terjadi merupakan dasar pencatatan hutang dan harta. Prinsip dasar ini digunakan pada saat pencatatan awal yang bersumber pada biaya perolehan dan dianggap merupakan penaksiran terbaik untuk nilai pasar wajar utang atau harta.

Kedua, Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*) yaitu pengakuan aliran masuk aset yang muncul dari penyerahan jasa atau barang yang dilakukan selama periode tertentu oleh suatu unit usaha. Dasar yang dipakai sebagai alat ukur besamya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang didapat dari semua transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Pendapatan diakui saat direalisasi atau dapat direalisasikan dan dihasilkan. Direalisasi ditunjukkan saat barang atau jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas. Dapat direalisasi ditunjukkan saat asset siap ditukar dengan kas atau klaim atas kas.

Ketiga, Prinsip Menandingkan (*Matching Principle*) yaitu menandingkan biaya dengan pendapatan yang muncul. Prinsip ini berfungsi untuk menentukan besarnya penghasilan bersih dalam setiap periode. Penandingan ini muncul sebagai akibat dari penerapan akuntansi akrual, yaitu mengakui pendapatan dan biaya pada saat terjadinya meskipun belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjaga agar pendapatan dan biaya dilaporkan secara wajar, tidak *overvalued* ataupun *undervalued*.

Keempat, Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*), yaitu penyajian semua informasi secara lengkap dalam laporan keuangan. Pengungkapan penuh mendorong entitas untuk memutuskan informasi apa yang harus dilaporkan berdasarkan praktik yang umum atau lazim dalam menyediakan informasi yang cukup penting dalam mempengaruhi penilaian dan pembuatan keputusan. Pengungkapan penuh juga harus memperhatikan biaya penyusunan dan manfaat yang diperoleh.

Prinsip Akuntansi merupakan hal yang mendasari akuntansi dan seluruh laporan keuangan yang dibuat. Prinsip akuntansi dijabarkan dari perihal tujuan laporan keuangan, konsep teoritis akuntansi, dan postutat akuntansi dan prinsip akuntansi juga merupakan sebuah prosedur akuntansi atau dasar pengembangan teknik yang digunakan dalam membuat susunan laporan keuangan. Bagi seorang akuntan, prinsip-prinsip akuntansi ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan karena prinsip akuntansi ini sebagai pondasi dasar bagi seorang akuntan sehingga prinsip akuntansi ini harus diaplikasikan dan dipahami dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Mahasiswa akuntansi diperkenalkan dengan prinsip akuntansi saat mereka memasuki semester 1 dan mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi I. Prinsip akuntansi juga kembali dibahas pada mata kuliah Akuntansi Menengah I dan Teori Akuntansi pada saat membahas Rerangka Konseptual dalam Pelaporan Akuntansi. Pemahaman mahasiswa terhadap prinsip akuntansi seharusnya sudah memadai jika memandang jumlah muatan materi pada mata kuliah yang sudah terampu pada semester 1, 3, dan 7. Mahasiswa yang mampu memahami prinsip akuntansi akan dengan mudah mengaplikasikannya pada saat menyusun laporan keuangan. Temuan peneliti saat menguji mahasiswa pada ujian komprehensif menunjukkan hampir sebagian mahasiswa yang diuji belum memahami prinsip akuntansi. Mereka pada umumnya terkesan menghapal dan pada saat diminta untuk membahas kasus, mereka mengalami kesulitan untuk menjawab.

Fenomena ini menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti tentang bagaimana pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap prinsip akuntansi. Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa yang berada di semester akhir atau minimal di semester 7. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap prinsip akuntansi dan menemukan solusi atau cara pengajaran mahasiswa agar mampu memahami prinsip akuntansi sehingga mudah untuk mengimplementasikannya saat menyusun laporan keuangan, bukan hanya sebatas hapalan saja.

Metode Penelitian

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa akuntansi semester akhir atau minimal semester 7. Jumlah semua mahasiswa akuntansi yang berada pada kategori ini adalah 220 orang yang berasal dari program studi akuntansi kelas regular A dan PPAPK kelas sore dan malam. Dengan menggunakan rumus slovin dan tingkat error 10%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 69 orang yang kemudian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi Sampel

Prodi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
AK Reguler	120	38
PPAPK Sore	50	16
PPAPK Malam	50	16
Jumlah	220	69

Sumber : data olahan, 2019

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pemahaman mahasiswa atas prinsip akuntansi yang dimaksud adalah skor yang diperoleh mahasiswa dalam menjawab kuesioner yang berisi pernyataan tentang prinsip akuntansi yang mencakup prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip menandingkan, dan prinsip pengungkapan penuh. Masing-masing variable diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

Metode dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan persentase. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan persentase. Menurut Sugiyono (2013: 147), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari obyek yang telah diteliti sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Rumus untuk menghitung frekuensi relatif (persentase) Sudijono (2012: 43) adalah sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Dimana :

p = angka persentase

f = frekuensi jawaban

N = jumlah responden

Kriteria penskoran data untuk tiap prinsip akuntansi dapat diketahui dengan melakukan pengkategorian sesuai dengan instrumen. Agar memudahkan untuk mengidentifikasi dan pendeskripsian tiap prinsip akuntansi dalam penelitian, maka skor akan ditentukan berdasarkan pada nilai mean (\bar{x}) dan standar deviasi (σ) dengan menggunakan lima skala. Hasilnya kemudian akan diklasifikasikan sesuai dengan kategori penilaian dan digambarkan dalam bentuk histogram.

Tabel 2. Kategori Penilaian Pemahaman

Interval	Kategori
$X > \bar{x} + 1,5 \alpha$	Sangat Tinggi
$\bar{x} + 0,5 \alpha < X \leq \bar{x} + 1,5 \alpha$	Tinggi
$\bar{x} - 0,5 \alpha < X \leq \bar{x} + 0,5 \alpha$	Sedang
$\bar{x} - 1,5 \alpha < X \leq \bar{x} - 0,5 \alpha$	Rendah
$X \leq -1,5 \alpha$	Sangat Rendah

Sumber : Azwar (2011: 108)

Keterangan :

X : Total jawaban responden

\bar{x} : Mean

α : Standar Deviasi

Pembahasan

Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang sudah disiapkan oleh peneliti. Jumlah pertanyaan terkait prinsip akuntansi berjumlah 16 pertanyaan. Masing-masing prinsip berisikan 4 pernyataan. Hasil pengujian penelitian adalah sebagai berikut:

Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan sahif apabila telah memenuhi validitas yang telah ditentukan. Untuk mengukur validitas angket sebagai instrumen menggunakan rumus *pearson product moment*. Semua butir pernyataan dikatakan valid atau sahif apabila mempunyai r hitung $\geq r$ tabel dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Hasil pengujian validitas adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,2419	0,2369	valid
2	0,3521	0,2369	valid
3	0,4794	0,2369	valid
4	0,2726	0,2369	valid
5	0,3060	0,2369	valid
6	0,3313	0,2369	valid
7	0,2382	0,2369	valid
8	0,3108	0,2369	valid
9	0,3236	0,2369	valid
10	0,2943	0,2369	valid
11	0,3246	0,2369	valid
12	0,4065	0,2369	valid
13	0,2453	0,2369	valid
14	0,3071	0,2369	valid
15	0,4793	0,2369	valid
16	0,2532	0,2369	valid

Sumber : data olahan, 2019

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa 16 pernyataan dalam kuesioner bisa digunakan semua.

Reliabilitas

Perhitungan reliabilitas dengan *Alpha Cronbach* memperoleh tingkat reliabilitas dalam sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Prinsip Akuntansi	0,604	reliabel

Sumber : data olahan, 2019

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa butir pertanyaan reliabel karena memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 0,6.

Hasil Pengolahan Data

Statistik deksiptif hasil pengolahan data kuesioner tentang prinsip akuntansi adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
His	69	2,25	4,50	3,1449	,53620
RR	69	1,75	4,50	3,1775	,70071
MC	69	1,50	4,75	2,8842	,71371
FD	69	1,25	4,25	2,9275	,67260
Valid N (listwise)	69				

Sumber : data olahan, 2019

Pernyataan Prinsip Biaya Historis memiliki mean sebesar 3, 1449 dengan standar deviasi sebesar 0,53. Pernyataan *Revenue Recognition* memiliki mean sebesar 3,1775 dengan standar deviasi sebesar 0,70071. Pernyataan *Matching Concept* memiliki mean sebesar 2,8842 dengan standar deviasi sebesar 0,71371 dan Pernyataan Full Disclosure memiliki mean sebesar 2,9275 dengan standar deviasi sebesar 0,67260.

Prinsip Biaya Historis

Pemahaman terhadap biaya historis diukur dengan menggunakan 4 (empat) pernyataan. Hasil pengolahan data pemahaman mahasiswa terhadap biaya historis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Pemahaman Prinsip Biaya Historis

Interval	Frekuensi	%	Kategori
4,01 - 4,50	4	5,80	Sangat Tinggi
3,51 - 4,00	8	11,59	Tinggi
3,01 - 3,50	24	34,78	Sedang
2,51 - 3,00	19	27,54	Rendah
2,01 - 2,50	14	20,29	Sangat Rendah
Total	69	100	

Sumber : data olahan, 2019

Hasil pengolahan data pemahaman mahasiswa terhadap prinsip biaya historis berada pada kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa responden belum sepenuhnya memahami tentang prinsip biaya historis. Mereka tahu tentang definisinya tetapi belum mampu mengaplikasikannya ke dalam praktik.

Prinsip Pengakuan Pendapatan

Sama seperti prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan juga terdiri atas 4 pernyataan. Pemahaman mahasiswa terhadap biaya historis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Pemahaman Prinsip Biaya Historis

Interval	Frekuensi	%	Kategori
3,95 - 4,50	14	20,29	Sangat Tinggi
3,40 - 3,94	15	21,74	Tinggi
2,85 - 3,39	16	23,19	Sedang
2,30 - 2,84	12	17,39	Rendah
1,75 - 2,29	12	17,39	Sangat Rendah
Total	69	100	

Sumber : data olahan, 2019

Kategori pemahaman mahasiswa terhadap prinsip biaya historis juga berada pada posisi sedang yaitu sebesar 23,19%. Secara rata-rata pemahaman mahasiswa cenderung mengarah sedang ke sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih memahami prinsip biaya historis dan dapat dengan mudah mengaplikasikannya pada kasus-kasus akuntansi.

Prinsip Menandingkan

Prinsip menandingkan terdiri atas 4 pernyataan yang diukur dengan skala likert. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa untuk prinsip menandingkan berada pada kategori rendah yaitu sebesar 37,68%. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Prodi Akuntansi untuk mencari solusi agar mahasiswa lebih memahami prinsip menandingkan, bukan sekedar menghafal tetapi juga mampu untuk mengaplikasikannya pada kasus-kasus akuntansi. Secara lengkap, tingkat pemahaman mahasiswa disusun dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Pemahaman Prinsip Menandingkan

Interval	Frekuensi	%	Kategori
4,14 - 4,79	2	2,90	Sangat Tinggi
3,48 - 4,13	11	15,94	Tinggi
2,82 - 3,47	20	28,99	Sedang
2,16 - 2,81	26	37,68	Rendah
1,50 - 2,15	10	14,49	Sangat Rendah
Total	69	100	

Sumber : data olahan, 2019

Prinsip Pengungkapan Penuh

Prinsip pengungkapan penuh diukur dengan menggunakan skala likert. Ada 4 (empat) pernyataan yang diuji disini. Jawaban responden menunjukkan pemahaman terhadap pengungkapan penuh berada di kategori sedang, yaitu sebesar 39,13%. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa

memahami prinsip pengungkapan penuh, tetapi agak kesulitan saat mengaplikasikannya pada kasus-kasus akuntansi.

Tabel 9. Pemahaman Prinsip Pengungkapan Penuh

Interval	Frekuensi	%	Kategori
4,05 - 4,74	2	2,90	Sangat Tinggi
3,35 - 4,04	17	24,64	Tinggi
2,65 - 3,34	27	39,13	Sedang
1,95 - 2,64	19	27,54	Rendah
1,25 - 1,94	4	5,80	Sangat Rendah
Total	69	100	

Sumber : data olahan, 2019

Secara umum, pemahaman mahasiswa terhadap prinsip akuntansi yang terdiri atas biaya historis, pengakuan pendapatan, menandingkan, dan pengungkapan penuh berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memang lebih banyak menghafal definisi dan kemudian kebingungan saat mencoba mengaplikasikannya ke dalam bentuk kasus-kasus akuntansi. Penelitian ini menjadi masukan bagi pengelola program studi akuntansi untuk membenahi sistem pembelajaran agar lebih baik.

Penutup

Simpulan

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap prinsip biaya historis terbanyak berada pada kategori sedang yaitu sebesar 34,78%. Pemahaman mahasiswa terhadap prinsip pengakuan pendapatan juga berada pada kategori sedang, yaitu sebesar 23,19%. Mahasiswa memiliki pemahaman yang rendah terhadap prinsip menandingkan dengan jumlah persentase sebesar 37,68%. Pemahaman mahasiswa terhadap pengungkapan penuh berada di kategori sedang dengan persentase sebesar 39,13%.

Keterbatasan Penelitian

Pernyataan yang diuji dalam kuesioner ini disusun berdasarkan adaptasi kasus yang terdapat pada buku *Intermediate Accounting*. Prinsip akuntansi yang digunakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang terdapat dalam *conceptual framework IFRS*.

Rekomendasi Untuk Penelitian Yang Akan Datang

Rekomendasi untuk penelitian yang akan datang adalah dengan menguji kembali pernyataan dalam kuesioner. Responden penelitian agar dibedakan berdasarkan angkatan dan IPK, untuk mengetahui kemampuan mahasiswa.

Daftar Pustaka

- IAI, 2017, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Salemba, Jakarta.
- Sudaryono, 2012, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Weygandt, Kimmel, Kieso, 2012, Financial Accounting IFRS edition, John Wiley & Sons, Inc., USA

PEMANFAATAN APLIKASI SMARTPHONE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI)

Rudy Kurniawan, SE., M.Sc. Ak

Abstrak

Penggunaan teknologi komunikasi, seperti handphone dan internet sebagai alat multifungsi, karena multifungsinya tersebut masyarakat dapat menggunakan teknologi ini secara positif ataupun negatif tergantung setiap individu. Namun dengan perkembangan berbagai aplikasi yang terdapat dalam teknologi telepon seluler, perangkat ini tampaknya mampu memberikan kontribusi pada perkuliahan mahasiswa dan peningkatan kinerja akademik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang pemanfaatan aplikasi yang terdapat pada smartphone yang dimiliki oleh mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Berbagai informasi akan diperoleh dari penelitian ini antara lain, merk yang digunakan, berapa besar biaya yang dikeluarkan, berapa lama penggunaan aplikasi, aplikasi yang digunakan dan informasi lainnya termasuk indeks prestasi mahasiswa yang bersangkutan. Data-data ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti e-learning, e-accounting, e-audit dan sebagainya

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa (responden) telah memiliki handpone, ada yang memiliki Handpone lebih dari 1(satu) unit, Penggunaan Handpone di kalangan responden menunjukkan lebih banyak waktu (di atas 4 jam) yang digunakan dibandingkan penggunaan laptop.. Aplikasi twitter termasuk yang paling tidak diminati oleh mahasiswa untuk dimiliki. Aplikasi yang sering dibuka oleh responden adalah WhatsApp Dalam berkomunikasi, aplikasi WhatsApp paling banyak digunakan dibandingkan Facebook, Instagram dan Twitter. Hasil menunjukkan untuk aplikasi Facebook, Instagram dan Twitter, responden tidak menggunakan dalam berkomunikasi. Responden menggunakan Aplikasi yang ada lebih banyak bertujuan untuk berinteraksi di media sosial dibandingkan dengan browsing, mendengar music dan merekan video.

Kata Kunci : *Handpone, Laptop, Manfaat*

Pendahuluan

Teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak.

Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman sehingga terjadi penambahan fungsi teknologi yang semakin memanjakan kehidupan manusia. Salah satu contoh fasilitas canggih saat ini adalah *handphone*. Di awal kemunculannya, handphone

hanya dimiliki oleh kalangan tertentu yang benar-benar membutuhkannya demi kelancaran pekerjaan mereka. Namun, seiring perkembangan zaman, *handphone* telah dimiliki oleh semua kalangan baik yang benar-benar membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan tak terkecuali masyarakat. Kini *handphone* bukan lagi sekadar alat berkomunikasi, tetapi *handphone* juga merupakan alat untuk mencipta dan menghibur dengan suara, tulisan, gambar, dan video.

Lembaga riset *International Data Corporation (IDC)* kembali mengeluarkan laporan merek smartphone terlaris di dunia untuk kuartal ketiga tahun 2018. Untuk daftar kali ini tidak jauh berbeda dengan edisi kuartal sebelumnya. Dalam laporan IDC, vendor *smartphone* asal China, Huawei, kembali menunjukkan performa cemerlang dibanding produsen *iPhone*, Apple. Huawei masih duduk di peringkat kedua dengan pangsa pasar 14,6 persen, sementara *Apple* berada tepat di bawahnya dengan pangsa pasar 13,2 persen (KumparanTECH, 2018)

Selain itu, perkembangan pesat beberapa teknologi komunikasi *handphone* memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti Internet berhasil mempengaruhi masyarakat dunia. Sekarang *handphone* dengan fitur internet tidak hanya sekadar teknologi untuk berbagi data via *e-mail*, *ftp*, dan lain-lain. Namun, internet juga menawarkan berbagai situs yang menyediakan berbagai hal seperti jejaring sosial yang sangat populer pada masyarakat sekarang ini. Jejaring sosial ini memungkinkan setiap masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain di daerah lain atau di negara lain.

Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Menurut Bohang (2018), Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, setidaknya begitu menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua 2,49 persen. Usia muda, banyak inovasi Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di tanah air adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini mengabsahkan profesi-profesi baru di ranah maya, semisal *Selebgram* (selebritas *Instagram*) dan *Youtuber* (pembuat konten *YouTube*). Menjamurnya perusahaan rintisan *digital* atau *startup* pun sedikit banyak digerakkan oleh kelompok usia ini, baik mereka sebagai pendiri atau konsumen. Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, orang tua di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet (APJII dalam Bohang. 2018)

Tingkat pendidikan dan level ekonomi Selain usia, faktor pendidikan mempengaruhi penetrasi internet di Indonesia. Sebanyak 88,24 dari mereka yang menggenggam gelar S2 dan S3 terhubung dengan internet. Mayoritas lulusan S1 dan Diploma juga telah menggunakan internet, yakni sebanyak 79,23 persen. Di beberapa universitas dan akademi kejuruan, internet memang telah menjadi bagian penting dari proses belajar-mengajar. Contohnya, tugas dan ujian dikumpulkan lewat *e-mail*, bukan lagi

berbentuk kertas. Mencari referensi pun kerap dari jurnal online atau e-Book, bukan buku-buku fisik (APJII dalam Bohang. 2018).

Menurut APJII dalam Bohang. 2018, proses administrasi seperti pengambilan mata kuliah, evaluasi dosen, hingga survey di kampus juga sudah terhubung ke sistem online. Untuk yang tingkat pendidikannya sampai SMA/MA/Paket C, SMP/MTs/Paket B, SD/MI/Paket A, dan yang tidak sekolah, persentase pengguna internetnya secara berurutan 70,54 persen, 48,53 persen, 25,10 persen, dan 5,45 persen. Dari level ekonomi juga bisa dibedakan, di mana mayoritas pengguna internet berasal dari kelas menengah ke bawah. Dari 143 juta masyarakat Indonesia yang sudah terkoneksi internet, ada sekitar 62,5 juta masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggunakan internet. Sedangkan masyarakat kelas atas sebesar 2,8 juta jiwa.

Penggunaan teknologi komunikasi, seperti *handphone* dan internet sebagai alat multifungsi, karena multifungsinya tersebut masyarakat dapat menggunakan teknologi ini secara positif ataupun negatif tergantung setiap individu. Penelitian Tindell dan Bohlander (2012) menunjukkan bahwa mahasiswa sering menggunakan ponsel selama kuliah sedang berlangsung. meskipun ada aturan yang melarangnya. Namun dengan perkembangan berbagai aplikasi yang terdapat dalam teknologi telepon seluler, perangkat ini tampaknya mampu memberikan kontribusi pada pembelajaran siswa dan peningkatan kinerja akademik. Misalnya, "*smartphone*" modern memberi siswa akses langsung dan portabel ke banyak kemampuan peningkatan pendidikan yang sama seperti komputer yang terhubung ke Internet, seperti pencarian informasi *online*, berbagi file, dan berinteraksi dengan para profesor dan sesama mahasiswa (Bull & McCormick , 2012; Tao & Yeh, 2013). Sebaliknya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak mahasiswa menganggap telepon seluler terutama sebagai alat rekreasi, dan paling umum menggunakan ponsel untuk jejaring sosial, menjelajahi internet, menonton video, dan bermain game (Lepp, Li, & Barkley, 2015; Lepp , Barkley, Sanders, Rebold, & Gates, 2013). Jika biasanya digunakan untuk liburan daripada pendidikan, maka ponsel dapat mengganggu pembelajaran dalam pengaturan akademik (Levine, Waite, & Bowman, 2007). Dengan demikian, hubungan potensial antara penggunaan ponsel dan kinerja akademik tidak jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang pemanfaatan aplikasi yang terdapat pada smartphone yang dimiliki oleh mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Berbagai informasi akan diperoleh dari penelitian ini antara lain, merk yang digunakan, berapa besar biaya yang dikeluarkan, berapa lama penggunaan aplikasi, aplikasi yang digunakan dan informasi lainnya termasuk indeks prestasi mahasiswa yang bersangkutan. Data-data ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti e-learning, e-accounting, e-audit dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pemanfaatan Aplikasi yang ada pada Handpone di kalangan mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tentang pemanfaatan aplikasi yang terdapat pada smartphone yang dimiliki oleh mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Berbagai informasi akan diperoleh dari penelitian ini antara lain, merk yang digunakan, berapa besar biaya yang dikeluarkan, berapa lama penggunaan aplikasi, aplikasi yang digunakan dan informasi lainnya termasuk indeks prestasi mahasiswa yang bersangkutan. Data-data ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti e-learning, e-accounting, e-audit dan sebagainya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Handphone

Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola (divisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah *DynaTAC*. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel.

Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat dua kilogram. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan US\$1 juta. Pada tahun 1983, telepon genggam portabel berharga US\$4 ribu (Rp36 juta) setara dengan US\$10 ribu (Rp90 juta).

Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 *MHz spektrum*, setara dengan lima *channel TV* yang tersalur ke seluruh dunia.

Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi selular adalah Amos Joel Jr yang lahir di Philadelphia, 12 Maret 1918, ia memang diakui dunia sebagai pakar dalam bidang *switching*. Ia mendapat ijazah bachelor (1940) dan master (1942) dalam teknik elektronik dari MIT. Tidak lama setelah studi, ia memulai kariernya selama 43 tahun (dari Juli 1940-Maret 1983) di Bell Telephone Laboratories, tempat ia menerima lebih dari 70 paten Amerika di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang *switching*. Amos E Joel Jr, membuat sistem penyambung (*switching*) ponsel dari satu wilayah sel ke wilayah sel yang lain. *Switching* ini harus bekerja ketika pengguna ponsel bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel lain sehingga pembicaraan tidak terputus. Karena penemuan Amos Joel inilah penggunaan ponsel menjadi nyaman. (www.wikipedia.com)

Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon *nirkabel* yaitu sistem GSM (*Global System for Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*). Badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). Telepon genggam atau *handphone* adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel konvesional namun dapat dibawa kemana-mana (*portable*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel*, *wireless*). *Handphone* saat ini memang bukan barang yang mewah dan aneh bagi masyarakat. Industri *handphone*, bergerak sangat cepat, setara dengan melesatnya kecepatan suaranya. Walau fungsi utamanya adalah untuk menelepon/berbicara jarak jauh, kini semakin banyak teknologi pendukung yang

terintegrasi dengan produk *handphone*, seperti radio FM, kamera digital, dan sekarang bahkan merambah ke jaringan internet. Belum lagi ukuran *handphone* yang berlomba untuk makin kecil dan menarik (Nikmah, 2016)

Selain bermanfaat untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, *handphone* umumnya juga mempunyai manfaat pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*short message service*, SMS). Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini *handphone* juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, *game*, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Selain fitur-fitur tersebut, *handphone* sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di *handphone* tersebut, orang bisa mengubah fungsi *handphone* tersebut menjadi mini komputer. (Kagoya, 2015)

Manfaat dan Fungsi Hanphone.

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*short message service*, SMS). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa *videophone*, sebagai alat pembayaran, maupun untuk *televisionline* di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi *gadget* yang multifungsi. Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, *game*, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat (Kagoya, 2015).

Secara garis besar pemanfaatan *handphone* sebagai media pembelajaran adalah: a) Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. b) Sebagai alat hitung. c) Terdapat fitur internet yang dapat membantu siswa mencari informasi. d) Memiliki banyak memory. *Handphone* memiliki banyak memory untuk menyimpan banyak data dengan mudah dan dapat dibawa kemana-mana. Ini bisa digunakan untuk membantu dan mempermudah siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru (Nikmah, 2016)

Menurut Lestari dan Yarmi, 2017, *Handphone* memiliki banyak dampak positif bagi pengguna seperti memudahkan di dalam berkomunikasi; memudahkan mencari informasi tentang apa saja, dimana saja, dan kapan saja; membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah dengan fasilitas internet yang diberikan; menyediakan fasilitas hiburan seperti *game*, audio, dan video; membuat peserta didik baik anak-anak maupun orang dewasa untuk melek teknologi sehingga semua urusan dapat terjadi secara efektif dan efisien.

Tidak hanya berdampak positif, *handphone* juga memiliki dampak negatif diantaranya mengganggu perkembangan anak sehingga menjadi tidak fokus pada lingkungan sekitar di sekeliling anak termasuk ketika sedang belajar; membuat turunnya prestasi belajar peserta didik; mengganggu kesehatan dikarenakan dampak radiasi yang timbul dari *handphone*; memicu terjadinya tindak

kejahanan; mempengaruhi sikap dan perilaku penggunanya dengan hadirnya situs-situs kekerasan maupun pornografi; memunculkan perilaku pemborosan di dalam pembelian pulsa; beredarnya berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya sehingga menyebabkan provokasi di kalangan masyarakat; serta melemahnya daya kerja otak dikarenakan perhatian dan memorinya tersita untuk *handphone*.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan suatu permasalahan/ topik untuk memahami permasalahan atau topik tersebut. Penelitian eksplorasi berhubungan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena itu ada ataupun tiada

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling* dengan jenis *judgement sampling* (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan) yang kriteria respondennya mahasiswa program S1 jurusan Akuntansi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis. Tahap-tahap dalam menganalisa data dalam penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut : Kuesioner disebarluaskan ke responden (mahasiswa); Kuesioner yang diterima akan ditabulasi untuk mengetahui jumlah yang layak sebagai bahan analisis; Jawaban responden ditabulasi ; Hasil tabulasi dinyatakan dalam persentase; Hasil angka persentase yang ada akan dianalisis dan Kemudian baru ditarik kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Pengumpulan Data

Kuesioner disebarluaskan kepada 120 mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura sebagai responden. Dari 120 kuesioner yang dikembalikan, ternyata hanya 112 saja yang memenuhi syarat dan dapat diolah sebagai hasil penelitian.

Jumlah Handpone dan Laptop yang dimiliki

Seluruh mahasiswa memiliki handpone, namun 82,14% mahasiswa yang memiliki handpone lebih dari 1 (satu) unit. Laptop yang dimiliki oleh mahasiswa sebanyak 98,21%. Hasil menunjukkan bahwa *handphone* merupakan peralatan yang paling banyak dimiliki oleh mahasiswa. Semua mahasiswa memiliki bahkan 92 mahasiswa yang memiliki *handphone* lebih dari 1 unit. Laptop yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai peralatan kedua setelah *handphone*, namun hampir seluruh mahasiswa memiliki laptop. Dari data terlihat 98,26% mahasiswa yang memiliki laptop, hanya 1,79% atau 2 (dua) orang yang tidak memiliki laptop. Terlihat dari jumlah *handphone* dan laptop yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa sehingga penggunaan *moodle* dengan *mobile learning* memungkinkan untuk dilakukan di dalam pembelajaran oleh mahasiswa.

Lamanya Penggunaan *Handphone* dan *Laptop* dalam Sehari

Dari hasil kuesioner yang disebarluaskan, diperoleh informasi bahwa mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menggunakan handpone di atas 4 jam dalam sehari (83,04%). Untuk penggunaan Laptop, mahasiswa lebih banyak menggunakan kurang dari 4 jam sehari (67,86%). Dari perbandingan ini, dapat dilihat bahwa mahasiswa lebih banyak menggunakan handpone dibandingkan laptop . Sebanyak 93 mahasiswa menghabiskan waktunya untuk menggunakan handpone

di atas 4 jam dibandingkan penggunaan laptop, dimana hanya 10 mahasiswa saja menggunakan laptop di atas 4 jam dalam sehari.

Aplikasi Handpone yang ada

Berbagai macam aplikasi yang ada pada handpone saat ini, aplikasi yang ditanyakan dibatasi pada aplikasi yaitu, *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*. Seluruh mahasiswa (112 orang atau 100%) memiliki aplikasi *WhatsApp* dan *Facebook*. Untuk aplikasi *Instagram* hanya berkisar 90% dan aplikasi *Twitter* termasuk yang paling tidak diminati oleh mahasiswa, karena yang memiliki aplikasi ini hanya sebesar 53,57%. Dari keempat aplikasi, mahasiswa lebih cendrung menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan *Facebook*.

Aplikasi yang sering Di Buka pada Handphone

Diperoleh informasi jika sebagian besar mahasiswa (79 %) sering sekali membuka aplikasi *WhatsApp* dibandingkan program lainnya; hampir tidak ada mahasiswa (2%) yang membuka aplikasi *Twitter*; *Facebook* (11%) dan membuka aplikasi *Instagram* 9%. sehingga dapat disimpulkan pada umumnya, mahasiswa menggunakan *handphone* untuk keperluan bersosialisasi sehari-hari dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*

Aplikasi Komunikasi yang sering Digunakan

Mahasiswa dalam berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi yang ada pada *Handpone*, seluruhnya (100%) menggunakan *WhatsApp* dibandingkan dengan aplikasi komunikasi lainnya. Diperoleh informasi jika tidak ada mahasiswa (0%) yang menggunakan aplikasi *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter* dalam berkomunikasi

Tujuan Penggunaan Handphone

Diperoleh informasi jika sebagian besar mahasiswa (di atas 95%) sering sekali menggunakan *handphone* untuk keperluan berinteraksi di media sosial dan *browsing* di internet; sebagian kecil mahasiswa (39%) sering menggunakan *handphone* untuk mendengar musik; hampir semua mahasiswa (81,25%) jarang menggunakan *handphone* untuk merekam suara/musik; mahasiswa (27%) jarang menggunakan *handphone* untuk merekam video sehingga dapat disimpulkan aktivitas yang paling tinggi dilakukan oleh mahasiswa di *handphone* yaitu berinteraksi dengan media sosial dan *browsing* di internet.

Rata-rata Waktu Menggunakan Aplikasi Handphone dalam Sehari

Berdasarkan data diperoleh, menunjukkan bahwa waktu penggunaan Aplikasi *WhatsApp* paling banyak digunakan oleh mahasiswa (79,05%) selama lebih dari 4(empat) jam dalam sehari. Hanya 4,76% yang menggunakan Aplikasi *WhatsApp* kurang dari 2 (dua) jam. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menggunakan *Handpone*.

Diperoleh informasi jika sebagian besar mahasiswa (78,57%) menggunakan Aplikasi *Facebook* lebih dari 4 jam. Hasil ini sama dengan penggunaan Aplikasi *WhatsApp* di atas. Namun demikian penggunaan Aplikasi *Facebook* yang kurang dari 2 (dua) jam lebih tinggi dibandingkan dengan Aplikasi *WhatsApp* (8,04%).

Untuk penggunaan Aplikasi *Instagram* kurang diminati oleh mahasiswa. Hal ini ditunjukkan sebagian besar (80,36%) menggunakan aplikasi *Instagram* kurang dari 2 (dua) jam dalam sehari. Bahkan yang menggunakan lebih dari 4(empat) jam tidak ada sama sekali.

Diperoleh informasi jika sebagian besar mahasiswa (89,29%) menggunakan Aplikasi Twitter kurang dari 2 (dua) jam. Hal ini sama dengan penggunaan Aplikasi Instagram yang kurang diminati oleh mahasiswa. Hanya 6,25% yang menggunakan aplikasi Twitter lebih dari 4 (empat) jam.

Aplikasi mana yang paling sering digunakan Dalam Berkomunikasi

Mahasiswa diberikan pertanyaan tentang Aplikasi yang sering digunakan dalam berkomunikasi melalui pilihan Aplikasi *WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter*. Seluruh responden lebih suka menggunakan Aplikasi *WhatsApp* dibandingkan dengan ketiga Aplikasi lainnya. Hasil menunjukkan 112 responden lebih berminat menggunakan Aplikasi *WhatsApp*. Hal ini menunjukkan bahwa ada keunggulan dari Aplikasi *WhatsApp* dibandingkan dengan aplikasi lainnya

Keperluan Penggunaan Aplikasi (*WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter*)

Mahasiswa dalam pertanyaan ini, diminta untuk menjawab tentang keperluan penggunaan Aplikasi (*WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter*). Jawaban yang diberikan bisa lebih dari 1 (satu). Hasil menunjukkan bahwa responden lebih berminat menggunakan Aplikasi *WhatsApp*. Mahasiswa lebih cendrung menggunakan Aplikasi-aplikasi yang ada untuk keperluan pribadi (52,09%). Untuk keperluan perkuliahan hanya 27,91% dan untuk bisnis *online* hanya 20%, sehingga dapat disimpulkan pada umumnya, mahasiswa memanfaatkan Aplikasi yang ada di *handphone* untuk keperluan pribadi dibandingkan perkuliahan dan bisnis online.

Informasi yang Sering Dibrowsing/cari di Internet

Diperoleh informasi jika sebagian besar mahasiswa (48,21%) sering sekali membuka informasi yang berkaitan tentang hiburan di *handphone*; sebagian kecil mahasiswa (21,43%) sering sekali membuka informasi yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan yang paling kecil mahasiswa (4,46%) membrowsing informasi yang berkaitan tentang hobi. Sedangkan untuk permainan *game online* lebih tinggi (25,89%) di cari dibandingkan membrowsing ilmu pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan pada umumnya, sebagian mahasiswa sering membuka informasi yang berhubungan dengan hiburan dan *game online*.

Penggunaan Internet di *Handphone* untuk Keperluan Perkuliahan

Dari data yang dikumpulkan, diperoleh informasi bahwa penggunaan internet melalui *Handpone* sangat menunjang perkuliahan mahasiswa yaitu sebesar 73,21%. Hasil ini menunjukkan bahwa *handpone* yang dimiliki mahasiswa belum sepenuhnya dapat menunjang perkuliahan mahasiswa, karena ada sekitar 25% yang masih menjawab bahwa menggunakan internet melalui *handpone* hanya sebagian saja menunjang perkuliahan (25%), bahkan masih ada sekitar 1,79% atau 2 (dua) mahasiswa yang tidak menggunakan untuk keperluan perkuliahan. Namun demikian dapat disimpulkan pada umumnya, mahasiswa sudah sering sekali memanfaatkan internet untuk keperluan perkuliahan.

Dosen memberikan perkuliahan secara online

Tentang perkuliahan secara online, mahasiswa diminta untuk menjawab setuju (untuk seluruh materi kuliah), sebagian saja (hanya beberapa materi kuliah) dan tidak setuju (seluruh materi disampaikan melalui tatap muka di kelas). Dari hasil data yang dikumpulkan, tidak ada jawaban yang dominan untuk hal ini. Ini terlihat yang setuju hanya sebesar 42,86%. Sedangkan yang menjawab sebagian saja 36,61% dan tidak setuju 20,54%, sehingga dapat disimpulkan perkuliahan secara online

perlu di sosialisasikan, agar jika penerapan kuliah secara online menjadi suatu hal yang biasa pada masa yang akan datang.

Internet melalui Handpone digunakan untuk mencari Materi Kuliah

Dari data yang dikumpulkan, belum sepenuhnya penggunaan internet melalui handpone oleh mahasiswa digunakan untuk mencari materi kuliah. Hasil menunjukkan hanya sebesar 59,82% saja mahasiswa yang memanfaatkannya. Bahkan ada sekitar 10,71% atau 12 mahasiswa yang sama sekali tidak menggunakan fasilitas internet untuk mencari materi kuliah.

Pembahasan

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa (Responden) memiliki *handpone*, dan Laptop. Sebagian besar memiliki *handpone* lebih dari 1 (satu) unit. Hasil menunjukkan bahwa *handphone* merupakan peralatan yang paling banyak dimiliki oleh mahasiswa. Dari jumlah *handphone* dan laptop yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa menunjukkan bahwa kepemilikan atas alat teknologi Informasi berupa *Handpone* dan Laptop dapat dikatakan sebagai kebutuhan primier bagi mahasiswa saat ini. Kepemilikan handpone di kalangan mahasiswa cendrung akan meningkat, dimana mahasiswa akan memiliki lebih dari 1(satu) handpone. Kepemilikan Laptop akan cendrung menurun, karena handpone yang ada pada saat ini sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang ada pada laptop. Menurut Consumer Sales Director Lenovo Indonesia melalui KONTAN.co.id , saat ini ada tren konsumen ritel pilih smartphone ketimbang laptop, bahkan untuk tahun depan pasar laptop dia prediksi turun

Berdasarkan data-data di atas, dapat dikatakan jika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura ingin menerapkan *E-Learning* sangat memungkinkan sekali. Dalam penerapan *e-learning*, tenaga pendidik dan peserta didik memiliki perannya masing-masing. Tenaga pendidik (guru/dosen/instruktur ataupun widyaiswara) memiliki peran sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan peserta didik (siswa dan mahasiswa) memiliki peran sebagai konstruktor pengetahuan, pembelajar mandiri (*independent learners*), dan pemecah masalah (*problem solvers*). Kondisi tersebut telah menyebabkan *e-learning* menjadi pusat perhatian khususnya dalam pendidikan untuk terus dikaji, diterapkan, dan diperbaiki dari berbagai aspek oleh para pakar dan praktisi pendidikan untuk digunakan dalam pendidikan formal dan nonformal.

Penerapan *E-learning* memerlukan partisipasi aktif antara dosen, mahasiswa serta institusi pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura belum banyak menerapkan pembelajaran dengan penggunaan teknologi atau *kuliah online*. Apalagi pada saat ini, penerapan E Accounting dalam dunia kerja sudah menjadi hal yang biasa. Dengan informasi yang ada, terlihat bahwa mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dapat dikatakan tidak ketinggalan dalam bidang penggunaan teknologi. Dengan kondisi ini, diharapkan nantinya setelah selesai kuliah, mereka tidak canggung untuk beradaptasi dengan *E-Accounting*. Penggunaan *E-accounting* dan internet dapat mempermudah dan mempercepat dalam melakukan kegiatan, transaksi, dan informasi, yang pada gilirannya dapat membantu pembentukan komunikasi yang lebih baik.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa (responden) telah memiliki handpone, bahkan 92 dari 112 responden memiliki Handpone lebih dari 1(satu) unit, Untuk kepemilikan laptop hampir seluruh (98,26%) mahasiswa memilikinya. Penggunaan Handpone di kalangan responden menunjukkan lebih banyak waktu (di atas 4 jam) yang digunakan dibandingkan penggunaan laptop.

Seluruh responden memiliki Aplikasi *WhatsApp* dan *Facebook* di *handpone* mereka masing-masing. Aplikasi *twitter* termasuk yang paling tidak diminati oleh mahasiswa untuk di miliki. Aplikasi yang sering dibuka oleh responden adalah *WhatsApp* dibandingkan *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*. *Twitter* adalah aplikasi yang paling sedikit dibuka.

Dalam berkomunikasi, aplikasi *WhatsApp* paling banyak digunakan dibandingkan *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*. Hasil menunjukkan untuk aplikasi *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*, responden tidak menggunakannya dalam berkomunikasi. Responden menggunakan Aplikasi yang ada lebih banyak bertujuan untuk berinteraksi di media sosial dibandingkan dengan *browsing*, mendengar music dan merekan video.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden banyak menghabiskan waktu menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan *Facebook* dibandingkan aplikasi *Instagram* dan *twitter*. Namun demikian aplikasi yang digunakan lebih banyak digunakan untuk keperluan pribadi dibandingkan untuk untuk menunjang perkuliahan dan bisnis *online*. Diperoleh informasi jika sebagian besar mahasiswa sering sekali membuka informasi yang berkaitan tentang hiburan di *handphone*; sebagian kecil mahasiswa sering sekali membuka informasi yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan yang paling kecil .

Dari hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa penggunaan internet melalui *Handpone* sangat menunjang perkuliahan mahasiswa yaitu sebesar 73,21%. Hasil ini menunjukkan bahwa handpone yang dimiliki mahasiswa belum sepenuhnya dapat menunjang perkuliahan mahasiswa, karena ada sekitar 25% yang masih menjawab bahwa menggunakan internet melalui handpone hanya sebagian saja menunjang perkuliahan (25%), bahkan masih ada sekitar 1,79% atau 2 (dua) mahasiswa yang tidak menggunakan untuk keperluan perkuliahan. Namun demikian dapat disimpulkan pada umumnya, mahasiswa sudah sering sekali memanfaatkan internet untuk keperluan perkuliahan.

Tentang perkuliahan secara *online*, mahasiswa diminta untuk menjawab setuju (untuk seluruh materi kuliah), sebagian saja (hanya beberapa materi kuliah) dan tidak setuju (seluruh materi disampaikan melalui tatap muka di kelas). Dari hasil data yang dikumpulkan, tidak ada jawaban yang dominan untuk hal ini. Ini terlihat yang setuju hanya sebesar 42,86%. Sedangkan yang menjawab sebagian saja 36,61% dan tidak setuju 20,54%, sehingga dapat disimpulkan perkuliahan secara online perlu di sosialisasikan, agar jika penerapan kuliah secara online menjadi suatu hal yang biasa pada masa yang akan datang. Dari data yang dikumpulkan, belum sepenuhnya penggunaan internet melalui *handpone* oleh mahasiswa digunakan untuk mencari materi kuliah. Hasil menunjukkan hanya sebesar 59,82% saja mahasiswa yang memanfaatkannya. Bahkan ada sekitar 10,71% atau 12 mahasiswa yang sama sekali tidak menggunakan fasilitas internet untuk mencari materi kuliah.

Daftar Pustaka

- Agus, 2018, Penjualan Laptop Terus menyusut, 19 Desember 2018. WIB
<https://industri.kontan.co.id/news/penjualan-laptop-terus-menysut>
- Ahmed Adamu Isa, 2017, The impact of computerized accounting information system on management performance in public sector in Nigeria: Problems and prospects, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979 Impact Factor: RJIF 5.72, Volume 4; Issue 12; December 2017; Page No. 80-83 , www.allsubjectjournal.com
- Ayu, 2018, Orang Indonesia Internetan Lebih Dari 8 Jam Sehari, Medsoc paling Banyak Diakses, <https://id.priceprice.com/harga-hp/news/Orang-Indonesia-Internetan-Lebih-Dari-8-Jam-Sehari-Medsos-Paling-Banyak-Diakses-4829/>
- Babbie, E. (1989). The practice of social research (5th edition). Belmont, CA: Wadsworth.
- Bohang, Fatimah Kartini, 2018, Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?, Kompas.com , <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>.
- Bull, P., McCormick, C. (2012). Mobile learning: Integrating text messaging into a community college pre-algebra course. International Journal on E-Learning, 11, 233-245.
- Fauzan, 2019, Penjualan Smartphone Naik 6 Persen, Realme paling Impresif, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190814/12/1136220/penjualan-smartphone-naik-6-persen-realme-paling-impresif>
- Hajera Fatima, 2016, Impact of E-Accounting in Today's Scenario, International Journal of Engineering and Management Research, Volume-6, Issue-1, January-February-2016, Page Number: 260-264, ISSN (ONLINE): 2250-0758, ISSN (PRINT): 2394-6962, Copyright © 2016. Vandana Publications. All Rights Reserved
- Hamid Reza and Manoochehr Khorramin, 2015, A REVIEW OF E-ACCOUNTING, *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences* ISSN: 2231– 6345 (Online) An Open Access, Online International Journal Available at www.cibtech.org/sp.ed/jls/2015/01/jls.htm 2015 Vol.5 (S1), pp. 1824-1829, Review Article © Copyright 2014 / Centre for Info Bio Technology (CIBTech) 1824
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Kagoya, Dekinus,2015, *Dampak Penggunaan Handphone pada Masyarakat*, *Acta Diurna*, Vol. IV, No. 4, 2015
- KumparanTECH, 2018, 5 Merek Smartphone Terlaris di Dunia selama Kuartal Ketiga 2018, 2 November 2018 20:12 WIB sumber : <https://kumparan.com/@kumparantech/5-merek-smartphone-terlaris-di-dunia-selama-kuartal-ketiga-2018-1541164374778633535>
- Kulbir Singh and Manjit Singh Saggi, 2016, E-Accounting: A key of modern business, International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN:

2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72, Volume 3; Issue 10; October 2016; Page No. 23-25,
www.allsubjectjournal.com

Lepp, A., Barkley, J. E., Sanders, G. J., Rebolt, M., Gates, P. (2013). The relationship between cell phone use, physical and sedentary activity, and cardiorespiratory fitness in a sample of U.S. college students. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, Article 79. Retrieved from <http://www.ijbnpa.org/content/10/1/79>

Malami A, Zainol Z, Nelson S. , 2012, Security Threats of Computerized Banking Systems (CBS): The Managers 2012

Nikmah, Astin, 2016, *Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Prestasi Siswa*, Surabaya: E- Jurnal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pratomo, 2019. Disurvei Dua lembaga Riset : Pasar PC Memang Turun, Kompas Com. 12 April 2019.
<https://tekno.kompas.com/read/2019/04/12/11323887/disurvei-2-lembaga-riset-pasar-pc-memang-turun>

Sakina, Rakhma Diah dan Setiawan, 2018, Berapa lama rata-rata Orang Indonesia Internet Dalam Sehari? Kompas.com, 19 Februari 2018, , <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/184500826/berapa-lama-rata-rata-orang-indonesia-gunakan-internet-dalam-sehari>

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tindell, D. R., Bohlander, R. W. (2012). The use and abuse of cell phones and text messaging in the classroom: A survey of college students. College Teaching, 60, 1-9

Yoga, Hastyadi Widiartanto, 2017, Riset UGM: Jumlah Pengguna Internet Pengaruhi PDB, Kompas.com 9 November 2017, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/164804126/riset-ugm-jumlah-pengguna-internet-pengaruhi-pdb>.

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP MOTIVASI MELAKUKAN *FRAUD*

Rusliyawati

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan (fraud). Faktor-faktor tersebut meliputi pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan asimetri informasi. Data penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan kuesioner sebanyak 42 responden yang merupakan staf keuangan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda (multiregression) dengan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif diantara pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dengan motivasi melakukan *fraud* di sektor pemerintahan sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi melakukan fraud.

Kata kunci : *Fraud*, pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan asimetri informasi

Pendahuluan

Banyaknya kasus kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia terjadi secara terus menerus dan berulang ulang. Maraknya pemberitaan kasus tersebut di media masa membuat masyarakat menganggap pemberitaan tersebut sebagai hal yang biasa dan bukan rahasia lagi. Pada sector public kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan pada sector swasta kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan dana. Hal demikian juga terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Wilopo, 2006).

Ikatan Akuntansi Indonesia oleh Wilopo (2006) menjelaskan ada dua kecurangan akuntansi yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu yang pertama adalah salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan dan yang kedua adalah salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berhubungan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Instansi baik pemerintah maupun swasta, tindakan kecurangan masih banyak terjadi antara lain dikarenakan pengendalian internal yang rendah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KPMG dalam “KPMG, 1998 Fraud Survey”(New York: KPMG, 1998) dalam Mustofa (2004) menunjukkan bahwa dari jawaban responden, lemahnya pengendalian intern merupakan penyebab tertinggi terjadinya kecurangan (*fraud*). Dalam Arens (2008:370) pengendalian internal adalah suatu sistem pengendalian yang terdiri dari kebijakan dan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan kepada manajemen bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Semakin efektif

pengendalian internal dalam suatu organisasi maka dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang merugikan perusahaan dan menguntungkan diri mereka sendiri karena tidak terbukanya peluang atau kesempatan bagi seseorang untuk berbuat kecurangan.

Faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi adalah kesesuaian kompensasi. Biasanya pegawai akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasaan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Dengan kompensasi yang sesuai, kecenderungan akuntansi diharapkan dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi dan tidak melakukannya serta kecenderungan berlaku curang dalam akuntansi demi memaksimalkan keuntungan pribadi.

Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila a) keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan b) bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Keinginan, motivasi dan utilitas yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi.

Jensen and Meckling (1976), Brickley and James (1987), dan Shivdasani (1993) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal perusahaan yang efektif. Untuk mengatasi permasalahan keagenan seharusnya manajemen perusahaan melaksanakan aturan akuntansi dengan benar. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi (IAI, 2001). Permasalahan keagenan juga terjadi, bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Situasi ini disebut sebagai asimetri informasi. Nicholson (1997: 487-489) mencatat bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen dipengaruhi oleh situasi asimetri informasi.

Selanjutnya asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agent memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak principal. Asimetri informasi muncul ketika agent lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal dan stakeholder lainnya. Anthony dan Govindarajan (2001), menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (agency theory), yaitu prinsipal (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya. Hal ini juga terjadi di pemerintahan disaat proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi dimana eksekutif mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*, asimetri informasi terjadi karena legislatif tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja eksekutif, legislatif tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha eksekutif memberikan kontribusi pada hasil aktual pada suatu organisasi pemerintahan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, komitmen organisasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan. Menurut Robbins dan Judge (2008:100), komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Komitmen organisasi mengacu pada kepercayaan tujuan karyawan dan nilai-nilai organisasi, serta keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi dan loyalitas terhadap perusahaan. Sehingga apabila pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka tingkat kecurangan dapat minimalisir.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi penanggung jawab penyusunan laporan keuangan pada perusahaan terbuka dan badan usaha milik negara di Indonesia untuk mengetahui perilaku tidak etis serta kecenderungan kecurangan akuntansi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor ini terdiri dari pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan asimetri informasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap motivasi melakukan *fraud*?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap motivasi melakukan *fraud* ?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap motivasi melakukan *fraud*?
4. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap motivasi melakukan *fraud*?

Pengendalian Internal

Dalam penelitian yang dilakukan Wilopo (2006), menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Mulyadi (2001:11) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengertian pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dalam kebenaran data akuntansi, membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu dan memajukan efisiensi di dalam operasi”.

Kesesuaian Kompensasi

Seseorang bekerja memberikan waktu dan tenaganya kepada organisasi dan sebagai kontra prestasinya, organisasi memberikan imbalan atau kompensasi yang bentuknya dapat sangat bervariasi. Kompensasi merupakan hal yang penting bagi pegawai yang ditawarkan organisasi sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Kompensasi menurut Hasibuan (2003:118) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang di berikan ke organisasi. Jika di kelola dengan baik, kompensasi akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, serta menjaga karyawan dengan baik, sebaliknya tanpakompensasi yang cukup (sesuai dan adil) pegawai yang ada akan sangat mungkin untuk meninggalkan organisasi. Didukung oleh penelitian Sulistiyowati (2007), kesesuaian kompensasi didasarkan pada ide bahwa seseorang akan terpuaskan dengan kompensasinya, ketika persepsi terhadap kompensasi dan apa yang mereka pikirkan sesuai dengan semestinya. Bagi seorang pegawai, kompensasi merupakan suatu *outcome* atau *reward* yang penting. Sehingga dapat diasumsikan, semakin rendah kepuasan kompensasi yang diterima, maka semakin tinggi tingkat korupsi.

Komitmen Organisasi

Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2008:184) dalam Wibowo (2017:429) menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pegawai terhadap organisasi. Dengan demikian, komitmen organisasi menyangkut tiga sifat: (a) perasaan identifikasi dengan tujuan organisasi, (b) perasaan terlibat dalam tugas organisasi, dan (c) perasaan loyal pada organisasi. Sedangkan menurut Newstrom (2011:223) komitmen organisasi atau loyalitas pekerja adalah tingkatan di mana pekerja mengidentifikasi dengan organisasi dan ingin melanjutkan secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Komitmen organisasi mempengaruhi apakah pegawai tetap tinggal sebagai anggota organisasi atau meninggalkan organisasi mencari pekerjaan baru. Dalam hal ini terjadi *turnover*. Adalah penting untuk diketahui bahwa *turnover* dapat besifat sukarela atau tidak sukarela. *Turnover* sukarela terjadi ketika pekerja sendiri memutuskan untuk keluar, sedang *turnover* tidak sukarela terjadi ketika pekerja dipecat oleh organisasi karena beberapa alasan.

Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang mewakili atau yang menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Wilopo, 2006). Baiman (1982), Chow *et.al* (1988), Blanchard & Chow (1983) dan Waller (1988) Dalam Falikhatun (2007) menyatakan bahwa di beberapa organisasi, bawahan memiliki informasi lebih akurat yang dapat mempengaruhi pengukuran kinerja dibandingkan atasannya. Baiman dan Evans (1982) menyarankan agar bawahan yang memiliki informasi pribadi mengenai perusahaan ikut berpartisipasi sesuai dengan sistem pengendalian manajemen dengan menyampaikan atau menyertakan informasi pribadinya untuk dipadukan dengan standar anggaran pemerintahan dalam rangka penetapan kinerja pemerintah.

Fraud

Fraud menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak lain dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta tersebut, fakta yang akan merugikan. Menurut Hall (2001:135), suatu tindakan yang curang harus memenuhi lima kondisi ini:

1. Penyajian yang salah. Harus terdapat laporan yang salah atau tidak diungkapkan
2. Fakta yang sifatnya material. Suatu fakta harus merupakan faktor yang substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak.
3. Tujuan. Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan tersebut salah.
4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi. Penyajian yang salah harus merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungan.
5. Perbuatan tidak adil atau kerugian. Kebohongan tersebut menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban *fraud*.

Menurut Sawyer,*et al.* (2002) dalam Puspitadewi (2012) kecurangan adalah sebuah representasi yang salah atau penyembunyian fakta-fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau mengambil bagian dalam suatu hal yang berharga.

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Hasil
Prapti Antarwiyati dan Raras Ega Purnomo (2017)	Keadilan organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap motivasi melakukan <i>fraud</i> , Pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap motivasi melakukan <i>fraud</i> , Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap motivasi melakukan <i>fraud</i> dan Asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi melakukan <i>fraud</i> .
Anik Fatun Najahningrum (2013)	Penegakan peraturan, berpengaruh negatif dengan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, Keefektifan pengendalian Internal berpengaruh negatif dengan kecurangan(fraud) di sektor pemerintahan, Keadilan distributif berpengaruh negatif dengan kecurangan(fraud) di sektor pemerintahan, Keadilan prosedural, berpengaruh negatif dengan kecurangan, (fraud) di sektor pemerintahan, Komitmen organisasi berpengaruh negatif dengan kecurangan(fraud) di sektor pemerintahan Asimetri informasi berpengaruh negatif dengan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, Budaya etis organisasi tidak berpengaruh dengan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.
Rizki Zainal (2013)	Efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, Asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi.
Listiyowati (2007)	kepuasaan kompensasi tidak berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi dan kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi.
Lisya Yuliana (2016)	Keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan, Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecurangan, Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan
Muhammad Faisal (2013)	Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, Kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, Prilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan dan Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan

Hipotesis Penelitian

Hubungan Pengendalian Internal dengan Motivasi Melakukan *Fraud*

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi. Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi adanya tindak kecurangan. Pengendalian internal yang efektif dapat membuat peluang untuk melakukan suatu tindak kecurangan menjadi tertutup. Oleh karena itu, tindak kecurangan akuntansi dapat dicegah dengan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Antarwiyati dan Purnomo (2017) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan kecurangan. Rumusan hipotesis dibuat sebagai berikut:

H₁: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan *fraud*

Hubungan Kesesuaian Kompensasi dengan Motivasi Melakukan *Fraud*

Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi termasuk melakukan kecurangan akuntansi. Pemberian kompensasi ini diharapkan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Zainal (2013) dan Kumastuti (2012) yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan *fraud*. Namun, dalam penelitian Antarwiyati dan Purnomo (2017) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap melakukan *fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap motivasi melakukan *fraud* sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan *fraud*.

Hubungan Komitmen Organisasi dengan Motivasi Melakukan *Fraud*

Pegawai yang memiliki rasa komitmen yang tinggi dalam organisasi tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan organisasi tempat mereka bekerja. Mereka akan beraktivitas sesuai aturan dan norma yang berlaku dalam organisasi dan berjuang semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan tingginya komitmen organisasi yang dimiliki oleh setiap individu, maka hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan.

Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Najahningrum (2013) dan Yuliana (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap seseorang melakukan kecurangan akuntansi.

H₃: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan *fraud*

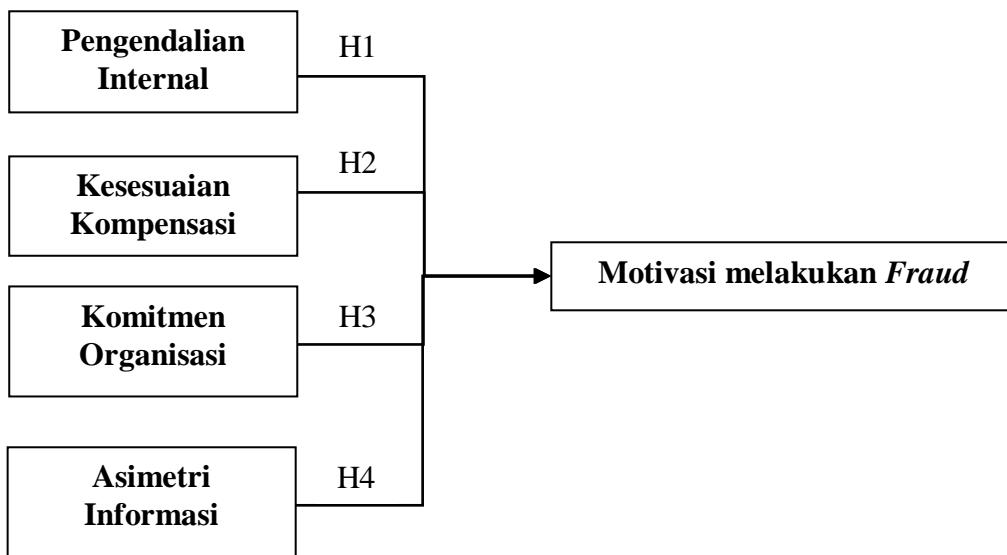
Hubungan Asimetri Informasi dengan Motivasi Melakukan *Fraud*

Menurut Kang (2002) dalam Wilopo (2006) bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain. Bawahan memiliki informasi yang lebih banyak tentang kapabilitas produksi mereka dibandingkan atasan. Ditinjau dari perspektif keagenan, asimetri informasi ini memotivasi bawahan untuk memberikan informasi yang menyesatkan tentang kapabilitas produksi mereka.

H₄: Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap motivasi melakukan *fraud*

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Model Penelitian



Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi dan Asimetri infoormasi terhadap Motivasi Melakukan *Fraud* dilakukan di dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Alasan memilih dinas tersebut sebagai tempat penelitian adalah dinas tersebut merupakan salah satu dinas yang memiliki anggaran besar yang artinya praktik *fraud* sangat memungkinkan akan terjadi. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta adanya surat izin penelitian diberikan.

Sampel

Menurut Arikunto (2002:117), sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu (Sangadji dan Sopiah, 2011:188). Sampel yang memiliki kriteria tersebut dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang telah diketahui (Muhamad, 2013). Berdasarkan teknik tersebut, kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di sub bagian umum dan sub bagian keuangan di dinas yang menjadi tempat penelitian.
2. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja selama minimal satu tahun.

Pengendalian Internal (X_1)

Pengertian pengendalian internal menurut Arens *et al*, (2008:412) adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reabilitas pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku. Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi peraturan perundang-undangan. Abbot *et al* dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yangefektif mengurangi kecenderungan

kecurangan akuntansi. Pengukuran variabel pengendalian internal menggunakan kuesioner hasil pengembangan Yendrawati dan Paramitha (2014) dan Herman (2013) dengan 9 item pertanyaan.

Kesesuaian Kompensasi (X₂)

Kesesuaian Kompensasi adalah kecocokan dan kepuasan pegawai atas apa yang diberikan instansi kepada mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, hari raya, uang makan dan lain - lain (Hariandja, 2002: 244). Dan dengan adanya kesesuaian kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisasikan tindakan kecurangan akuntansi di dalam instansi. Pengukuran variabel kesesuaian kompensasi menggunakan kuesioner hasil pengembangan Wilopo (2006) dengan 5 item pertanyaan.

Komitmen Organisasi (X₃)

Komitmen organisasi adalah loyalitas seorang pekerja. Komitmen organisasi menunjukkan penerimaan seseorang terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi. Sikap yang diambil oleh peagawai berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan menunjukkan seberapa besar komitmen pegawai tersebut terhadap organisasi tempatnya bekerja. Pertanyaan variabel komitmen organisasi menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dede (2017) dengan 5 item pertanyaan.

Asimetri Informasi

Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi terdiri dari lima pertanyaan dari instrumen yang dikembangkan dari Dunk (1993) dalam Wilopo (2006). Skala *Likert* 1 – 5 digunakan untuk mengukur respons dari responden, (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju. Semakin tinggi nilai yang ditujukan maka semakin menunjukkan tidak terjadinya asimetri informasi.

Motivasi Melakukan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi melakukan *fraud*. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berprilaku tertentu sehingga seseorang tersebut mulai melaksanakan kegiatan tertentu (Nugroho, 2013:26). Pengukuran variabel motivasi melakukan *fraud* menggunakan kuesioner hasil pengembangan Mustikasari (2013) dan Simanjuntak (2013) dengan 4 item pertanyaan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Jumlah populasi atau sasaran dari penelitian ini adalah semua pihak yang berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, yang paham mengenai laporan keuangan. Semua populasi sekaligus menjadi sampel berjumlah 42 orang, 42 orang ini adalah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagian keuangannya.

Tabel 1
Respon Responden Penelitian

Jumlah kuesioner yang disebar	42
Jumlah kuesioner yang kembali	42
Tingkat pengembalian kuesioner	100%
Jumlah kuesioner yang tidak layak uji	0
Jumlah kuesioner yang layak uji	42
<i>Responrate</i>	100%

Sumber data: data olahan

Tabel 2
Komposisi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	16	38 %
Perempuan	26	62%
Jumlah	40	100 %

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel 2 mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 16 orang atau 38,0% sedangkan responden laki-laki adalah sebanyak 26 orang atau 62,0%. Karakteristik sampel responden terdiri dari usia responden yang termuda adalah 24 tahun dan yang tertua adalah 57 tahun. Latar belakang pendidikan responden adalah S2 (3 responden), S1 (18 responden), D3(5 responden), dan SMA (16 responden). Masa kerja responden berkisar antara 3 tahun sampai dengan 30 tahun.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Untuk perhitungan, menggunakan metode korelasi *product moment pearson* dengan bantuan *software SPSS 21* dan hasilnya dibandingkan dengan r_{tabel} dengan. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka pertanyaan dikatakan valid. Pengujian validitas dalam penelitian ini yang menggunakan *pearson correlation* dengan bantuan program SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Variabel Pengendalian Internal (X_1)

Hasil uji validitas variabel pengendalian internal diperoleh hasil sebagai berikut;

Tabel 3
Validitas Pengendalian Internal (X_1)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X_1_1	0,668	0,213	Valid
X_1_2	0,709	0,213	Valid
X_1_3	0,599	0,213	Valid
X_1_4	0,711	0,213	Valid
X_1_5	0,650	0,213	Valid
X_1_6	0,644	0,213	Valid
X_1_7	0,601	0,213	Valid

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil bahwa semua item pengendalian internal dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel sehingga semua item pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian.

b. Variabel Kesesuaian Kompensasi (X_2)

Hasil uji validitas variabel kesesuaian kompensasi dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.4
Validitas Kesesuaian Kompensasi

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X_2_1	0,657	0,213	Valid
X_2_2	0,777	0,213	Valid
X_2_3	0,655	0,213	Valid
X_2_4	0,601	0,213	Valid
X_2_5	0,654	0,213	Valid

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel 4 hasil uji validitas menunjukkan semua item kesesuaian kompensasi dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel sehingga semua item pertanyaan tidak ada yang didrop dan dapat digunakan dalam penelitian.

c. Variabel Komitmen Organisasi (X_3)

Hasil uji validitas variabel komitmen organisasi dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Validitas Komitmen Organisasi

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X_3_1	0,652	0,213	Valid
X_3_2	0,784	0,213	Valid
X_3_3	0,691	0,213	Valid
X_3_4	0,622	0,213	Valid
X_3_5	0,705	0,213	Valid

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel 5 hasil uji validitas menunjukkan semua item komitmen organisasi dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel sehingga semua item pertanyaan tidak ada yang didrop dan dapat digunakan dalam penelitian.

d. Variabel Asimetri Informasi (X_4)

Hasil uji validitas variabel akuntansi akrual dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Validitas Asimetri Informasi

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X ₄ _1	0,619	0,213	Valid
X ₄ _2	0,704	0,213	Valid
X ₄ _3	0,727	0,213	Valid
X ₄ _4	0,654	0,213	Valid

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel 6 hasil uji validitas menunjukkan semua item asimetri informasi dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel sehingga semua item pertanyaan tidak ada yang didrop dan dapat digunakan dalam penelitian.

e. Variabel Motivasi melakukan Fraud (Y)

Hasil uji validitas motivasi melakukan fraud ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Validitas Motivasi Melakukan Fraud (Y)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,735	0,213	Valid
2	0,675	0,213	Valid
3	0,693	0,213	Valid
4	0,744	0,213	Valid

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel 7 hasil uji validitas menunjukkan semua item motivasi melakukan fraud dapat valid karena nilai r hitung > r tabel sehingga semua item pertanyaan tidak ada yang didrop dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas, yaitu menguji kemampuan dari alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat memberikan hasil yang konsisten. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti menggunakan metoda *internal consistency* dengan menggunakan *cronbach's alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1967). Hasil dari uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pengendalian Internal (X ₁)	0,704	0,60	Reliabel
Kesesuian Kompensasi (X ₂)	0,677	0,60	Reliabel
Komitmen Organisasi (X ₃)	0,693	0,60	Reliabel
Asimetri Informasi (X ₄)	0,714	0,60	Reliabel
Motivasi melakukan Fraud (Y)	0,688	0,60	Reliabel

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel 8 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk semua variabel (pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, dan asimetri informasi dan motivasi melakukan fraud > nilai kritis (0,50), maka dalam penelitian ini dikatakan reliabel artinya data dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu model regresi yang baik adalah dimana datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan analisis statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

Tabel.9
Uji Normalitas
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.084547721
Most Extreme Differences	Absolute	.0651
	Positive	.060
	Negative	-.053
Kolmogorov-Smirnov Z		.611
Asymp. Sig. (2-tailed)		.432

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel 9 hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov* diketahui bahwa nilai *Sig (p)* 0,432 > 0,05; maka dapat dinyatakan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi jika nilai Tolerance <0,10 atau nilai VIF > 10.

Tabel 10
Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF
Pengendalian Internal	0,777	1,889
Kesesuaian Kompensasi	0,689	1,703
Komitmen_Organisasi	0,678	1,897
Asimetri Informasi	0,712	1,901

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa hasil uji multikolineritas diketahui nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, berarti tidak terjadi multikolonieritas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas atau dapat dipercaya dan obyektif.

Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi dan korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada perioede t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011).

Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi adalah uji *Durbin Watson* itu dengan ketentuan sebagai berikut :Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan program *SPSS* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 11
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.744(a)	.703	.576	1.08455	1.623

a. Predictor: (Constant), Kendali_Internal, Kesesuaian_kompensasi, Komitmen_Organisasi, Asimetri_Informasi

b. Dependent Variable: Motivasi

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel 11 hasil uji Durbin Watson diperoleh nilai 1,623 dan terletak diantara 1,231 – 2,214 sehingga dinyatakan tidak ada kesimpulan dan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas.

Tabel 12
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	.654	.776	.421	.654
	Kendali_Internal_	.062	.079	.543	.635
	Kesesuaian_Kompensasi_	.063	.071	.088	.412
	Komitmen_Organisasi	.059	.078	.124	.489
	Asimetri_Teknologi	.050	.073	.210	.555

Dependent variable: abs_residu

Berdasarkan tabel 12 hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser diperoleh nilai probabilitas dari variabel (Pengendalian internal, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi dan Asimetri_Informasi) $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	12.343	2.232		6.121	.000
Kendali_Internal	-.532	.178	-.329	-3.976	.008
Kesesuaian_Kompensasi	-.534	.165	-.444	-4.032	.008
Komitmen_Organisasi	-.611	.159	-.476	-4.010	.007
Asimetri_Teknologi	.578	.191	.439	4.199	.008

Dependent variable: Motivasi

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 12,343 + 0,532X_1 + 0,534X_2 + 0,611X_3 + 0,578X_4 + e$$

- Nilai konstansta (a) adalah 12,343, hal ini berarti bahwa apabila variabel pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan asimetri teknologi dianggap tetap maka berpengaruh secara negatif terhadap motivasi melakukan fraud.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel pengendalian internal (X_1) yang bertanda negatif, yaitu sebesar 0,532. Hal ini berarti bahwa jika variabel pengendalian internal (X_1) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel motivasi melakukan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,532.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel kesesuaian kompensasi (X_2) yang bertanda negatif, yaitu sebesar 0,534. Hal ini berarti bahwa jika variabel kesesuaian kompensasi (X_2) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel motivasi melakukan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,534.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel komitmen organisasi (X_3) yang bertanda negatif, yaitu sebesar 0,611. Hal ini berarti bahwa jika variabel komitmen organisasi (X_3) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel motivasi melakukan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,611.

- e. Nilai koefisien regresi untuk variabel asimetri teknologi (X_4) yang bertanda positif, yaitu sebesar 0,578. Hal ini berarti bahwa jika variabel asimetri teknologi (X_4) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel motivasi melakukan *fraud* (Y) akan meningkat sebesar 0,578.

Uji t

Pengujian uji t dengan bantuan program SPSS. Dari hasil perhitungan program SPSS dapat diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 14
Hasil Uji t

Variabel	t	Sig
Pengendalian Internal	-3,976	.008
Kesesuaian Kompensasi	-4,032	.008
Komitmen Organisasi	-4,010	.007
Asimetri Informasi	4,199	.008

Sumber data: data olahan

Hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Pengaruh pengendalian internal (X_1) terhadap motivasi melakukan fraud (Y). Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar -3,976 dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap motivasi melakukan fraud atau Hipotesis 1 (H_1) diterima.

Pengendalian internal merupakan salah satu dari beberapa faktor seseorang melakukan *fraud*. Hasil pengendalian internal dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif. Artinya, semakin baik pengendalian internal suatu instansi maka semakin sempit seseorang melakukan *fraud*. Keefktifan pengendalian internal diharapkan dapat meminimalisir prilaku *fraud* dalam suatu instansi.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antarwiyati dan Purnomo (2017) menunjukkan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan *fraud*.

- b. Pengaruh kesesuaian kompensasi (X_2) terhadap motivasi melakukan fraud (Y). Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar -4,032 dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap motivasi melakukan fraud atau Hipotesis 2 (H_2) diterima.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainal (2013) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan *fraud*. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Antarwiyati dan Purnomo (2017) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap motivasi melakukan *fraud*.

- c. Pengaruh komitmen organisasi (X_3) terhadap motivasi melakukan fraud pemerintah daerah (Y). Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar -4,010 dengan tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap motivasi melakukan fraud atau Hipotesis 3 (H_3) diterima.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) dan Yuliana (2016) menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan *fraud*.

- d. Asimetri Informasi (X_4) terhadap motivasi melakukan fraud (Y). Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,199 dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi melakukan fraud atau Hipotesis 4 (H_4) diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Aranta (2013) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi melakukan kecurangan. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan peneliti bahwa asimetri informasi yang tinggi di suatu perusahaan memiliki peran dalam meningkatkan motivasi melakukan fraud.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) dihitung dengan menggunakan program SPSS yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 16
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744(a)	.703	.579	1. 08455

Sumber: Data yang telah diolah menggunakan SPSS, tahun 2019

Berdasarkan tabel 16 hasil pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini diperoleh koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,579 artinya besarnya sumbangan atau pengaruh variabel pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi terhadap motivasi melakukan fraud 57,9%, sedangkan sisanya sebesar 42,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada pengaruh negatif yang signifikan pengendalian internal terhadap motivasi melakukan fraud, sehingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya atau hipotesis (H_1) diterima. Hal ini dibuktikan nilai t hitung sebesar -3,976 dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$.
2. Ada pengaruh negatif yang signifikan kesesuaian kompensasi terhadap motivasi melakukan fraud, sehingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya atau hipotesis alternatif (H_2) diterima. Hal ini dibuktikan t hitung sebesar -4,032 dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$
3. Ada pengaruh negatif yang signifikan komitmen organisasi terhadap motivasi melakukan fraud, sehingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya atau hipotesis alternatif (H_3) diterima. Hal ini dibuktikan nilai t hitung sebesar -4,010 dengan tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$
4. Ada pengaruh positif yang signifikan asimetri informasi terhadap motivasi melakukan fraud, sehingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya atau hipotesis alternatif (H_4) diterima. Hal ini dibuktikan nilai t hitung sebesar 4,199 dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$

Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas jumlah populasi misalkan seluruh SKPD di Provinsi Kalbar

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen misalnya keadilan organisasi, budaya organisasi, prilaku etis, penegakan peraturan dan lain-lain

Keterbatasan

Pada penelitian ini, masih banyak keterbatasan-keterbatasan, diantaranya:

1. Populasi penelitian yang masih terbatas hanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar
2. Masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi variabel Y (motivasi melakukan *fraud*), karena hasil koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,579 atau 57,9% , sisanya (100%-57,9% = 42,1%) dijelaskan oleh faktor lain diluar keempat faktor yang disebutkan di penelitian ini.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dari instrumen melalui persepsi jawaban responden sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Antarwiyati, Prapti dan Raras Ega Purnomo. (2017). *Motivasi Melakukan Fraud dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Akuntasi & Auditing Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Arens, A. A., R. J. Elder, dan M. S. Beasley. (2012). *Auditing and assurance services: an integrated approach*. Edisi Dua Belas. Jakarta: Erlangga
- _____. (2012). *Auditing and assurance services: an integrated approach*(14th ed.). Boston: Prentice Hall.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Kelima. Jakarta: Rineka Cipta
- Faisal, Muhammad. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan*. Semarang: FE Unnes
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hal, A Jamesl. (2001) . *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta. Edisi pertama
- Hariandja, Marihot Efendi Tua. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*: Edisi revisi.
- Bumi Aksara .Jakarta: Bumi Aksara.
- Herman, Lisa Amelia, (2013).*Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah Padang*, Jurnal, Universitas Negeri Padang.
- Indrianto, Nur. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Karni, Soerjono. (2000). *Audit Khusus dan Audit Forensik dalam Praktik*. Jakarta. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kumaat, Valery G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Kusumastuti, nur ratri. (2012).*Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi: Semarang: Undip
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba empat
- Mustafa, Li Baihaqi, (2004).*Artikel Warta Pengawasan Vol Pengendalian Internal dan Pemberantasan Korupsi IX No.1*.

- Najahningrum, Fatun Anik. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. Accounting Analysis Journal, 2 (3). Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Ngatidjo, (2014). *Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Organisasi dan Usaha Pelayanan Koperasi Kredit/Koperasi Simpan Pinjam*. Edisi Ketiga: Yogyakarta
- Ningtyas, Dyan Restu. (2011). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Pada CU Semarang Sosok*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tangjungpura.
- Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Prasetyono dan Nurul Kompyurini. (2007). *Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Dengan Pendekatan Balance Scorecard Berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengadilan Intern dan Penerapan Prinsip- Prinsip Good Corporate Governance (GCG) (Survey Pada Rumah Sakit Daerah di Jawa Timur)*. Simposium Nasional Akuntansi X: Unhas Makasar
- Rahmawati, Ardiana Peri. (2012). *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sangadji, M. E & Sopiah. (2011). *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Edisi I. Yogyakarta: Andi.
- Setiadi, Nugroho J. (2013). *Perilaku Konsumen Perspektif Komtemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Pranada Media
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyowati, Firma. (2007). *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi*. JAAI, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Supriyadi, Edy. (2014). *SPPS + Amos: Perangkat Lunak Statistik*. Jakarta: IN MEDIA
- Thoifah, I'anatut. (2015). *Statistik Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: Madani
- Tuanankotta, Theodorus.M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Seri Departemen akuntansi*. FE UI : Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja. (2010). *Teori dan Praktek Auditing*. Jakarta: Harvarindo
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset
- Wilopo. (2006). *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 9.
- Yuliana, Anisya. (2016). *Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan*. Pekanbaru: FE Riau
- Yusuf, Ria Mardiana dan Darman Syarif. (2018). *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi, dan Mempengaruhi*. Makasar: Nas Media Pustaka
- Zainal, Rizki.(2013). *Pengaruh Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)*. Skripsi: Universitas Negeri Padang

ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA

Khristina Yunita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan pemanfaatan sumber-sumber keuangan desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Kantor, Kabupaten Ketapang. Desa dengan ciri khas kekotaan karena terletak di pusat kota Ketapang dan berbeda dengan desa-desa yang bercorak pertanian atau kelautan seperti pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kebijakan pemanfaatan sumber-sumber keuangan desa di Desa Payak Kumang. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemanfaatan sumber-sumber keuangan desa tahun 2018 mengalami perubahan dibandingkan tahun 2017. Faktor utama yang menyebabkan perubahan kebijakan adalah karena Desa Payak Kumang mulai fokus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa. Selama tahun 2018, sumber – sumber keuangan desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pengeluaran pemberdayaan modal bumdes, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci : kebijakan, pemanfaatan, sumber keuangan desa

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui Keberadaan desa secara yuridis formal. Berdasarkan kedua UU tersebut, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi secara jelas menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus “dirinya sendiri” sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia atau bertindak secara otonomi. Otonomi ini berarti juga memberikan desa keleluasaan secara penuh bagi desa untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh desa.

Sumber-sumber keuangan desa menurut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 terdiri atas: 1. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; 2. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; 3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; 4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan 5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber-sumber keuangan desa ini wajib dimanfaatkan oleh desa

untuk membangun dan mengembangkan perekonomian desa sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Payak Kumang terletak di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Desa ini memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti karena posisi desa ini berada di kota kabupaten dengan karakteristik desa cenderung kekotaan. Pekerjaan utama masyarakat lebih banyak di sektor pemerintahan, swasta, dan perdagangan, berbeda dengan desa-desa lain yang bercorak pertanian atau pun kelautan. Kondisi ini yang kemudian mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana kebijakan desa Payak Kumang dalam mengelola sumber-sumber keuangannya dengan kondisi desa yang berbeda dengan desa-desa pada umumnya. Manfaat penelitian ini adalah memberikan perbandingan tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa karena perbedaan karakteristik desa.

I. Kajian Literatur

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa, tetapi dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) beserta dengan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) (Pasal 3:3 Permendagri 20/2018).

Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa membutuhkan kebijakan pengelolaan. Freidrich (Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai “*...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*” (....serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan). Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu; 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Dye (Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*”

(apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data mengenai kebijakan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa pada Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan data tersebut, peneliti mencoba untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengelolaan sumber-sumber keuangan desa.

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Penggelaran hasil observasi dan wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan digelar dalam lembaran-lembaran yang mudah dibaca, selanjutnya peneliti dapat melakukan editing terbatas.

b. Pemilahan hasil observasi dan wawancara

Hasil wawancara dan observasi setelah digelar dipilah menurut domain- domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal dari elemen yang mana.

c. Menemukan elemen-elemen yang kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilahan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.

Hasil dan Pembahasan

Desa Paya Kumang terbentuk dan di tetapkan oleh Bupati Ketapang pada Tahun 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ketapang NO. 333 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Desa Payak Kumang berasal dari Dusun Payak Kumang di Desa Sukaharja (Sekarang Kelurahan Sukaharja) Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Luas wilayah Desa Payak Kumang 2.165 Km², meliputi Dusun Mente Permai, Dusun Rindan Jaya, Dusun Karya Jaya, dan Dusun Kusuma Jaya. Batas wilayah Desa Payak Kumang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Sukaharja yaitu Sungai Mas, tempat pembakaran limbah PT Alas Kusuma dan Kuburan Cina;
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pagar Pasturan Komplek Bina Utama (Kelurahan Sampit);
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Sukaharja;

4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sukabangun yaitu Parit Haji Bujang besar.

Desa Payak Kumang adalah desa di wilayah kota. Karakteristik pekerjaan masyarakat terbesar adalah sebagai peternak, pegawai negeri, pensiunan angkatan darat serta pedagang. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus dilakukan secara hati-hati. Sumber-sumber penerimaan keuangan desa terbesar berasal dari pendapatan Bumdes desa yang mengalami kenaikan sebesar 49%. Bumdes desa Payak Kumang berupa pasar rakyat yang berada di depan kantor desa. Sisanya berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Retribusi, dan Bagi Hasil Pajak. Secara ringkas, penerimaan keuangan desa ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Sumber – Sumber Penerimaan Desa Payak Kumang
Tahun 2017 dan 2018

Sumber	Penerimaan (Rp)		Percentase
	2017	2018	
Bumdes	67.050.000	100.000.000	49%
Dana Desa	825.229.042	860.923.000	4%
Alokasi Dana Desa	521.859.749	537.700.561	3%
Bagi Hasil Retribusi	2.676.697	2.116.261	(21%)
Bagi Hasil Pajak	26.885.150	27.284.954	1%
Total Pendapatan Desa	1.443.700.638	1.528.024.776	6%

Sumber : APBDesa Tahun 2017 & 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa desa sudah menikmati penerimaan bagi hasil dari Bumdes yang dikelolanya. Bumdes desa Payak Kumang adalah pasar sore yang beroperasi mulai pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Penerimaan dari bagi hasil Bumdes tersebut berasal dari sewa meja dan kios. Penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tumbuh sebesar 4% dan 3%. Bagi hasil dari retribusi turun sebesar 21% sedangkan bagi hasil pajak tumbuh sebesar 1%. Retribusi diperoleh dari retribusi kebersihan pasar. Jumlah ini mengalami penurunan karena jumlah pedagang yang berdagang tidak selalu sama setiap harinya.

Penerimaan desa tersebut kemudian dialokasikan pada belanja desa yang terdiri atas pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, binaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan tak terduga. Penerimaan desa Payak Kumang selama tahun 2017 dan 2018 dijabarkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Belanja Desa Payak Kumang Tahun 2017 dan 2018

Kegiatan	Sumber Dana	Tahun		Percentase
		2017	2018	
Pembangunan Desa	DD	708.274.987.52	540.606.100	(24%)
Pembinaan Masyarakat	DD	116.954.144.36	130.660.000	12%
Pengeluaran Pembiayaan	DD	0	189.656.900	100%
Belanja Pegawai	ADD	188.250.000	264.600.000	41%
Belanja Barang dan Jasa	ADD	275.649.790	183.100.561	(34%)
Binaan Masyarakat	ADD	37.709.959	70.000.000	86%
Pemberdayaan Masyarakat	ADD	16.000.000	20.000.000	21%
Kegiatan Tak Terduga	ADD	4.250.000	Rp 0	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas, belanja desa mengalami kenaikan untuk pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan, belanja pegawai, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Belanja desa mengalami penurunan untuk bidang pembangunan desa, belanja barang dan jasa serta kegiatan tak terduga. Distribusi belanja Desa Payak Kumang menunjukkan bahwa desa sudah mulai mengurangi porsi belanja barang dan jasa dan menambah porsi pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kepala Desa Payak Kumang, pengalihan belanja ke bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa Payak Kumang. Keputusan ini sangat didukung oleh masyarakat dalam Musyawarah Rembug Desa.

Tabel 3 berikut ini akan menampilkan perbandingan porsi belanja dengan porsi penerimaan keuangan desa untuk melihat perubahan komposisi belanja per tahun untuk memudahkan analisa kebijakan.

Tabel 3. Perbandingan Komposisi Belanja Terhadap Total Penerimaan Keuangan Desa Payak Kumang Tahun 2017 dan 2018

Keterangan	Komposisi Belanja Terhadap Total Penerimaan	
	2017	2018
Pembangunan Desa	49,06%	35,38%
Pembinaan Masyarakat	8,10%	8,55%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00%	12,41%
Belanja Pegawai	13,04%	17,32%
Belanja Barang & Jasa	19,09%	11,98%
Binaan Masyarakat	2,61%	4,58%
Pemberdayaan Masyarakat	1,11%	1,31%
Kegiatan Tak Terduga	0,29%	0,00%

Sumber : data olahan, 2019

Perbandingan komposisi perbandingan belanja terhadap total penerimaan desa menunjukkan bahwa porsi belanja pembangunan desa pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kegiatan pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan, belanja pegawai, binaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Belanja barang dan jasa serta kegiatan tak terduga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Komposisi belanja terhadap penerimaan menunjukkan bahwa pada saat ini desa tidak lagi memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur desa. Desa mulai fokus untuk menggerakkan perekonomian warga desa. Kegiatan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan desa Payak Kumang seperti kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan PKK, kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini, kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya serta peringatan dan perayaan hari-hari besar.

Belanja Pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 12,41%. Pengeluaran pembiayaan ini untuk membantu renovasi pasar desa yang merupakan Bumdes. Belanja binaan

masyarakat juga mengalami kenaikan sebesar 2,17% dibandingkan tahun 2017. Belanja binaan masyarakat berbeda dengan belanja pembinaan masyarakat. Belanja binaan masyarakat diperuntukkan untuk membantu usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Sedangkan belanja pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Payak Kumang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, b. pelatihan teknologi tepat guna, c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: - kader pemberdayaan masyarakat Desa; - kelompok usaha ekonomi produktif; - kelompok perempuan, - kelompok tani, - kelompok masyarakat miskin, - kelompok nelayan, - kelompok pengrajin, - kelompok pemerhati dan perlindungan anak, - kelompok pemuda; dan - kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Secara umum pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat desa Payak Kumang menunjukkan kepuasan warga masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh kepala desa Payak Kumang. Program-program yang dibuat sudah mencerminkan keinginan warga dan dilaksanakan secara transparan. Pertanggungjawaban pun dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan alokasi pengelolaan keuangan desa di Desa Payak Kumang pada tahun 2018 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Faktor utama yang menyebabkan perubahan adalah karena Desa Payak Kumang mulai fokus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa tersebut.
2. Keuangan desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pengeluaran pembiayaan modal bumdes, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, binaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kebijakan alokasi pengelolaan keuangan desa ditentukan terlebih dahulu melalui musyawarah rembug desa yang di hadiri oleh masyarakat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, RT/RW, Kadus dan juga Pemerintah Desa.
4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

5. Dalam tanggapan masyarakat atas pelaksanaan program kerja desa bahwa masyarakat sangat terbuka dengan adanya program kerja desa dan sangat mendukung sekali dalam pembangunan desa terutama untuk Desa Payak Kumang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan APBDes di Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keuangan desa serta sumber-sumber keuangan desa yang terbaru beserta fungsi-fungsi dari setiap anggaran sehingga, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa baik pada tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan. Hal ini sangat penting mengingat jumlah dana yang besar dapat membuat pelaksananya terjerat pada kesalahan-kesalahan. Sosialisasi tersebut dapat melalui beberapa kesempatan maupun dapat disampaikan dalam rapat dan dapat dibuatkan poster tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat tercipta pula transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Pendidikan dan pelatihan kepada pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dilakukan bukan hanya sekali, melainkan dilakukan secara berkala, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Paya Kumang melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan desa dan terus melaksanakan pendampingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus memaksimalkan pendamping desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, agar meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa.
4. Untuk mengoptimalkan pembangunan desa masyarakat harus terkait dengan perencanaan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam memberikan usulan dari tingkat RT dan Dusun yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa bersama BPD. Setelah itu pemerintah desa harus memberikan wadah usulan dari masyarakat dengan melakukan Musrenbangdes.

Daftar Pustaka

- Budi Winarno, Ph.D, Teori Kebijaksanaan Publik, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Dye Thomas R, Understanding Public Policy Making, New York- Holt, Renehart & Winston, 1981..
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si, Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Islamy, M. Irfan, DR,MPA, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
- Moloeng, Lexy. J, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mar'at., Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Robbins, Stephen P, Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Steers, Ricard M., (terjemahan), 1985, Efektivitas Organisasi, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, The Policy Implementation Process : A Concentual Framework in : Administration and Society, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.

Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

Widjaja, 2000, Ilmu Komunikasi Pengantar Study, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP AKUNTANSI

Ira Grania Mustika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep akuntansi antara mahasiswa akuntansi reguler dan PPAPK di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Penelitian ini menggunakan kuisioner yang disebarluaskan langsung kepada 158 mahasiswa aktif prodi akuntansi program regular dan PPAPK yang berada di semester 3 hingga semester 7 tahun akademik 2019/2020. Responden adalah mahasiswa aktif yang sudah lulus mata kuliah pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan menengah pertama. Metode analisis data dalam pengujian ini menggunakan uji Mann-Whitney. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa program studi akuntansi reguler dan mahasiswa PPAPK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Kata Kunci : Konsep, Akuntansi, Mahasiswa

Pendahuluan

Konsep dasar akuntansi adalah salah satu pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa akuntansi. Pengetahuan ini akan digunakan untuk membangun informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi dibutuhkan untuk mempelajari pengolahan data keuangan suatu entitas atau perusahaan sehingga pengolahan data keuangan bisa berjalan dengan baik. Konsep dasar akuntansi merupakan landasan yang berlaku umum mencakup kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi ini sangat penting untuk menghindari kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Konsep dasar akuntansi dipelajari sebagai topik awal di mata kuliah pengantar akuntansi yang wajib diampuh oleh mahasiswa program studi akuntansi. Output yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar akuntansi secara baik sebelum masuk ke topik-topik bahasan berikutnya. Konsep dasar akuntansi kemudian dibahas lagi dalam bab-bab awal mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Munawir (2014) menyebutkan ada 3 (tiga) materi pokok yang terdapat dalam konsep dasar akuntansi. Pertama, pemahaman tentang aktiva yaitu kekayaan perusahaan dan pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (*deffered charges*) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Kedua, pemahaman kewajiban-kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, yaitu kewajiban merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Ketiga, pemahaman modal yang merupakan hak atau

bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh kewajibannya.

Pemahaman terhadap konsep dasar akan memudahkan mahasiswa dalam memahami topic-topik akuntansi lanjutan yang akan dibahas dalam mata kuliah akuntansi selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi yang berasal dari program studi yang sama tetapi berbeda waktu kuliahnya yaitu program studi regular dan program percepatan angka partisipasi kasar (PPAPK). Penelitian ini mencoba membandingkan apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa regular yang kuliah di pagi dan mahasiswa PPAPK yang kuliah di siang atau di malam hari. Pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi akan bermanfaat pagi pengelola program studi untuk mengambil kebijakan terkait dengan aktivitas pembelajaran di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Telaah Literatur

Definisi Pemahaman

Murshell (2007) menyatakan pemahaman isi pelajaran yang bermakna bagi anak dapat dicapai bila pengajaran mengutamakan pemahaman, wawasan (*insight*), bukan hafalan dan latihan. Sudjana (1992:24) menjelaskan pemahaman peserta didik dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan (3) tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ektrapolasi. (Benyamin, 1975: 89) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman siswa adalah siswa mengerti yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal yang lain.

Konsep Dasar Akuntansi

Suwardjono (1999) menjelaskan bahwa konsep dasar merupakan asumsi-asumsi yang harus dipegang mahasiswa sebagai basis penalaran untuk memahami mengapa bentuk dan isi laporan keuangan seperti yang mereka jumpai dalam praktik. Walaupun digunakan konsep dasar sebagai basis penalaran dan pengembangan sistem, konsep dasar yang dikenalkan tentunya hanya konsep dasar yang benar-benar mempunyai pengaruh terhadap bagaimana laporan keuangan dapat tersusun seperti yang sekarang dikenal. Dua konsep yang sangat penting dan harus dikenalkan kepada mahasiswa adalah konsep dasar kesatuan usaha (business entity concept) dan konsep dasar perioda (period concept).

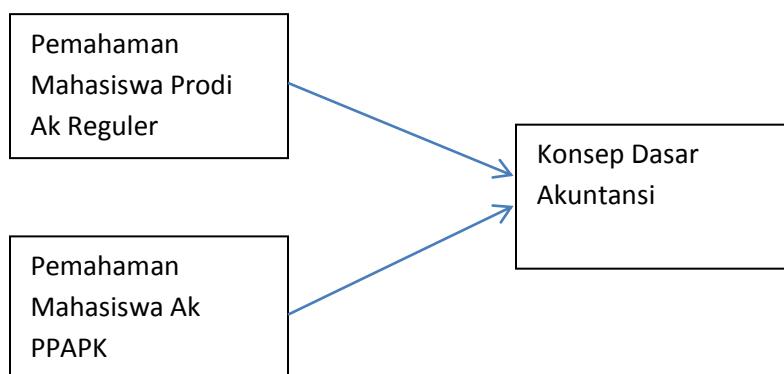
Pengetahuan Akuntansi

Menurut Suwardjono (2005) pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai

suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktek dan teori. Bidang praktek berkepentingan dengan masalah bagaimana praktek dijalankan sesuai dengan prinsip akuntansi. Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argumen yang dianggap melandasi praktek akuntansi yang semuanya dicakup dalam suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi. Pembelajaran akuntansi berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur, dan bertanggungjawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan dan penafsiran perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Model Penelitian

Model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

Hipotesis Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah:

Ha : terdapat perbedaan pemahaman konsep akuntansi antara mahasiswa prodi ak regular dan mahasiswa ak PPAPK

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar akuntansi. Pemahaman ini akan diukur dengan menggunakan skala likert. Konsep dasar yang menjadi pembanding pemahaman mahasiswa adalah konsep dasar akuntansi mencakup konsep *business entity, period concept, continuity activity, measured consideration, effort and accomplishment, verifiable, objectives, and evidence concept*.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi kelas Reguler A dan Mahasiswa PPAPK kelas Sore dan Malam yang minimal berada di semester 3 dan sudah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi dan Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 158 orang, terdiri atas 66 mahasiswa reguler A dan 92 mahasiswa PPAPK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden atas kuisioner yang dibagikan. Sumber data berasal dari kuisioner yang telah dibagikan dan diisi oleh mahasiswa prodi akuntansi regular A dan PPAPK kelas sore dan malam. Mahasiswa yang menjadi responden diminta untuk mengisi kuesioner. Ada 25 pernyataan yang diajukan dan mengandung konsep *business entity, period concept, continuity activity, measured consideration, effort and accomplishment, verifiable, objectives, and evidence concept*. Mereka diminta untuk memberikan penilaian dengan menggunakan skala likert 1 – 5 sesuai dengan pernyataan tersebut. Pernyataan disusun dengan menggunakan kasus-kasus yang ada di buku Accounting dan Intermediate Accounting.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik yaitu uji hipotesis. Tahap pertama analisis data ialah melakukan uji validitas dan realibilitas dan pada tahap kedua melakukan uji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tahap-tahap dalam melakukan pengujian data yaitu: 1) Validitas alat pengukur dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor yang diperoleh masing-masing item pernyataan dengan korelasi rata-rata. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti (butir soal) valid dan sebaliknya. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti (butir soal) tidak valid. 2) Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha. Dimana suatu instrument dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar: (a) $<0,6$ tidak reliabel, (b) $0,6-0,7$ acceptable, (c) $0,7-0,8$ baik, dan (d) $>0,8$ sangat baik (Sekaran, 2010:171). 3) Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal (Ghozali, 2015:30). 4) Pengujian hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney. Prosedur statistik ini untuk menguji 2 group kasus yaitu mahasiswa akuntansi program regular A dan mahasiswa akuntansi PPAPK kelas sore dan malam dengan satu variable yang sama yaitu pemahaman akan konsep dasar.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah responden adalah 158 orang, terdiri atas 66 mahasiswa reguler A dan 92 mahasiswa PPAPK. Mereka diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri atas 25 pernyataan. Dari hasil pengolahan data program SPSS menunjukkan hasil uji validitas untuk 25 pernyataan tersebut valid pada taraf lebih dari 5% yang artinya semua item bisa dijadikan alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya. Pengujian reliabilitas terhadap item-item pernyataan konsep dasar akuntansi menggunakan metode Cronbach Alpha. Hasil keseluruhan uji reliabilitas untuk 25 pernyataan menunjukkan nilai 0,871 yang berarti semua item pernyataan berkriteria tinggi, sehingga dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Uji

Kolmogorov – Smirnov. Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Hasil pengolahan tabel untuk pengujian normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,174. Nilai signifikan tersebut berada di atas nilai 0,05 ($0,174 > 0,05$) maka dapat dikatakan bahwa data pernyataan berdistribusi normal.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji data dua sampel independen yaitu prosedur statistik untuk membandingkan dua group kasus dalam satu variabel untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman tentang konsep dasar akuntansi antara mahasiswa regular A dan PPAPK. Hasil uji Mann Whitney U-Test adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Mann-Whitney U-Test

Program Studi	Jumlah Responden	Mean Rank	Asymp. Sig. (2 tailed)
Akuntansi Reguler A	66	83,16	0,394
Akuntansi PPAPK	92	76,88	

Sumber : data olahan, 2019

Hasil uji Mann-Whitney test menunjukkan nilai mean rank untuk akuntansi regular A sebesar 83,16 dan akuntansi PPAPK sebesar 76,88. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa akuntansi regular A untuk konsep dasar akuntansi lebih baik daripada mahasiswa akuntansi PPAPK. Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa akuntansi regular A dan akuntansi PPAPK menunjukkan nilai asymp.sig. (2 tailed) sebesar 0,394 dan lebih besar dari 5%. Ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa regular A dan PPAPK.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa regular dan PPAPK. Pemikiran di awal penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman ini akan berbeda karena jam kuliah akan mempengaruhi penyerapan materi konsep dasar akuntansi. Mahasiswa PPAPK menempuh kuliah mulai pukul 14.00 – 18.00 WIB untuk kelas sore dan 18.30 – 22.15 WIB untuk kelas malam. Perbedaan jam kuliah berdampak pada psikologis mahasiswa saat mengikuti perkuliahan. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah di pagi hari akan lebih mudah menyerap materi dibandingkan dengan siang atau malam hari.

Syah (2009:145) menjelaskan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang mahasiswa dalam belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau faktor psikologis adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi; intelegensi yaitu kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang mencakup lingkungan sosial kampus seperti para dosen, staf administrasi, dan teman-teman yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang mahasiswa. Para dosen yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik, rajin membaca dan berdiskusi dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar mahasiswa.

Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Implikasi Penelitian yang Akan Datang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai asymp.sig. (2 tailed) sebesar 0,394 dan lebih besar dari 5%, artinya tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep dasar akuntansi antara mahasiswa regular A dan PPAPK sehingga Ha ditolak dan Ho diterima.
2. Hasil uji Mann-Whitney test menunjukkan nilai mean rank untuk akuntansi regular A sebesar 83,16 dan akuntansi PPAK sebesar 76,88. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa akuntansi regular A untuk konsep dasar akuntansi lebih baik daripada mahasiswa akuntansi PPAPK.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki keterbatasan sebagai berikut.

1. Pernyataan kuesioner disusun berdasarkan kasus yang terdapat pada buku Pengantar Akuntansi dan Akuntansi Keuangan Menengah 1. Penggunaan bahasa bisa saja bermakna ambigu karena merupakan hasil terjemahan dari buku asli yang menggunakan bahasa Inggris.
2. Mahasiswa yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan kesiapan mereka untuk menjawab pernyataan yang diajukan membuat jawaban tidak maksimal dan terkesan hanya sekedar asal jawab.

Implikasi untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Mengoreksi kembali pernyataan yang diajukan agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa responden.
2. Memilih waktu yang lebih senggang sehingga kuesioner dapat diisi secara maksimal oleh mahasiswa responden.
3. Responden sebaiknya difokuskan pada mahasiswa semester akhir.

Daftar Pustaka

- Al. Haryono Jusup. Dasar-dasar Akuntansi Edisi 6. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003.
- Hansen, Don R., Marianne M. Mowen. Cost Management: Accounting and Control. Ohio: South-Western College Publishing, 1995.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant. Intermediate Accounting 9th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998.
- Munawir, S. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta : Penerbit Liberty , 2004.
- Suwardjono. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan keuangan, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE,2005.
- Thacker, Ronald J. Accounting Principles 2nd Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.1979.
- Warren, Karl S., James M. Reeve, Philip E. Fess. Accounting 20th Edition. United States: Thomson Learning, Inc., 2002.
- Weygandt, Jeffry J., Donald E. Kieso, Walter G. Kell. Accounting Principles 4th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MAHASISWA MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Syarif M. Helmi
Berlian Apriliana

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran Mahasiswa dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam penelitian ini Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan merupakan variabel independen yang diduga mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNTAN yang telah menempuh matakuliah Perpajakan dengan total jumlah sampel 72. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan keduanya mempengaruhi Kesadaran Mahasiswa Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara selain dari sektor migas. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pajak diposisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain pemerintah pusat, Pemerintah derah juga menarik pajak dari masyarakat seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Parkir, Pajak Kendaraan Bermotor dan lainnya. Bagi pemerintahan Daerah, Penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penrimaian Daerah yang digunakan untuk mendanai Pemerintahan dan Pembangunan wilayah. Sejumlah penelitian menunjukkan porsi PAD dalam struktur APBD masih belum menunjukkan angka yang ideal. Oleh karena itu diperlukan studi empiris untuk memahami faktor yang mempengaruhi setiap unsur penerimaan yang ada dalam PAD.

Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan ibukota kabupaten / kota lainnya dalam provinsi ini memiliki potensi penerimaan pajak daerah yang besar, salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hanya saja Pertumbuhan penerimaan dari PKB masih lebih kecil dibandingkan Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota Pontianak empat tahun terakhir (2014-2017) (lihat **Lampiran 1**).

Chau (2009) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Dalam lingkup penelitian penerimaan PKB, Wardani dan Rumiyatun (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran memiliki peranan yang penting yang berasal dari dalam diri seseorang menyangkut teori atribusi secara internal.

Teori atribusi dan teori persepsi menjadi rujukan dalam penelitian ini untuk menempatkan pengaruh eksternal dan internal serta persepsi individu dalam memprediksi tindakan yang mungkin dilakukan seorang individu di masa mendatang.

Faktor Pengetahuan Perpajakan secara teoritis dianggap mampu menggugah persepsi dan kesadaran individu untuk patuh dan membayar pajak. Sementara faktor sanksi perpajakan yang merupakan faktor eksternal individu diduga akan meningkatkan kesadaran individu membayar pajak untuk menghindari pembayaran PKB yang lebih tinggi. Susilawati Budiartha (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini mencoba menemukan pengaruh faktor Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap kemauan atau kesadaran membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Mahasiswa prodi akuntansi yang telah menempuh matakuliah perpajakan. Karena salah satu segmen pengguna kendaraan bermotor terbesar adalah mahasiswa, maka penelitian dilakukan terhadap mahasiswa sebagai objek penelitian.

Tinjauan Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Atribusi

Teori Atribusi menjelaskan bahwa penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwalah dan yang bukan peristiwa aktual itu sendiri yang mempengaruhi perilaku orang. Secara lebih spesifik, individu berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka dimasa mendatang. (Ivancevics, *et al.*, 2005:123).

Teori Atribusi ini dikemukakan oleh Kelley, *et al* (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh Heider, *et al* (1958). Dalam teorinya dijelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Tingkah laku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada perilaku pribadi seorang individu sendiri. Dan juga Tingkah laku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi. Dalam teori atribusi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini untuk mengukur karakter mahasiswa terhadap kesadaran kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan perpajakan dan variabel sanksi perpajakan yang dipengaruhi oleh pihak eksternal.

Dengan merujuk pada teori atribusi dikaitkan dengan karakter individu atau tingkah laku mahasiswa dalam variabel pengetahuan perpajakan yang dipengaruhi oleh pihak eksternal. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki mahasiswa didapatkan melalui buku pajak, internet, sosial media, koran, televisi dan materi yang disampaikan oleh dosen mata kuliah perpajakan. Variabel sanksi perpajakan yang dipengaruhi oleh pihak eksternal juga mahasiswa dapat mengalami sanksi administrasi atau denda dan juga jika tidak membayar pajak dari pihak yang berwajib. Sedangkan kesadaran kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh dalam diri individu yang berasal dari pihak internal mahasiswa yang memiliki kesadaran serta kemauan dalam membayar pajak serta kesadaran dan kemauan timbul dikarenakan adanya aturan ketat dalam membayar pajak yang dipengaruhi pihak eksternal yaitu pemerintah.

Teori Persepsi

Teori persepsi (*perception*) sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. (Robins, *et al.*, 2009:175). Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dikatakan rumit dan aktif karena walaupun persepsi merupakan pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Dengan demikian, persepsi bukanlah cerminan yang tepat dari realita (Lubis, *et al.*, 2010:93). Persepsi mempunyai ruang lingkup tentang pola pikir seseorang, tentang suatu informasi yang diterima sehingga menimbulkan kesimpulan dalam pikirannya, dengan adanya teori persepsi dapat memperkuat bahwa seseorang memang mempunyai persepsi secara langsung dalam pikirannya yang memberikan hasil yaitu penafsiran setelah informasi yang diterima. Pada penelitian ini menggunakan teori persepsi.

Teori persepsi mencangkup pola pikir seseorang terhadap suatu informasi yang didapatkan namun ia belum mengalami kejadian tersebut secara langsung hanya menyimpulkan sendiri informasi tersebut dalam pikirannya. Teori persepsi ini menjadi rujukan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan perpajakan serta mengalami sanksi perpajakan terhadap kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor, dimana mahasiswa bukan wajib pajak, namun merupakan calon wajib pajak dimasa yang akan datang.

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan, Peraturan Gubenur Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2018. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubenur Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2018 pada Bab II Penghitungan dan Penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB .

Pasal 7

1. Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih , ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Untuk kendaraan pribadi/badan ditetapkan sebesar 1,5%(satu koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB;
 - b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan/atau barang, ditetapkan sebesar 1%(satu persen) dari dasar pengenaan PKB;
 - c. Untuk kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB.

2. Pengenaan BBN-KB penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB atau sebesar 1% (satu persen) untuk BNN-KB penyerahan kedua.
3. Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil Lelang Negara/Daerah atau Dump TNI/POLRI, ditetapkan Bea Balik Nama sebesar 1 % (satu persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal ini wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut (Darwin, *et al.*, 2010:106). Pajak kendaraan bermotor dikenakan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan daerah tentang pengenaan tarif, dengan adanya pajak kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah serta dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Peraturan yang diberikan pemerintah dapat mempertegas pajak kendaraan bermotor, berdasarkan peraturan gubernur yang dikenakan kepada wajib pajak. dengan adanya aturan yang tertulis secara tegas berdasarkan undang-undang yang harus dipatuhi masyarakat umum pengguna kendaraan bermotor tak terkecuali mahasiswa mayoritas sebagai pengguna kendaraan bermotor yaitu sepeda motor dan juga sebagai calon wajib pajak dimasa yang akan datang.

Kesadaran Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realita. (Hardinigsih, *et al.*, 2011). Kesadaran membayar pajak akan menimbulkan persepsi positif dari mahasiswa. Meningkatnya pengetahuan melalui pelajaran dan media lainnya, dapat memberikan dampak bagi kesadaran. Sanksi yang diberikan dalam perpajakan jika tidak membayar pajak oleh wajib pajak yang akan dialami oleh mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa tentang pajak akan berdampak positif terhadap kesadaran dan kemauan membayar pajak. Kesadaran memiliki peranan yang sangat penting bagi mahasiswa hal ini sangat disadari, mengingat mahasiswa mengerti dan mengetahui, dengan seiringnya perkembangan teknologi di era global ini tentunya menjadi kepekaan bahwa kesadaran sangat penting agar tidak terjadi sanksi atau pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dimasa mendatang. Kemauan membayar pajak diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung (Vanessa dan Hari, *et al.*, 2006).

Indikator kemauan membayar pajak(Hardiningsih dan Yulianawati, *et al.*, 2011):

- a) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
- b) Dokumen diperlukan dalam membayar pajak.
- c) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
- d) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Kesadaran kemauan membayar pajak dalam diri mahasiswa dapat terlihat saat ini, dengan merujuk dari teori atribusi dan teori persepsi yang memiliki dapat mengukur kesadaran kemauan membayar pajak mahasiswa dimasa yang akan datang. kesadaran serta kemauan mahasiswa dalam membayar pajak dapat merujuk pada teori atribusi yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang dipengaruhi secara internal maupun eksternal yang berarti didalam diri inividu tersebut dengan

adanya pengetahuan serta sanksi perpajakan yaitu pihak eksternal maka akan berdampak pada kesadaran serta kemauan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

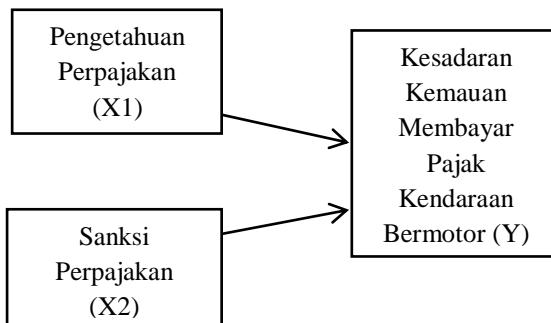
Penelitian Terdahulu

Aswati, Mas'ud dan Nudi (2018) menemukan bahwa faktor Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ruky, Putra, dan Mansur (2018) menemukan bahwa faktor Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dewi, Diatmika, dan Yasa (2018) menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Admnistrasi Perpajakan, dan Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Wardani dan Rumiyatun (2017) menemukan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Drive Thru berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Susilawati dan Budiartha (2013) menemukan bahwa faktor Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Model Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah para calon wajib pajak potensial dimasa yang akan datang, yaitu mahasiswa sebagai pengguna sepeda motor. Meskipun belum sebagai wajib pajak yang sepenuhnya pada saat ini dikarenakan belum memiliki penghasilan tetap, namun dimasa yang akan datang menjadi tanggung jawab bagi individual mahasiswa sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur Kesadaran kemauan dalam membayar pajak oleh mahasiswa dengan pengetahuan yang sudah dimiliki serta peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang bila dilanggar dapat dikenakan sanksi perpajakan.



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

Menurut Hardningsih dan yulianawati (2011) pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemala (2015) menemukan pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jannah dan Fajriana (2018) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. (Mardiasmo, 2011:59). Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Cahyadi dan Jati (2016) menemukan sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Metode Penelitian

Bentuk Penelitian Dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif kuantitatif, menggunakan data primer dengan sampel yang diambil secara *purposive* dengan kriteria telah menempuh matakuliah Perpajakan. Target sampel adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2016 dan angkatan 2017 Reguler A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura sebanyak 72 orang dari total 252 mahasiswa.

Uji Validitas Dan Reliabilitas Data

Ghozali, *et al* (2011) menyatakan uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas diukur melalui korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka pertanyaan atau indikator dinyatakan valid. Dalam penelitian ini r tabel dengan $df=(72-2)=70$ tingkat signifikansi 0,05 yaitu 0,2319. Berdasarkan table uji validitas (lampiran 2) dapat dinyatakan bahwa **semua indikator adalah valid**.

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat menunjukkan konsistensi jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$. (Santoso, *et al.*, 2015). Tabel Uji Reliabilitas (lampiran 2) menunjukkan semua variable memiliki nilai cronbach alpha $> 0,60$, sehingga dapat dinyatakan **reliable**.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas. Uji Kolmogorov Smirnov, (lampiran 3) menunjukkan angka Sig 0.117 (diatas 0.05) yang berarti bahwa simpangan data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. grafik Normal Plot dan Histogram (lampiran 3) juga menunjukkan sebaran dengan indikasi normal.

Uji Multikolinearitas. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, *et al.*, 2016). Hasil uji multikolinearitas (lampiran 3) menunjukkan bahwa nilai VIF untuk kedua variable kurang dari 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Uji Heterokedastisitas. Grafik scatterplot (lampiran 3) menunjukkan sebaran yang tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat diduga tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada data.

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel Regresi Linear Berganda berikut:

Tabel 1
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,559	3,440		1,616	,111
	,339	,104	,325	3,259	,002
	,451	,102	,441	4,419	,000
a. Dependent Variable: Kesadaran_Kemauan_Membayar_Pajak					

Sumber : Data primer yang diolah (2019)

maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5,559 + 0,339X_1 + 0,451X_2 + e$$

Dimana :

Y: Kesadaran kemauan membayar pajak

α : Konstanta

X_1 : Pengetahuan Perpajakan

X_2 : Sanksi Perpajakan

e: Error Term

Persamaan linear di atas menunjukkan adanya pengaruh positif dari faktor Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Konstanta 5,559 menunjukkan kesadaran minimal positif mahasiswa akuntansi untuk membayar pajak Kendaraan Bermotor. Usaha meningkatkan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersamaan akan meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Hasil uji koefisien determinasi berikut menunjukkan skor Adjusted R Square senilai 0,391 yang artinya bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan variabel kesadaran kemauan membayar pajak sebesar 39,1% sementara 60,9 % dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Mod el	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,639 ^a	,408	,391	2,54279
a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pengetahuan_Perpajakan				

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

Uji Model (Uji F)

Tabel Uji statistik F berikut menunjukkan skor signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima, yang artinya semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji Statistik-t

Pengaruh parsial setiap variable independen terhadap variable dependen dalam penelitian ini dilakukan melalui Uji statistik t. Dengan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$, hipotesis alternatif diterima jika nilai signifikansi t (p-value) $< 0,05$.

Tabel 3
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	307,637	2	153,819	23,790	,000 ^b
	Residual	446,140	69	6,466		
	Total	753,778	71			
a. Dependent Variable: Kesadaran_Kemauan_Membayar_Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pengetahuan_Perpajakan						

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

Tabel 4
Hasil Uji Statisik T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients >	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5,559	3,440		1,616	,111
	Pengetahuan_Perpjakan	,339	,104	,325	3,259	,002
	Sanksi_Perpjakan	,451	,102	,441	4,419	,000

a. Dependent Variable: Kesadaran_Kemauan_Membayar_Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi variable Pengetahuan Perpjakan (0,002) dan Sanksi Perpjakan(0,000) keduanya menunjukkan skor dibawah 0.05, yang artinya bahwa baik **Hypothesis 1** maupun **Hypothesis 2, Diterima**. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa faktor Pengetahuan Perpjakan maupun faktor Sanksi Perpjakan memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pengaruh pengetahuan perpjakan dan faktor sanksi perpjakan terhadap tingkat kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa jurusan akuntansi regular A FEB UNTAN.

Pengaruh Pengetahuan Perpjakan terhadap Kesadaran Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t untuk faktor Pengetahuan Perpjakan (H1) menunjukkan skor signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, maka Hipothesis 1 diterima, yang selanjutnya dapat dinyatakan bahwa pengetahuan perpjakan berpengaruh terhadap kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil uji ini sejalan dengan kesimpulan penelitian oleh Saputro, Marsiwi, dan Wafitron (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpjakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten ngawi. Kesimpulan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita, Kurniawan dan Diatmika (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpjakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan penelitian ini juga sejalan dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Cahyati, Wafirotin dan Hartono (2019) yang juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Ponorogo.

Kesamaan hasil kesimpulan Penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu bahwa pengetahuan perpjakan berpengaruh terhadap kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor diduga bahwa rata-rata menyatakan bahwa mereka mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang pajak. Dengan memiliki pengetahuan tentang pajak, responden sebagai calon wajib pajak

memiliki tanggung jawab yang besar untuk taat terhadap pajak yang memunculkan kesadaran serta kemauan membayar pajak sejak dini. Kemudahan memperoleh pengetahuan yang didapat dari dosen mata kuliah perpajakan dan teknologi internet saat ini juga patut diduga memberikan kontribusi.

Fakta bahwa karakter responden yang merupakan mahasiswa Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, dan telah menempuh matakuliah perpajakan, menjelaskan faktor persepsi dari mahasiswa terhadap pajak bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kemauan mahasiswa dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil uji t untuk variabel sanksi perpajakan (X2) dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor, artinya bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan timbul kesadaran serta kemauan membayar pajak kendaraan bermotor oleh calon wajib pajak sejak dini. Dalam lingkup penelitian ini, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran serta kemauan membayar pajak kendaraan bermotor mahasiswa jurusan akuntansi FEB UNTAN.

Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan kesimpulan penelitian Yunita dkk.,(2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan efek keinginan patuh seseorang agar terhindar dari sanksi timbulah kesadaran serta kemauan tersebut.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor dengan skor signifikan $0,002 < 0,05$. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin meningkat tingkat kesadaran serta kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kesadaran kemauan membayar pajak kendaraan bermotor dengan skor signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya semakin tinggi tingkat ketegasan Sanksi Perpajakan maka akan semakin meningkatkan kesadaran serta kemauan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNTAN yang telah menempuh matakuliah Perpajakan. Sehingga generalisasi kesimpulan secara umum tidak relevan dilakukan berdasarkan penelitian ini.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk penelitian serupa di masa mendatang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Disarankan untuk memperluas lingkup, tidak hanya mahasiswa jurusan Akuntansi, memasukkan mahasiswa jurusan manajemen maupun jurusan ilmu ekonomi sebagai bagian sampel diduga akan memberikan kesimpulan yang berbeda.
2. Melibatkan mahasiswa regular B yang sudah bekerja dalam penelitian selanjutnya dapat memperkaya persepsi dan perbandingan antara mahasiswa yang tidak bekerja yang sebagian besarnya adalah regular A dibandingkan dengan mahasiswa yang bekerja yaitu reguler B sebagai *tax payer*.

Daftar Pustaka

- Anam, M.C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Kpp Pratama Salatiga). *Vol. 4 No.4*.
- Aswati, W.O., Mas'ud, A., & Nudi, T.N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 1. Hlm 2088-4656*
- Badan Pusat Statistik.(2014-2018). Pontianak dalam Angka 2014-2018. Pontianak : BPS.
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2):p:34-40
- Cahyadi, I.M.W., & Jati, I.K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16 No. 3. 2342-2373*.
- Dewi, N.M.P., Diatmika, I.P.G., & Yasa, N.P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama Samsat. Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol. 8 No.2*.
- Dewi, N.P.A., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19 No.2. 1378-1405*.
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. (2012). Belajar Pajak. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan.
- Etrivana .D., Meihendri & Herawati. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Ikhsan, M.(2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tambusai. Artikel Ilmiah.
- Ilhamsyah .R., Endang M.G.W., & Dewantara. R.Y .(2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No. 1*.

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2009). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (edisi 1). Yogyakarta:BPFE.
- Jannah, M. & Fajriana, I. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas Samsat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.
- Jaya, I.B.M., & Jati, I.K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16 No.1. hlm 471-500*
- Kemala. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM FEKON Vol. 2. No. 1.*
- Prabowo, A.D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi. *Jurnal MBA Vol.3 No.1.*
- Putra, I.G.A.S. M. & Merkusiwati. N. K. L. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar. *Vol 23 No.1.*
- Quadratullah, M.F. (2012). Analisis Regresi Terapan : Teori, Contoh Kasus, dan Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1.
- Riano. P. R. & Rohaman. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting Vol 4. No. 4.*
- Rohmahtullah.S. Herawati, N.T dan Sulindawati.N.L.G.E.(2014). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Lingkungan Kerja Auditor Terhadap Karir. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Vol.2 No.1.*
- Ruky, N.E., Putra, W.E.,& Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6 No.3. hlm 405-418*
- Saputro, M.A., Marsiwi, D., & Wafirotin, K.Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Vol. 2 No.4.
- Sari, V. Y. & Susanti N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review.*
- Susila, B., Juniult, P.T.,& Hidayat, S. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda : Tax Morale Mahasiswa di Indonesia Taxpayers and Young Generation : Tax Morale of Indonesian College Students. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.16 No.2 :154-172*

- Susilawati, K. E. & Budiartha K.(2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 4 No. 2*.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesdaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fisikus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang.
- Wardani, D. K. & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1*.
- Winerungan, O.L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3*.
- Yulianawati, N. & Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The (Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax). *Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3 No. 1. 126 - 142*
- Susanto, N.J. (2013). Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan (Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Dikota Probollingga Kecamatan Mayangan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1*.
- Yunita, R.S., Kurniawan, S.P. & Diatmika, G.P.I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol. 8 No. 2*.

WEBSITE

<http://repository.unpas.ac.id/30085/7/7.%20BAB%20III.pdf5>

<https://kbbi.web.id/sadar>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89919/pergub-prov-kalimantan-barat-no-20-tahun-2018>

https://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pengetahuan&id=48518-arti-maksud_definisi-pengertian-Pengetahuan.html

<https://www.kompasiana.com>

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejurnal.uajy.ac.id/11998/5/EA199583.pdf&ved=2ahUKEwiUjLGy_bbiAhUST6wKHF4xC3kQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0WSf_193jT-fdf08bXNSYA

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://kc.umn.ac.id/1430/3/BAB%2520III.pdf&ved=2ahUKEwik793VhbfiAhUS-6wKHXScBh8QFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw1wriofXEz-eaaRTbMknic>

<http://junaidichaniago.wordpress.com>

LAMPIRAN 1**Jumlah Perkembangan Kendaraan Bermotor Kota Pontianak**

Rincian Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017
Kendaraan Bermotor Roda 2	33.907	45.380	126.833	202.095
Kendaraan Bermotor Roda 3	210	-	1.061	1.215
Mobil Penumpang	3.679	252	1.218	1.811
Bus dan Sejenisnya	6	42	150	31
Mikrobus dan Sejenisnya	16		46	101
Minibus dan Sejenisnya		5.589	17516	9.733
Mobil Pickup	1.060	1.315	5.408	4.306
Truk dan Sejenisnya	552	1.088	3.848	3.883
Truk Trontom	14	-		59
Ambulan	10	-	-	18
Kendaraan Pemadam Kebakaran	3	-	-	1
Jeep dan Sejenisnya	221	470	1979	1.609
Total	39.678	54.136	158.059	224.862

Sumber:<https://pontianakkota.bps.go.id> (data olahan 2019)

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pontianak Wilayah 1

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Truck		Sepeda Motor	
	Unit	Jumlah	Unit	Rupiah
2013	474	Rp 6.848.446.800	29.828	Rp 27.890.465.103
2014	568	Rp 9.193.426.100	31.189	Rp 28.351.992.100
2015	450	Rp 5.714.412.900	20.436	Rp 15.077.535.900
2016	471	Rp 4.409.415.000	19.892	Rp 11.601.948.800
2017	535	Rp 3.707.328.000	20.933	Rp 8.855.095.300
Total	2.498	Rp 29.873.028.800	122.278	Rp 91.777.037.203

Sumber : BPKPD Provinsi Kalimantan Barat

LAMPIRAN 2**Data Statistik Karakteristik Responden**

Keterangan	Kriteria	Jumlah(orang)	Percentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	24	72%
	Perempuan	48	72%
Angkatan	2016	36	50%
	2015	36	50%
Mengambil mata kuliah perpajakan	Sudah mengambil mata kuliah perpajakan	72	100%
Tahun keluaran sepeda motor	Rentang dibawah tahun 2010	14	72%
	Rentang antara tahun 2010-2015	35	72%
	Rentang tahun 2015 ke atas	23	25 72%
Jenis Sepeda Motor	Matic	49	72%
	Non-matic	23	72%

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

Lanjutan 1
Hasil Uji Validitas

	Butir	Total correlation/ r hitung	r tabel	Kriteria
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,616	0,2319	Valid
	X1.2	0,569	0,2319	Valid
	X1.3	0,677	0,2319	Valid
	X1.4	0,738	0,2319	Valid
	X1.5	0,769	0,2319	Valid
	X1.6	0,501	0,2319	Valid
	X1.7	0,618	0,2319	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,631	0,2319	Valid
	X2.2	0,667	0,2319	Valid
	X2.3	0,645	0,2319	Valid
	X2.4	0,719	0,2319	Valid
	X2.5	0,672	0,2319	Valid
	X2.6	0,440	0,2319	Valid
	X2.7	0,718	0,2319	Valid
Kesadaran kemauan membayar pajak	Y.1	0,647	0,2319	Valid
	Y.2	0,587	0,2319	Valid
	Y.3	0,635	0,2319	Valid
	Y.4	0,684	0,2319	Valid
	Y.5	0,670	0,2319	Valid
	Y.6	0,652	0,2319	Valid
	Y.7	0,577	0,2319	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Lanjutan 2
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No.	Variabel	r alpha	r kritis	kriteria
1.	Pengetahuan Perpajakan	0,761	0,600	Reliabel
2.	Sanksi Perpajakan	0,729	0,600	Reliabel
3.	Kesadaran kemauan membayar pajak	0,730	0,600	Reliabel

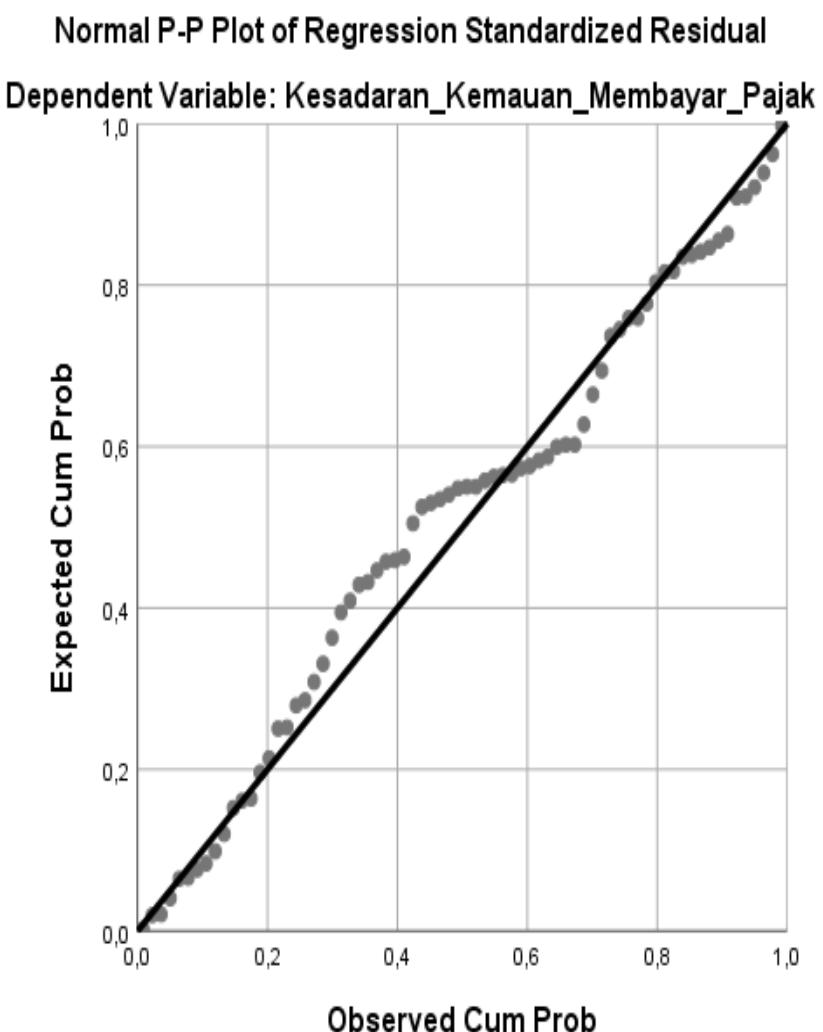
Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

LAMPIRAN 3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,50672430
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,077
	Negative	-,095
Test Statistic		,095
Asymp. Sig. (2-tailed)		,177 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Grafik Normal Plot



Sumber : Data Primer Diolah (2019)

Lanjutan 1**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	5,559	3,440		,111	
	Pengetahuan_Perpajakan	,339	,104	,325	3,259	,002
	Sanksi_Perpajakan	,451	,102	,441	4,419	,000

a. Dependent Variable: Kesadaran_Kemauan_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Hasil Uji Heteroskedastisitas

